



PEMERINTAH KOTA DENPASAR



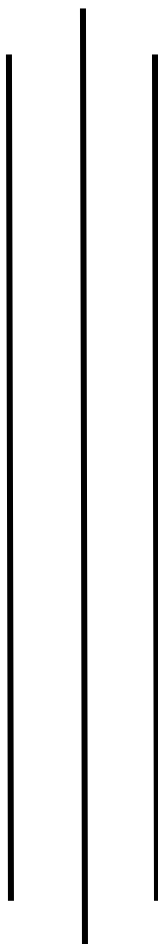
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kota Denpasar Tahun 2017



**PEMERINTAH
KOTA DENPASAR**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DENPASAR TAHUN 2018



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2017**



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJP Daerah Kota Denpasar adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Semesta Berencana Denpasar Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Kota Denpasar adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MATERI MUATAN RKPD

Pasal 2

Materi muatan RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

RKPD menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dan seluruh Perangkat Daerah serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2018

BAB III

SISTIMATIKA PENULISAN

Pasal 4

RKPD disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 31 MEI 2017

NOMOR : 26 TAHUN 2017

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA DENPASAR
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2018 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2018.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas dan pada saat penyusunan RKPD ini Kota Denpasar sedang menyusun Peraturan Daerah mengenai RPJMD yang sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai organisasi perangkat daerah maka penyusunan RKPD Tahun 2018 memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam rancangan RPJMD menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Harapan kami, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk segera dapat diatasi.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2018 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

WALIKOTA DENPASAR,

RAKDHARMA WJAYA MANTRA

Daftar Isi

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		v
Daftar Gambar		x
Bab I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3.	Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4.	Maksud dan Tujuan	I-5
1.4.1.	Maksud	I-5
1.4.2.	Tujuan	I-5
1.5.	Sistematika Domumen RKPD	I-6
Bab II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1.	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1	Aspek Geografi	II-1
2.1.1.2	Demografi	II-6
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-7
2.1.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-7
2.1.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-16
2.1.2.3.	Fokus Seni Budaya	II-17
2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-17
2.1.3.1.	Urusan Pendidikan	II-18
2.1.3.2.	Urusan Kesehatan	II-22
2.1.3.3.	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	II-42
2.1.3.4.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	II-61
2.1.3.5.	Urusan Sosial	II-63
2.1.3.6.	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	II-66
2.1.3.7.	Urusan Lingkungan Hidup	II-68
2.1.3.8.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-76



2.1.3.9.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	II-80
2.1.3.10.	Urusan Perhubungan	II-81
2.1.3.11.	Urusan Komunikasi Dan Informatika	II-86
2.1.3.12.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	II-87
2.1.3.13.	Urusan Kebudayaan	II-90
2.1.3.14.	Urusan Kearsipan	II-94
2.1.3.15.	Urusan Kelautan Dan Perikanan	II-97
2.1.3.16.	Urusan Pariwisata	II-98
2.1.3.17.	Urusan Pertanian	II-99
2.1.3.18.	Urusan Perdagangan	II-100
2.1.3.19.	Urusan Perencanaan Pembangunan	II-102
2.1.3.20.	Urusan Pemerintahan Umum	II-103
2.1.4.	Aspek daya Saing	II-104
2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-104
2.1.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	II-105
2.1.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	II-106
2.1.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	II-107
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-108
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-108
2.3.1.	Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-108
2.3.1.1.	Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik	II-108
2.3.1.2.	Pendidikan	II-112
2.3.1.3.	Kesehatan	II-113
2.3.1.4.	Penanggulangan Kemiskinan	II-113
2.3.1.5.	Infrastruktur	II-113
2.3.1.6.	Kebudayaan	II-114
2.3.1.7.	Kreativitas dan Inovasi	II-115
2.3.1.8.	Ketahanan Pangan	II-115
2.3.1.9.	Perekonomian	II-116
2.3.1.10.	Iklim investasi dan iklim usaha	II-116
2.3.1.11.	Lingkungan Hidup	II-117
2.3.1.12.	Politik, hukum, keamanan dan ketertiban	II-117

Bab III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018	III-2
3.1.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	III-6
3.1.1.2.	Inflasi	III-7
3.1.1.3.	Kebutuhan Investasi (PMA dan PMDN)	III-7



3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2017 dan Tahun 2018	III-11
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-13
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-14
3.2.1.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-14
3.2.1.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-16
3.2.1.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-19
Bab IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2	Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-4
4.3	Prioritas Pembangunan	IV-5
Bab V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V-1
Bab VI	PENUTUP	VI-1
LAMPIRAN I	REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2018 KOTA DENPASAR	



DAFTAR TABEL

No.		Halaman
2.1	Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan 2016	II - 1
2.2	Letak Geografis Kota Denpasar Per Kecamatan	II - 4
2.3	Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian Dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya	II - 4
2.4	Nama Sungai, Bendungan dan Perkiraan Luas Areal yang Diairi di Kota Denpasar Tahun 2016	II - 5
2.5	Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Penggunaan Tanah (hektar) Tahun 2012 - 2016	II - 6
2.6	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2015 dan 2016	II - 7
2.7	Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2013 s.d 2015 Kota Denpasar	II - 9
2.8	Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2013 s.d 2015 Kota Denpasar	II - 10
2.9	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Denpasar	II - 10
2.10	Angka Agregatif PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015	II - 11
2.11	Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Denpasar dengan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se - Bali Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) Tahun 2011-2015	II - 12
2.12	Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Denpasar dengan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se - Bali Atas Dasar Harga Konstan 2011 (Juta Rupiah) Tahun 2011-2015	II - 12
2.13	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011-2015	II - 13
2.14	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2012 - 2015	II - 14



2.15	Laju Inflasi (%) di Kota Denpasar Tahun 2012-2016	II - 15
2.16	Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012 s/d 2016 Kota Denpasar	II - 16
2.17	Angka Melek Huruf dari tahun 2011-2016 Menurut Kecamatan Kota Denpasar	II - 16
2.18	Perkembangan Organisasi Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2011-2016	II - 17
2.19	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012-2016 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Kota Denpasar	II - 19
2.20	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012-2016 Menurut Kecamatan Kota Denpasar	II - 20
2.21	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kota Denpasar	II - 20
2.22	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 - 2016	II - 21
2.23	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012 - 2016	II - 22
2.24	Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016	II - 23
2.25	Indikator Pelayanan Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2016	II - 26
2.26	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2016	II - 26
2.27	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012-2016	II - 28
2.28	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2016	II - 28
2.29	Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama Tahun 2016	II - 29
2.30	Perbandingan Angka Kematian Bayi Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010- 2016	II - 32
2.31	Perbandingan Angka Kematian Ibu Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010 – 2016	II - 33
2.32	Demam berdarah dangue	II - 36
2.33	Gizi Buruk	II - 37
2.34	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010 - 2016	II - 38
2.35	Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien	II - 40



2.36	Karakter tiga sungai pembuang utama saluran drainase Kota Denpasar	II - 43
2.37	Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2011 s/d 2016 Kota Denpasar	II - 44
2.38	Sistem Drainase Kota Denpasar	II - 44
2.39	Kondisi Existing	II - 45
2.40	Perkembangannya Jalan Lingkungan	II - 48
2.41	Perkembangannya Jalan Lingkungan Swadaya Masyarakat	II - 49
2.42	Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2012 s/d 2016	II - 51
2.43	Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2012 s/d 2016	II - 51
2.44	Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2016	II - 52
2.45	Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya	II - 53
2.46	Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar	II - 57
2.47	Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private Per-Kecamatan Di Kota Denpasar	II - 58
2.48	Kegiatan Penyandang Kesejahteraan Sosial	II - 63
2.49	Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2012 s.d. 2016	II - 64
2.50	Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2012 s.d. 2016	II - 65
2.51	Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2012 s/d 2016	II – 74
2.52	Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2015	II - 75
2.53	Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2016	II - 75
2.54	Persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP	II - 77
2.55	Distribusi Penduduk tahun 2016	II - 79
2.56	Komposisi Penduduk berdasarkan Umur di Kota Denpasar Tahun 2016	II - 80
2.57	Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Denpasar	II - 80
2.58	Jumlah PKK, Posyandu dan Pokjanal Kota Denpasar	II - 81



2.59	Kelompok Jumlah Posyandu	II - 81
2.60	Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2012-2016	II - 82
2.61	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum tahun 2010 s/d 2016	II - 83
2.62	Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016	II - 84
2.63	Kunjungan Pelayaran Pelabuhan Benoa Tahun 2010 s/d 2016	II - 85
2.64	Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tahun 2016	II - 85
2.65	Rincian keragaan koperasi dari tahun 2012-2016	II - 88
2.66	Perkembangan UMKM dari Tahun 2012 – 2016	II - 89
2.67	Kasifikasi UMKM Berdasarkan Usaha di Kota Denpasar Tahun 2016	II - 90
2.68	Perkembangan Organisasi Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2010-2016	II - 91
2.69	Jumlah Organisasi Kesenian Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2016	II - 91
2.70	Jumlah Event yang diselenggarakan di Kota Denpasar Tahun 2012-2016	II - 92
2.71	Jumlah Seniman yang Dapat Penghargaan di Kota Denpasar sampai Tahun 2016	II - 92
2.72	Dialog Budaya yang diselenggarakan di Kota Denpasar sampai Tahun 2016	II - 93
2.73	Jumlah Subak yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar tahun 2012- 2016	II - 93
2.74	Jumlah Desa Pakraman yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar tahun 2012- 2016	II - 93
2.75	Jumlah Cagar Budaya per Kecamatan di Kota Denpasar sampai tahun 2016	II - 94
2.76	Perkembangan Jumlah Anggota Perpustakaan	II - 95
2.77	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2012 s/d 2016	II - 95
2.78	Judul Buku dan Koleksi Buku	II - 96
2.79	Pengelolaan arsip in aktif dan Monitoring evaluasi kearsipan dari Tahun 2012-2016	II - 97
2.80	Perkembangan Kunjungan Wisatawan Ke Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016	II - 98



2.81	Laporan Realisasi Ekspor Kota Denpasar Periode Tahun 2012 s/d 2016	II - 101
2.82	Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s/d 2016 Kota Denpasar	II - 104
2.83	Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2012 s/d 2016 Kota Denpasar	II - 105
2.84	Angka Kriminalitas Kota Denpasar	II - 106
2.85	Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2016	II - 107
2.86	Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s/d 2015 Kota Denpasar	II - 107
3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Harga Berlaku (Juta) Menurut Lapangan Usaha	III - 3
3.2	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	III - 4
3.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha	III - 5
3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	III - 6
3.5	Inflasi di Kota Denpasar (Dalam Persen)	III - 7
3.6	Investasi PMDN	III - 10
3.7	Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Pekerja	III - 11
3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2015 s.d tahun 2019	III - 15
3.9	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2015 s.d Tahun 2019	III - 17
3.10	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s.d Tahun 2019	III - 19
4.1	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran	IV - 2
4.2	Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar	IV - 5
4.3	Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta Program Prioritas	IV - 6
5.1	Rumusan rencana program dan pagu dana tahun 2018	V - 2



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Denpasar	I - 3
2.1	Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar	II - 3
2.2	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar	II - 9
2.3	Distribusi PDRB Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2014	II - 15
2.4	Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012 s/d 2016 Kota Denpasar	II - 16
2.5	Kunjungan di Puskesmas se-Kota Denpasar Tahun 2016	II - 25
2.6	Tren kunjungan di Puskesmas se-Kota Denpasar Tahun 2012 – 2016	II - 25
2.7	Persentase Desa Siaga Aktif Berdasarkan Strata Di Kota Denpasar Tahun 2015	II - 29
2.8	Angka Kematian Bayi tahun 2012-2016	II - 31
2.9	Angka Kematian Ibu Maternal Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2016	II - 33
2.10	Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2016	II - 34
2.11	Incidence Rate Penyakit Demam berdarah dangue Tahun 2011 s/d 2016	II - 36
2.12	Prevalensi gizi buruk tahun 2011 s/d 2016	II - 37
2.13	Grafik Peningkatan Angka Harapan Hidup	II - 38
2.14	Grafik Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien Dari Tahun 2012 sampai 2016	II - 40
2.15	Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2011 s/d 2016	II - 51
2.16	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 s/d 2016	II - 52
2.17	Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya	II - 53



2.18	Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar	II - 63
2.19	Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar	II - 63
2.20	Jumlah TPS dan Daya Tampung Sampah	II - 75
2.21	Jumlah Penumpang dan Barang Keluar Masuk di Kota Denpasar Tahun 2012 – 2016	II - 82
2.22	Jumlah Barang Datang dan Barang Berangkat	II - 83
2.23	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum tahun 2010 s/d 2016	II - 84
2.24	Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar	II - 84
2.25	Kunjungan Kapal di Pelabuhan Benoa Tahun 2010 s/d 2016	II - 85
2.26	Perkembangan UKM 2012-2016	II - 89
2.27	Grafik Total Ekspor per Tahun	II -102
2.28	Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s/d 2015 Kota Denpasar	II -105



1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Proses pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi sumber daya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumber daya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat.

Pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Demikian juga dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diundangkan pada 19 Juni 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian bentuk struktur dan jabatan organisasi perangkat daerah yang telah ada mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 juga memperjelas pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

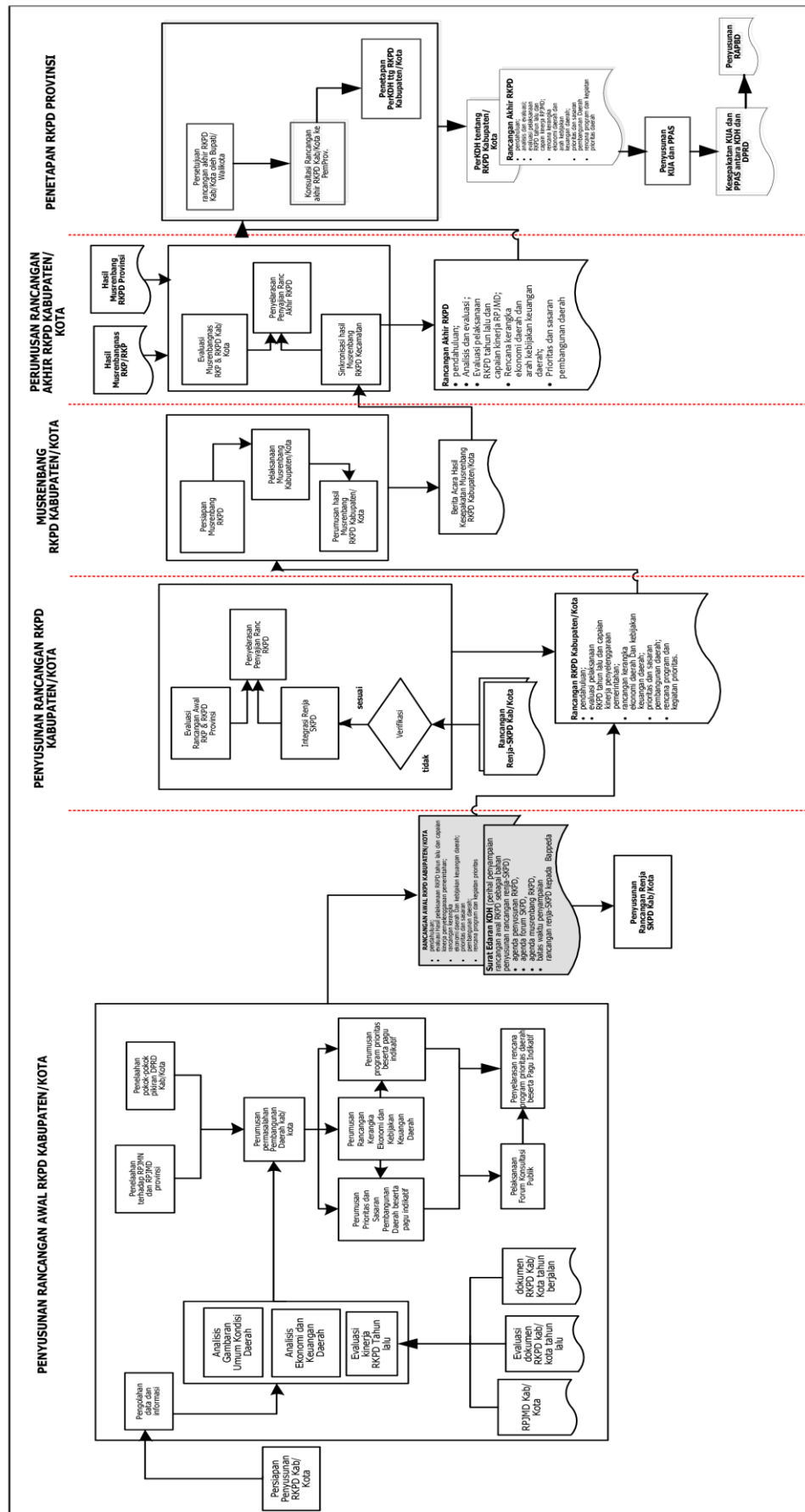
1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.



2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD Kota Denpasar Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Denpasar. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan atau proses perumusan RKPD Kota Denpasar Tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:





1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD Tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar Tahun 2018.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses sistematis, RKPD diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Dokumen RKPD juga akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun 2018 serta dasar penyusunan RAPBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar. RKPD memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kota Denpasar

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar adalah :

1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Kota Denpasar, seluruh OPD, Kecamatan dan Lurah di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun 2018



3. Memperkuat koordinasi, integritas, sinergitas, dan sinkronisasi pembangunan baik antar Organisasi Perangkat Daerah, antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah pusat.
4. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target penetapan kinerja.
5. Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap OPD dilingkungan pemerintah Kota Denpasar
6. Menciptakan iklim pemerintah yang partisipatif, responsive, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan antara pemerintah, pelaku usaha swasta, perguruan tinggi dan komunitas.
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
8. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2018.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2018.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Tahun 2018 dengan dokumen dokumen perencanaan baik tingkat Nasional, Propinsi maupun Kota Denpasar.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2018.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan Tahun 2017.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2017 serta pencapaian indikator RPJMD Kota Denpasar



2.3. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2017.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD Provinsi dan kebijakan ekonomi dalam RPJMD Kota.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan hubungan visi misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2016 serta kondisi daerah.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam Bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam tahun 2018 yang memuat rincian program dan kegiatan pokok RKPD pada tahun rencana Perangkat Daerah. Serta Indikator dan target kinerja tahunan masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain:

- a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara Perangkat Daerah dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas Perangkat Daerah;
- b. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;
- c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD
- d. Penegasan tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

A. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 12,778 Ha atau sebesar 2,27 % dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,17 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,42 km² (24,62 persen) dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km² (18,85 persen). Adapun kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,16 km² (17,36 persen). Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1.

Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan 2016

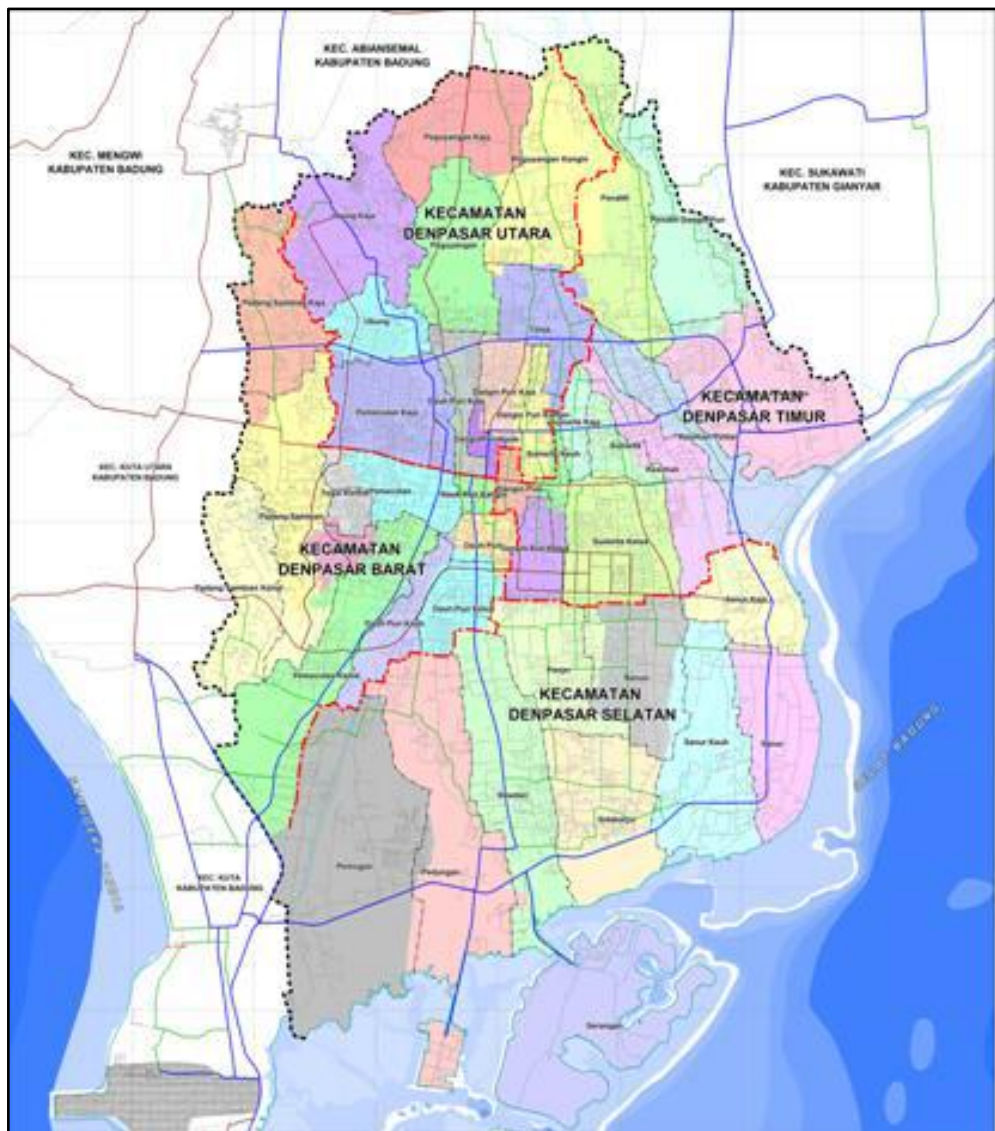
No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan		Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Denpasar Utara		3142	24.59
	1.1	Kelurahan Dangin Puri Kaja	142	4.52
	1.2	Desa Dangin Puri Kangin	75	2.39
	1.3	Kelurahan Tonja	230	7.32
	1.4	Desa Dangin Puri Kauh	72	2.29
	1.5	Desa Pemecutan Kaja	385	12.25
	1.6	Desa Ubung	103	3.28
	1.7	Desa Ubung Kaja	430	13.69
	1.8	Desa Dauh Puri Kaja	109	3.47
	1.9	Kelurahan Peguyangan	644	20.50
	1.10	Desa Peguyangan Kaja	536	17.06
	1.11	Desa Peguyangan Kangin	416	13.24
2	Kecamatan Denpasar Barat		2406	18.83
	2.1	Desa Padang Sambian Klod	412	17.12
	2.2	Desa Pemecutan Klod	442	18.37
	2.3	Desa Kauh Puri Kauh	183	7.61
	2.4	Desa Kauh Puri Klod	188	7.81
	2.5	Kelurahan Dauh Puri	60	2.49
	2.6	Desa Dauh Puri Kangin	59	2.45



No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan		Luas (Ha)	Persentase (%)
	2.7	Kelurahan Pemecutan	186	7.73
	2.8	Desa Tegal Harum	62	2.58
	2.9	Desa Tegal Kertha	35	1.45
	2.1	Kelurahan Padang Sambian	370	15.38
	2.11	Desa Padang Sambian Kaja	409	17.00
3	Kecamatan Denpasar Timur		2231	17.46
	3.1	Desa Dangin Puri Klod	209	9.37
	3.2	Desa Sumerta Klod	268	12.01
	3.3	Kelurahan Kesiman	239	10.71
	3.4	Desa Kesiman Petilan	281	12.60
	3.5	Desa Kesiman Kertalangu	380	17.03
	3.6	Kelurahan Sumerta	50	2.24
	3.7	Desa Sumerta Kaja	52	2.33
	3.8	Desa Sumerta Kauh	87	3.90
	3.9	Kelurahahn Dangin Puri	62	2.78
	3.1	Kelurahan Penatih	291	13.04
	3.11	Desa Penatih Dangin Puri	312	13.98
4	Kecamatan Denpasar Selatan		4999	39.12
	4.1	Desa Pemogan	971	19.42
	4.2	Kelurahan Pedungan	749	14.98
	4.3	Kelurahan Sesean	739	14.78
	4.4	Kelurahan Serangan	481	9.62
	4.5	Desa Sidakarya	389	7.78
	4.6	Kelurahan Panjer	359	7.18
	4.7	Kelurahan Renon	254	5.08
	4.8	Desa Sanur Kauh	386	7.72
	4.9	Kelurahan Sanur	402	8.04
	3.1	Desa Sanur Kaja	269	5.38
	Kota Denpasar		12778	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar





Gambar. 2.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar

Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung sebelah utara, barat dan selatan sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar antara lain:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung)
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)



B. Letak dan Kondisi Geografis

Menurut letak Geografis Kota Denpasar berada di antara 08 35' 31" – 08 44' 49" Lintang Selatan dan 115 10' 23" – 115 16' 27" Bujur Timur seperti tampak pada Tabel. 2.2 berikut:

Tabel. 2.2.

Letak Geografis Kota Denpasar Per Kecamatan

No	Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Denpasar Selatan	08040'00"-08044'49"	115011'23"-115015'54"
2	Denpasar Timur	08035'31"-08040'36"	115012'29"-115016'27"
3	Denpasar Barat	08036'24"-08041'59"	115010'23"-115014'14"
4	Denpasar Utara	08035'31"-08044'49"	115012'09"-115014'39"

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

C. Kondisi Topografi

Wilayah Kota Denpasar 59,1 %berada pada ketinggian antara 0 – 25 m dpl, dan sisanya sampai 75 m dpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng secara umum berkisar 0 – 2 % ke arah selatan, sebagian lagi kemiringan lerengnya antara 2 – 8 %. Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2 – 15 %.

Tabel. 2.3.

Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian
Dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya

Klasifikasi Ketinggian (Meter)	Luas Wilayah	
	Km ²	(%)
0 - 12	49,99	39,12
00 - 75	22,31	17,46
	24,06	18,83
	31,42	24,59
Jumlah	127,78	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

D. Kondisi Geologi

Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kuartar, kwarter bawah, tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Baliskala 1 : 25.000 (Direktorat Geologi, 1971) wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan. Susunan formasi batuan adalah sebagai berikut : Batuan vulkanik kuartar menutupi sekitar 70 % wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan – Bratan dan gunung api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan vulkanik Buyan – Bratan merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa danlahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu vulkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian utara agak tebal (>200 m) dan menipis ke arah selatan.

Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahan, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar.



Jenis tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 : 250.000 (Yunus Dai, 1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di wilayah Kota Denpasar.

E. Kondisi Hidrologi

Di wilayah Kota Denpasar, terdapat potensi sumber daya air dapat disebutkan lengkap meliputi: air hujan, air permukaan, air tanah maupun air laut, seperti Tabel 2.4.

Tabel. 2.4.
Nama Sungai, Bendungan dan Perkiraan Luas Areal yang Diairi
di Kota Denpasar Tahun 2016

	Nama Sungai	Panjang (km)	Nama Bendungan/ Dam		Total Bendungan/ Dam (km)	Luas yg Diairi (hektar)
1.	Tukad Ayung	6,50	1	Kedewatan	1	720
			2	Mambal	1	645
			3	Peraupan	1	10
			4	Oongan	1	536
2.	Tukad Badung	17,15	5	Mertagangga	1	5
			6	Batan Nyuh	1	215
			7	Mergaya	1	100
			8	Gerak Tk. Badung	1	21
			9	Penyaring Sampah	1	0
			10	Waduk Muara	1	0
3.	Tukad Teba	8,75	11	Semila II	1	15
			12	Tegallinjung	1	0
4.	Tukad Mati	5,65	13	Free I. Tegallinjung	1	0
			14	Srogsogan	1	0
			15	Lange	1	25
			16	Dadas	1	15
			17	Umeduwi	1	25
5.	Tukad Abianbase	4,15	-	-	-	-
6.	Tukad Loloan (Dl. Oongan)	3,75	18	Emp Bantang	1	15
			19	Emp Bantang	1	8
			20	Emp Pengabean	1	21
			21	Emp Agel	1	36
			22	Emp Pengayasan	1	23
			23	Penyaring Sampah	1	-
7.	Tukad Ngenjung	2,15	-	-	-	-
8.	Tukad Penggawa (Dl. Oongan)	6,55	25	Emp. S. Sidakarya	1	97
9.	Tukad Rangda/ Buaji (Dl. Oongan)	4,25			-	-
10.	Tukad Pekaseh (Dl. Oongan)	5,50	26	Emp. S. Sesetan	1	10
			28	Emp. S. Sesetan	1	15
	Jumlah				25	2.557

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

F. Kondisi Klimatologi

Wilayah Kota Denpasar secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi angin musim, yaitu musim kemarau dengan angin timur antara bulan Juni sampai September, dan musim hujan dengan angin barat antara bulan September sampai Maret dan diselingi musim pancaroba, dengan curah hujan berkisar antara 0 – 406 mm, dan curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 406 mm. Pada tahun 2014 rata-rata suhu Kota



Denpasar sebesar 27,0°C. Kota Denpasar juga memiliki kelembaban udara rata-rata sebesar 81% dengan curah hujan sebesar 2.026,2 mm dan kecepatan angin berembus sebesar 7 knot.

G. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kota Denpasar menurut penggunaan tanah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, perkantoran dan lainnya. Luas lahan pertanian selama 5 tahun (2012 -2016) berkurang seluas 46 Ha atau rata-rata berkurang per tahun seluas 9,2 Ha (0,31% per tahun). Alih fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah mencapai sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti pekarangan, pemukiman, dan jalan serta lainnya. Secara rinci penggunaan lahan di Kota Denpasar tahun 2012 - 2016 disajikan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel. 2.5.
Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Penggunaan Tanah (hektar)
Tahun 2012 - 2016

No.	Penggunaan Lahan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Lahan Pertanian	3.035	3.022	3.014	3.014	2.989
1.1	Lahan Sawah Irigasi	2.519	2 506	2.509	2.509	2.479
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	516	516	505	505	510
	a Tegalan	396	396	385	385	390
	b Perkebunan	35	35	35	35	35
	c Hutan Rakyat	75	75	75	75	75
	d Lainnya	10	10	10	10	10
2	Lahan Bukan Pertanian (Pekarangan, Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll)	9.743	9.756	9.764	9.764	9.789
	Jumlah	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

2.1.1.2. Demografi

Jumlah penduduk di Kota Denpasar selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar sebanyak 880.600 jiwa sedangkan jumlah penduduk Kota Denpasar menurut proyeksi BPS Kota Denpasar tahun 2016 sebanyak 897.300 jiwa yang tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Barat, dan Denpasar Utara. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan dengan jumlah penduduk 286.060 jiwa, yang mana jumlah penduduk perempuan sebanyak 139.840 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 146.220 jiwa, dengan rasio penduduk sebesar 1,046 (25,058%). Penduduk dengan jumlah terendah terdapat di Kecamatan Denpasar Timur yaitu berjumlah 153.480 jiwa terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 78.040 jiwa, perempuan 75.440 jiwa dengan rasio 1,034 (24.79%). Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.6.

Penduduk Kota Denpasar tahun 2015 menurut umur didominasi oleh penduduk usia produktif (25-54 tahun) sebanyak 427.060 jiwa dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 136.220 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 70.990 jiwa, penduduk perempuan 65.230 jiwa. Penduduk usia sekolah (usia 5-24 tahun) sebanyak 305.700 jiwa yang mana jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan. Jumlah penduduk Kota Denpasar menurut usia yang berjumlah paling sedikit yaitu usia manula (55 tahun keatas) berjumlah 72.300 jiwa, jumlah terbanyak terdapat di kecamatan



Denpasar Barat sebanyak 20.000 jiwa, terendah 14.400 jiwa terdapat di Kecamatan Denpasar Timur.

Tabel. 2.6.
Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin
per Kecamatan Tahun 2015 dan 2016

	Tahun 2015		Jumlah 2015	Tahun 2016		Jumlah 2016
	Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
Denpasar Selatan	142.910	136.730	279.640	146.220	139.840	286.060
Denpasar Timur	76.860	74.340	151.200	78.040	75.440	153.480
Denpasar Barat	130.400	124.760	255.160	132.790	127.030	259.790
Denpasar Utara	99.530	95.070	194.600	101.280	96.690	197.970
Jumlah	449.700	430.900	880.600	458.300	439.000	897.300

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar (Hasil Proyeksi)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain IPM, pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan sumber daya manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil perkapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: (1). Indeks kesehatan : Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup); (2). Indeks pendidikan : Terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi); dan (3). Indeks daya beli : Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan).

Pada tahun 2016 IPM Kota Denpasar mencapai 82,58 ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 82,24. IPM Kota Denpasar tidak pernah menurun / selalu meningkat dan konsisten di peringkat pertama antar kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan Kota Denpasar merupakan daerah sentra ekonomi yang didukung oleh berbagai infrastruktur yang relatif maju.

Selama lima tahun terakhir, IPM Kota Denpasar terus menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2016 IPM Kota Denpasar sebesar 82,58. Indek tersebut adalah yang tertinggi di Propinsi Bali. Hal ini berarti kecepatan Kota Denpasar untuk mencapai IPM ideal (IPM 100), merupakan yang paling cepat diantara daerah lain di Propinsi Bali.



B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

PDRB menggambarkan perekonomian suatu daerah yang disajikan secara berkala dari tahun ke tahun menurut lapangan usaha. PDRB dibedakan menjadi 2 jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan yang dihitung menurut tahun dasar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu daerah dimana dapat diketahui struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tingkat inflasi atau deflasi serta peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau lapangan usaha. PDRB per kapita adalah PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan suatu ukuran yang dapat dijadikan cerminan kasar tentang kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Salah satu implikasi perubahan tahun dasar adalah Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian.

Melihat perkembangan ekonomi Kota Denpasar kurun waktu 3 tahun terakhir kontribusi ekonomi Kota Denpasar masih didominasi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 23,93 % tahun 2013, tumbuh menjadi 23,59 % tahun 2014 dan pada tahun 2015 sebesar 23,09 % sedikit melambat dari tahun sebelumnya. Selanjutnya kategori pendidikan menjadi kontribusi terbesar kedua yaitu sebesar 10,88 % tahun 2013, 11,19 % tahun 2014 dan 11,39 % pada tahun 2015. Kontribusi pendidikan di Kota Denpasar searah dengan salah satu indikator pembentuk IPM yaitu harapan lama sekolah (EYS) serta rata-rata lama sekolah (MYS) mengalami pertumbuhan positif, hal tersebut dapat terlihat bahwa Kota Denpasar sebagai pusat pendidikan di Provinsi Bali.

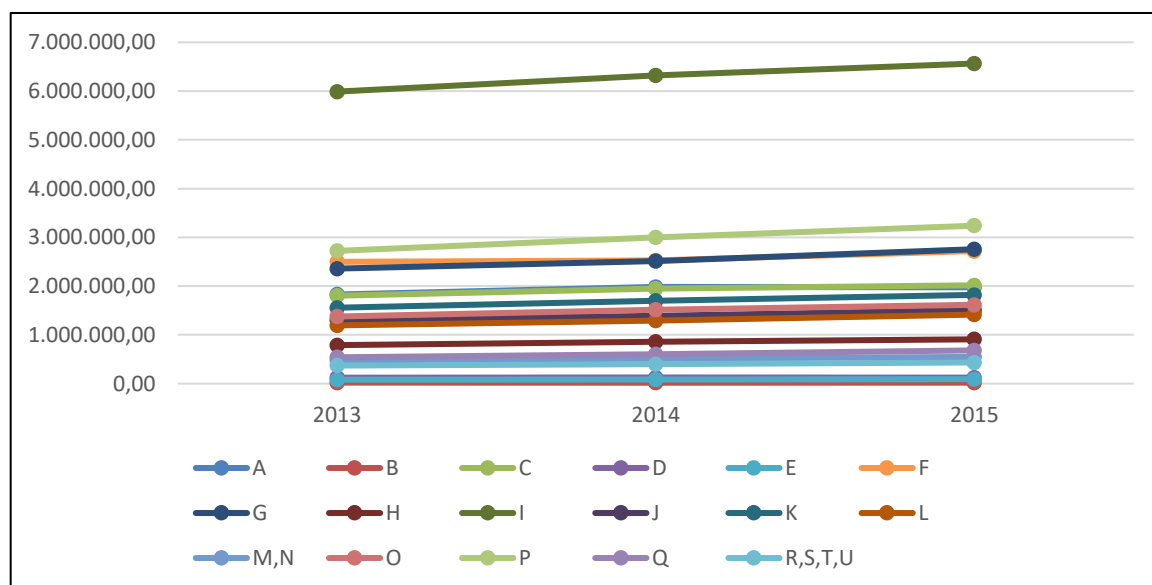


Tabel. 2.7.

Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kategori Lapangan Usaha
Tahun 2013 s.d 2015 Kota Denpasar

Kategori	Uraian	REALISASI					
		2013		2014		2015	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.827.499,24	7,30	1.983.619,73	7,41	1.976.247,47	6,95
B	Pertambangan & Penggalian	20.139,68	0,08	19.969,72	0,07	19.006,16	0,07
C	Industri Pengolahan	1.802.751,64	7,20	1.948.014,79	7,27	2.015.853,98	7,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	121.804,12	0,49	125.621,68	0,47	124.978,65	0,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah	79.944,86	0,32	85.230,28	0,32	90.379,85	0,32
F	Konstruksi	2.498.338,93	9,98	2.526.388,29	9,43	2.718.743,36	9,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.358.611,49	9,42	2.515.109,67	9,39	2.756.326,10	9,69
H	Transportasi dan Pergudangan	789.100,75	3,15	856.361,66	3,20	908.224,39	3,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.989.052,14	23,93	6.318.390,20	23,59	6.564.846,46	23,09
J	Informasi dan Komunikasi	1.302.991,68	5,21	1.386.996,91	5,18	1.507.982,08	5,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.557.298,73	6,22	1.696.853,36	6,34	1.819.415,31	6,40
L	Real Estate	1.194.073,86	4,77	1.292.791,01	4,83	1.414.793,65	4,98
M,N	Jasa Perusahaan	476.363,10	1,90	509.545,87	1,90	547.390,86	1,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.376.123,37	5,50	1.516.580,46	5,66	1.616.264,44	5,68
P	Jasa Pendidikan	2.722.353,99	10,88	2.996.744,45	11,19	3.238.726,09	11,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	540.153,01	2,16	604.239,28	2,26	680.789,04	2,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	369.608,12	1,48	396.127,74	1,48	433.279,34	1,52
	PDRB	25.026.208,70	100,00	26.778.585,10	100,00	28.433.247,23	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



Gambar. 2.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2015
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014
Kota Denpasar



Tabel. 2.8.

Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori Lapangan Usaha
Tahun 2013 s.d 2015 Kota Denpasar

Kategori	Uraian	2013		2014		2015	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.170.980,17	7,39	2.475.899,44	7,24	2.748.028,13	7,14
B	Pertambangan & Penggalian	22.890,01	0,08	25.071,28	0,07	25.330,98	0,07
C	Industri Pengolahan	2.058.868,34	7,01	2.342.479,72	6,85	2.595.381,48	6,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	84.997,11	0,29	110.422,44	0,32	145.849,77	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah	80.390,37	0,27	87.636,88	0,26	101.116,08	0,26
F	Konstruksi	2.951.641,20	10,04	3.126.126,47	9,14	3.555.518,01	9,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.645.105,46	9,00	3.047.571,07	8,91	3.512.823,53	9,13
H	Transportasi dan Pergudangan	902.921,23	3,07	1.052.803,67	3,08	1.171.372,69	3,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.870.764,75	26,78	9.908.704,35	28,96	10.924.363,27	28,40
J	Informasi dan Komunikasi	1.302.543,28	4,43	1.424.722,21	4,16	1.635.008,69	4,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.876.978,13	6,39	2.146.319,95	6,27	2.360.242,80	6,14
L	Real Estate	1.319.135,56	4,49	1.495.441,72	4,37	1.676.201,72	4,36
M,N	Jasa Perusahaan	524.618,33	1,79	596.164,15	1,74	689.930,50	1,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.427.889,91	4,86	1.617.884,07	4,73	1.785.016,57	4,64
P	Jasa Pendidikan	3.105.983,97	10,57	3.561.373,51	10,41	4.141.638,79	10,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	610.845,35	2,08	699.700,84	2,05	823.650,39	2,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	432.701,78	1,47	491.543,83	1,44	572.252,84	1,49
	PDRB	29.389.254,94	100,00	34.209.865,60	100,00	38.463.726,26	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Tabel. 2.9.

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2015
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kota Denpasar

Kategori	Uraian	2013		2014		2015	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,39	7,30	7,24	7,41	7,14	6,95
B	Pertambangan & Penggalian	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
C	Industri Pengolahan	7,01	7,20	6,85	7,27	6,75	7,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,29	0,49	0,32	0,47	0,38	0,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah	0,27	0,32	0,26	0,32	0,26	0,32
F	Konstruksi	10,04	9,98	9,14	9,43	9,24	9,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,00	9,42	8,91	9,39	9,13	9,69
H	Transportasi dan Pergudangan	3,07	3,15	3,08	3,20	3,05	3,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,78	23,93	28,96	23,59	28,40	23,09
J	Informasi dan Komunikasi	4,43	5,21	4,16	5,18	4,25	5,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,39	6,22	6,27	6,34	6,14	6,40
L	Real Estate	4,49	4,77	4,37	4,83	4,36	4,98
M,N	Jasa Perusahaan	1,79	1,90	1,74	1,90	1,79	1,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,86	5,50	4,73	5,66	4,64	5,68
P	Jasa Pendidikan	10,57	10,88	10,41	11,19	10,77	11,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,08	2,16	2,05	2,26	2,14	2,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,47	1,48	1,44	1,48	1,49	1,52
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati begitu, mesti diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Namun apapun itu, data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat produktivitas perekonomian suatu daerah/wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 38.463.726,26 milyar rupiah dan jumlah penduduk proyeksi tahun 2015 sebanyak 880.600 jiwa, diperoleh PDRB per kapita Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 44.538.821,51 rupiah per tahun. Bila dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan, PDRB perkapita Kota Denpasar pada tahun 2015 adalah sebesar 32.924.093,59 rupiah. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 dimana PDRB perkapita atas dasar harga konstan Kota Denpasar adalah sebesar 31.008.088,35 rupiah. Ini berarti bahwa peningkatan PDRB perkapita yang terjadi pada tahun 2015 tidak hanya terjadi secara nominal tapi juga disertai dengan peningkatan pendapatan secara riil. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 2.10.

Angka Agregatif PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2011-2015

Perincian	2011	2012	2013	2014	2015
NILAI ABSOLUT					
PDRB - Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)	22.664.477,19	25.819.231,08	29.389.254,94	34.209.865,60	38.463.726,26
PDRB - Harga Konstan (Jutaan Rupiah)	21.763.406,25	23.397.173,90	25.026.379,26	26.778.585,10	28.433.247,23
Jumlah Penduduk Proyeksi	810.900	828.900	846.200	863.600	880.600
PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Rupiah)	27.949.780,72	31.148.788,85	34.730.861,43	39.613.091,25	44.538.821,51
PDRB Per Kapita Harga Konstan (Rupiah)	26.838.582,13	28.226.775,12	29.575.016,85	31.008.088,35	32.924.093,59
Index Implisit (%)	104,14	110,35	117,43	127,75	135,28
Laju Implisit (%)	4,14	5,96	6,42	8,79	5,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



Bila dibandingkan secara regional, PDRB per kapita Kota Denpasar atas dasar harga berlaku tahun 2011-2015 menempati urutan terbesar kedua, setelah Kabupaten Badung. Bila dibandingkan dengan PDRB per Kapita Provinsi Bali atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Kota Denpasar selama kurun waktu lima tahun (2011-2015) masih lebih tinggi dari Provinsi Bali. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 2.11.

Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Denpasar dengan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se - Bali Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) Tahun 2011-2015

Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Jembrana	23,81	26,19	28,99	33,43	37,83
Tabanan	24,36	26,81	30,10	34,76	39,47
Badung	41,91	47,31	53,97	61,49	66,97
Gianyar	25,48	28,27	31,63	36,52	40,50
Klungkung	23,06	25,44	28,18	32,47	36,50
Bangli	14,02	15,38	17,18	19,80	22,42
Karangasem	18,61	20,47	22,99	26,53	30,10
Buleleng	24,10	26,69	29,99	34,78	39,45
Denpasar	27,95	31,15	34,73	39,61	43,67
Provinsi Bali	26,43	29,44	33,13	38,11	42,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2011 Kota Denpasar secara regional Provinsi Bali lebih tinggi dari Provinsi Bali dan menempati urutan kedua setelah Kabupaten Badung seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 2.12.

Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Denpasar dengan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se - Bali Atas Dasar Harga Konstan 2011 (Juta Rupiah) Tahun 2011-2015

Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Jembrana	22,69	23,91	25,10	26,44	27,91
Tabanan	23,28	24,55	25,95	27,47	29,02
Badung	39,80	41,79	43,58	45,56	47,34
Gianyar	24,52	25,99	27,50	29,10	30,65
Klungkung	22,07	23,35	24,61	25,95	27,39
Bangli	13,41	14,16	14,91	15,69	16,57
Karangasem	17,79	18,74	19,79	20,86	22,00
Buleleng	23,00	24,41	25,99	27,62	29,13
Denpasar	26,84	28,23	29,58	31,00	32,28
Provinsi Bali	25,27	26,69	28,13	29,67	31,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

D. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.



Selama tahun 2011–2014, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Di tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Denpasar meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 7,51 persen namun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar melambat hanya menjadi 6,96 persen dan selanjutnya pada tahun 2014 dapat sedikit meningkat menjadi 7 persen. Lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2014 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan laju pertumbuhan sebesar 11,86 persen. Selanjutnya diikuti oleh administrasi pemerintahan 10,21 persen dan jasa pendidikan sebesar 10,08 persen. Jika dilihat rata-rata pertumbuhan selama tahun 2011-2014, kategori yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 9,34 persen. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial selain memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2014 juga memiliki rata – rata pertumbuhan yang tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi diduduki oleh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,31 persen dan diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,04 persen. Penyediaan akomodasi makanan dan Minum sebagai kategori yang menopang industri pariwisata di Kota Denpasar memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,29 persen sedangkan kategori pertanian hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,51 persen. Dari 17 kategori pembentuk PDRB Kota Denpasar hanya kategori pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi di tahun 2014. Kota Denpasar tidak memiliki lokasi galian C namun masih dapat ditemui hasil produksi pertambangan dan penggalian lainnya. Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah daerah semakin ketat dalam megawasi kegiatan penggalian terutama untuk kegiatan yang illegal ataupun tidak berijin. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.13.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011-2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,36	2,72	2,43	8,54	-0,37
B	Pertambangan dan Penggalian	10,73	16,91	6,45	-0,84	-4,83
C	Industri Pengolahan	1,49	5,72	7,29	8,06	3,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,23	12,08	7,22	2,09	-0,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,48	4,2	4,63	6,61	6,04
F	Konstruksi	6,88	20,5	5,05	1,12	7,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,78	6,97	8,12	6,64	9,59
H	Transportasi dan Pergudangan	5,65	6,37	5,91	8,52	6,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,19	9,01	7,45	5,5	3,90
J	Informasi dan Komunikasi	9,09	9,15	4,85	6,45	8,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,68	9,62	11,9	8,96	7,22
L	Real Estat	4,64	7,4	6,03	8,27	9,44
M,N	Jasa Perusahaan	3,45	3,03	8,27	6,97	7,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	25,98	2,01	-0,96	10,21	6,57
P	Jasa Pendidikan	11,15	1,24	12,77	10,08	8,07



No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,66	7,03	11,81	11,86	12,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,32	5,92	3,24	7,18	9,38
Produk Domestik Regional Bruto		7,16	7,51	6,96	7	6,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Tabel. 2.14.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2012 - 2015

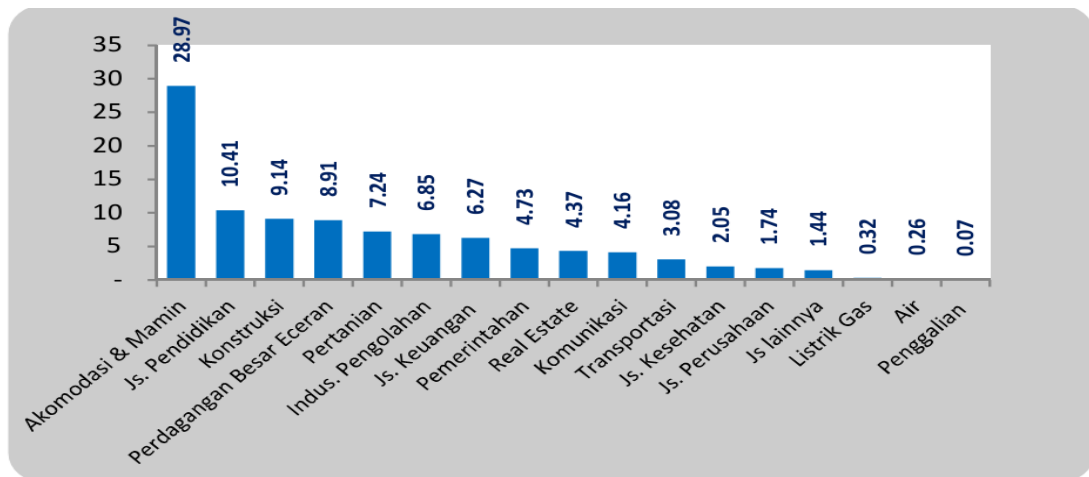
No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.72	2.43	8.54	-0.37
2.	Pertambangan dan Penggalan	16.91	6.45	-0.84	-4.83
3.	Industri Pengolahan	5.72	7.29	8.06	3.48
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	12.08	7.22	2.09	-0.51
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.2	4.63	6.61	6.04
6.	Konstruksi	20.5	5.05	1.12	7.61
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.97	8.12	6.64	9.59
8.	Transportasi dan Pergudangan	6.37	5.91	8.52	6.06
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.01	7.45	5.5	3.90
10.	Informasi dan Komunikasi	9.15	4.85	6.45	8.72
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.62	11.9	8.96	7.22
12.	Real Estat	7.4	6.03	8.27	9.44
13.	Jasa Perusahaan	3.03	8.27	6.97	7.43
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.01	-0.96	10.21	6.57
15.	Jasa Pendidikan	1.24	12.77	10.08	8.07
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.03	11.81	11.86	12.67
R.S. T.U	Jasa lainnya	5.92	3.24	7.18	9.38
Produk Domestik Regional Bruto		7.51	6.96	7	6.18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Pada tahun 2014, lapangan usaha yang memiliki distribusi tertinggi yaitu di bidang akomodasi makanan dan minuman sebesar 29,97%, di bidang pendidikan distribusinya sebesar 10,41%, distribusi terendah yaitu ada pada lapangan usaha air dan penggalan yaitu hanya sebesar 0,07%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.3.





Gambar. 2.3 Distribusi PDRB Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2014

E. Laju Inflasi Harga

Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak hanya melihat dari besaran PDRB yang dicapai baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, namun harus dilihat juga dari peran harga yang merupakan sisi lain yang harus tetap dijaga karena tinggi rendahnya harga sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat serta kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Laju inflasi dihitung berdasarkan indeks harga konsumen (IHK). IHK itu sendiri merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat disuatu wilayah dengan menggunakan diagram timbangan nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau.

Di Kota Denpasar, inflasi tahun 2016 banyak disumbangkan oleh inflasi kelompok bahan Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebanyak 7,70% serta kelompok sandang sebanyak 5,41%. Secara keseluruhan, laju inflasi di Kota Denpasar sebesar 2,94%. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 2.15.

Laju Inflasi (%) di Kota Denpasar Tahun 2012-2016

No	Kelompok	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Laju Inflasi	4,71	7,35	8,03	2,70	2,94
2.	Inflasi Menurut Kelompok					
2.1	Bahan Makanan	6,06	10,36	11,23	3,31	4,51
2.2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	8,67	5,19	6,29	3,55	7,70
2.3	Perumahan	3,97	5,64	7,20	5,09	0,39
2.4	Sandang	0,92	-1,42	3,60	3,61	5,41
2.5	Kesehatan	2,13	1,49	9,99	5,26	3,68
2.6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	6,44	4,22	4,34	4,23	3,10
2.7	Transpor dan komunikasi	1,26	12,62	9,78	-3,35	-0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

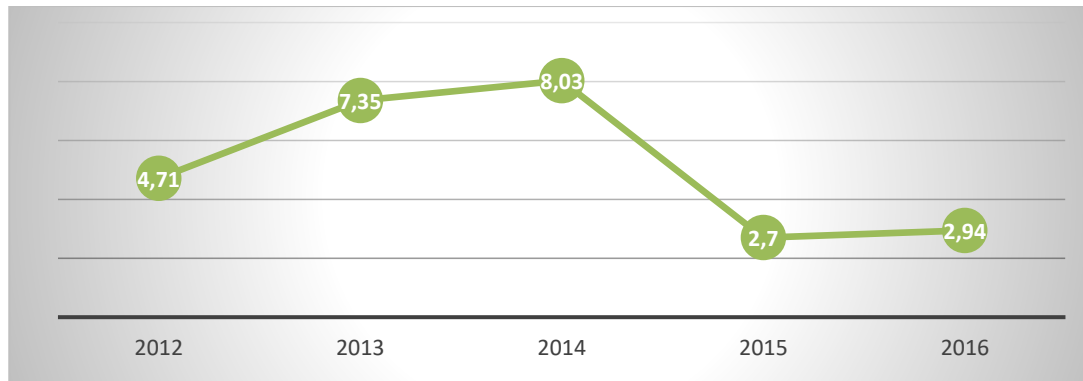


Tabel. 2.16.

Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012 s/d 2016 Kota Denpasar

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Inflasi	4,71	7,35	8,03	2,7	2,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



Gambar. 2.4

Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012 s/d 2016 Kota Denpasar

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Angka Melek Huruf merupakan pencapaian pendidikan dasar dan program pemelekan huruf dalam memberikan keahlian melek huruf dasar terhadap penduduk, dengan cara ini diharapkan penduduk menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat mengembangkan kondisi sosial dan ekonominya. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf (AMH) dapat digunakan untuk:

- Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
- Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Tabel. 2.17.

Angka Melek Huruf dari tahun 2011-2016 Menurut Kecamatan Kota Denpasar

NO	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kecamatan Denpasar Utara	153.097	157985	157.998	158.125	158.155	158.255
2	Kecamatan Denpasar Selatan	186.488	191815	196.500	196.650	196.690	196.710
3	Kecamatan Denpasar Barat	187.596	192895	192.950	192.990	193.020	193.120
4	Kecamatan Denpasar Timur	122.877	126215	126.750	126.850	126.900	127.010
	Jumlah	650,485	668,910	668,910	674.198	674.765	675.095



NO	Kecamatan	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kecamatan Denpasar Utara	157.556	158.100	158.150	158.225	158.255	158.356
2	Kecamatan Denpasar Selatan	191.919	196.800	196.850	196.900	196.930	196.980
3	Kecamatan Denpasar Barat	193.472	193.100	193.125	193.140	193.180	193.218
4	Kecamatan Denpasar Timur	126.546	127.100	127.220	127.225	127.275	127.375
	Jumlah	669403	675100	675.345	675.49	675.640	675.929

NO	Kecamatan	Angka melek huruf					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kecamatan Denpasar Utara	99,90	99.92	99.93	99.94	99.94	99.94
2	Kecamatan Denpasar Selatan	99,90	99.94	99.82	99.87	99.88	99.86
3	Kecamatan Denpasar Barat	99,80	99.70	99.90	99.92	99.92	99.95
4	Kecamatan Denpasar Timur	99,75	99.73	99.63	99.70	99.71	99.71
	Jumlah	99,83	99.82	99.82	99.86	99.86	99.865

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Disamping itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata. Banyaknya organisasi kesenian di Kota Denpasar tahun 2011 sebanyak 653 berkurang menjadi 616 organisasi di tahun 2016, seperti disajikan pada Tabel berikut.

Tabel. 2.18.

Perkembangan Organisasi Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2011-2016

Tahun	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Jumlah
2016	207	155	80	174	616
2015	165	227	150	106	648
2014	155	217	151	123	646
2013	181	238	155	193	767
2012	171	229	149	123	672
2011	154	218	154	127	653

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan 4 urusan: Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan.



2.1.3.1 Urusan Pendidikan

(1). Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *link and match*, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.

Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayagunadan berhasil guna.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Denpasar berusaha keras agar bidang pendidikan ditingkatkan. Karena pendidikan merupakan salah satu cara membuka wawasan cara berfikir masyarakat. Kemajuan suatu bangsa dengan mudah dapat diteropong lewat keberhasilan penyelenggaraan dunia pendidikan. Kemajuan pendidikan mempunyai korelasi positif terhadap keberhasilan pembangunan suatu bangsa dan negara, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar, sebagaimana tercermin dari realisasi anggaran urusan pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan pembangunan pendidikan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang muaranya tentu guna meningkatkan kesejahteraan setiap manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menunjang pembangunan nasional, karena mendidik dan mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga menjadi media inovasi untuk menghasilkan berbagai temuan, teknologi, eksplorasi yang mampu mempermudah manusia menjalankan kehidupannya.

Pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di era otonomi daerah ini. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang pendidikan. Perubahan tersebut adalah dari pemda sebagai pelaksana kebijakan pusat menjadi penentu kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, SLTP, SMU, SMK dan yang sederajat.

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi sekolah merupakan indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain angka melek huruf dan buta huruf. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan penduduk usia sekolah. APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun),SLTP (13-15 tahun) dan SMU (16-18 tahun)



Tabel. 2.19.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012-2016
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Kota Denpasar

NO	Kecamatan	SD/MI									
		jumlah murid usia 7-12 thn					jumlah penduduk usia 7-12 th				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kecamatan Denpasar Utara	17.982	17.903	18.695	19.501	20.776	8.063	10.943	10.983	19.955	20.301
2	Kecamatan Denpasar Selatan	17.633	17.630	19.571	19.952	20.348	9.494	25.653	25.717	26.432	27.039
3	Kecamatan Denpasar Barat	22.795	22.708	22.826	22.458	22.494	9.463	11.563	12.413	25.093	25.548
4	Kecamatan Denpasar Timur	15.298	15.681	15.587	15.980	15.007	5.998	7.198	7.120	15.035	15.262
	Jumlah	73.708	73.922	76.679	77.891	78.625	33.018	55.297	56.233	86.515	88.150

NO	Kecamatan	SMP/MTs									
		jumlah murid usia 13-15 thn					jumlah penduduk usia 13-15 th				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kecamatan Denpasar Utara	8.647	7.275	10.917	11.011	11.226	8.063	7.063	7.075	8.920	9.075
2	Kecamatan Denpasar Selatan	6.424	8.869	7.477	7.849	8.260	9.494	9.494	9.594	10.843	11.092
3	Kecamatan Denpasar Barat	4.320	3.315	5.097	5.190	5.457	9.463	7.453	7.481	10.524	10.715
4	Kecamatan Denpasar Timur	3.852	3.170	3.717	4.823	4.837	5.998	7.063	7.083	6.553	6.651
	Jumlah	23.243	18.629	27.208	28.873	29.780	33.018	31.073	31.233	36.840	37.533

* Sumber : Dinas Pendidikan Pemudaran Olahraga Kota Denpasar

** Data diolah

Rendahnya taraf pendidikan penduduk di suatu daerah, kemungkinan terjadi karena rendahnya partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah kemungkinan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain penilaian orangtua terhadap nilai pendidikan anak. Di lain pihak, rendahnya penilaian itu kemungkinan berkaitan dengan tipologi daerah dimana mayoritas penduduk bertempat tinggal. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APS berkecenderungan meningkat pada semua kelompok umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada perbedaan pencapaian yang nyata antara laki-laki dan perempuan disemua jenjang pendidikan, bahkan pada kelompok usia 7-12 thn dan 13-15 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki.

Kalau dilihat berdasarkan data pokok pendidikan maka bisa dikatakan bahwa pembangunan pendidikan di Kota Denpasar cukup memadai. Kategori ini bisa dijelaskan dengan melihat kemajuan atau perkembangan indikator-indikator dasar seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, kelulusan, ruang kelas, guru dan fasilitas sekolah.

Secara umum baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs atau SMA/MA keadaan komponen-komponen tersebut relatif baik. Jumlah sekolah cukup banyak, siswa baru juga semakin meningkat, kelulusan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, kondisi kelas cukup baik, sebagian besar guru berpendidikan tinggi, dan fasilitas pendukung pendidikan tersedia di seluruh tingkatan. Pendidikan merupakan usaha yang tidak hanya tergantung dari keberadaan fasilitas, sarana dan prasarana namun lebih merupakan usaha sadar yang lebih banyak tergantung dari kemauan, kesungguhan dan usaha dari manusia sebagai faktor utama.



Tabel. 2.20.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012-2016
Menurut Kecamatan Kota Denpasar

NO	Kota Denpasar	SD/MI									
		Jumlah gedung sekolah					jumlah penduduk usia 7-12 th				
(1)	(2)	(3)					(4)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kecamatan Denpasar Utara	56	55	54	54	57	18.218	18.253	19.605	19.955	20.301
2	Kecamatan Denpasar Selatan	63	64	63	63	66	23.375	23.975	25.812	26.432	27.039
3	Kecamatan Denpasar Barat	56	55	55	55	55	22.788	22.988	24.628	25.093	25.548
4	Kecamatan Denpasar Timur	51	53	53	53	52	13.908	14.025	14.805	15.035	15.262
	Jumlah	226	227	225	225	230	78.289	79.241	84.850	86.515	88.150

NO	Kota Denpasar	SMP/MTs									
		Jumlah gedung sekolah					jumlah penduduk usia 13-15 th				
(1)	(2)	(3)					(4)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kecamatan Denpasar Utara	20	20	20	20	20	8.143	8.263	8.764	8.920	9.075
2	Kecamatan Denpasar Selatan	18	18	19	19	21	9.588	9.594	10.589	10.843	11.092
3	Kecamatan Denpasar Barat	12	12	12	12	13	9.557	9.600	10.329	10.524	10.715
4	Kecamatan Denpasar Timur	11	12	12	12	12	6.057	7.157	6.452	6.553	6.651
	Jumlah	61	62	63	63	66	33.345	34.614	36.134	36.840	37.533

* Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

** Data diolah

Tabel. 2.21.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kecamatan Kota Denpasar

NO	Kecamatan	SD/MI									
		Jumlah Guru					Jumlah Murid				
(1)	(2)	(3)					(4)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kecamatan Denpasar Utara	759	803	2.060	978	1.066	21.767	21.472	21.257	22.260	23.483
2	Kecamatan Denpasar Selatan	822	819	1.252	1077	1.081	21.883	22.018	22.236	22.713	22.597
3	Kecamatan Denpasar Timur	991	1.025	1.870	928	892	26.394	17.922	18.328	18.180	17.062
4	Kecamatan Denpasar Barat	946	943	2.250	1118	1.131	17.890	26.225	25.745	25.457	25.310
	Jumlah	3.518	3.590	7.432	4.101	4.170	87.934	87.637	87.697	88.610	88.452

NO	Kecamatan	SMP/MTs									
		Jumlah Guru					Jumlah Murid				
(1)	(2)	(3)					(4)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kecamatan Denpasar Utara	822	837	752	775	809	12.945	12.595	15.590	14.603	14.742
2	Kecamatan Denpasar Selatan	667	631	490	692	680	9.505	9.078	10.239	10.706	10.996
3	Kecamatan Denpasar Timur	403	385	246	338	356	6.472	6.506	7.028	6.454	6.540
4	Kecamatan Denpasar Barat	470	468	337	403	451	5.676	5.489	4.825	7.233	7.390
	Jumlah	2.362	2.321	1.825	2.208	2.296	34.598	33.668	37.682	38.996	39.668

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

** Data diolah



B. Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: (a). Partisipasi sekolah; (b). Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c). Ijazah tertinggi yang dimiliki; dan (d). Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rata rata Lama Sekolah di Kota Denpasar juga mengalami peningkatan dari 11,02 tahun 2015, menjadi 11,14 tahun 2016

Pada tahun 2016 mencapai 11,14 (lebih tinggi dari Provinsi Bali yang sebesar 8,36) Meningkatnya rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi. Hal ini juga didukung meningkatnya angka partisipasi pada semua kelompok usia sekolah, yang artinya bahwa jumlah penduduk yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenjang usianya pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015.

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah, yaitu 7 sampai dengan 18 tahun, di tingkat pendidikan tertentu. APM di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.22.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 - 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	74.347	76.625	76.679	77.492	78.625
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12	78.289	79.241	84.850	86.515	88.150
1.3	APM SD/MI	94,96	96,70	90,47	89,43	89,19
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	24.626	25.560	31.689	28.873	29.780
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15	33.345	34.614	36.134	36.840	37.533
2.3	APM SMP/MTs	73,85	73,84	87,69	79,97	79,34
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	25.755	14.726	28.010	27.170	29.192
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18	35.315	38.184	38.660	39.417	40.162
3.3	APM SMA/MA/SMK	72,93	38,57	72,45	68,93	72,68

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar



D. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar merupakan indikator lainnya yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. APK merupakan indikator umum tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah berapa pun usianya. Tabel berikut menunjukkan APK pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Denpasar.

Tabel. 2.23.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2012 - 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	87.150	87.209	92.379	88.610	88.416
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12	78.289	79.241	84.850	86.515	88.150
1.3	APK SD/MI	111,32	110,06	108,873	102,03	100,30
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	34.601	36.185	37.682	38.688	39.618
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15	33345	34.614	36.134	36.840	37.533
2.3	APK SMP/MTs	103,77	104,54	104,28	107,86	150,55
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	36.635	38.014	39.962	39.714	40.999
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18	35.315	38.184	38.660	39.417	40.162
3.3	APK SMA/MA/SMK	103,74	99,55	103,36	100,75	102,08

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

2.1.3.2 Urusan Kesehatan

(2). Dinas Kesehatan

Pada urusan kesehatan, pemerintah Kota Denpasar memiliki target pembangunan yang mengarah pada pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/ rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), Morbiditas dan Gizi Buruk. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia.

Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, murah dan terjangkau sehingga diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagaimana pembangunan di bidang lainnya, peran masyarakat termasuk swasta dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan dan ikut memberikan andil terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Pemerintah memberikan ruang untuk berkembangnya peran aktif masyarakat termasuk swasta sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai



mitra pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan indikator, antara lain Indikator Indonesia sehat dan Indikator Kinerja dari Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Indikator Indonesia sehat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut diatas dapat digolongkan ke dalam : (1) Indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir, yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas dan status gizi (2) Indikator hasil yang terdiri atas indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup, akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta (3) Indikator proses dan masukan, yang terdiri atas pelayanan minimal kesehatan di Kabupaten/Kota terdiri atas 26 indikator pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Dalam lima tahun terakhir ini telah banyak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, baik dalam segi pemberdayaan masyarakat, desentralisasi upaya kesehatan maupun lingkungan strategis termasuk globalisasi.

Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Akses terhadap sarana Kesehatan
 - a) Puskesmas

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan di suatu wilayah kerja. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit puskesmas keliling. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah 1 : 1,3. Target kunjungan rawat jalan sebanyak 15 % dari kunjungan penduduk baru rawat jalan, kunjungan tersebut sudah mencapai 46 %.

Dari 11 Puskesmas yang ada di Kota Denpasar, 2 Puskesmas sudah dikembangkan menjadi Puskesmas Rawat inap yaitu Puskesmas I Denpasar Timur dengan 10 tempat tidur dan Puskesmas IV Denpasar Selatan dengan 10 tempat tidur.



Sejak tahun 2009 di Kota Denpasar sudah mengembangkan Puskesmas ISO (ISO 9001:2008) Sistem Manajemen Mutu Puskesmas. Sampai dengan tahun 2014. Kegiatan ISO di Puskesmas di Kota Denpasar sudah terlaksana pada 4 (empat) Puskesmas diantaranya :

- Puskesmas II Denpasar Selatan tahun 2009
- Puskesmas III Denpasar Selatan tahun 2011
- Puskesmas IV Denpasar Selatan tahun 2013
- Puskesmas II Denpasar Barat tahun 2014

Puskesmas dengan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONED) merupakan salah satu upaya pengembangan puskesmas. Upaya kesehatan poned dilakukan untuk mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal dasar. Akses masyarakat yang semakin mudah terhadap pelayanan kegawatdaruratan diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan AKI dan AKB (kemenkes,2014). Di Kota Denpasar terdapat tiga puskesmas poned yaitu Puskesmas I Denpasar Timur, Puskesmas IV Denpasar Selatan dan Puskesmas II Denpasar Barat.

Jumah kunjungan rawat jalan selama tahun 2016 di puskesmas sekota Denpasar sebanyak 348.554 orang, sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2013 sebanyak 322.597 orang. Bila dilihat berdasarkan puskesmas, selama tahun 2015 Puskesmas dengan kunjungan tertinggi adalah Puskesmas I Denpasar timur (50.307), Hal ini disebabkan karena Puskesmas I Denpasar Timur merupakan puskesmas rawat inap dan membuka pelayanan selama 24 jam.

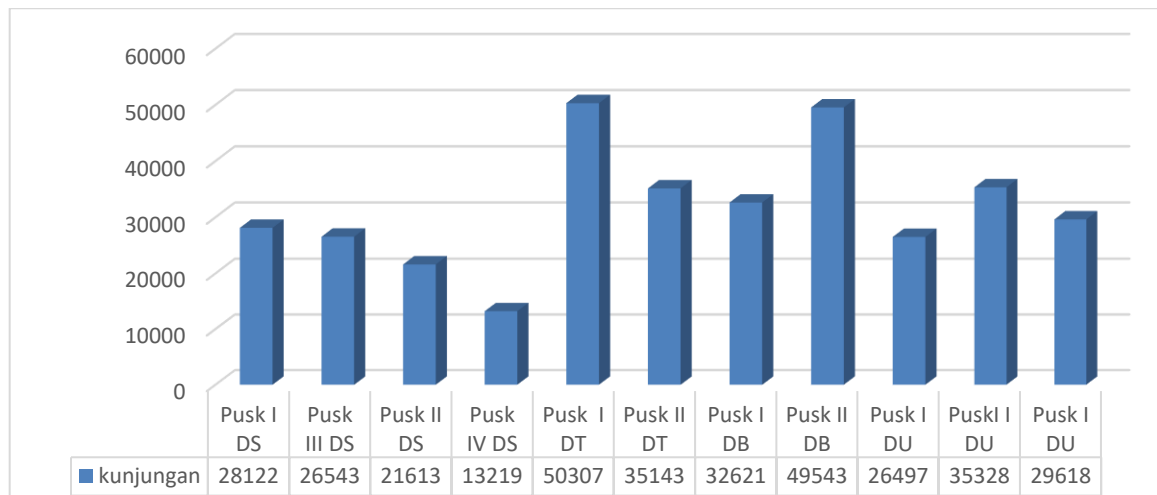
Tabel. 2.24.

Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016

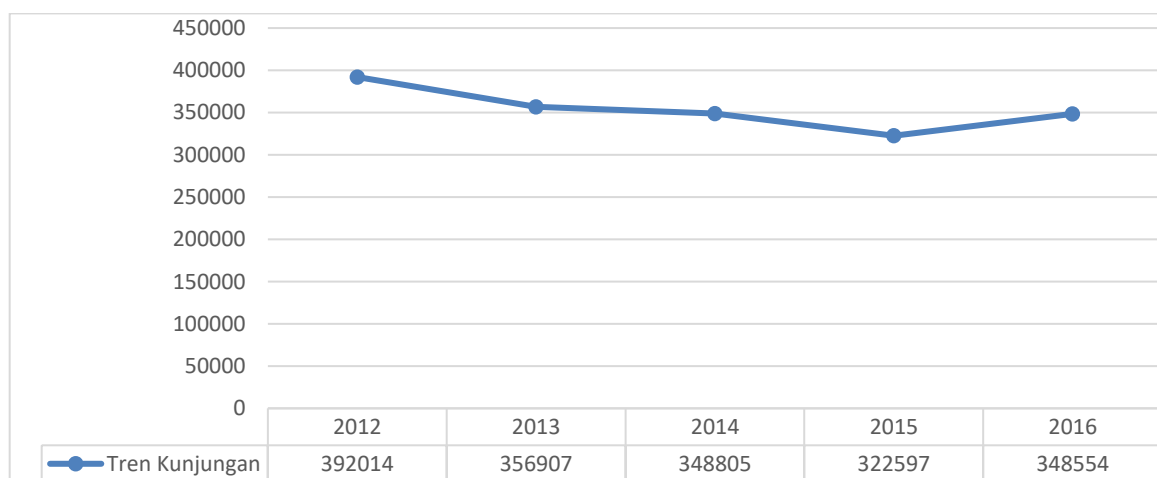
URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Pusk I Denpasar Selatan	35.999	30.468	28.051	20.425	28.122
Pusk II Denpasar Selatan	46.107	3.5880	38.528	37.407	26.543
Pusk III Denpasar Selatan	22.091	10.039	21.240	22.827	21.613
Pusk IV Denpasar Selatan	92.108	93.654	65.300	51.201	13.219
Pusk I Denpasar Timur	38.428	35.685	43.287	56.990	50.307
Pusk II Denpasar Timur	35.221	34.825	30.713	35.123	35.143
Pusk I Denpasar Barat	37.485	39.697	37.712	34.609	32.621
Pusk II Denpasar Barat	57.970	36.373	51.567	41.852	49.543
Pusk I Denpasar Utara	35.364	29.742	36.559	30.349	26.497
Pusk II Denpasar Utara	38.250	38.658	40.199	39.219	35.328
Pusk III Denpasar Utara	39.589	41.780	39.412	38.860	29.618

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar





Gambar. 2.5 Kunjungan di Puskesmas se-Kota Denpasar Tahun 2016



Gambar. 2.6 Tren kunjungan di Puskesmas se-Kota Denpasar Tahun 2012 - 2016

b) Rumah sakit

Selain upaya promotif dan preventif, upaya kuratif dan rehabilitatif merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kuratif dan rehabilitative dapat diperoleh di rumah sakit.

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya dan merupakan tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

Disamping Balai Klinik, Pemerintah juga memberikan ruang kepada masyarakat/swasta untuk berperan dalam pembangunan kesehatan melalui rumah sakit, tanpa melepaskan tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti yang dinyatakan dalam Sistem Kesehatan Nasional.



Tabel. 2.25.

Indikator Pelayanan Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2016

No	Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur	Kapasitas (TT x 365)	BOR (%)
1	RSUD Wangaya	200	73.000	100
2	RSUP Sanglah	765	279.225	90
3	RS Trijata/Bhayangkara	54	19.710	28,9
4	RS Udayana	120	43.800	75,7
5	RS Puri Raharja	104	37.960	80,2
6	RS Harapan Bunda	25	9.125	37,1
7	RS Puri Bunda	86	31.390	68,2
8	RS Dharma Yadnya	66	24.090	27,4
9	RS Surya Husadha	99	36.135	84,9
10	RS Prima Medika	94	34.310	74,2
11	RS Manuaba	54	19.710	56,0
12	RS Kasih Ibu	90	32.850	61,1
13	RS Indera	10	3.650	32,5
14	RS Balimed	135	49.275	58,5
15	RS Bali Royal	113	41.245	77,3
16	RS Surya Husada Ubung	33	12.045	81,5
17	RS Bakti Rahayu	91	33.215	75,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Rumah sakit yang ada di Kota Denpasar terdiri dari 5 buah rumah sakit pemerintah (1 buah RS Tipe A, 1 buah RS Tipe B dan 3 buah RS Tipe C) dan 11 buah rumah sakit swasta yang seluruhnya termasuk dalam Rumah Sakit Tipe C, memiliki kemampuan gawat darurat, memiliki kemampuan laboratorium kesehatan dan seluruhnya sudah memiliki 4 (empat) spesialis dasar serta memiliki akses ketersediaan darah untuk ibu hamil dan neonatus resti/komplikasi yang dirujuk kecuali RS Indra Masyarakat.

Tabel. 2.26.

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

NO	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA		
		RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Puskesmas I Denpasar Utara	12.009	14.488	26.497				40	13	53
2	Puskesmas II Denpasar Utara	16.106	19.222	35.328				81	57	138
3	Puskesmas III Denpasar Utara	14.254	15.364	29.618				-	-	-
4	Puskesmas I Denpasar Timur	25.219	25.088	50.307	106	474	597	36	19	55
5	Puskesmas II Denpasar Timur	16.011	19.132	35.143				54	31	85
6	Puskesmas I Denpasar selatan	12.498	15.624	28.122				23	7	30



NO	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA		
		RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
7	Puskesmas II Denpasar selatan	15.278	11.265	26.543				66	26	92
8	Puskesmas III Denpasar selatan	10.690	10.923	21.613				20	20	40
9	Puskesmas IV Denpasar selatan	6.115	7.104	13.219	139	125	264	18	8	26
10	Puskesmas I Denpasar Barat	15.368	17.253	32.621				-	-	-
11	Puskesmas II Denpasar Barat	25.267	24.276	49.543		269	269	150	45	195
SUB JUMLAH I										
II	RS PEMERINTAH									
1	RSUD Wangaya	66.846	58.447	1.253.293	6.826	8.372	15.198	2	2	4
2	RS Tk. II Udayana	49.038	46.116	95.154	4.901	5.475	10.376	214	155	369
3	RS Polda Bali	5.875	6.891	12.766	839	1.005	1.844	77	65	142
4	RSUP Sanglah	142.511	129.112	271.623	16.595	15.036	31.631	545	467	1.012
5	RS Indera Prov. Bali	26.958	24.170	51.128	193	132	325	-	-	-
III	RS SWASTA									
1	RS Manuaba	11.028	21.530	32.558	1.343	1.368	2.711	24	62	86
2	RS Surya Husada	57.124	56.924	114.048	4.086	3.952	8.038	0	0	0
3	RS Puri Raharja	30.449	35.466	65.915	3.456	3.221	6.672	0	0	0
4	RS Darma Yadnya	6.599	6.818	13.417	1.489	1.267	2.756			
5	RS Kasih Ibu Denpasar	20.084	28.150	48.239	2.567	3.694	6.261			
6	RS Bhakti Rahayu	25.096	34.829	59.925	2.687	3.857	6.544	26	14	40
7	RSB Harapan Bunda	3.384	13.245	16.629	592	1.235	1.827			
8	RS Prima Medika	29.326	26.032	55.358	2.632	4.273	6.905	10	17	27
10	RS Bali Med	28.840	38.731	67.571	3.801	5.294	9.095			
11	RS Surya Husada Ubung	9.814	50.124	59.938			2.712			234
12	RS BROS	42.093	47.161	89.254	3.246	4.661	7.907	77	85	162
13	Rs Puri Bunda	21.402	19.372	40.774	1.254	1.254	2.508			
SUB JUMLAH II		576.467	643.118	1.219.585	56.507	64.096	123.315	975	867	2.076
JUMLAH (KAB/KOTA)		745.282	822.857	1.568.139	56.646	64.221	123.579	1.277	1.029	2.540
JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA		458.300	439.000	897.300	458.300	439.000	897.300			

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar



2. Sarana Kesehatan lainnya

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) seperti pos pelayanan terpadu (Posyandu, pos kesehatan desa /Poskesdes) dan desa siaga aktif.

Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Keberadaan posyandu sampai saat ini masih memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada golongan balita. Posyandu memiliki lima program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat. Ratio posyandu dengan balita di kota Denpasar adalah 1 posyandu melayani 100 balita.

Tabel. 2.27.

Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Posyandu	459	485	461	460	459
2.	Jumlah Balita	18.706	18.321	30.792	29.566	43.652

Tabel. 2.28.

Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2016

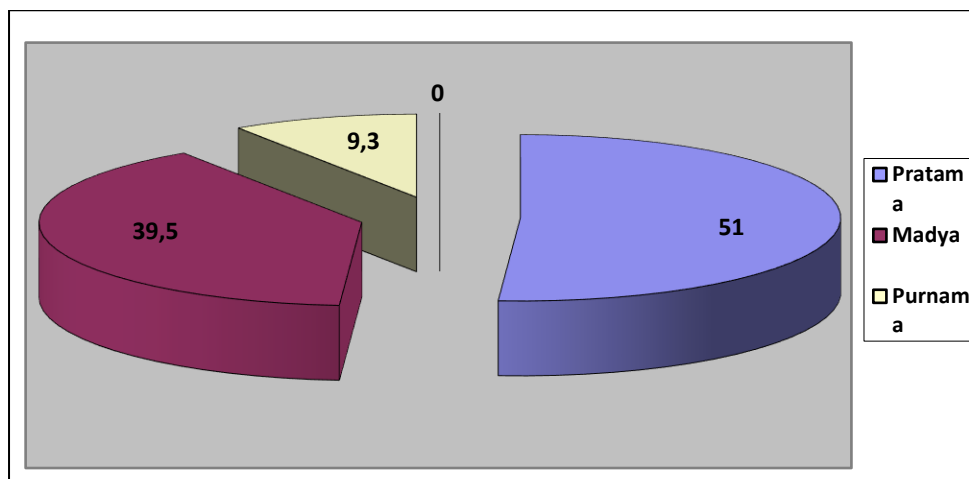
No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4*1000)
1.	Denpasar Selatan	108	12.419	8,6
2.	Denpasar Timur	103	8.660	11,89
3.	Denpasar Barat	131	10.367	12,64
4.	Denpasar Utara	117	12.206	9,59
	JUMLAH	459	43.652	10,52

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Desa/kelurahan siaga aktif adalah Desa/kelurahan yang memiliki poskesdes atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveylans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), Penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Kemenkes RI, 2015).

Dari 43 desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar seluruhnya sudah merupakan desa siaga aktif. Lima puluh satu (51%) desa siaga tergolong pratama, 39,5% madya, 9,3 purnama dan belum ada desa siaga yang mandiri.





Gambar. 2.7

Persentase Desa Siaga Aktif Berdasarkan Strata di Kota Denpasar Tahun 2015

Tabel. 2.29.

Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama Tahun 2016

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Ijin Dokter umum praktek swasta	96
2	Ijin Dokter spesialis praktek swasta	220
3	Ijin Dokter gigi praktek swasta	20

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

3. Mutu Pelayanan Kesehatan

Mutu pelayanan di rumah sakit dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain :

a) Angka Kematian Netto (*Net Death Rate/NDR*)

Angka kematian Netto atau NDR merupakan angka kematian 48 jam pasien rawat inap per 1000 pasien keluar hidup dan mati. Indikator ini digunakan untuk melihat mutu pelayanan rumah sakit. Lima besar Angka NDR tertinggi di beberapa RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada :

Tahun 2016

- 1) RSUP Sanglah : 41,3 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 2) RSUD Wangaya : 59,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 3) RSUD Puri Raharja : 14,8 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 4) RS Surya Husada : 9,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 5) RS Darma Yadnya : 6,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

b) Angka Kematian Umum (*Gross Death Rate/GDR*)

Angka Kematian Umum (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian total pasien rawat inap yang keluar rumah sakit per 1000 penderita keluar hidup dan mati. Lima besar Angka GDR tertinggi di beberapa rumah sakit (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar yang datanya kami terima pada :



Tahun 2016

- 1) RSUP Sanglah : 53,8 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 2) RSUD Wangaya : 36,2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 3) RSUD Puri Raharja : 28,14 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 4) RS Surya Husada : 17 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 5) RS Darma Yadnya : 13,8 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

c) Angka Penggunaan Tempat Tidur (*Bed Occupation Rate/BOR*)

BOR merupakan indikator yang dapat menggambarkan tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Lima besar tingkat pencapaian BOR tertinggi oleh RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar yang datanya kami terima pada tahun 2016 adalah :

- 1) RSUP Sanglah : 100 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 2) RSUD Wangaya : 90 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 3) RS Surya Husada : 84,9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 4) RSUD Puri Raharja : 80,2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 5) RS Puri Bali Med : 81,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

d) Rata-rata Lama Dirawat (*Length Of Stay/LOS*)

Indikator LOS digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit. Rata-rata lama pasien di rawat di rumah sakit (pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar tahun 2016 adalah 3 hari.

4. Indikator Kesehatan

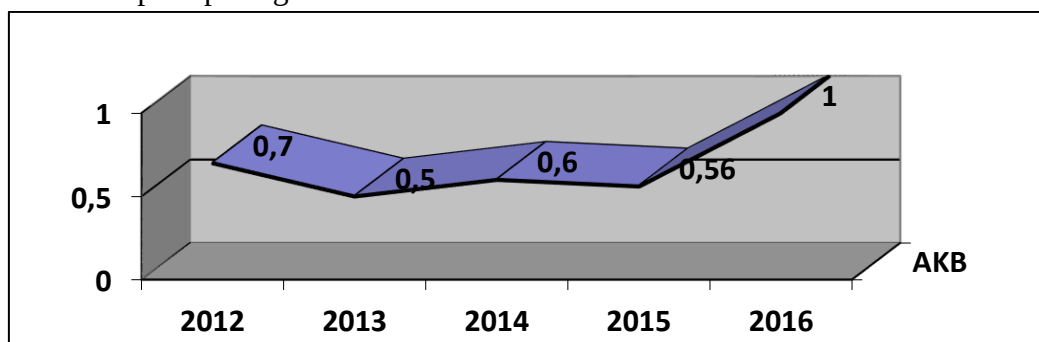
Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir, di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator : penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian bayi, meningkatkan umur harapan hidup, peningkatan jumlah bayi , balita tertimbang, peningkatan bayi balita yang menunjukkan kenaikan berat badannya, penurunan angka bagi balita yang dibawah garis merah, penurunan angka balita gizi buruk

a) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu daerah. AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. AKB merupakan salah satu indikator yang sensitive terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan perinatal. AKB juga mempunyai asosiasi dengan GNP (Gross National Product) perkapita : pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga.



Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir dapat juga di gambarkan seperti pada grafik di bawah ini.



Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Gambar. 2.8 Angka Kematian Bayi tahun 2012-2016

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, dan meningkat di tahun 2016 namun masih dibawa target renstra dinas kesehatan kota Denpasar 2016-2021.

Pada tahun 2016 terjadi 12 kematian bayi dari 14.689 lahir hidup. Penyebab Kematian bayi di Kota Denpasar pada tahun 2016 adalah:

No	Penyebab Kematian	Jumlah
1	Berat badan lahir rendah (BBLR)	1 orang
2	Sepsis	2 orang
3	Aspeksia Berat	7 orang
4	Diare	2 orang
	Total	12 orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Kematian Bayi umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kematian pada bayi meliputi imunisasi TT pada ibu hamil, persalinan yang bersih, perawatan mata, ASI dini dan eksklusif dan pemberian antibiotika untuk penyebab kematian karena infeksi. Kemudian untuk penyebab kematian karena asfiksia dan trauma kelahiran dilakukan upaya berupa resusitasi dan penghangatan. Sedangkan untuk mencegah kematian bayi karena kelainan kongenital dilakukan upaya yang meliputi terapi spilis bagi WUS penderita spilis dan suplementasi Folat pada ibu hamil. Dari segi promosi kesehatan, telah dilaksanakan Penyuluhan kesehatan kepada remaja putri dan peningkatan pengetahuan kader.

Lebih dari 90% kematian bayi di Kota Denpasar pada tahun 2016 terjadi pada usia kurang dari 28 hari dan 50% lebih kematian disebabkan oleh BBLR. Hal ini mengindikasikan kesehatan ibu pada saat hamil sangat berperan dalam perkembangan kesehatan janin. Kematian bayi di Kota Denpasar lebih banyak terjadi pada bayi laki-laki (1,7 /1000 KH) dibandingkan bayi perempuan (0,1/1000 KH). Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar untuk



tahun 2016 sudah di bawah target yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk tahun 2016 (15/1000KH). Bila kita bandingkan dengan realisasi tahun 2015 (0,6 per 1000 KH) maka angka kematian bayi tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencantumkan target kematian bayi 15 per 1000 kelahiran hidup untuk tahun 2016, sedangkan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar sudah dibawah target dan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik karena petugas dan sarana kesehatan sudah menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar.

Tabel. 2.30.
Perbandingan Angka Kematian Bayi Kota Denpasar
dan Provinsi Bali Tahun 2010- 2016

Tahun	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	
	Kota Denpasar	Provinsi Bali
2010	3,80	12,30
2011	1,80	7,21
2012	0,70	5,09
2013	0,49	5,50
2014	0,50	6,00
2015	0,62	5,7
2016	1,0	6,01

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali 2016.

AKB di Provinsi Bali dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan kecenderungan menurun dan sudah lebih rendah dari angka kematian bayi secara nasional. Tapi tahun 2014 terjadi peningkatan menjadi 6,0 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dari tahun 2010 sampai tahun 2015 cenderung menurun. AKB di tahun 2010 mencapai 3,80 sedangkan di tahun 2015 mencapai 0,6 per 1.000 kelahiran bayi.

b) Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan.

Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil (bumil), pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu. Angka kematian Ibu Maternal.

Secara umum derajat kesehatan masyarakat di Kota Denpasar telah menunjukkan perbaikan seperti dilihat dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan. Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan indikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu -



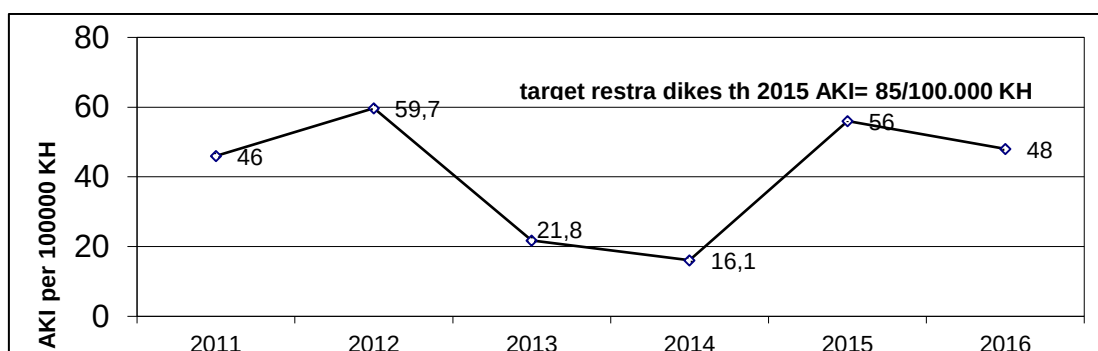
hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi dan infeksi. Meningkatnya kesadaran masyarakat selain ditunjukkan oleh menurunnya angka kesakitan dan kematian juga ditentukan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup waktu lahir.

Angka Kematian ibu maternal di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel. 2.31.
Perbandingan Angka Kematian Ibu Kota Denpasar
dan Provinsi Bali Tahun 2010 – 2016

Tahun	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	
	Kota Denpasar	Provinsi Bali
2010	24,91	58,10
2011	46,03	84,25
2012	59,73	89,67
2013	21,76	72,1
2014	16,1	70,5
2015	56	83,4
2016	48	78,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar



Gambar. 2.9 Angka Kematian Ibu Maternal Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2016

Pada grafik diatas terlihat Angka kematian ibu di Kota Denpasar berfluktuasi secara cukup signifikan, Sampai dengan tahun 2014 AKI sudah dapat ditekan sampai 16,1 per 100.000 KH namun meningkat kembali pada tahun 2015. Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar tahun 2015 (56 per 100.000 KH) masih lebih rendah dari target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2015 (85 per 100.000 KH). AKI di Kota Denpasar juga lebih rendah bila dibandingkan dengan target MDGs tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 KH, namun demikian untuk kedepannya perlu terus digalakkan upaya-upaya untuk menekan kematian ibu di Kota Denpasar dengan meningkatkan PWS ibu, meningkatkan surveilans terhadap ibu hamil dan peningkatan cakupan penanganan ibu dengan komplikasi.

Selama tahun 2016 di Kota Denpasar terjadi 7 kematian ibu yang terdiri dari 1 orang karena pendarahan, 2 orang karena preeklamsia berat, 2 orang kelainan jantung dan 2 orang karena Dengue Shock Syndrom (DSS).

Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang



akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat di tekan.

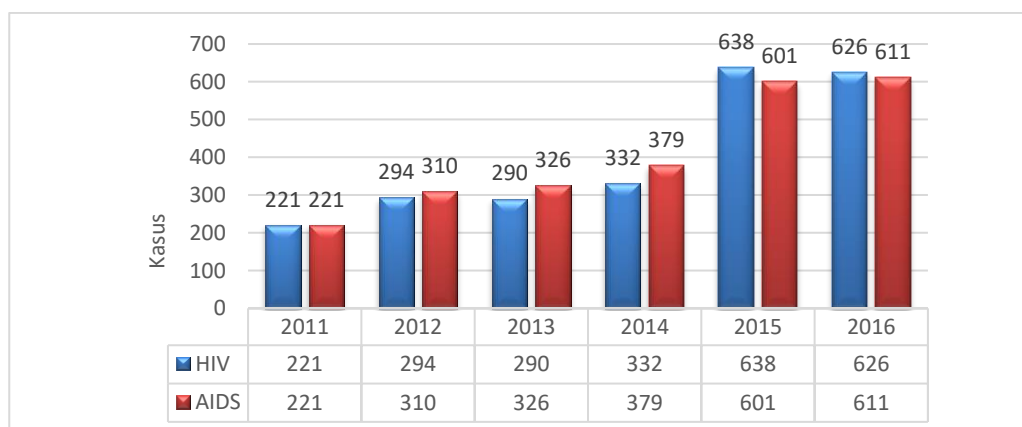
5. Angka Kesakitan

a) HIV/AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar terdapat 4 Puskesmas dengan layanan VCT yaitu Puskesmas II Denpasar Selatan, Puskesmas II Denpasar Utara dan Puskesmas I Denpasar Timur dan Puskesmas II Denpasar Barat.

Penyebaran HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:



Gambar. 2.10 Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2016

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan. Pada tahun 2011 ditemukan 221 kasus HIV baru. Pada tahun 2012 jumlah penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 294 orang (119 penderita laki-laki dan 175 perempuan) dan AIDS sebanyak 310 orang (208 penderita laki-laki dan 102 penderita perempuan). Sedangkan pada tahun 2013 dengan penambahan 1 puskesmas yang mampu melakukan VCT jumlah kasus HIV sedikit menurun menjadi 290 kasus (144 laki-laki dan 146 perempuan), sedangkan AIDS ditemukan 326 orang (228 laki-laki dan 98 perempuan). Sedangkan pada tahun 2014 ditemukan 332 penderita HIV positif (161 laki-laki dan 171 perempuan) dan AIDS ditemukan 379 orang (239 laki-laki dan 140 perempuan). Selama tahun 2014 ditemukan 13 kematian akibat AIDS (10 laki-laki dan 3 perempuan). Tahun 2015 terjadi 638 kasus HIV dan 601 kasus AIDS, dengan 10 kematian



akibat AIDS. Tahun 2016 terjadi 626 kasus HIV dan 611 kasus AIDS dengan 7 kematian AIDS.

Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum suntik yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV+. Situasi kasus HIV-AIDS menurut kelompok resiko di Kota Denpasar sebagian besar terdapat pada kelompok heteroseks (73,38%) kemudian disusul IDU (9,84%), Homo/Biseksual (11,63%), tidak diketahui (2,62%) dan perinatal (2,5%). Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran kasus HIV-AIDS di Kota Denpasar. Salah satunya adalah melakukan skrining terhadap pendonor darah. Pada tahun 2016 Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Cabang Kota Denpasar yang berkedudukan di RSUD Wangaya telah melakukan skrining terhadap 4.151 pendonor darah (3.191 laki-laki dan 960 perempuan). Dari jumlah tersebut sebanyak 11 sampel darah (0,26%) positif terinfeksi HIV-AIDS.

Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar secara aktif melaksanakan penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala.

b) Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk *aedes aegypti*. Indonesia merupakan negara tropis yang secara umum mempunyai risiko terjangkit penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk *Aedes aegypti* tersebar luas di kawasan pemukiman maupun tempat-tempat umum, kecuali wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut.

Kota Denpasar merupakan daerah endemis DBD baik tingkat desanya maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut – turut selalu dilaporkan adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria kejadian luar biasa (KLB) DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya peningkatan kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya.

Jumlah kasus DBD pada tahun 2015 adalah 1.574 kasus, terdiri dari 869 penderita laki-laki dan 705 perempuan. Incidence rate DBD pada tahun 2015 adalah sebesar 178,7 per 100.000 penduduk, bila dibandingkan dengan IR DBD tahun 2014 adalah sebesar 211,7 per 100.000 penduduk maka terjadi penurunan IR DBD yang cukup bermakna. Kematian akibat DBD pada tahun 2015 sebanyak 14 orang (CFR=0,9%). Kasus DBD tahun 2016 adalah 2.851 kasus terdiri dari 1.644 penderita laki-laki dan 1.207 penderita perempuan. IR DBD tahun 2016 adalah sebesar 317,7 per 100.000 penduduk . Kematian akibat DBD tahun 2016 sebanyak 18 orang (CFR = 0,6%).

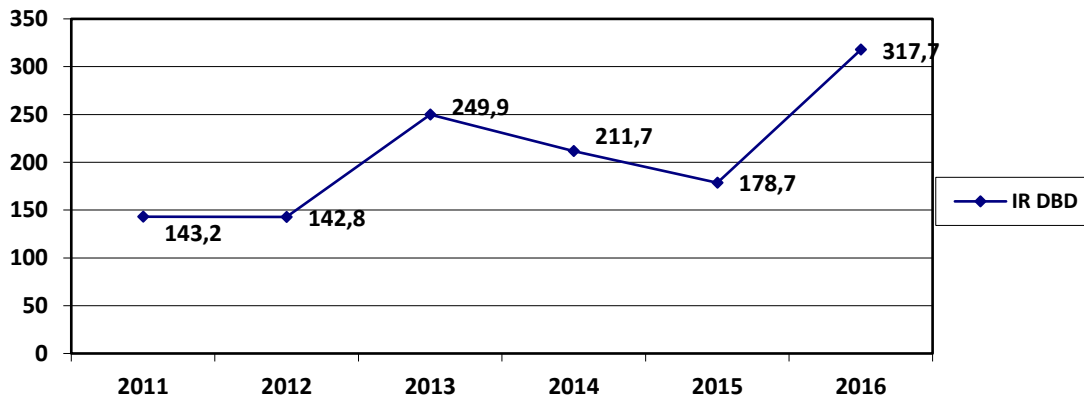


Tabel. 2.32.

Demam berdarah dangué

No	Tahun	Demam berdarah dangué
1	2011	981
2	2012	1.006
3	2013	1.765
4	2014	1.837
5	2015	1.574
6	2016	2.851

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar



Gambar. 2.11 Incidence Rate Penyakit Demam berdarah dangué Tahun 2011 s/d 2016

Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini, 3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, menutup dan mengubur) plus menabur larvasida. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan PSN adalah angka bebas jentik (ABJ).

6. Status Gizi

Keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis (pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lainnya). Gizi buruk pada balita sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian pada balita. MDGs menetapkan prevalensi bagi Indonesia sebesar >15% persen dan pencapaian Indonesia sebesar 0,48 persen berarti target MDGs sudah terpenuhi.

Pada tahun 2016 prevalensi gizi buruk di Kota Denpasar adalah sebesar 0,1 persen, pencapaian ini sudah lebih rendah dari pencapaian secara nasional dan target MDGs.

Kejadian gizi buruk dan BBLR dipengaruhi oleh multi faktor seperti keadaan soal ekonomi orangtua, tingkat pendidikan dan pengetahuan orangtua serta adanya penyakit kronis seperti TB, Paru, HIV AIDS dan lain sebagainya.

Dalam lima tahun terakhir kasus gizi buruk di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini:

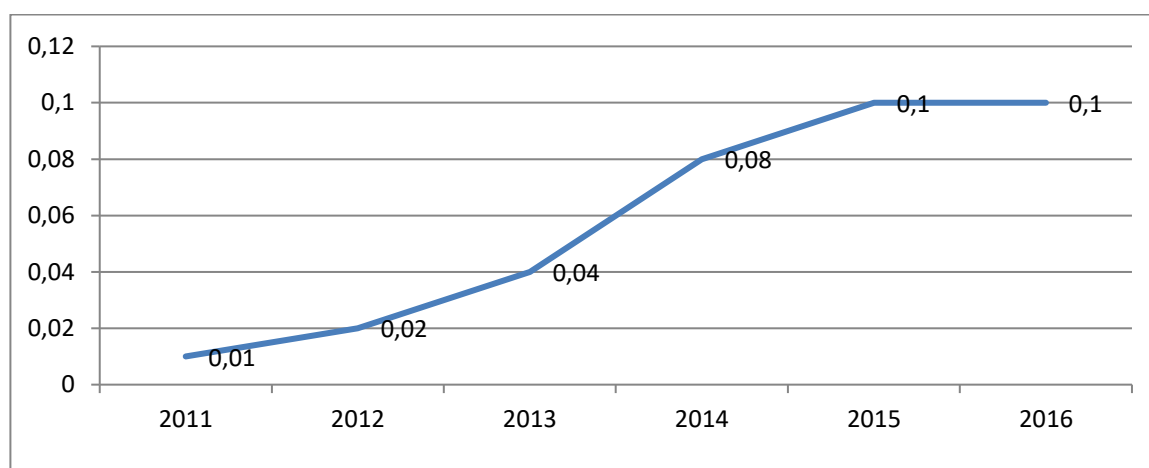


Tabel. 2.33.

Gizi Buruk

No	Tahun	Gizi Buruk
1	2011	0,01%
2	2012	0,02% (4/18.888)
3	2013	8/18.321 (0.04)
4	2014	0,08%
5	2015	0,1%
6	2016	0,1%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar



Gambar. 2.12 Prevalensi gizi buruk tahun 2011 s/d 2016

7. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Mulai tahun 2014 diterapkan system Kesehatan nasional (JKN) dengan penyelenggara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Tahun 2016 Data Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari: Penerima Bantuan Iuran (PBI)/APBN sebanyak 69.165 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) 293.552 jiwa, Peserta Mandiri 139.167 Jiwa, bukan pekerja 25.787 jiwa dan jamkesda/JKBM 369.629 jiwa

Khusus untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar yang jumlahnya mencapai 69.165 jiwa, seluruhnya (100%) sudah tercakup dalam Asuransi Kesehatan sebagai pennerima bantuan iuran dengan dana dari APBN. Pelayanan yang berhak didapatkan meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

8. Umur Harapan Hidup

Usia harapan hidup (UHH), sebagai salah satu indikator penting bidang kesehatan yang menentukan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara konsepsi angka harapan hidup diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hidupnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup adalah lingkungan, status sosial ekonomi penduduk, keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta keadaan status gizi penduduk. Dalam konsep perencanaan pembangunan, angka harapan hidup digolongkan mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk.

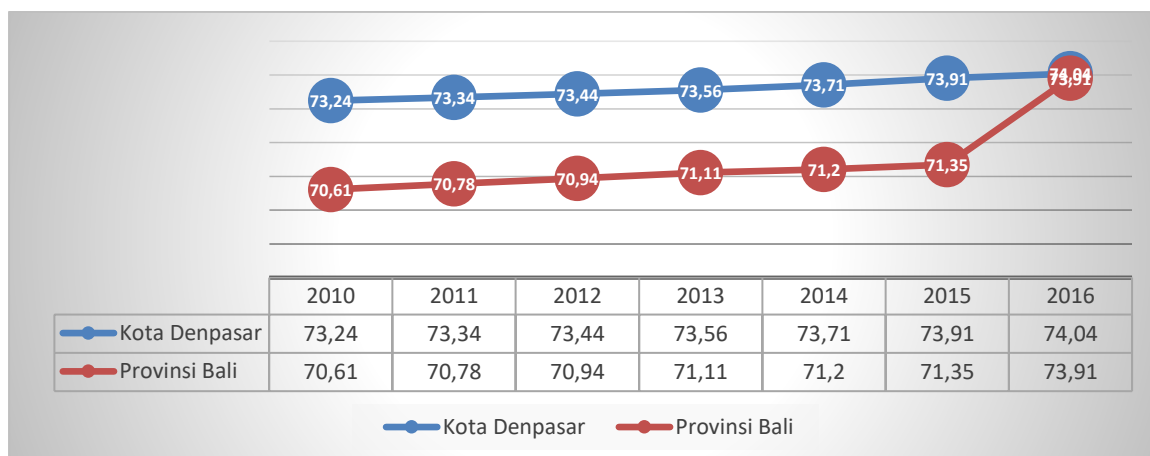


Usia harapan hidup di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015 yaitu pada tahun 2010 mencapai 73,24 dan pada tahun 2011 mencapai 73,34 tahun dan ditahun 2013 mencapai 73,56. Angka harapan hidup di tahun 2014 mencapai 73,71. Angka Harapan Hidup di tahun 2015 mencapai 73,91 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat meningkat. Upaya yang diperlukan adalah perbaikan sanitasi lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat dan pengobatan dengan cara medik secara langsung untuk memperpanjang usia hidup masyarakat. Selengkapnya disajikan pada tabel dan grafik peningkatan angka harapan hidup sebagai berikut:

Tabel. 2.34.
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar
dan Provinsi Bali Tahun 2010 - 2016

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	
	Kota Denpasar	Provinsi Bali
2010	73,24	70,61
2011	73,34	70,78
2012	73,44	70,94
2013	73,56	71,11
2014	73,71	71,20
2015	73,91	71,35
2016	74,04	73,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali



Gambar. 2.13 Grafik Peningkatan Angka Harapan Hidup

(3). Rumah Sakit Umum Wangaya

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan yang sehari - hari melakukan kontak dengan pasien. Oleh karena itu sebuah rumah sakit harus mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pasien sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi - tingginya. Karena kesehatan merupakan kebutuhan setiap orang, maka sarana pelayanan kesehatan adalah fasilitas yang wajib dimiliki setiap daerah. Jumlah penyedia jasa kesehatan disuatu daerah harus sebanding dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Melihat adanya kebutuhan ini, maka banyak penyedia pelayanan jasa kesehatan muncul. Mulai dari rumah sakit negeri, rumah sakit swasta, puskesmas, bahkan berbagai jenis pengobatan tradisional (alternatif).



Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang beralamat di Jalan Kartini No 133 Denpasar merupakan rumah sakit daerah milik Pemerintah Kota Denpasar. RSUD Wangaya berdiri sejak tahun 1921, dengan luas tanah 23,271 m², luas bangunan 12.063,372 m² dengan 200 tempat tidur. Mulai tahun 2003 menjadi rumah sakit swadana dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003. Sebagai satu - satunya rumah sakit tertua di Bali dan merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Denpasar, RSUD Wangaya harus selalu melakukan pembenahan, baik manajemen maupun pelayanan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi hal yang utama bagi sebuah rumah sakit sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit swasta lainnya. Pada tahun 1990 RSUD Wangaya ditetapkan menjadi rumah sakit tipe C, dan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 2001 RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi Unit Swadaya. Sejak tahun 2002 RSUD Wangaya telah terakreditasi untuk 12 standard pelayanan, dan pada tahun 2010 RSUD Wangaya Kota Denpasar telah lulus akreditasi untuk 16 standar pelayanan serta memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi 2012 dengan lulus tingkat paripurna serta dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 538/Menkes/SK/2003, RSUD Wangaya meningkat kelasnya menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/487/2015, Tanggal 8 Desember 2015 RSUD Wangaya sudah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Wangaya mulai mempersiapkan diri menuju Badan Layanan Umum (BLU). Pada tanggal 23 Juli 2008 dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 Tahun 2008, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi PPK-BLUD dengan status BLUD penuh. Perubahan status RSUD Wangaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan motifasi untuk memberikan pelayanan yang bermutu, profesional, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat yang merupakan tujuan RSUD Wangaya Kota Denpasar dalam rangka mendukung visi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit pilihan utama, inovatif, unggul dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis budaya kerja.

Dalam memberikan pelayanan yang bermutu, profesional serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat, dalam kegiatan rutin operasionalnya, RSUD Wangaya dibiayai dengan pendapatan rumah sakit, sedangkan kegiatan lainnya seperti belanja modal dan alat - alat kesehatan dibiayai dengan dana APBD II, APBD I dan APBN. Target utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan publik melalui program peningkatan pelayanan rumah sakit, dengan kegiatan :



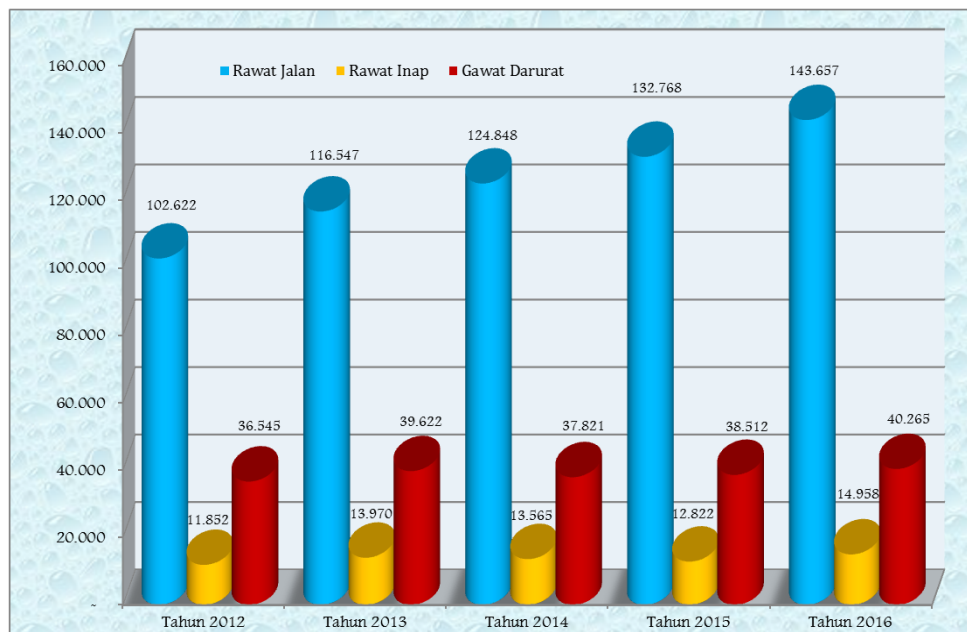
1. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Tabel. 2.35.

Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien

No	Jenis Pelayanan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rawat Jalan	102.622	116.547	124.848	132.768	143.657
2.	Rawat Inap	11.825	13.970	13.565	12.822	14.958
3.	Gawat Darurat	36.545	39.622	37.821	38.512	40.265
4.	BOR	77,41 %	78,91 %	80,70 %	79,44 %	90,05%

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar



Gambar. 2.14 Grafik Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien Dari Tahun 2012 sampai 2016

Berdasarkan tabel diatas terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Kenaikan yang signifikan terjadi di tahun 2015 ke 2016, sebagai akibat peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Wangaya Kota Denpasar semakin baik, hal ini didukung dengan hasil indek kepuasan masyarakat tahun 2016 mencapai 94,272 (termasuk kategori baik).

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan RSUD Wangaya Kota Denpasar adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
3. Terbatasnya dana/anggaran yang tersedia

Isu Strategis yang terjadi saat ini

1. Masih adanya keluhan terhadap pelayanan.
2. Respon time loket pendaftaran dan farmasi terlalu lama.
3. Belum lengkapnya peralatan medis.



4. Kekurangan sarana gedung pelayanan.
5. Belum lengkapnya tenaga Dokter Spesialis dan Sub Spesialis sesuai standar Rumah Sakit type B.
6. Tingginya subsidi (selisih tarif) yang di tanggung Rumah Sakit.
7. Adanya pasien terlantar yang sesuai ketentuan tidak bisa difasilitasi oleh BPJS dan berakhir menjadi beban rumah sakit (biaya)

Permasalahan yang dihadapi saat ini :

1. Dengan adanya program BPJS Kesehatan sistem pelayanan paket, sering terjadi selisih tarif rumah sakit dengan tarif paket INA - CBG's.
2. Di era BPJS Kesehatan sering terdapat pasien terlantar yang tidak bisa diklaim sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan. Rumah sakit selaku pelayanan publik melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Denpasar di bidang kesehatan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan amanah undang - undang. Disisi lain sebagai pasien terlantar tidak ada yang menjamin untuk menyelesaikan pembayarannya, sehingga menjadi beban rumah sakit. Hal ini tidak mungkin dibebankan secara terus menerus kepada pihak rumah sakit di tengah - tengah membludaknya pelaksanaan BPJS Kesehatan berbasis tarif paket dengan standar tertentu.

Solusi :

1. Agar dilakukan penyesuaian tarif BPJS Kesehatan minimal mendekati tarif rumah sakit.
2. Kiranya Dinas Sosial Kota Denpasar menganggarkan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien - pasien terlantar.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan RSUD Wangaya didalam pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit adalah :

1. Tingkat pemanfaatan sarana pelayanan
2. Mutu pelayanan
3. Tingkat efisiensi pelayanan

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2016

- I. Peningkatan sarana dan prasarana
 1. Pembangunan Gedung B
 2. Pengawasan Gedung B
 3. Penyusunan DED Gedung D (IGD)
 4. Renovasi WC Kamar Praja
 5. Pembuatan Ruang Keuangan
 6. Pemasangan Paving Depan IGD
 7. Pembuatan partisi dan penyimpanan linen bersih
 8. Pemasangan Vinil Selasar Timur Gedung C
 9. Penataan Ruangan dan Ruang Tunggu Apotek 24 jam
 10. Pekerjaan pasang got dan tiang bendera di bawah
 11. Pekerjaan kanopi dan reling di ruang jenazah
 12. Pembuatan Nurse Station Ruang Flaminggo
 13. Pembuatan Ruang Pemeriksaan Dahak



II. Peningkatan mutu pelayanan

1. Responsivitas partisipasi masyarakat terhadap pelayanan publik dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2016 mencapai 94,272 % (termasuk kategori baik) dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 3.600 eksemplar
2. Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tiap triwulan, dimana untuk Tahun 2016 capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 91,45 %

III. Prestasi RSUD Wangaya Tahun 2016 adalah :

1. RSUD Wangaya meraih The Best Champion Of Bali Wow Service Excellence Award Category : General Hospital (B class), pada tanggal 29 September 2016 dari Markplus berdasarkan hasil survey terhadap pelayanan publik secara umum pada seluruh instansi/perusahaan baik pemerintah maupun swasta di Indonesia.
2. RSUD Wangaya meraih Gold Champion Of Indonesia Wow Service Excellence Award Category : Hospital B Class Region : Bali & Kalimantan, pada tanggal 8 Desember 2016 dari Markplus berdasarkan hasil survey terhadap pelayanan publik secara umum pada seluruh instansi/perusahaan baik pemerintah maupun swasta di Indonesia.
3. RSUD Wangaya mendapat piagam penghargaan dari Walikota Denpasar sebagai juara III dalam lomba pengelolaan kearsipan kategori teladan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar dari tanggal 7 Januari s/d 23 Februari 2016 dalam rangka HUT ke 228 Kota Denpasar pada tanggal 24 Februari 2016.
4. RSUD Wangaya mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "A" berdasarkan hasil evaluasi terhadap 59 Kabupaten - Kota Role Model sesuai dengan KepMenPan Nomor 191 Tahun 2016 tentang Penetapan 59 Kabupaten/Kota sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Tanggal 2 Maret 2017.

2.1.3.3 Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

(4). Dinas Pekerjaan Umum

Pembangunan urusan pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor - sektor lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola secara efisien, akan menciptakan aksesibilitas dan kinerja sistem transportasi sehingga kegiatan perdagangan dan jasa akan berkembang dan memicu keunggulan daya saing perekonomian. Pada sisi lainnya tersedianya sarana prasarana perkotaan yang memadai, akan mampu minimalis terjadinya bencana serta dampaknya yang menghambat kemajuan perkembangan kota. Kesadaran masyarakat untuk ikut berperan baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana bidang ke PU-an khususnya dengan menumbuhkan ekonomi kerakyatan untuk mendukung Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif.



Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

A. Drainase dan Irigasi

Saluran pembuangan utama Kota Denpasar adalah sungai, yang penampung utama air hujan menuju pembuangan akhir yaitu pantai, sehingga adanya sungai sangat penting sebagai media yang membawa debit aliran. Ada beberapa sungai (tukad) yang mengalir di Kota Denpasar, tetapi dari semua tukad yang ada dapat dipilah 3 (tiga) buah sungai yang benar – benar berfungsi sebagai sungai, yaitu : Tukad Ayung, Tukad Mati, Tukad Badung. Sedangkan yang lainnya sebagian berupa saluran irigasi yang menjadi sungai akibat erosi kedalaman (vertikal) dan sebagian lagi alur rawa – rawa. Karakter tiga sungai pembuang utama saluran drainase Kota Denpasar dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.36.

Karakter tiga sungai pembuang utama saluran drainase Kota Denpasar

SISTEM	WILAYAH	PEMBUANG UTAMA	LUASAN DAS	PANJANG SUNGAI
Tukad Ayung	- Kabupaten Badung - Kabupaten Gianyar - Kabupaten Bangli	- Pantai Padanggalak	109.30 km ²	62.50 km
Tukad Badung	- Kabupaten Badung - Kota Denpasar	- Hutan Mangrove Denpasar Selatan	22.55m ²	17,15km
Tukad Mati	- Kabupaten Badung - Kota Denpasar	- Hutan Mangrove sebelah barat Tukad Badung	25.40 km ²	12,25 km

Sedangkan sungai – sungai yang berasal dari saluran irigasi dan drainase berubah menjadi sungai (tukad) antara lain :

- Sistem I (Sistem Tukad Badung) mengalir sekitar wilayah Sumerta Kaja, Sumerta, Tonja pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Oongan, Tukad Badung, Tukad Guming.
- Sistem II (Sistem Tukad Ayung) mengalir sekitar wilayah Penatih, Kesiman, Sebagian Sanur pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Abianbase, Tukad Ayung, Tukad Medih.
- Sistem III (Sistem Tukad Mati) mengalir sekitar wilayah Padangsambian, Ubung, Pemecutan, Wilayah Barat Tukad Badung, pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Mati, Tukad Teba, Pangkung Muding.
- Sistem IV (Sistem Niti Mandala Suwung) mengalir sekitar wilayah Niti Mandala, Panjer, Sidakarya, Suwung, Sanur, Sesetan, pembuangan utama sekitar wilayah Tukad Rangda, Tukad Punggawa, Tukad Loloan, Tukad Pekaseh.
- Sistem V (Sistem Pemogan) mengalir sekitar wilayah Sanglah, Pedungan, Pemogan pembuangan utama Saluran Juwet Sari, Saluran Pembuang Seksi I, II dan III.

Seperti telah diuraikan bahwa sungai-sungai tersebut diatas mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai saluran drainase dari saluran irigasi, dan bahkan ada yang berfungsi sebagai sumber air baku, obyek wisata dan lain-lain.



Sampai saat ini, sistem drainase di Kota Denpasar belum sepenuhnya dapat diatasi, mengingat tumbuhnya pemukiman dengan begitu pesat sehingga menumbuhkan daerah genangan yang semakin banyak. Selain genangan, saluran drainase dikiri-kanan jalan masih belum menyatu dalam sistem yang terpadu.

Tabel. 2.37.

Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2011 s/d 2016 Kota Denpasar

No	Jaringan irigasi	Panjang jaringan					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jaringan primer	13.439 m	13.439 m	13.439 m	13.439 m	11.850 m	11.850 m
2	Jaringan sekunder	13.626 m	13.626 m	13.626 m	13.626 m	4.039 m	11.850 m
3	Jaringan tersier	93.656 m	93.656 m	93.656 m	79.607 m	38.412 m	11.850 m
4	Luas lahan budidaya	3.687 ha	3.687 ha	2.967,37 ha	2.509 ha	539 ha	526 m

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Tabel. 2.38.

Sistem Drainase Kota Denpasar

SISTEM	WILAYAH	PEMBUANG UTAMA
SISTEM I (Sistem Tk.Badung)	- Sumerta Kaja - Sumerta - Tonja	- Tk.Oongan - Tk.Badung - Tk.Guming
SISTEM II (Sistem Tk.Ayung)	- Penatih - Kesiman - Sebagian Sanur	- Tk.Abianbase - Tk.Ayung - Tk.Medih
SISTEM III (Sistem Tk.Mati)	- Padangsambian - Ubung - Pemecutan - Wil.Barat Tk.Badung	- Tk.Mati - Tk.Teba - Pangkung Muding
SISTEM IV (Sistem Niti Mandala Suwung)	- Niti Mandala - Panjer - Sidakarya - Suwung - Sanur - Sasetan	- Tk.Rangda - Tk.Punggawa - Tk.Loloan - Tk.Pekaseh
SISTEM V (Sistem Pemogan)	- Sanglah - Pedungan - Pemogan	- Sal.Juwet Sari - Sal.Pembuang Seksi I, II dan III

Permasalahan Sistem Drainase di Kota Denpasar

1. Meningkatnya limpasan permukaan akibat adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian / kebun menjadi lahan non pertanian.
2. Sistem Saluran Drainase di Denpasar sebagian besar berkembang dari sistem saluran irigasi. Perbedaan sifat saluran drainase dan irigasi berpengaruh kepada penampang saluran drainase.
3. Penampang sungai / pembuang yang tidak mampu menampung debit sesuai dengan debit banjir rencana yang ada.



4. Kemiringan daerah pada beberapa titik sangat kecil sehingga menyulitkan pembuangan menuju pembuangan utama.
5. Pembuangan air dibagian selatan dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga tidak setiap saat pembuangan pada bagian hilir dapat lancar dilakukan.
6. Adanya bangunan melintang sungai yang berpotensi mengurangi kapasitas aliran sungai.
7. Berkembangnya kawasan permukiman baru sering tidak memperhatikan sistem drainase alami yang sudah ada.
8. Kapasitas saluran berkurang akibat dari sedimen dan sampah.
9. Alur saluran tidak jelas akibat gangguan alur yang sebelumnya pernah ada.
10. Kemiringan saluran yang kecil berakibat pada kecilnya kecepatan air yang mendorong peningkatan jumlah sedimen dan sampah yang mengurangi kapasitas saluran.

Tabel. 2.39.
Kondisi Existing

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
I	Bidang Pengairan			
	1. Pembangunan Sal. Drainase / Gorong-gorong	8.830,65 m'	12.208,65 m'	138,25
	2. Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	7.598,50 m'	7.598,50 m'	100
	3. Pengendalian Banjir	6 daerah titik genangan	6 daerah titik genangan	100
	4. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	32.203,00 m' 1 Lap	32.203,00 m' 1 Lap	100 100

Analisis & Kondisi genangan (Terlampir)

Tahun 2010 terdeteksi 26 titik rawan genangan dan banjir. Secara bertahap daerah - daerah rawan genangan dan banjir ini dituntaskan dengan jalan : Normalisasi alur sungai, perkuatan dinding, sodetan dan pengerukan sedimentasi. Pembangunan 4 jaring pengaman sampah automatic (Trash track) dan jaring manual. Secara bertahap daerah rawan genangan Kawasan Pura Demak, Kawasan sepanjang Tukad Teba, Kawasan Gunung Talang (Pangkung Muding), Kawasan Perum Monang Maning, Kawasan Renon Gang IX, Kawasan Jalan Tukad Pakerisan, Dewata dan Bedugul, Kawasan Jalan Waturenggong Panjer, Jalan Nagasari Laplap Penatih Dangin Puri, Warung Mina Peguyangan, Jalan Kenyeri, Lingkungan Jl.Batanghari, Lingkungan Kerta Dalem dan Lingkungan Kerta Bedulu, Lingkungan Jl. Pucuk Kesiman Kertalangu, Jalan Gunung Soputan, Lingkungan Jalan Subak Dalem, Lingkungan Jalan Pertulaka Penatih dapat diatasi.

Untuk meningkatkan jaringan irigasi dilakukan perbaikan terhadap bangunan air seperti bendung, bangunan pembagi perkutatan dan pengerukan saluran irigasi dari sedimentasi dan waledan.



Pengerjaan ini dilakukan secara sinergis dengan Dinas PU Prov, dan Pemerintah Pusat melalui Balai SDA dan PLP (Werdhapura).

Sampai dengan 2014 masih terdeteksi 12 daerah rawan banjir khususnya Kawasan Bumi Ayu Sanur, Pemogan Mitra 10, Jl. Danau Tempe, Jl. Teuku Umar, Jl. Gunung Payung, Jl. Tangkuban Perahu, Jl. Gunung Atena, Perum Pondok Purnawira, Jl. Sulatri, Jl. Kembang Matahari, Jl. A. Yani Utara dan Simpang Gatsu – Gatsu I - Gatsu II.

Program 2016 akan menyasar perbaikan saluran drainase sepanjang 2.735,70 m, perbaikan saluran irigasi sepanjang 345 m dan pengendalian banjir di 3 lokasi. Hal ini ditujukan untuk mengurangi genangan dan lancarnya saluran irigasi. Disamping itu pemeliharaan dan pembersihan saluran tetap dilaksanakan melalui program Kali Bersih dan Pengerukan Sedimentasi.

Pemecahan Masalah

1. Pengaturan tata guna lahan secara selektif dan menjaga kawasan hijau terbuka secara konsisten
2. Penataan / normalisasi saluran yang sebelumnya berfungsi sebagai saluran irigasi namun kini berfungsi ganda sebagai saluran irigasi dan saluran drainase
3. Normalisasi pembuang utama agar kapasitasnya bisa menampung debit banjir rencana
4. Pembangunan kawasan penampung banjir sementara / retarding bazin sebagai usaha mereduksi banjir di daerah hilir
5. Penataan bangunan yang melintang di pembuang utama yang berpotensi menghambat aliran air
6. Penataan kawasan pengembangan permukiman sehingga sistem drainase yang ada tidak mengganggu sistem drainase yang sudah ada
7. Pembersihan saluran drainase dari sedimen dan sampah secara berkala
8. Penataan alur saluran pada beberapa kawasan
9. Pembuatan sumur resapan pada masing – masing rumah untuk mengurangi / menekan besarnya limpasan permukaan.

B. Air Limbah dan Sanitasi

Sesuai data tahun 2012 sistem pembuangan air limbah di Kota Denpasar masih ada yang dilakukan secara individual, sebagian besar rumah penduduk di Kota Denpasar sudah dilengkapi dengan sarana sanitasi pembuangan air limbah seperti : Kecamatan Denpasar Barat sekitar 85 persen, Denpasar Utara 87 persen, Denpasar Timur sekitar 93 persen dan Denpasar Selatan sekitar 90 persen. Sedangkan sisanya masih menggunakan dan memanfaatkan sungai atau saluran umum untuk kegiatan bersama (BBAS = Buang Air Besar Sembarangan).

Limbah cair yang berasal dari rumah tangga (limbah domestik) masih dianggap tidak sebagai penyebab tercemarnya lingkungan padahal limbah domestik ternyata cukup potensial menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Kota Denpasar. Hal ini diindikasikan dari tercemarnya sungai di Kota Denpasar (Tukad Badung dan Tukad Mati) dan sumur – sumur penduduk oleh minyak dan lemak.

Guna mengatasi pencemaran air limbah ini, di Kota Denpasar telah dibangun jaringan perpipaan yang menampung air limbah melalui program DSDP (Denpasar Sewarage Development Program). Melalui sistem perpipaan dan IPAL terpusat. Demikian pula dengan



upaya peningkatan kesehatan lingkungan, di Kota Denpasar telah diperkenalkan sistem Sanitasi yang berbasis kepada masyarakat melalui program Sanimas (Sanitasi Oleh Masyarakat).

Sanitasi merupakan gerakan pembangunan yang mengkoordinasikan pembangunan secara terintegrasi antara sektor air bersih, air limbah, sampah dan drainase. Sampai saat ini pembangunan sektor sanitasi masih bersifat sektoral dan belum adanya integrasi dan koordinasi sehingga terkesan sanitasi belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Padahal sanitasi merupakan indikator penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

Denpasar sebagai sebuah kota metropolitan dihadapkan pada masalah sanitasi yang cukup pelik, oleh karenanya penanganan sanitasi kota perlu lebih diintensifkan melalui berbagai program pembangunan. Salah satu program sanitasi yang diperkenalkan oleh pusat adalah program ISSDP (Indonesia Sanitation Sector Development Program). Melalui program ini kondisi sanitasi kota dipetakan, kebijakan sanitasi dirumuskan, yang akhirnya strategi implementasi sanitasi kota disusun untuk dapat dilaksanakan secara terpadu. Sampai saat ini pemerintah Kota Denpasar sedang berproses dalam upaya implementasi strategi sanitasi kota, melalui keikutsertaan dalam program ISSDP 2.

Secara garis besar program Sanitasi di Kota Denpasar dilakukan melalui 2 (dua) sistem antara lain :

Sistem IPAL terpusat melalui program DSDP, kegiatan yang dilakukan dengan membangun Sambungan Rumah (SR) :

- a. Tahun 2011 sebesar : 230 SR
- b. Tahun 2012 sebesar : 701 SR
- c. Tahun 2013 sebesar : 700 SR
- d. Tahun 2014 sebesar : 609 SR
- e. Tahun 2016 sebesar : 478 SR

Sistem IPAL Komunal melalui program Sanimas, dengan menyasar kawasan Padat dan Komunal yang tidak terjangkau program DSDP, Kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Tahun 2010
IPAL Komunal Rabic Pro di Desa Pemecutan Kaja dengan jumlah SR 81 buah
2. Tahun 2011
IPAL Komunal Pasar Desa : Tembau, Sidakarya, Tegal Harum, Panjer dan Anggabaya
3. Tahun 2012
IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja (WASAP-D)
Tahap I : 3 buah IPAL dengan jumlah : 108 SR
Tahap II : 1 buah IPAL dengan jumlah : 28 SR
IPAL Komunal Pasar Desa : Ubung dan Binoh
IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja (DAK) sebanyak 2 (dua) IPAL dengan jumlah : 107 SR
4. Tahun 2013



IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja (DAK) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah 68 SR. IPAL Komunal Pasar Desa : Pemogan, Padangsambian, Penatih.

5. Tahun 2014

IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja (DAK) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah 55 SR. IPAL Komunal Pasar Desa : Batan Kendal, Penatih Dangri, Tonja.

6. Tahun 2016

IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja sebanyak 1 (satu) dengan jumlah 88 SR(Cadangan Rabic Pro)

Mulai Tahun 2016 Pemkot memprogramkan Pembangunan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 478 unit dengan sumber dana DAK 2016. Sesuai dengan kesepakatan (MOU) terhadap Pembangunan / Penanganan Air Limbah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, dimana Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas membangun Sambungan Rumah mulai sumber buangan sampai dengan HI (House In Let).

C. Penyehatan Lingkungan Permukiman

Pengelolaan Pembangunan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan difokuskan pada penataan jalan lingkungan, drainase lingkungan dan penataan lingkungan permukiman. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan layak huni yang sehat, bersih dan indah. Perkembangan jalan lingkungan meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh perkembangan jumlah penduduk, perkembangan tawaran yang memerlukan untuk tempat tinggal.

Tabel. 2.40.
Perkembangannya Jalan Lingkungan

JALAN LINGKUNGAN	2013	2014	2015	2016
Aspal	393.424	393.424	393.424	437.992
Paving	230.291	258.711	287.815	331.063
Tanah / Kapur	126.730	98.310	83.147	74.881
Beton	123.405	123.405	109.464	21.183

Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Jalan Lingkungan dengan perbaikan perkerasan, pemeliharaan dengan perbaikan terhadap Kawasan dengan Penataan secara terpadu dalam 1 kawasan mulai dari jalan dan saluran drainase sepanjang 1000 m'. Program 2016 difokuskan untuk meningkatkan jalan lingkungan sepanjang 8727 m', pemeliharaan jalan sepanjang 8.804,5 m' yang tersebar diseluruh wilayah Kota Denpasar.

Untuk Pengembangan wilayah baru diprogramkan Peningkatan Jalan Lingkungan LC sepanjang 2.416 meter. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan diprogramkan Aspal Swadaya, hal ini untuk menggugah masyarakat



berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat untuk berswadaya

Tabel. 2.41.
Perkembangannya Jalan Lingkungan Swadaya Masyarakat

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
JUMLAH ASPAL(DRUM)	1,216	1,445	1,006	1,500	1,000
KELOMPOK MASYARAKAT	41	44	30	31	19
PANJANG (KM)	15,386	18,208	14,095	21,139	11,728

Program 2016 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan Pengadaan Aspal untuk jalan Swadaya sebanyak 1000 (seribu) drum dan pada program 2016 untuk paving sebanyak 24,553 m².

Perencanaan jalan di Kota Denpasar

Perencanaan jalan disesuaikan dengan status Kota Denpasar sebagai kota inti Metrosarbagita. Dengan fungsi : Kota pusat pemerintahan, Perdagangan jasa, Pendidikan dan pelayanan dasar.

Denpasar sebagai kota yang tumbuh dari Desa menjadi Kota dikembangkan dengan konsep Catur Patha sebagai pusat kawasan, pusat-pusat pengembangan, Jalan lingkar (Ring Road Kota). Pembukaan jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, Perencanaan sinergitas dengan pengembangan Kota Metro Sarbagita dan jaringan drainase, Kota berwawasan budaya.

Permasalahan :

Pertumbuhan ekonomi penduduk dan pusat-pusat kegiatan, Harga lahan yang tinggi. Pelebaran jalan terbentur tempat-tempat ibadah RT yang memerlukan biaya tinggi untuk pemindahannya.

Solusi :

Pengembangan jalan baru memakai sistem Land Consolidation (LC). Peningkatan dan pemeliharaan jalan sesuai fungsi, status, dan luas jalan. Program disesuaikan dengan kondisi dan perencanaan makro.

Data jaringan jalan di Kota Denpasar Tahun 2016

Total Panjang jalan di Kota Denpasar adalah 576.394 Km yang terdiri dari :

- Jalan Nasional sepanjang 46.570 Km
- Jalan Propinsi sepanjang 43.740 Km
- Jalan Kota sepanjang 486.084 Km



Penanganan Jalan di wilayah Kota Denpasar dilaksanakan berdasarkan status jalan :

Jalan dengan status Jalan Nasional ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melalui dana APBN. Jalan dengan status Jalan Propinsi ditangani Dinas PU Prop. Bali melalui dana APBD I. Jalan dengan status Jalan Kota untuk pembangunan dan pemeliharaan ditangani Pemda melalui APBD Kota Denpasar.

Berdasarkan jenis perkerasannya Jalan Kota Tahun 2016 sepanjang 486.084 Km terdiri dari : Aspal Beton sepanjang 288.691 Km, Lapis Penetrasi sepanjang 164.330 Km, Limestone/ tanah 29.905 Km, Paving Blok sepanjang 3.158KM

Kondisi Jalan Kota di Kota Denpasar Tahun 2016 adalah :

Kondisi baik sepanjang 281.834 KM', Kondisi Sedang sepanjang 135.939 KM', Kondisi Rusak sepanjang 68.312 KM'

Kerusakan jalan di Kota Denpasar ditangani melalui beberapa tahapan :

- Pemeliharaan Rutin dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas .Perawatan dan perbaikan dilakukan pada tahap kerusakan masih ringan dan setempat. Hal ini dilakukan dengan biaya relatif rendah dan cara memperbaikinya relatif mudah/ringan.
- Pemeliharaan Berkala (untuk penanganan jalan dengan kondisi ruas jalan rusak sedang dengan melakukan peremajaan bahan perkerasan maupun bahan lainnya serta melakukan perataan kembali terhadap permukaan jalan)
- Peningkatan dan Pembangunan (untuk penanganan jalan yang kondisi rusak berat, dan perlu segera ditingkatkan kondisinya).

D. Sarana dan Prasarana Jalan

Permasalahan transportasi darat di Kota Denpasar dipengaruhi oleh terbatasnya jaringan existing dan kondisi kemantapan jalan dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan sepeda motor. Sistem jaringan kota terkonsentrasi pada koridor timur-selatan-barat dan koridor utara-timur belum tersedia aksesibilitas yang seimbang, ketidakseimbangan utara-timur dan utara-selatan mengakibatkan volume lalu lintas menjadi tinggi di kawasan kota yang menimbulkan efisiensi transportasi kota.

Jalan merupakan sarana yang sangat penting peranannya dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu daerah secara otomatis akan menuntut pembangunan prasarana jalan untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan daerah antara khususnya melalui darat.

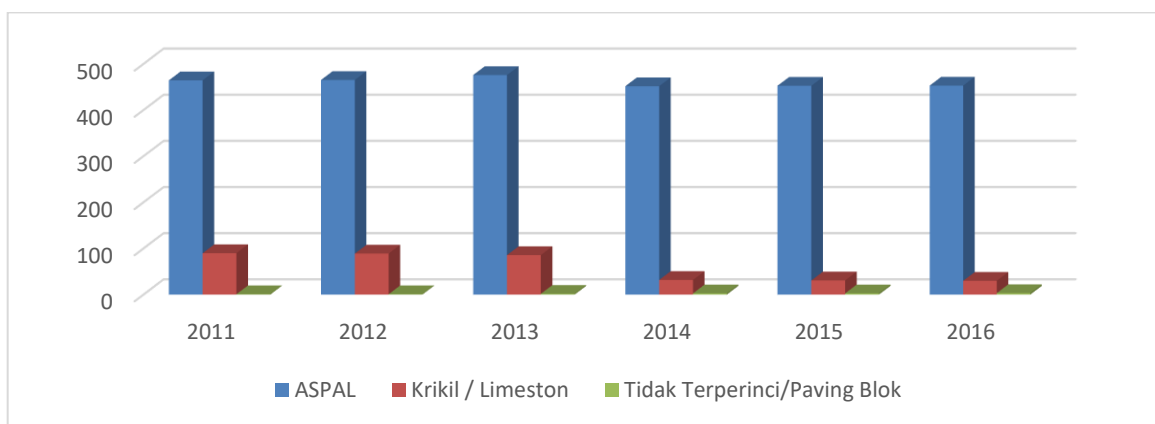


Tabel. 2.42.

Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2012 s/d 2016

Keadaan	Panjang Jalan (km)				
	2012	2013	2014	2015	2016
JENIS PERMUKAAN					
Aspal	465,239	475,828	451,676	452,637	453.021
Kerikil/limestone	88,901	85,607	31,711	30,750	29.905
Tanah/Kapur	-	-	-	-	-
Tidak diperinci/Paving blok	0,936	1,666	2,697	2,697	3.158
Jumlah	555,076	563,101	486,084	486,084	486.084

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar



Gambar. 2.15 Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2011 s/d 2016

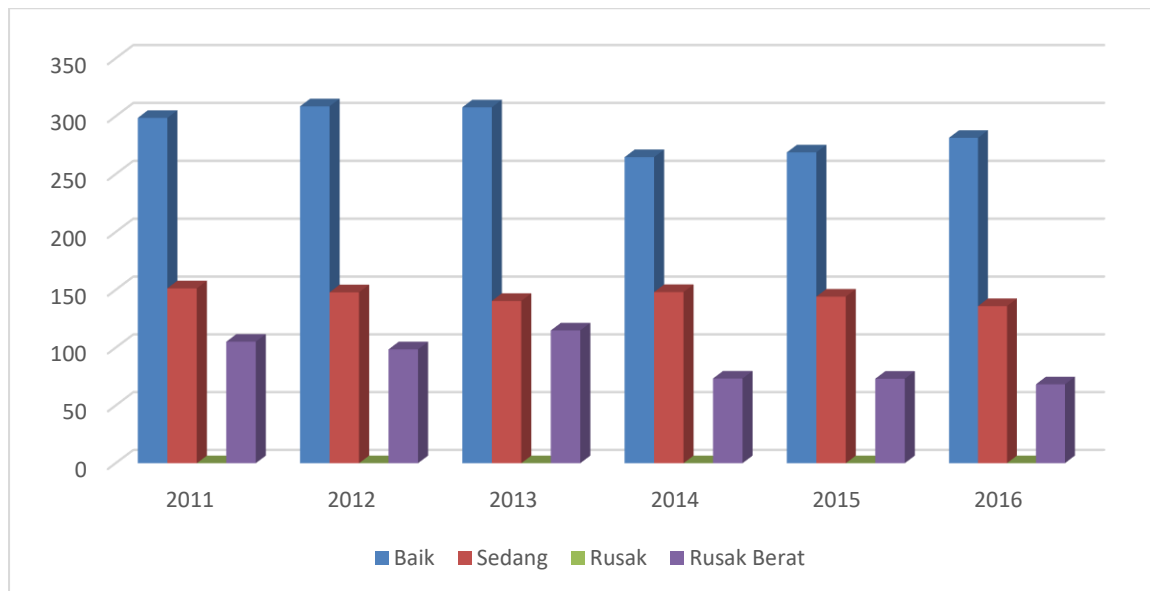
Tabel. 2.43.

Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2012 s/d 2016

Kondisi Jalan	2012	2013	2014	2015	2016
Baik	308,587	307,693	264,672	268,789	281.834
Sedang	147,901	140,448	148,107	144,177	135.939
Rusak	-	-	-	-	-
Rusak Berat	98,588	114,960	73,306	73,119	68.312
Jumlah	555,076	563,101	486,084	486,084	486.085

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar





Gambar. 2.16 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 s/d 2016

Tabel. 2.44.

Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2016

No	Status Jembatan	Satuan	Kondisi				
			Panjang	Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat
1	Jembatan Negara	M'	549,70	549,70	-	-	-
2	Jembatan Provinsi	M'	230,20	230,20	-	-	-
3	Jembatan Kab/Kota	M'	1.089,84	1.000,10	4,70	85,04	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

E. Air Bersih

Pesatnya perkembangan penduduk dan perkembangan pariwisata di wilayah Denpasar dan sekitarnya sehingga kebutuhan air baku semakin meningkat baik untuk kebutuhan air bersih domestik maupun non domestik. Pengadaan air bersih bagi penduduk Kota Denpasar dikelola oleh PDAM, namun demikian belum semua penduduk dapat dilayani, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi maupun distribusinya. Bagi penduduk yang belum mendapat air bersih dari PDAM diperoleh dengan membuat sumur gali atau sumur dangkal, terbatasnya akses untuk memiliki perumahan telah menyebabkan timbulnya permukiman-permukiman kumuh Kota Denpasar yang memiliki keterbatasan terhadap fasilitas-fasilitas untuk menunjang peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

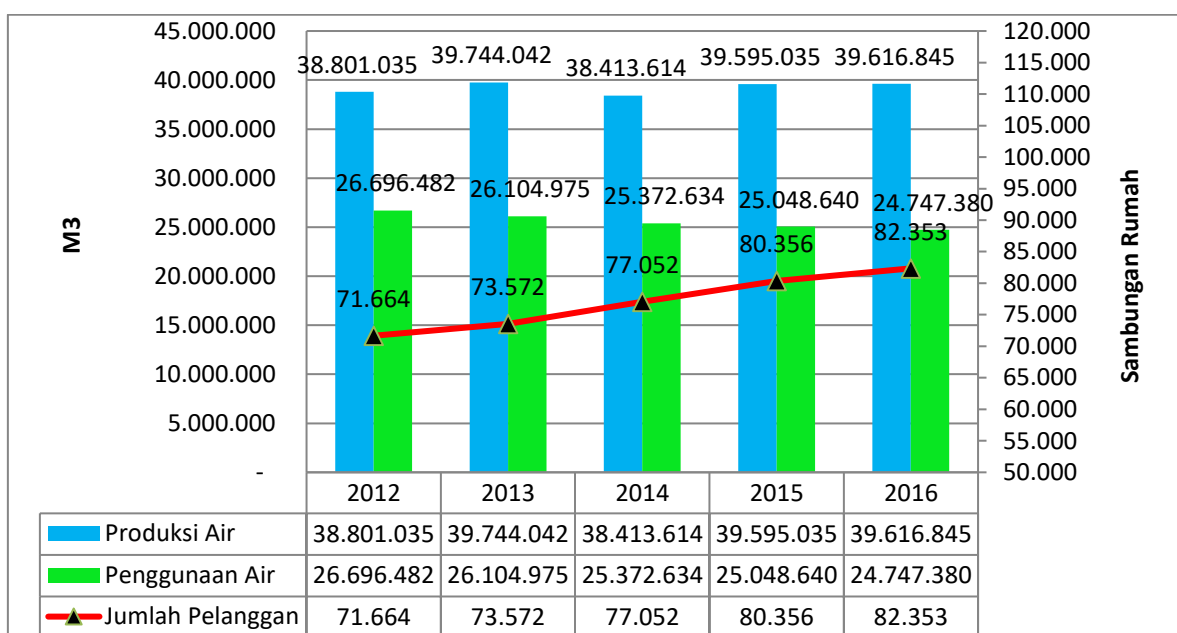
Untuk memperoleh gambaran tentang jumlah pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya dari tahun 2012 sampai 2016 dapat dilihat pada tabel 2.44



Tabel. 2.45.
Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya

No	Uraian	Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
1	Jumlah Pelanggan	71.664 sambungan		73.572 sambungan		77.052 sambungan		80.356 sambungan		82.353 sambungan	
2	Produksi Air	38.801.035 m ³	1.247,46 l/d	39.744.042 m ³	1.277,78 l/d	38.413.614 m ³	1.235,01 l/d	39.595.035 m ³	1.272,99 l/d	39.616.845 m ³	1.273,69 l/d
3	Penggunaan Air	26.696.482 m ³	858,30 l/d	26.104.975 m ³	839,28 l/d	25.372.634 m ³	815,74 l/d	25.048.640 m ³	805,32 l/d	24.747.380 m ³	795,63 l/d
	-Domestik	24.299.251 m ³	781,23 l/d	23.836.720 m ³	766,36 l/d	23.093.808 m ³	742,47 l/d	22.901.245 m ³	736,28 l/d	22.792.112 m ³	732,77 l/d
	-Non Domestik	2.397.231 m ³	77,07 l/d	2.268.255 m ³	72,92 l/d	2.278.826 m ³	73,26 l/d	2.147.395 m ³	69,04 l/d	1.955.268 m ³	62,86 l/d

Sumber : PDAM Kota Denpasar



Gambar. 2.17
Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya

Kendala yang dihadapi selama ini adalah :

1. Keterbatasan sumber air baku, pelayanan tidak optimal
2. Cakupan pelayanan masih rendah, target MDG tidak tercapai
3. Daftar tunggu masih banyak
4. Potensi penurunan pendapatan, masyarakat masih banyak memanfaatkan air bawah tanah yang berdampak pada lingkungan
5. Tingkat kehilangan air masih berfluktuasi dan di atas 20%
6. Suplai dari pembelian air melalui kerjasama regional SARBAGITA (IPA PETANU DAN IPA PENET) belum optimal\
7. Tingginya angka pencabutan water meter (Beralih menggunakan air bawah tanah (ABT))



(5). Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanggulangan bencana merupakan salah satu dari pembangunan Nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Prinsip dasar manajemen bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi kesiapan, tanggap darurat dan pemulihan keterkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat dan setelah bencana. Bencana yang terjadi selama ini datangnya tidak dapat kita prediksi sehingga memerlukan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi apabila terjadi dengan berupaya meningkatkan kemampuan, baik itu personil/petugas maupun sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara penanggulangan bencana, sesuai dengan pasal 5 undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Amanat dari Undang-Undang tersebut diatas, pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Penanggulangan Bencana dengan tanggungjawab dan kewenangannya antara lain mengurangi resiko bencana, memberikan perlindungan dari dampak bencana, menetapkan kebijakan dan merumuskan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.

Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, menjadikan Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian dan sebagainya. Jumlah penduduk yang padat dalam dimensi positif dapat menjadi sumber tenaga kerja potensial bagi pembangunan, disisi lain dapat menjadi masalah bagi pembangunan itu sendiri. Bencana dapat timbul dimana saja kapan saja dan dapat menimpa siapa saja, sebagaimana diketahui bencana itu bersumber dari alam, manusia atau kombinasi keduanya dan bencana dapat juga timbul sebagai akibat dampak sosial. Bencana yang selama ini sering terjadi kalau diklasifikasikan berdasarkan data antara lain : kebakaran gedung dan pemukiman, banjir sebagai akibat curah hujan yang tinggi, angin puting beliung yang berdampak pada pohon tumbang, tanah longsor, gempa bumi dan bencana sosial lainnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar memiliki 4 Pos Penanggulangan Bencana yaitu Pos Induk, Pos Juanda, Pos Cokro, Pos Mahendradata dan 5 Pos Balawista yang berlokasi di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Pos Lemayuer, Pantai Segara Ayu Serangan, dan didukung oleh Pusdalops Bencana (Call Centre), Publik Safe Community (PSC) dan Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja BPBD Kota Denpasar

Dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 tercatat bencana alam dan non bencana alam beserta kerugiannya sebagai berikut : 164 kejadian di Tahun 2011 dengan kerugian Rp.24.017.311.000, 216 kejadian Tahun 2012 dengan kerugian Rp. 16.151.436.000, 151 kejadian Tahun 2013 dengan total kerugian Rp.11.541.500.000, 168 kejadian Tahun 2014 dengan total kerugian Rp. 24.253.417.000, dan 186 kejadian Tahun 2015 dengan total kerugian Rp. 5.506.435.500 dan Tahun 2016 total kejadian 112 dengan total kerugian Rp. 22.178.206.000.



Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain :

1. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bencana
2. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana
3. Belum optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana di tingkat instansi terkait, Kecamatan maupun desa/kelurahan
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
5. Kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi resiko bencana
6. Aspek sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana masih kurang memadai.
7. Perlu adanya penambahan Pos Penanggulangan Bencana di wilayah Denpasar Timur.

Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan solusi permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain :

1. Melaksanakan program kegiatan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
2. Merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif berupa pengurangan resiko bencana
3. Membentuk tim-tim siaga bencana dari tingkat instansi terkait, tingkat kecamatan maupun Desa/Kelurahan
4. Menambah jumlah relawan bencana
5. Merumuskan program-program pembangunan melalui kegiatan pencegahan pengurangan resiko bencana
6. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui program kegiatan pelatihan, sosialisasi penanggulangan bencana.
7. Membentuk Desa/Kelurahan tangguh bencana

(6). Dinas Tata Ruang Dan Perumahan

Pemanfaatan ruang untuk perumahan dan permukiman di Kota Denpasar meliputi luasan 5.904 ha atau 46,21.% dari luas wilayah Kota Denpasar. Dari 43 wilayah Desa/Kelurahan, permukiman semuanya berawal dari kelompok-kelompok perumahan tradisional. Pada kawasan pusat Kota dan beberapa kelompok kawasan permukiman, kepadatan permukiman kelihatan lebih padat, namun di beberapa tempat terdapat kelompok permukiman kepadatan sedang dan rendah. Kepadatan permukiman yang agak rendah terlihat pada kawasan-kawasan yang masih memiliki persawahan yaitu : pada koridor kawasan Peguyangan Kaja – Penatih, Kawasan Kesiman Kertalangu dan Petilan, Kawasan Renon – Sanur Kauh, Kawasan Pemogan – Pedungan, dan Kawasan Pemecutan Kelod, dan sekitar Padang Sambian sebelah selatan, namun di beberapa blok terdapat kelompok-kelompok permukiman baru dengan kepadatan tinggi.



Kepadatan bangunan pada lingkungan perumahan dan permukiman juga bervariasi yaitu:

- a. Permukiman dengan kepadatan bangunan rendah dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah ke besar, Kawasan LC, atau permukiman tradisional yang masih asli)
- b. Permukiman dengan kepadatan bangunan sedang dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah, dan permukiman tradisional kapling kecil)
- c. Permukiman dengan kepadatan bangunan tinggi dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling kecil, dan permukiman tradisional kapling kecil)
- d. Permukiman kepadatan tinggi dan tidak teratur (pada kawasan permukiman yang berada pada gang-gang sempit, lahan sewa, dan beberapa permukiman kumuh).
- e. Di dalam kawasan perumahan, telah terdapat berbagai fasilitas penunjang perumahan seperti warung sampai minimarket, sekolah dasar maupun jasa-sasa penunjang lainnya.

Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota, tingginya pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh. Permasalahan perbatasan yang berpotensi menimbulkan konflik perlu diantisipasi dengan penataan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) atau Peraturan Zonasi (PZ) Kota Denpasar diprioritaskan sebagai bahan dasar penerbitan perijinan pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang dilaksanakan dalam rangka menata fungsi-fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi-fungsi bangunan yang diwadahnya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang terkait dengan interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan pola ruang dan struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penataan ruang mutlak diperlukan mengingat penataan ruang mempunyai tujuan yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan pada umumnya, yang secara garis besar terdiri dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, kestabilan yang tangguh dan dinamis, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat dibudidayakan serta tercapainya tata ruang yang berkualitas bagi manusia.

Dengan demikian, penataan ruang merupakan perangkat untuk mengupayakan terjadinya rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama udara, daratan dan air yang terbatas jumlahnya dengan seefektif dan seefisien mungkin, agar menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata.



A. Pemanfaatan Ruang Daratan

Tabel. 2.46.

Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar

NO	FUNGSI RUANG	KECAMATAN (Ha)				DENPASAR (Ha)	% LUAS
		Dps Utara	Dps Timur	Dps Barat	Dps Selatan		
I	KAWASAN LINDUNG						
1	Tahura Ngurah Rai	-	-	-	588.99	588.99	4.61
2	Sempadan Pantai	-	16.00	-	152.50	168.50	1.32
3	Sempadan Sungai	46.11	64.21	45.87	52.34	208.53	1.63
4	RTHK Hutan Kota	2.47	9.51	7.13	25.96	45.08	0.35
	SUB TOTAL I	48.57	89.72	53.00	819.79	1,011.09	7.91
II	KAWASAN BUDIDAYA						
1	Permukiman	1,872.10	850.19	1,456.12	1,726.29	5,904.69	46.21
2	Perdagangan dan Jasa	355.68	208.90	525.86	615.88	1,706.32	13.35
3	Perkantoran Pemerintahan	40.85	92.02	19.38	17.82	170.07	1.33
4	Kawasan Efektif Pariwisata	-	47.16	-	683.70	730.86	5.72
5	Perindustrian dan Pergudangan	-	-	-	32.50	32.50	0.25
6	Fasilitas Pendidikan	18.28	20.26	15.42	23.61	77.57	0.61
7	Fasilitas Kesehatan	8.03	3.30	28.30	10.20	49.83	0.39
8	Pertahanan dan Keamanan	2.65	7.30	4.70	29.82	44.47	0.35
9	Fasilitas Peribadatan	11.10	17.90	9.90	12.19	51.09	0.40
10	Fas.Rekreasi dan Olah Raga	54.05	66.45	40.26	112.71	273.47	2.14
11	Kaw. Bddy T. Pangan (sawah)	473.72	610.28	24.28	455.24	1,563.52	12.24
12	Kuburan dan Setra	3.80	6.40	11.00	14.20	35.40	0.28
13	TPA Suwung	-	-	-	10.00	10.00	0.08
14	IPAL Suwung	-	-	-	19.57	19.57	0.15
15	Estuary Dam	-	-	-	33.03	33.03	0.26
16	Jaringan Jalan	218.61	234.12	222.26	328.87	1,003.86	7.86
17	Pelabuhan	-	-	-	52.00	52.00	0.41
18	Terminal	4.55	-	2.52	1.58	8.66	0.07
	SUB TOTAL II	3,063.42	2,164.28	2,360.00	4,179.21	11,766.91	92.09
III	TOTAL I + II	3,112.00	2,254.00	2,413.00	4,999.00	12,778.00	100.00
IV	RUANG TERBUKA (%)	6.29	7.88	2.77	14.30	31.23	
V	RUANG TERBANGUN (%)	93.71	92.12	97.23	85.70	68.77	

Sumber : Lampiran XV Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar

Kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan ruang antar kabupaten/kota yang tidak sama, merupakan suatu ancaman sebab perkembangan fisik di daerah hinterland tersebut sering tidak sama dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Ancaman lainnya adalah meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas kehidupan masyarakat dengan sumber daya lahan yang terbatas, yang sudah barang tentu memerlukan ruang untuk bermukim. Hal ini mendorong timbulnya kawasan pemukiman padat dan juga percepatan pembangunan sehingga mengakibatkan terjadinya alih fungsi penggunaan lahan di Kota Denpasar.



Tabel. 2.47.
Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private
Per-Kecamatan Di Kota Denpasar

NO	FUNGSI RUANG	KECAMATAN (Ha)				DENPASAR (Ha)	% LUAS
		Den-Ut	Den-Tim	Den-Bar	Den-Sel		
I	RTHK PUBLIK						
1	Tahura Ngurah Rai	-	-	-	588,99	588,99	4,61
2	Sempadan Pantai	-	16,00	-	152,50	168,50	1,32
3	Sempadan Sungai	46,11	64,21	45,87	52,34	208,53	1,63
4	RTHK Hutan Kota	2,47	9,51	7,13	25,96	45,08	0,35
5	Fas. rekreasi dan Olah Raga (90%)	48,65	59,81	36,23	101,44	246,12	1,93
6	Kuburan dan Setra	3,80	6,40	11,00	14,20	35,40	0,28
7	RTHK Pertanian (sawah Ekowisata)	236,86	305,14	12,14	227,62	781,76	6,12
8	Perkantoran Pemerintahan (20%)	8,17	18,40	3,88	3,56	34,01	0,27
9	Fasilitas Pendidikan (10%)	1,83	2,03	1,54	2,36	7,76	0,06
10	Fasilitas Kesehatan (10%)	0,80	0,33	2,83	1,02	4,98	0,04
11	Fasilitas Peribadatan (20%)	2,22	3,58	1,98	2,44	10,22	0,08
12	Estuary Dam (10%)	-	-	-	3,30	3,30	0,03
13	Jaringan Jalan (20%)	43,72	46,82	44,45	65,77	200,77	1,57
14	Pelabuhan (10%)	-	-	-	5,20	5,20	0,04
15	Terminal (10%)	0,45	-	0,25	0,16	0,87	0,01
	TOTAL RTHK PUBLIK	395,08	532,23	167,31	1.246,87	2.341,48	18,32
II	RTHK PRIVATE						
1	RTHK Pertanian (sawah murni)	236,86	305,14	12,14	227,62	781,76	6,12
2	Permukiman (20%)	374,42	170,04	291,22	345,26	1.180,94	9,24
3	Perdagangan dan Jasa (10%)	35,57	20,89	52,59	61,59	170,63	1,34
4	Kawasan Efektif Pariwisata (10%)	-	9,43	-	136,74	146,17	1,14
5	Perindustrian dan Pergudangan (10%)	-	-	-	3,25	3,25	0,03
6	Pertahanan dan Keamanan (20%)	0,53	1,46	0,94	5,96	8,89	0,07
7	TPA Suwung (10%)	-	-	-	1,00	1,00	0,01
8	IPAL Suwung (10%)	-	-	-	1,96	1,96	0,02
	TOTAL RTHK PRIVATE	647,38	506,96	356,89	783,38	2.294,60	17,96
III	TOTAL RTHK	1.042,45	1.039,19	524,20	2.030,25	4.636,09	
IV	LUAS WILAYAH (HA)	3.112,00	2.254,00	2.413,00	4.999,00	12.778,00	
V	% RTHK	33,50	46,10	21,72	40,61	36,28	

Sumber : Lampiran XVII Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar

B. Pemanfaatan Ruang Kelautan

Secara umum ruang lautan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan transportasi, aktivitas pariwisata, sektor perikanan dan penggunaan lainnya seperti habitat/konservasi flora dan fauna, pertahanan dan keamanan serta penelitian.

Penggunaan ruang lautan Kota Denpasar untuk kepentingan transportasi dibedakan atas prasarana pelabuhan dan penggunaan bagi jalur-jalur lintasan perhubungan laut, baik jalur angkutan laut tradisional maupun jalur angkutan kapal laut. Kota Denpasar memiliki satu



prasarana pelabuhan laut yang beroperasi secara aktif dan permanen, yaitu Pelabuhan Benoa. Sedangkan untuk penyeberangan ke Pulau Nusa Penida, sementara ini masyarakat pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut memanfaatkan Pantai Sanur sebagai dermaga yang beroperasi dalam skala yang lebih kecil.

Pesatnya pembangunan dan berbagai aktifitas di sepanjang pesisir dan lautan telah menimbulkan berbagai tekanan-tekanan terhadap lingkungan dan menjadi isu masalah lingkungan yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Denpasar antara lain kerusakan habitat (terumbu karang, mangrove dan padang lamun) dan kerusakan fisik pantai oleh abrasi.

Hutan mangrove yang sebagian besar terletak di kawasan Pulau Serangan, Teluk Benoa dan Sekitarnya mengalami kerusakan akibat reklamasi Pulau Serangan. Faktor penyebab lainnya adalah faktor pengendapan pasir/ lumpur yang tinggi dengan adanya perubahan pola aliran air seperti di sebelah barat jalan Pelabuhan Benoa dan muara Tukad Tegeh.

C. Pemanfaatan Ruang Udara

Pemanfaatan ruang udara saat ini di Kota Denpasar antara lain untuk: penerbangan, layang-layang, para sailing, cerobong asap industri, tower dan frekwensi komunikasi, tower Saluran Udara Tegangan Tinggi untuk jaringan listrik, dan ruang untuk bangunan tinggi. Untuk manuver pengudaraan dan pendaratan penerbangan daerah bagian selatan Kota Denpasar terkena batas ketinggian bangunan dan ketinggian aktivitas lainnya sesuai dengan sudut pendaratan dan pengudaraan. Tower komunikasi baik untuk hubungan telepon, televisi cenderung bertambah semarak sehingga menimbulkan “kekumuhan” ruang udara, oleh karena itu perlu dibatasi jumlah dan lokasi pembangunannya dikendalikan seupaya tidak membahayakan jiwa dan barang.

Pengelolaan tata guna udara mencakup penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang udara di wilayah Kota yang berwujud konsolidasi pemanfaatan ruang udara berupa pengaturan ruang udara untuk kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan fungsional di wilayah kota sampai dengan penetapan zonasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang udara diantaranya :

- 1) Struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada radius daerah penerbangan untuk mengikuti aturan yang berlaku.
- 2) Ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara diatas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter.
- 3) Lokasi bangunan menara telekomunikasi dan atau pemancar radio televisi dan antena harus dibangun pada kawasan budi daya memberi rasa aman dan keselamatan lingkungan.
- 4) Pembuangan hasil proses kegiatan ke ruang udara harus dijamin tidak menimbulkan pencemaran udara
- 5) Pengaturan kawasan untuk kegiatan masyarakat yang menggunakan ruang udara seperti lomba layang-layang pada kawasan di luar radius keselamatan penerbangan, serta jalur penerbangan helikopter wisata lainnya



D. Perumahan dan Fasilitas Umum

Perkembangan penduduk di Kota Denpasar tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, yang berdampak akan kebutuhan perumahan penduduk beserta infrastruktur, sarana dan prasarana yang semakin meningkat pula. Kebutuhan ruang-ruang perumahan di Kota Denpasar semakin terbatas, terkait dengan ketersediaan lahan dan daya tampung wilayah yang telah melampaui batas pemanfaatan ruang yang ada. Disamping hal tersebut diatas persaingan akan kesempatan kerja juga semakin ketat, sehingga berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat .

Keberadaan Kota Denpasar yang menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai daerah di sekitarnya menyebabkan timbulnya permukiman/perumahan kumuh di berbagai kawasan. Berdasarkan SK Walikota Denpasar Nomor : 188.45/1450/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar diperoleh data keberadaan kawasan kumuh di Kota Denpasar di 4 Kecamatan sebanyak 36 kawasan kumuh. Untuk mengentaskan kawasan perumahan kumuh perlu disusun program perbaikan/penataan kawasan kumuh secara bertahap dan dialokasikan APBD kota ataupun diusulkan kepada APBD Propinsi dan APBN setiap tahun agar dapat dituntaskan segera.

Untuk rumah tidak layak bagi warga yang sudah terdaftar sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar mulai tahun 2011 sudah melakukan / memberikan bantuan perbaikan RTM dengan rincian sebagai berikut:

1. TA 2011 induk jumlah bantuan RTM	= 80 unit
2. TA 2011 Perubahan jumlah bantuan RTM	= 26 unit
3. TA 2012 Induk jumlah bantuan RTM	= 28 unit
4. TA 2012 Perubahan jumlah bantuan RTM	= 28 unit
5. TA 2013 Induk jumlah bantuan RTM	= 80 unit
6. TA 2013 Perubahan jumlah bantuan RTM	= 27 unit
7. TA 2014 Perubahan jumlah bantuan RTM	= 39unit
8. TA 2015 Perubahan jumlah bantuan RTM	= 83 unit
9. TA 2016 Induk jumlah bantuan RTM	= 21unit

Bantuan perbaikan rumah RTM tetap diusulkan dapat berlanjut sampai tuntas, fasilitas umum perumahan sejak Tahun 2008 penyelenggaraanya di koordinir oleh Dinas Perijinan Fasilitas umum dikelola bersama fasilitas sosial sekarang dinamakan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Dinas Tata Ruang dan perumahan, Kota Denpasar turut dalam unsur dalam Tim PSU tersebut.

Peruntukan PSU antara lainnya untuk jalan beserta utilitasnya, taman, tempat bermain, Balai Banjar dan Pos jaga. Diharapkan pengarahannya dan pemanfaatan fasilitas umum perumahan dapat diselenggarakan secara optimal sesuai peruntukannya pada masing-masing kawasan sehingga manfaat PSU tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat terutama warga di kawasan tersebut.



2.1.3.4 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

(7). Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Upaya kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : Aspek wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang harus senantiasa menjiwai pola pandang sikap, penghayatan dan perilaku seluruh warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek politik, yaitu substansi kebijakan politik dalam negeri diarahkan untuk memperkokoh keberadaan NKRI, dengan mengembangkan system praktik nasional yang demokratis, berkedaulatan rakyat, terbuka serta diarahkan guna membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa Indonesia yang maju bersatu, demokratis, adil dan makmur. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan perilaku berdemokrasi. Berdasarkan data Profil Perkembangan Kota Denpasar diketahui jumlah penduduk 833.900 jiwa tahun 2014, sedangkan yang terdaftar dalam DPH (daftar pemilih) sebanyak 407.476 jiwa sehingga ada selisih 426.425 jiwa. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu unsur membangun mental bangsa yang berlandaskan Pancasila. Kota Denpasar sebagai daerah yang sangat terbuka dari berbagai interaksi individu, kelompok, budaya, agama dan berbagai kepentingan. Kondisi diatas pada hakekatnya mengandung berbagai perbedaan yang menimbulkan kerawanan sosial maupun politik yang mengarah pada konflik social di masyarakat.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi Kota Denpasar dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan politik antara lain :

1. Masih perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan meliputi : peningkatan deteksi dini dan pembinaan pada organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk meminimalkan konflik.
2. Masih perlunya pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi : peningkatan kesadaran bela Negara, peningkatan koordinasiforum pembauran kebangsaan, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa, sosialisasi wawasan kebangsaan, bintek peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama, bintek peningkatan nilai luhur budaya bangsa.
3. Masih perlunya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, seperti : seminar peningkatan wawasan kebangsaan, fasilitas terhadap pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya, seminar peningkatan ketahanan kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan.
4. Masih perlunya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) meliputi : penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, penyuluhan berkembangnya praktik prostitusi, penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur.
5. Masih perlunya pendidikan politik masyarakat, meliputi : verifikasi bantuan keuangan parpol. Pendidikan politik pemilih pemula, pemberdayaan kelembagaan parpol, koordinasi forum-forum diskusi politik, pendidikan politik kepada organisasi massa.



(8). Satuan Polisi Pamong Praja

Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak Kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan Pemerintah Kota melalui Polisi Pamong Praja untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap Peraturan Daerah serta dalam penyediaan perangkat hukum yang diperlukan. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indikator prosentase penertiban terhadap pelanggaran Perda.

Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksud untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan daerah serta dalam penyediaan perangkat umum yang diperlukan. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indikator prosentase penertiban terhadap pelanggaran Perda.

Jumlah pelanggaran dan penindakan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Kota Denpasar pada tahun 2011 terdapat 1744 obyek pelanggaran, pada tahun 2012 berjumlah 2394 obyek pelanggaran, meningkat 650 kasus dari tahun 2011, pelanggaran ketentraman dan ketertiban tahun 2012 berjumlah 2394 obyek pelanggaran, pelanggaran ketentraman dan ketertiban pada tahun 2013 berjumlah 2552 kasus, meningkat 158 kasus dari tahun 2012, pelanggaran ketentraman dan ketertiban tahun 2013 berjumlah 2552 obyek pelanggaran, pelanggaran ketentraman dan ketertiban pada tahun 2014 berjumlah 2903 kasus, meningkat 351 kasus dari tahun 2013, dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban pada tahun 2015 berjumlah 3628 kasus, meningkat 725 kasus dari tahun 2014, pelanggaran ketentraman dan ketertiban pada tahun 2016 berjumlah 2089 kasus. Bila dibandingkan dengan jumlah pelanggaran pada Tahun Akhir RPJMD 2010 – 2015 pada Tahun 2015 berjumlah 3.628 kasus, terdapat selisih berkurang pelanggaran sebesar 1.539 kasus.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat anatar lain:

1. Penertiban pengawasan pengendalian dan evaluasi di segala bidang;
2. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan disegala bidang;
3. Pengendalian keamanan lingkungan kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat dibidang penanganan strategis;
4. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di bidang linmas;
5. Publikasi peraturan perundang-undangan;
6. Kajian peraturan perundang undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah yang diwujudkan dalam evaluasi produk hukum;
7. Fasilitas sosial peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui sosialisasi produk hukum.



Kondisi ketertiban dan kemandirian selalu merupakan hal penting yang harus tetap dijaga di setiap daerah untuk menuju penghidupan masyarakat yang lebih baik, terlebih timbulnya dampak dari pemilihan langsung kepala daerah maupun situasi kesulitan masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok yang terjadi akhir- akhir ini diberbagai daerah.

Adat sebagai tiang budaya yang berlandaskan agama Hindu merupakan ujung tombak untuk keberlanjutan budaya sebagai modal dasar pembangunan. Meminimalisasi konflik yang berlatar belakang adat perlu terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Denpasar.

Upaya untuk menjaga ketertiban dan kemandirian di Kota Denpasar sangat mutlak diperlukan mengingat keamanan dan ketertiban merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Denpasar sebagai daerah tujuan wisata.

Sebagai ibu Kota Provinsi Bali yang merupakan daerah tujuan wisata, keamanan untuk mengkonsumsi barang dan jasa maupun pengawasan obat dan makanan perlu dijaga oleh Pemerintah Kota Denpasar beserta masyarakat. Beberapa masalah terkait dengan menciptakan keamanan Kota Denpasar adalah:

1. Meningkatnya jumlah pendatang dengan pekerjaan informal yang memungkinkan timbulnya banyak permasalahan dibidang keamanan dan kemandirian umum.
2. Adanya peluang munculnya konflik- konflik yang dipicu masalah adat, budaya, dan agama.
3. Meningkatnya pelanggaran ketertiban umum oleh masyarakat

2.1.3.5 Urusan Sosial

(9). Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dan ketenagakerjaan merupakan bagian pembangunan nasional yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan atau disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Tabel. 2.48.

Kegiatan Penyandang Kesejahteraan Sosial

KEGIATAN PENYANDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL						
DINSOSNAKER TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN BERUPA PMKS SEBAGAI BERIKUT:						
NO	KEGIATAN	2012	2013	2014	2015	2016
PMKS						
1	Peringatan HAN, HALUN	330	330	- 450 - 500	-450 -500	-300 -500
2	Penyandang cacat yang mendapat pelayanan dan bantuan sosial	294 org	96 org	591 org	173 orang	200 orang
3	Penyandang cacat yang diberikan pelatihan	40 org	4 org	52 org	20 orang	40 orang
4	Gepeng yang dibina dan dipulangkan ke daerah asalnya	160 org	201 org	97 org	117 orang	120 orang
5	Keluarga miskin yang memperoleh bimbingan dan	40 kk	30 kk	50 KK	40 KK	50 kk



KEGIATAN PENYANDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL						
DINSOSNAKER TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN BERUPA PMKS SEBAGAI BERIKUT:						
NO	KEGIATAN	2012	2013	2014	2015	2016
	binaan sosial melalui KUBE					
6	Masyarakat yang memperoleh bimbingan penanggulangan bencana	40 org	40 org	125 org	200 orang	30 orang
7	Korban bencana yang mendapat bantuan sosial	330 kk	360 kk	433 KK	3 orang	-
8	Jumlah anak nakal yang mendapat bimbingan sosial pelatihan keterampilan & tirtayatra	7 org	5 org	50 org	-	-
PSKS						
1	PSM yang dibina	5	5	5	5	1
2	PSM yang berprestasi dan berperan dalam usaha kesejahteraan sosial (UKS)	5	5	5	5	1
3	Organisasi sosial yang mendapat bantuan (PWS, PWRI, LVRI, KKKS)	4	4	4	4	4
4	Karang taruna yang dibina dalam rangka lomba & yang diberikan motivasi	5	5	9	9	9
5	Karang taruna yang berprestasi dan berperan dalam usaha kesejahteraan sosial (UKS)	5	5	5	5	5
6	Panti yang dibina	15	15	15	16	16

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu.

Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena itu upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Tabel. 2.49.

Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2012 s.d. 2016

NO	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Pekerja	418.839	438.687	461.135	468.515	468.515
2.	Jumlah Pencari Kerja	5.405	3.301	1.846	1.386	1.122
3.	Jumlah Angkatan Kerja	429.184	450.579	472.103	472.103	472.103
4.	Prosentase Pekerja dengan Penduduk	61,60	61,92	53,40	53,20	52,21

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar



Adanya Pengangguran yang belum dapat seluruhnya ditempatkan disebabkan semakin bertambahnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan daya serap lapangan usaha atau lapangan kerja. Hal ini disebabkan oleh dampak krisis yang berkepanjangan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha/ lapangan kerja.

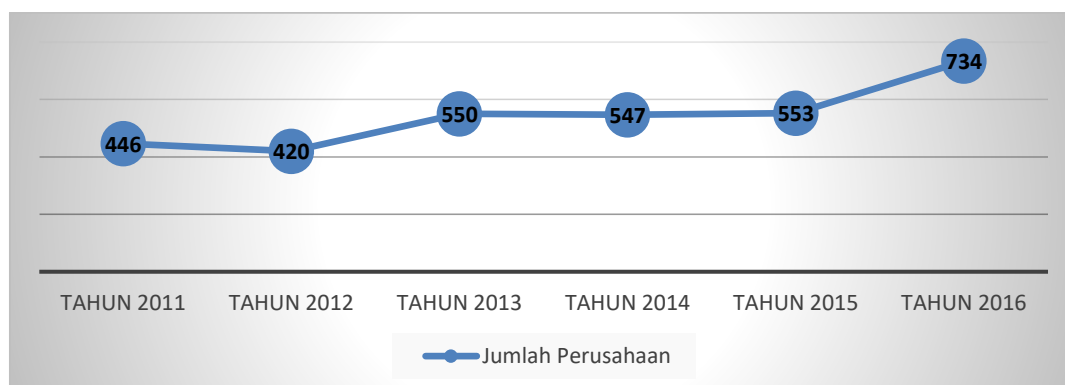
Pembangunan dan pengembangan sektor tenaga kerja antara lain mempunyai tujuan untuk terciptanya pembinaan dan penempatan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja, perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja, menciptakan ketenagakerjaan berusaha melalui pembinaan dan pembentukan sarana dan Hubungan Industrial serta Pengawasan ketenagakerjaan guna meningkatkan kesadaran pekerja dan pengusaha dalam mentaati dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Tabel. 2.50.

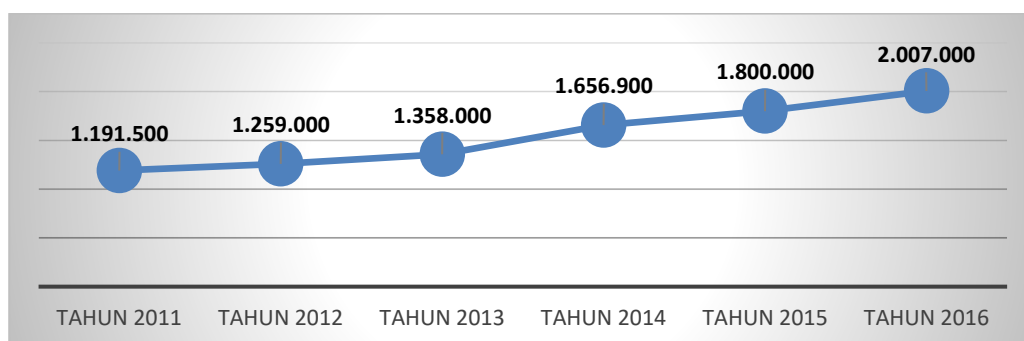
Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2012 s.d. 2016

NO	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Perusahaan	420	550	547	553	734
2.	Upah Minimum Kabupaten / Kota	1.259.000	1.358.000	1.656.900	1.800.000	2.007.000

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar



Gambar. 2.18 Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar



Gambar. 2.19 Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar



Data jumlah perusahaan di Kota Denpasar yang tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar bersumber dari wajib lapor ketenagakerjaan. Adanya peningkatan data perusahaan yang tercatat, mengidentifikasi adanya kesadaran dari perusahaan untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya, walaupun diakui data tersebut masih sangat minim dengan jumlah perusahaan yang ada di Kota Denpasar. Untuk mendapatkan data jumlah perusahaan yang lebih akurat dapat juga dilakukan penyanding dengan Dinas / Instansi lain seperti Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Statistik Kota Denpasar.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diusulkan oleh dewan Pengupahan dari masing – masing Kabupaten/Kota. Penetapan UMK berdasarkan hasil survey harga pasar untuk menentukan nilai KHL, tingkat inflansi, perkembangan dunia usaha dan aspek – aspek ekonomi lainnya. UMK merupakan upah minimum (gaji dan tunjangan tetap) yang diberikan kepada pekerja lajang dengan masa kerja 0-1 tahun. UMK Kota Denpasar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan harga hasil survey dan sebagai jaringan pengaman jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan.

2.1.3.6 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

(10). Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

Pengendalian penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran. Tujuan umum pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program KB membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kelurga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS(Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini menyangkut “Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas” Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana dan dengan pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera dan terkendalinya mobilitas penduduk. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Denpasar adalah termasuk wilayah yang penduduknya paling padat di Provinsi Bali dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Keluarga berencana adalah usaha untuk mengontrol jumlah dan jarak antara kelahiran anak untuk menghindari kehamilan yang bersifat sementara digunakan kontrasepsi sedangkan untuk menghindari kehamilan yang sifatnya menetap bisa dilakukan sterilisasi. Aborsi bisa



digunakan untuk mengakhiri kehamilan jika terjadinya kegagalan kontrasepsi. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sampai saat ini permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan masih tetap menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan yang serius, lebih-lebih saat ini permasalahan gender sudah menjadi isu global dengan dimasukkannya dalam kesepakatan Millenium Development Gols (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam Millenium Summit yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2000. MDGs telah menyepakati 8 goal dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015 yang meliputi :

1. Meniadakan kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar secara universal
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi tingkat kematian anak
5. Memperbaiki kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya
7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan
8. Membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan

Untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukanlah perkara mudah mengingat hal ini berkaitan erat dengan konstruksi social budaya yang sudah tertanam sejak lahirnya adam dan hawa di muka bumi ini. Namun demikian tidak berarti kita harus menyerah, karena segala sesuatu bentukan manusia tidak ada yang bersifat statis tetapi semua bisa diubah dan diperbaiki. Tentu hal ini memerlukan komitmen dan perjuangan yang serius dan konfrehensif, untuk itu sangat diperlukan adanya dukungan dari semua pihak baik masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait.

Secara historis, upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 70-an yang diawali dengan dibentuknya menteri muda urusan peranan wanita (MEN UPW) pada tahun 1978 yang saat ini sudah berubah menjadi Kementrian Negara Pemeberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebelum dibentuknya lembaga ini, perhatian terhadap nasib perempuan yang kurang beruntung jika dibandingkan dengan laki-laki sudah dilakukan oleh kaum feminis baik di dunia barat maupun di Indonesia.

Komitmen Pemerintah untuk memperjuangkan nasib perempuan terus berlanjut melalui lembaga kementrian yang sudah terbentuk di tingkat pusat dan lembaga pemberdayaan perempuan di daerah baik dalam bentuk badan maupun kantor, maka berbagai program pun diimplementasikan ke masyarakat. Pendekatan awal yang diimplementasikan pada saat itu adalah women in development/WID karena saat itu disadari bahwa perempuan merupakan sumberdaya manusia yang sangat berharga sehingga perempuan yang posisinya termajinalkan perlu diikutsertakan dalam pembangunan.

Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan, seperti inisiatif pengembangan teknologi yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan beban kerja perempuan. Tujuannya adalah menekankan kepada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan,



tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Setelah dilakukan evaluasi, nampaknya dalam pelaksanaannya pendekatan ini tidak terlalu berhasil dalam menghapus masalah diskriminasi terhadap perempuan. Dari pendekatan pembangunan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan seperti tersebut diatas, nampaknya juga masih belum efektif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, upaya lain pun diusahakan untuk mempercepat terwujudnya visi pembangunan pemberdayaan perempuan. Untuk bisa mengaplikasikan strategi ini secara baik dan benar, hal penting yang harus diketahui oleh para penyusun program adalah memahami teknik analisa gender (TAG). Analisa gender merupakan perangkat analisa yang dapat membantu para perencana dalam menganalisa suatu kebijakan/program apakah sudah responsive gender atau belum. Dengan menggunakan analisa gender bisa diidentifikasi dalam hal apa kesenjangan gender yang masih terjadi, apakah dalam akses, partisipasi, control atau manfaat. Juga kesenjangan itu sudah bisa diidentifikasi dengan benar, maka dengan sendirinya program yang akan disusunpun akan menjadi tepat sasaran.

Sementara itu, hal penting yang harus ada untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknis analisis gender adalah eksistensi data terpilih menurut jenis kelamin. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan karena keberadaan data menjadi pondasi utama dalam melakukan analisis gender maupun penyusunan perencanaan yang responsive gender. Oleh karena itu, penyusunan propil statistik gender di Kota Denpasar menjadi sangat penting.

2.1.3.7 Urusan Lingkungan Hidup

(11). Badan Lingkungan Hidup

Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum pembangunan lingkungan hidup. Yang bertujuan untuk: melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.



Permasalahan di bidang lingkungan Kota Denpasar, diantaranya adalah :

- Masih terjadinya ancaman banjir, timbulan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah domestik, minyak jelantah, abrasi pantai, interusi air laut, kerusakan terumbu karang, kerusakan ekosistem padang lamun, menurunnya kualitas udara, sungai tercemar berat, tercemarnya kualitas air sungai dan air tanah, semakin punahnya jenis-jenis flora dan fauna asli Kota Denpasar, semakin langkanya penyu hijau, kerusakan hutan mangrove, semakin sempitnya ruang terbuka hijau , semakin luasnya kerusakan tanah dan meningkatnya alih fungsi lahan serta variabilitas iklim. Berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Denpasar Tahun 2015 beberapa isu prioritas lingkungan Kota Denpasar kondisi, tekanan dan respon pengelolaannya adalah sebagai berikut :

1. Penurunan Kualitas Air :

Kegiatan manusia meliputi pertanian, peternakan, industri dan permukiman menghasilkan berbagai limbah seperti limbah cair. Sebagian besar kegiatan manusia tersebut tanpa disadari telah memberikan dampak negatif bagi lingkungan khususnya badan air yang menerima air limbah dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas manusia telah menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan laut di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil monitoring kualitas air sungai yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar bersama Laboratorium Analitik Universitas Udayana diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat beberapa sungai yang telah melampaui baku mutu air untuk kelas II meliputi beberapa parameter kualitas air yaitu DO, BOD, COD, NO₂, NO₃, NH₃, Total Phospat serta Total Coliform.

Hasil pemantauan kualitas air laut tahun 2015 untuk kegiatan pelabuhan di pelabuhan Benoa juga telah menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD dan Nitrat (NO₃) telah melampaui baku mutu air untuk pelabuhan sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 8 tahun 2007. Selain itu beberapa pantai untuk kegiatan wisata bahari telah menunjukkan bahwa parameter oksigen terlarut (pantai Matahari Terbit dan Pantai Sanur), BOD (Pantai Matahari Terbit, Pantai Sindhu dan Pantai bagian Selatan Pulau Serangan), Amonia pada seluruh pantai , No₃ (Pantai Mertasari, Pantai Bagian Utara, Timur dan Selatan Pulau Serangan Serta Parameter PO₄ (Pantai Bagian dan Selatan Pulau Serangan) telah melampaui baku mutu air untuk wisata bahari sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 8 Tahun 2007.

Sebagai upaya pengelolaan kualitas air sungai dan air laut di kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan dana lingkungan untuk pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Laut. Selain itu bagi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah telah dilakukan pemantauan dan pengawasan rutin oleh Badan Lingkungan Hidup kota Denpasar dan secara yuridis kegiatan usaha yang memiliki dampak telah disyaratkan untuk menyusun dokumen UKL-UPL serta melaksanakan proses perijinan terkait limbah yang dihasilkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kota Denpasar oleh Walikota Denpasar.



2. Sampah :

Konsekuensi atas perkembangan struktur perekonomian daerah Kota Denpasar telah memicu meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan meningkatnya tingkat konsumsi, dimana kondisi tersebut juga telah menghasilkan bahan buangan berupa sampah. Secara umum sampah yang dominan dijumpai di wilayah perkotaan mencakup sampah rumah tangga, sampah badan komersil serta sampah di area-area umum. Dalam beberapa teori diungkapkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat dianggap sangat mempengaruhi timbunan sampah pada suatu wilayah. Pola hidup konsumtif yang digambarkan dalam tingginya tingkat konsumsi, mendorong orang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersiernya. Hal ini pada akhirnya merubah jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh individu setiap harinya.

Perkiraan produksi sampah Kota Denpasar dengan asumsi 1 orang per hari menghasilkan 4 liter sampah dengan jumlah penduduk 897.300 jiwa dan prediksi peningkatan volume sampah pada saat hari besar seperti galungan, kuningan nyepi kurang lebih 60% serta 10% peningkatan sampah seremonial/kegiatan lainnya sehingga produksi sampah Kota Denpasar per tahun sebesar $= 1.357.435 \text{ m}^3 = 339.358,74 \text{ ton/tahun}$ yang diangkut ke TPA sebesar $= 1.348.367 \text{ m}^3$ per tahun atau mencapai 99,33 % dari perkiraan sampah Kota Denpasar, dan sisa sampah sebesar $9,068 \text{ m}^3/\text{tahun}$ ($24,844 \text{ m}^3/\text{hari}$) telah didaur ulang dan diolah untuk dijadikan kompos. Dan sebagai barang souvenir sampah yang bernilai ekonomis sebesar $19,87 \text{ m}^3/\text{hari}$ (80%) $= 4,96 \text{ ton/hari}$ dan $4,97 \text{ m}^3/\text{hari}$ (20%) $= 1,24 \text{ ton/hari}$ dari sisa sampah masih dibuang ke tanah kosong atau tegalan.

Selain itu kegiatan pengurangan volume sampah dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

- Pembentukan Bank Sampah melalui Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/195/HK/2015 tentang Penetapan Bank Sampah di Kota Denpasar Tahun 2015. Jumlah Bank Sampah yang telah terbentuk berjumlah 47 Bank Sampah. Pembentukan Bank Sampah ini dimaksudkan meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan di Kota Denpasar.
- Pendirian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mengelola sampah secara 3R. Selain itu, terdapat 2 TPST yang telah mengelola sampah menjadi bio gas, yakni TPST 3R Desa Kesiman Kertalangu dan TPST Dauh Puri.
- Aplikasi GIS (Geographic Information System) yang dibuat oleh Gringgo transh tech didownload di google play store android smart phone yang berfungsi untuk mengetahui :
 - Data barang daur ulang
 - Harga jual/beli terbaru sampah
 - Laporan pengaduan
 - Masukan dan penanganan sampah
 - Lokasi TPS
 - Depo dan Bank sampah
- Recycle Center (PT. Irditect eccojo plashtindo)
Processing sampah plastic, aluminium dan non organic lainnya



- ATM sampah
Bantuan PT Inditect eccojos plashtindo bertempat dipasar kreneng
- Bank Sampah Online
Oleh ketua yayasan Baliwastu Lestari : Ni Wayan Riawati

3. Alih Fungsi Lahan:

Kebutuhan lahan di kota Denpasar untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian daerah. Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat kecenderungan tersebut. Beberapa kasus menunjukkan jika pada suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan disekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Hal tersebut terjadi karena dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulasi tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain disekitarnya untuk menjual lahan, selain itu, pelaku pembeli tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura memberikan perhatian terhadap alih fungsi lahan pada sektor pertanian. Hasil inventarisasi terhadap lahan –lahan pertanian di Kota Denpasar menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi alih fungsi lahan sawah di Kota Denpasar mencapai 198 Ha. Peningkatan pembangunan di berbagai sektor di Kota Denpasar, tidak terlepas dari kebutuhan lahan. Sedangkan jumlah lahan yang tersedia terbatas. Dengan kondisi ini diperlukan peran serta semua pihak untuk mempertahankan lahan pertanian perkotaan. Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan telah melakukan berbagai upaya diantaranya memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Selain itu secara yuridis Pemerintah Kota Denpasar telah mengatur alokasi ruang melalui Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar

4. Variabilitas Iklim

Variabilitas iklim adalah fluktuasi unsur iklim yang terjadi secara tiba-tiba namun tidak berlangsung lama. Variabilitas iklim yang terjadi di Kota Denpasar ditandai dengan meningkatnya temperatur udara di berbagai wilayah serta tidak menentunya kejadian hujan. Terjadinya Variabilitas iklim telah menyebabkan masalah sumber daya air. Kegiatan manusia seperti pembukaan lahan yang mengurangi jumlah tutupan vegetasi serta aktivitas yang menghasilkan berbagai gas-gas rumah kaca seperti pertanian, peternakan, industri dan sektor transportasi telah memicu Variabilitas iklim di daerah. Selain itu dinamika cuaca atau iklim yang terjadi di sekitar wilayah Indonesia disebabkan adanya aktivitas El Nino di perairan Samudera Pasifik di bagian timur Indonesia telah memicu kejadian kemarau panjang.



Kemarau panjang dengan suhu udara yang cukup tinggi telah mengganggu kenyamanan masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah yang selanjutnya mengakibatkan menurunnya produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di luar bangunan. Selain itu, fenomena iklim di Kota Denpasar telah memicu beberapa permasalahan penurunan debit air sungai. Kondisi tersebut telah mengganggu jumlah produksi air baku oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar. Penurunan debit air berdampak pada penurunan distribusi air ke pelanggan. Kondisi tersebut juga telah membuat sejumlah pelanggan yang berada di daerah elevasi yang lebih tinggi seperti kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat mengalami permasalahan pasokan air baku. Sebagai upaya meminimalisasi tingkat kerentanan terhadap kondisi iklim, maka Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2015 telah melakukan berbagai upaya antara lain

- Sebagai langkah nyata dalam meminimalisir permasalahan penurunan produksi jumlah air baku kepada masyarakat, maka PDAM Kota Denpasar telah memberikan pasokan air bersih dengan menyiapkan mobil tangki untuk daerah-daerah yang mengalami permasalahan pasokan air bersih.
- Pelaksanaan konservasi melalui metode vegetatif yaitu melalui penanaman pohon, dimana bibit tersebut ditanam pada lahan-lahan kosong yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di wilayah kota Denpasar, kegiatan penghijauan bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, nilai estetika, fungsi resapan air dan menciptakan keserasian serta keseimbangan dengan fisik kota. Hijaunya kota tidak hanya menjadikan kota itu indah dan sejuk namun aspek kelestarian, keserasian, keselarasan dan keseimbangan sumber daya alam, yang pada gilirannya akan memberikan kenyamanan, Kesegaran, terbebasnya kota dari polusi dan kebisingan serta sehat dan cerdasnya warga kota.

(12). Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

Kebersihan mencakup dimensi yang cukup luas, sehingga dalam penanganan lebih lanjut memerlukan kerjasama serta koordinasi yang baik antar seluruh sektor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pengelolaan kebersihan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Kesadaran masyarakat memang sudah mulai nampak namun baru sebatas skala kecil di tingkat rumah tangga. Hal ini terbukti rumah memang bersih dan bahkan bebas dari sampah ternyata di luar rumah sampah belum dikelola dengan baik sehingga sering ditemukan lahan kosong, selokan, sungai dan tempat lainnya menjadi sasaran TPS liar. Dapat disimpulkan bahwa pada bagian hulu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang. Masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan sampah adalah urusan pemerintah saja. Sedangkan rentang dari hulu ke hilir adalah bagian proses, dimana pemerintah berperan dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada bagian hilir, adalah pengolahan akhir sampah yang dilakukan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah.

Dalam melakukan operasional kebersihan, ada dua hal pokok yang sangat mendukung keberhasilan penanganan sampah yakni Sumber Daya Manusia dan ketersediaan prasarana dan sarana.



Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pengelolaan kebersihan masih belum mencukupi jumlah dan kualitasnya, nantinya perlu diadakan peremajaan sehingga kinerja dapat meningkat. Kondisi prasarana dan sarana pada tahun 2016 meliputi :

1. Dump truck : 73 unit termasuk – 4 unit pengadaan 2016 untuk dioperasikan tahun 2017
2. Truk armroll : 19 unit
3. Kontainer / Kontainer terpilah : 117 unit termasuk 97 unit kondisi baik, 20 unit rusak, - unit container pengadaan 2015 untuk dioperasikan tahun 2016
4. Transfer depo : 13 unit
5. Convektor truk : 11 unit
6. Sweeper truk : 1 unit
7. Street Sweefer : 2 unit

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kebersihan meliputi aparat pengelola manajemen dan aparat pelaksana atau tenaga lapangan. Aparat pengelola manajemen kebersihan adalah para pejabat struktural yang menduduki jabatan di

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada tahun 2016 jumlah tenaga lapangan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar mencapai 1.517 orang. Dari segi kuantitas dan kualitas aparat pengelola kebersihan masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi.

Kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang terhadap penanggulangan masalah sampah di Kota Denpasar ini antara lain : komitmen pemerintah dalam penanggulangan sampah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, adanya investor yang berminat dalam pengelolaan sampah, dan adanya sumbangan pemikiran dari berbagai instansi serta komponen lainnya.

Namun demikian ancaman dalam upaya penanggulangan masalah sampah ini terutama disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan adanya sampah kiriman dari wilayah sekitar. TPA (Tempat pemrosesan Akhir) overload/penyempitan lahan pembuangan serta sulitnya/terbatasnya mendapatkan lahan untuk pembuatan TPS/Depo

Pada tahun 2016 pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar masih dilakukan dengan cara konvensional yakni proses mengumpulkan, mengangkut dan pengolahan di tempat pembuangan akhir. Kegiatan pengumpulan sampah di badan jalan dilakukan melalui kegiatan penyapuan jalan. Penyapuan jalan yang dilakukan DKP Kota Denpasar telah mencakup 70% dari seluruh ruas jalan di Kota Denpasar. Sedangkan pengumpulan sampah masih dilakukan di transfer depo dan kontainer yang selanjutnya diangkut ke TPA. Cakupan pelayanan angkutan sampah oleh DKP

Kota Denpasar mencapai 79.73% dari seluruh produksi sampah di Kota Denpasar. Sisanya sebesar 17.79% sampah diangkut ke TPA oleh PD. Pasar, masyarakat dan jasa sampah swasta (swakelola), 12-13% sampah sudah diolah menjadi kompos, dan 3% dibuang ditanah masyarakat yang kosong (tegalan).

Berdasarkan kondisi terkini di Kota Denpasar dalam bidang kebersihan, maka isu yang mendesak adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti yang diamanatkan



Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 yakni keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu :

- Rendahnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bagian hulu,
- Rendahnya peranserta masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara 3R (reduse, reuse, recycle)
- Kurangnya partisipasi masyarakat swasta dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

Kebersihan dan keindahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan kebersihan senantiasa diarahkan dalam rangka meningkatkan keindahan kota, oleh karena kedua hal itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar yang bersih dan indah.

Program pengelolaan kebersihan kota dimaksudkan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan kota agar sampah dapat dikelola dengan baik diantara masyarakat dan pemerintah. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan sumber sampah serta meningkatkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan indikator sasaran adalah mengurangi volume tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan volume sampah yang masuk ke TPA.

Tabel. 2.51.

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2012 s/d 2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah TPS/Kontainer	84	100	110	117	117
2	Jumlah daya tampung TPS	1.688	1.784	1.844	1.961	1961
3	Jumlah penduduk	830.662	833.900	863.600	880.600	897.300
4	Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Rasio pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk dari Tahun 2011 sampai dengan 2016 belum ada perubahan, sehingga rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk hanya bisa menampung 2 liter per orang dengan perkiraan produksi sampah per orang 4 liter perhari.

Perkiraan laju pertumbuhan penduduk 3,2% sehingga diperkirakan jumlah penduduk meningkat dan rasio daya tampung TPS hanya bisa menampung 50% dari produksi sampah penduduk.



Tabel. 2.52.

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk
menurut kecamatan tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	TPS/Kontainer		Rasio
			Jumlah (unit)	Jumlah daya tampung (M ³)	
1	2	3	4	5	6=5/3
1	Kecamatan Denpasar Timur	150.590	31	357	0,002
2	Kecamatan Denpasar Barat	256.415	33	571	0,002
3	Kecamatan Denpasar Selatan	279.680	31	568	0,002
4	Kecamatan Denpasar Utara	193.680	22	465	0,002

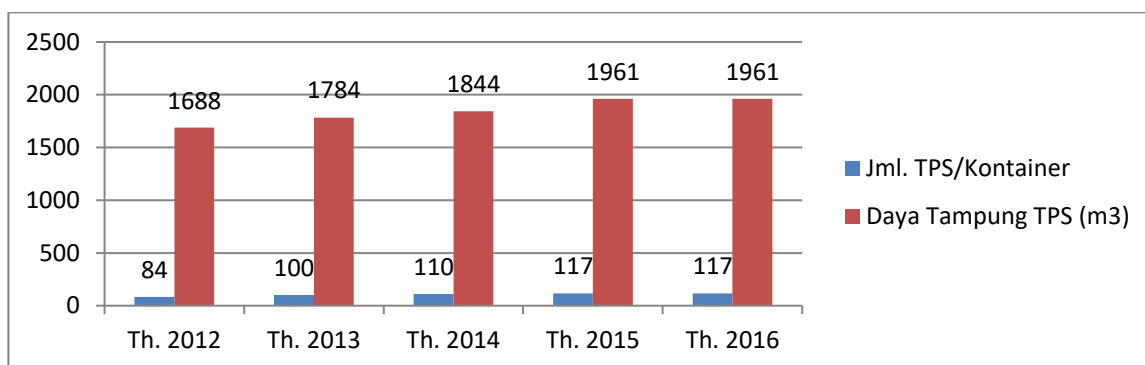
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Tabel. 2.53.

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk
menurut kecamatan tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	TPS/Kontainer		Rasio
			Jumlah (unit)	Jumlah daya tampung (M ³)	
1	2	3	4	5	6=5/3
1	Kecamatan Denpasar Timur	153.480	31	357	0,002
2	Kecamatan Denpasar Barat	259.790	33	571	0,002
3	Kecamatan Denpasar Selatan	286.060	31	568	0,002
4	Kecamatan Denpasar Utara	197.970	22	465	0,002

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar



Gambar. 2.20 Jumlah TPS dan Daya Tampung Sampah

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk dari masing-masing kecamatan hanya dapat menampung 50% atau 2 liter per orang dari produksi sampah per orang 4 liter per hari.

Kota Denpasar merupakan kota pusat pemerintahan di Propinsi Bali yang menjadikannya sebagai pusat kegiatan strategis yang menyebabkan banyak orang datang dan bermukim di Kota Denpasar. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2016 jumlah penduduk Kota Denpasar mencapai 897.300 orang. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Denpasar berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Diasumsikan setiap orang di



Kota Denpasar menghasilkan 4 liter per hari, maka seluruh penduduk Kota Denpasar akan menghasilkan sampah sebesar 3.719 m³ per hari atau setara dengan 929,75 ton sampah.

Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah visual kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau yang mampu memberi imbuhan terhadap kuantitas air tanah.

Pertamanan di Kota Denpasar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mengelola taman-taman kota yang terletak lapangan umum khususnya di Lapangan Puputan, median jalan dan persimpangan jalan serta perindangan kota.

Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas taman yang ada di Kota Denpasar, keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan pertamanan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pertamanan dan perindangan kota dengan melengkapi sarana prasarana pertamanan, pemeliharaan maupun peningkatan intensitas penanaman tanaman perindang. Permasalahan yang dihadapi dibidang pertamanan dalam upaya mempercantik wajah kota, adalah sebagai berikut :

- Pada penataan taman, lahan untuk taman kota terbatas dan sulit dilakukan perluasan sehingga perlu ditingkatkan kualitas taman. Luas taman yang dipelihara tahun 2016 sekitar 166.873 m² yang terdiri dari 53.353 m² Taman Median, 69.970 m² Taman Lapangan dan 43.550 m² Taman Telajakan.
- Pada bidang penghijauan dan perindangan pohon, saat ini jumlah pohon perindang di Kota Denpasar mencapai 58.240 pohon. Jumlah ini masih kurang dan terancam akan berkurang karena adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menebang pohon dan adanya pohon tumbang akibat bencana alam.
- Dalam bidang LPJU permintaan masyarakat terhadap bantuan pemasangan lampu penerangan untuk prasarana sosial seperti pura dan jalan lingkungan sangat banyak dan perlu di prioritaskan pemenuhannya.

2.1.3.8 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(13). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dalam rangka pelayanan dibidang kependudukan. Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia.

Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta diimplementasikan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan proses cepat serta terkendalinya mobilitas penduduk.

Dalam kaitannya dengan urusan kependudukan dan Pencatatan sipil ini, terdapat dua sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kota Denpasar, yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Kedua sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:



a. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

1. Penduduk ber-KTP

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dari seluruh penduduk yang wajib memiliki KTP.

Tabel. 2.54.

Persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk	679.979	708.488	729.028	633.201	659.623
Penduduk yang wajib ber KTP	496.579	512.995	544.532	469.002	488.628
Penduduk ber KTP	183.402	303.220	364.319	313.797	421.431
Persentase b/c	36,93%	59,11%	66,90%	66,90%	86,24%

2. Penduduk ber-KK

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KK dari seluruh wajib KK yang ada. Jumlah keluarga yang memiliki Kartu keluarga pada tahun 2016 sebanyak 41.716 KK.

3. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran per Tahun

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akta kelahiran dari seluruh penduduk yang baru lahir.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah yang memiliki akta kelahiran sebanyak 25.236 lembar pada Tahun 2012, 17.706 lembar penerbitan kelahiran pada tahun 2013, 13.212 lembar penerbitan Akta kelahiran pada tahun 2014 dan 13.532 lembar penerbitan Akta Kelahiran pada Tahun 2015 dan 11.403 lembar penerbitan Akta Kelahiran pada tahun 2016.

4. Penerbitan Akta Kematian per Tahun

Dengan diberikannya uang santunan duka dari Walikota Denpasar dengan menggunakan Akta Kematian, jumlah penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat dan dapat dilihat tahun 2013 sebanyak 2.772 lembar Akta Kematian, di tahun 2014 sebanyak 2.933 lembar Akta Kematian, sedangkan ditahun 2015 sebanyak 4.165 lembar Akta Kematian dan di tahun 2015 sebanyak 4.136 lembar akta kematian.

5. Penerbitan Akta Perkawinan per Tahun

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Perkawinan, terlihat dengan adanya peningkatan jumlah permohonan akta perkawinan di tahun 2013 sebanyak 2.479 lembar dan di tahun 2014 sebanyak 3.014 lembar, sedangkan di tahun 2015 sebanyak 3.297 lembar dan di tahun 2016 sebanyak 3.588 lembar.



6. Penerbitan Akta Perceraian per Tahun

Data penerbitan akta perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2013 sebanyak 393 lembar, di tahun 2014 sebanyak 316 lembar akta perceraian dan di tahun 2015 sebanyak 372 lembar, sedangkan di tahun 2016 sebanyak 355 lembar.

b. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admininstrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penerapan KTP-el yang mulai diberlakukan sejak tahun 2014 mengalami perubahan tentang masa berlakunya KTP-el yang selama 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan.

Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan dalam pasal 69 ayat 1a. Disebutkan waktu penyelesaian KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari.

2. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Dalam hal ini terjadi perubahan penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk, perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta – akta pencatatan sipil ditempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup mengurus didomisili saja.

3. Pengurusan dan penebitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis) Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis) semula hanya untuk penerbitan KTP- el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan lain – lain.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian sasaran program peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil antara lain:

1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan meliputi pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili Luar Negeri (SKDLN), Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD), Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing (SKPD OA) tinggal terbatas dan Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN), SKPD OA tinggal tetap, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) OA Terbatas, SKPLN WNI, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Permohonan Menjadi Penduduk (SPMP);
2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil meliputi pelayanan akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian dan akte perkawinan;
3. Pelayanan informasi publik bidang kependudukan;



Kota Denpasar sebagai Kota Metropolitan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga penduduk berduyun-duyun datang dengan berbagai motivasi, tingkat pendidikan, dan tingkat keterampilan untuk berjuang mengadu nasib dalam upaya meningkatkan kesejahterannya. Hal ini memicu pertumbuhan penduduk yang besar sebagai sumbangan dari migrasi penduduk yang diakibatkan oleh arus urbanisasi.

Pengendalian penduduk ini mutlak perlu dilakukan guna menghindari eksese-eksese negatif yang dapat menghambat upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Potensi Kearifan lokal perlu diberdayakan guna membantu pengendalian pertumbuhan dengan sistem dan pola yang benar.

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan

Berdasarkan angka statistik bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan terus mengalami peningkatan . Laju perkembangan penduduk yang diakibatkan migrasi penduduk perlu ditekan dengan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan sehingga mereka yang memenuhi kelengkapan administrasi dan mempunyai tujuan, ketrampilan dan keahlian tertentu yang direkomendasikan menetap di Kota Denpasar.

Tabel. 2.55.
Distribusi Penduduk tahun 2016

No	Uraian	Distribusi Penduduk tahun 2016	Persentase
1	Denpasar Barat	194.048	29,41%
2	Denpasar Selatan	170.781	25,89%
3	Denpasar Utara	170.176	25,70%
4	Denpasar timur	124.618	19,00%
	JUMLAH	659.623	100%

B. Kepadatan

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi yang merupakan perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kepadatan penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2016 telah mencapai 5.162 jiwa /km², sedangkan kalau dilihat di masing – masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Kecamatan Denpasar Barat sebesar 8.042 jiwa/km²
- Kecamatan Denpasar Timur sebesar 5.529 jiwa/km²
- Kecamatan Denpasar Utara sebesar 5.468 jiwa/km²
- Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 3.416 jiwa/km²

C. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin

Piramida penduduk merupakan grafik yang menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Berdasarkan bentuk piramida penduduk Denpasar tahun 2016 dimana penduduk kelompok umur 0 – 14 tahun berjumlah 140.105 orang atau 21,24%, penduduk yang tergolong dalam kelompok umur 15 – 49 tahun berjumlah 386.275 orang atau 58,56%, sedangkan penduduk Kota Denpasar yang tergolong kelompok umur 50 tahun keatas berjumlah 133.243 orang atau 20,20%. Bentuk piramida penduduk Kota Denpasar



juga menandakan telah terjadinya migrasi penduduk ke Kota Denpasar dan didominasi oleh mereka yang tergolong dalam usia produktif.

Tabel. 2.56.

Komposisi Penduduk berdasarkan Umur di Kota Denpasar Tahun 2016

Umur (Tahun)	Penduduk (orang)	Persentase
0 – 14	140.105	21,24%
15 – 49	386.275	58,56%
50 ke atas	133.243	20,20%
Jumlah	659.623	100%

2.1.3.9 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

(14). Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Daerah membutuhkan suatu konsep yang berbasis pada potensi yang ada serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep ini akan tercapai jika ada peran aktif dan partisipasi dari masyarakat, karena keterlibatan masyarakat dari awal proses perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini akan membuat masyarakat merasa memiliki kepedulian terhadap hasil pembangunan tersebut. Untuk itu masyarakat dalam bentuk kelembagaan dan organisasi lainnya harus dapat diberdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, membawa akibat penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan Desa/Kelurahan yang mampu melaksanakan fungsi Pemerintahan secara efisien dan efektif, serta dalam upaya mewujudkan Desa / Kelurahan yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan dengan pradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa/Kelurahan maupun Kecamatan. Adapun jumlah desa / kelurahan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.57.

Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Denpasar

Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
Kecamatan Denpasar Timur	7 Desa	4 Kelurahan
Kecamatan Denpasar Selatan	4 Desa	6 Kelurahan
Kecamatan Denpasar Barat	8 Desa	3 Kelurahan
Kecamatan Denpasar Utara	8 Desa	3 Kelurahan



Tabel. 2.58.

Jumlah PKK, Posyandu dan Pokjnal Kota Denpasar

Kecamatan	Jumlah TP. PKK Desa/Kel	Jumlah Kelompok PKK Dusun/Kaling	Jumlah Kelompok Dasawisma	Jumlah Guru TK Binaan PKK Tota Denpasar
Kecamatan Denpasar Barat	325 Orang	112 Orang	2.757 Kelompok	84 Orang
Kecamatan Denpasar Utara	332 Orang	102 Orang	2.029 Kelompok	103 Orang
Kecamatan Denpasar Timur	342 Orang	87 Orang	2.321 Kelompok	75 Orang
Kecamatan Denpasar Selatan	320 Orang	105 Orang	2.005 Kelompok	44 Orang

Tabel. 2.59.

Kelompok Jumlah Posyandu

Kecamatan	Posyandu Kecamatan	Pokjnal Kecamatan
Kecamatan Denpasar Barat	113 Kelompok	25 Orang
Kecamatan Denpasar Utara	105 Kelompok	25 Orang
Kecamatan Denpasar Timur	109 Kelompok	25 Orang
Kecamatan Denpasar Selatan	103 Kelompok	25 Orang

2.1.3.10 Urusan Perhubungan

(15). Dinas Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat tinggi masuk ke dalam kota Denpasar. Oleh karena itu pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antara kota antar wilayah. Sampai saat ini manajemen transportasi regional belum terlaksana secara optimal namun mulai tahun 2010-2016 pelayanan system transportasi kawasan sarbagita akan dilaksanakan diawali dengan bantuan bus dari Pemerintah Pusat, salah satu indikatornya adalah semakin padatnya arus lalu lintas di dalam kota Denpasar, padahal transportasi sebagai sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya memegang peranan penting. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta tingkat aksesibilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan oleh masyarakat.

Sarana transportasi sangat berperan dalam percepatan pergerakan sosial maupun ekonomi dan juga merupakan alat transport yang mampu memindahkan sesuatu dalam skala besar dan dalam waktu yang singkat. Mobilitas dari alat transportasi ini sering menimbulkan masalah perkotaan seperti kemacetan lalu lintas dimana didalam operasionalnya berkaitan erat dengan karakter dari operator kendaraan itu sendiri maupun tata guna lahan yang ada diperkotaan yang menjadi tarikan lalu lintas. Mengingat dalam kegiatan perekonomian Kota Denpasar, masih bertumpu pada potensi pariwisata dan pertanian dalam arti luas, maka pembangunan transportasi diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana sebagai satu



kesatuan sistem jaringan transportasi yang terpadu dan terintegrasi, untuk menunjang kelancaran mobilitas dan distribusi barang dan jasa dari sentra-sentra produksi ke daerah konsumen. Namun demikian, oleh karena keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan merupakan aspek yang sangat rentan terhadap perkembangan pariwisata, maka untuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial di masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan memperhatikan posisi penting bandar udara yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, daya dukung dan daya tampung tata ruang wilayah.

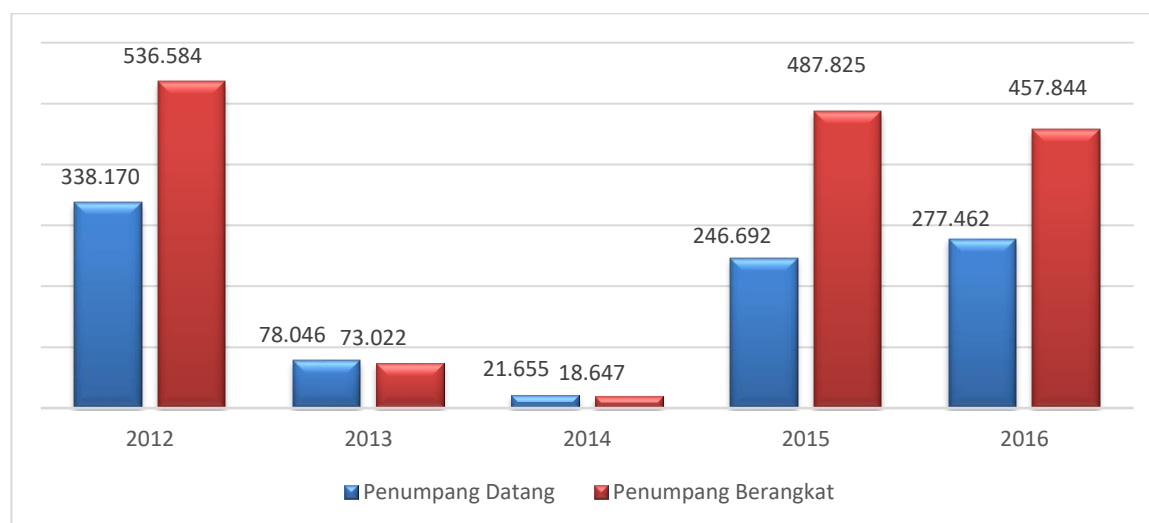
Rincian data penumpang dan barang keluar-masuk Kota Denpasar, terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.60.

Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2012-2016

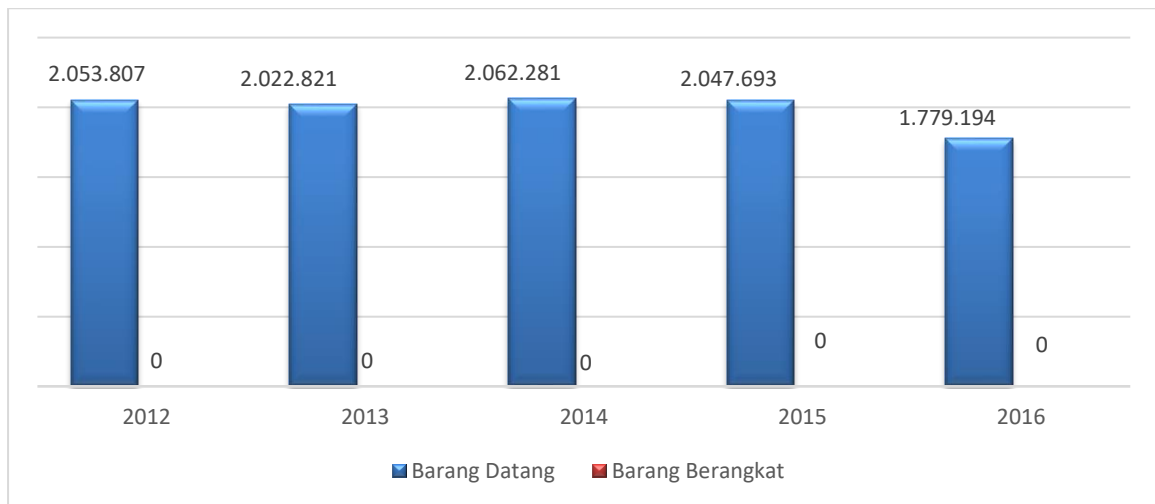
No	Muatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Penumpang Datang	338.170	78.046	21.655	246.692	277.462
	Penumpang Berangkat	536.584	73.022	18.647	487.825	457.844
	Jumlah	874.751	151.068	40.502	730.517	735.306
2	Barang Datang	2.053.807	2.022.821	2.062.281	2.047.693	1.779.794
3	Barang Berangkat	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.890.546	2.053.807	2.062.281	2.047.693	1.779.194

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar



Gambar. 2.21 Jumlah Penumpang dan Barang Keluar Masuk di Kota Denpasar Tahun 2012 – 2016





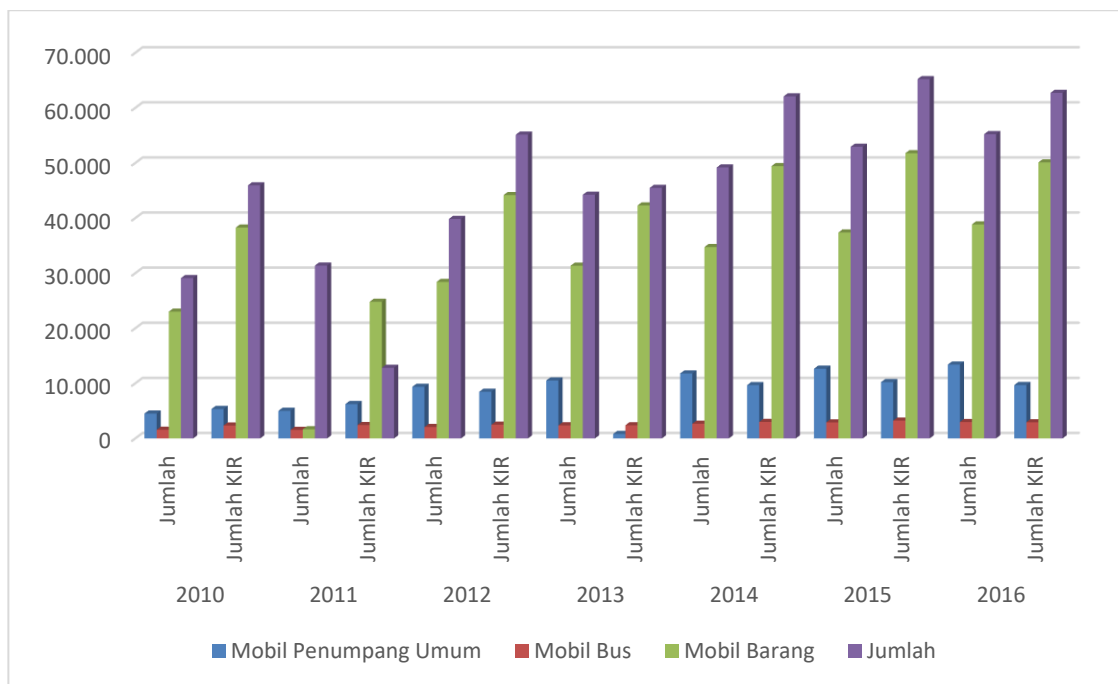
Gambar. 2.22 Jumlah Barang Datang dan Barang Berangkat

Tabel. 2.61.

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum tahun 2010 s/d 2016

Tahun		Mobil Penumpang Umum	Mobil Bus	Mobil Barang	Jumlah
2010	Jumlah	4.508	1.576	23.013	29.097
	Jumlah KIR	5.335	2.342	38.256	45.933
	%	1.183	1.486	1.662	4.331
2011	Jumlah	5.011	1.548	1.661	31.363
	Jumlah KIR	6.233	2.423	24.804	12.817
	%	1.243	1.565	4.161	4.486
2012	Jumlah	9.359	2.065	28.403	39.827
	Jumlah KIR	8.477	2.492	44.158	55.127
	%	905	1.206	1.554	3.665
2013	Jumlah	10.512	2.367	31.346	44.225
	Jumlah KIR	811	2.379	42.274	45.464
	%	7.715	10.013	13.486	31.214
2014	Jumlah	11.781	2.656	34.732	49.169
	Jumlah KIR	9.668	2.987	49.423	62.078
	%	82,064	112,462	142,298	126,254
2015	Jumlah	12.651	2.903	37.369	52.923
	Jumlah KIR	10.214	3.230	51.759	65.203
	%	80,74	111,26	138,51	123,20
2016	Jumlah	13.404	2.971	38.837	55.212
	Jumlah KIR	9.679	2.930	50.099	62.708
	%	72,209	96,619	128,998	113,576



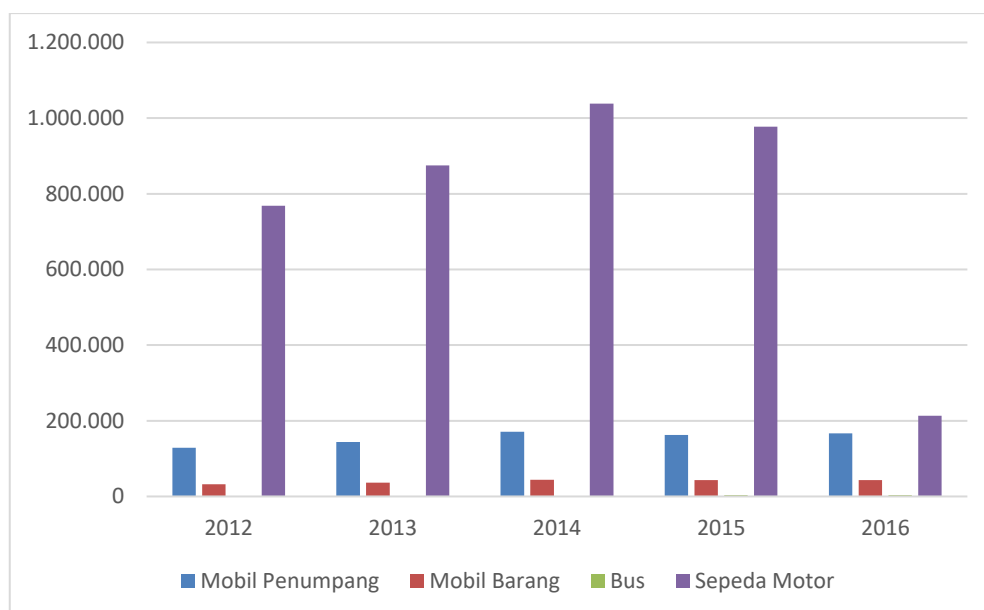


Gambar. 2.23 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum tahun 2010 s/d 2016

Tabel. 2.62.

Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar
Tahun 2012 s/d 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Mobil Penumpang	128.943	143.989	170.633	162.590	166.654
2	Mobil Barang	32.625	36.586	44.478	43.258	43.375
3	Bus	850	922	1.090	3.407	3.367
4	Sepeda Motor	768.475	875.346	1.038.344	977.774	213.396



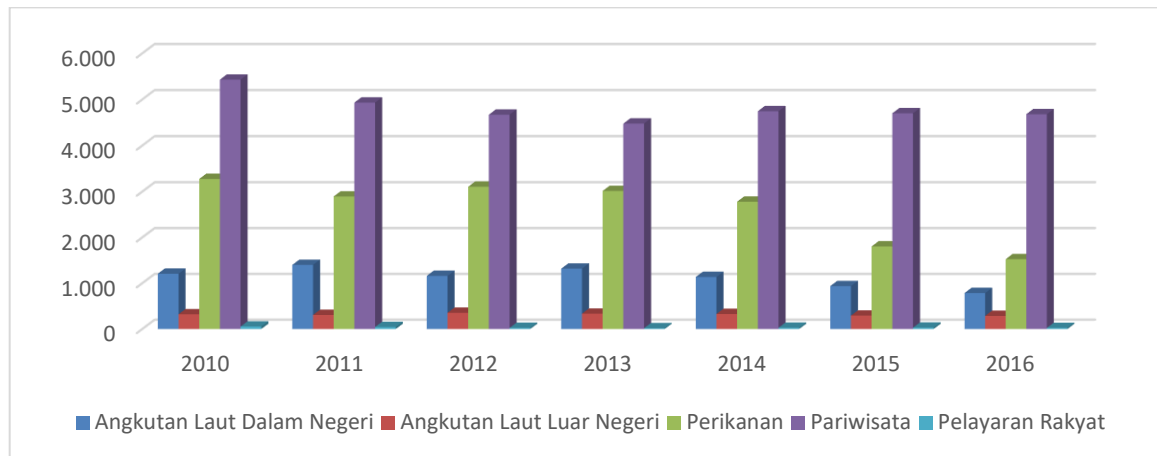
Gambar. 2.24 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar



Tabel. 2.63.
Kunjungan Pelayaran Pelabuhan Benoa
Tahun 2010 s/d 2016

No	Tahun	Angkutan Laut Dalam Negeri	Angkutan Laut Luar Negeri	Angkutan Laut Khusus		Pelayaran Rakyat
				Perikanan	Pariwisata	
1	2010	1.206	321	3.275	5.429	54
2	2011	1.399	306	2.893	4.931	42
3	2012	1.159	354	3.105	4.669	24
4	2013	1.318	334	3.013	4.476	16
5	2014	1.136	327	2.779	4.743	26
6	2015	936	292	1.803	4.699	29
7	2016	785	285	1.525	4.678	23

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar



Gambar. 2.25 Kunjungan Kapal di Pelabuhan Benoa Tahun 2010 s/d 2016

Tabel. 2.64.
Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)
Tahun 2016

No	Simpang/Ruas	Terpasang	
		Baik	Rusak
1	Simpang 4/Lebih	51	-
2	Simpang 3	15	-
3	Jumlah titik di ruas & simpang untuk Pelican Cross	7	-
4	Jumlah titik di ruas jalan untuk Lampu Kuning/Warning Light	30	-
		103	-



Rambu-rambu yang sudah terpasang s/d Bulan Juni Tahun 2016

- Jumlah Rambu yang terpasang : 3.097 Unit
- Traffic Light : 66 Unit
- Warning Light : 30 Unit
- Marka Jalan : 23.300 Meter
- Halte : 13 Unit

Type Terminal di Kota Denpasar

1. Terminal Penumpang :
 - Terminal Ubung : Terminal Penumpang Type C
 - Terminal Kreneng : Terminal Penumpang Type C
 - Terminal Tegal : Terminal Penumpang Type C
 - Terminal Wangaya : Terminal Penumpang Type C
2. Terminal Barang : 1

2.1.3.11 Urusan Komunikasi Dan Informatika

(16). Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah merubah paradigma dalam perekonomian dunia yaitu berupa beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Informasi mempunyai nilai ekonomi, dan kemampuan untuk mendapat, mengolah dan memanfaatkan informasi ini memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu perkembangan masyarakat harus diarahkan untuk mencapai kemajuan di bidang informasi dan teknologi ini.

Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sangat serta penerapan elektronifikasi merupakan aspek penting menuju penerapan konsep *smart city* yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki pelayanan pemerintah kota untuk menghasilkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Penyediaan data statistic yang berkualitas menjadi sangat menentukan Karena akan berdampak kepada efektifitas dan pengambilan keputusan yang dilakukan. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien.

Data dan informasi statistik yang dihasilkan menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya, sebagaimana telah digunakan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi pemabangunan, peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistic semakin meningkat, dari sisi pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Oleh Karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Selain itu pengamanan informasi berupa persandian merupakan tantangan berat Karena persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi Karena SDM persandian yang ada saat ini belum mempunyai kompetensi yang mencukupi untuk mengamankan informasi berbasis IT. Adapun penjabaran fungsi persandian adalah tata kelola penjaminan informasi berklasifikasi, pengelolaan



sumberdaya persandian, dukungan layanan operasional persandian untuk keamanan informasi, dan pengawasan penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi internal.

Sehubungan dengan hal tersebut sasaran yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar adalah:

1. Berkembangnya jaringan informasi diseluruh lapisan masyarakat
2. Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-Government
3. Terwujudnya kualitas pelayanan public
4. Meningkatnya citra Kota Denpasar di media
5. Meningkatnya kapasitas dan akutanbilitas kinerja birokrasi,

Untuk mendukung sasaran yang dimaksud maka arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Mengupayakan system informasi manajemen pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan melalui penguasaan teknologi dan peralatannya untuk membentuk system jaringan yang terkendali sebagai media komunikasi dan penerangan, informasi dan promosi serta Pendidikan masyarakat
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan regulasinya serta kerjasama dengan media massa dalam rangka memperkokoh jati diri masyarakat sebagai satu kesatuan budaya nasional.
3. Menetapkan sustem penyiaran yang berkeadilan, bermartabat dan bermanfaat guna mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk membentuk intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi dan pemanfaatannya.

Mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa menggunakan media elektronik merupakan factor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus diarahkan untuk mendorong mayarakat Denpasar sebagai masyarakat informasi menuju Kota Cerdas (Smart City)

2.1.3.12 Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

(17). Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Pada prinsipnya koperasi Indonesia adalah Badan Usaha yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi para anggotanya dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Dilihat dari ciri koperasi yang seperti itu, terkandung arti bahwa kegiatan koperasi yang dijalankan para pengurusnya, tidak bisa terlepas dari aktifitas dan keperluan para anggotanya. Karena dengan melaksanakan konsep ini koperasi akan biasa berjalan dengan berkesinambungan dari, oleh dan untuk anggota.

Sejalan dengan perkembangan jaman dan juga kebutuhan para anggota koperasi dan masyarakat disekitar lingkungan koperasi, program yang bisa dijalankan tidak hanya simpan pinjam. Peluang untuk mengembangkan program baru sesuai dengan kebutuhan para anggota



dan masyarakat sekitarnya, menjadi pilihan tepat untuk mencapai tujuan dari koperasi, yakni meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Munculnya koperasi banjar disejumlah tempat di Denpasar, merupakan sebuah terobosan dari pada pengelola koperasi bersangkutan. Keistimewaan koperasi banjar ini, basis anggotanya tentunya saja merupakan warga setempat. Demikian pula program yang bisa diluncurkan juga sangat bervariasi, sesuai dengan kondisi koperasi dimana mereka berada. Mewujudkan koperasi berkelanjutan yang berbasis banjar dengan bermodal budaya dan modal sosial tersebut secara langsung maupun tak langsung mengurangi beban pemerintah daerah, khususnya dalam hal mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan ekonomi berbasis budaya bali. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah sekitarnya. Supaya koperasi bisa tumbuh dan berkembang, maka faktor pendukung juga harus dikembangkan. Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain:

1. Potensi Ekonomi masyarakat
2. Pengusaha
3. Lembaga perkreditan/Keuangan
4. Instansi terkait
5. Koperasi sebagai badan usaha

Meningkatkan peran koperasi, usaha kecil dan menengah dalam tatanan ekonomi kerakyatan berbasis budaya unggulan yang bertumpu pada mekanisme pasar dalam menunjang Denpasar sebagai Kota budaya, telah menjadi Visi dinas koperasi dalam mencapai tujuan pembangunan koperasi. Visi ini dijabarkan melalui misi menyelenggarakan lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif serta berwawasan lingkungan. Meningkatkan jiwa kewirausahaan baru berbasis ilmu pengetahuan yang berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif sehingga memberikan nilai tambah usaha ekonomi lokal dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas berbasis sumber daya lokal. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

Tabel. 2.65.
Rincian keragaan koperasi dari tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah Koperasi	Unit	1.016	1.056	1.090	1.128
2	Jumlah Anggota	Orang	330.575	333.400	334.279	334.629
	Laki - laki	Orang	252.362	254.587	255.087	255.337
	Perempuan	Orang	78.213	78.813	79.192	79.292
3	Pelaksanaan RAT	Unit	883	886	887	309
4	Koperasi Aktif	Unit	913	953	1.004	1.049
5	Koperasi Tidak Aktif	Unit	103	103	86	79
6	Koperasi Sehat	unit	-	-	-	10
7	Koperasi Cukup Sehat	unit	-	-	-	30
8	Koperasi dalam pengawasan*	unit	-	-	-	20
9	Koperasi dalam pengawasan khusus*	unit	-	-	-	92
10	Permodalan					



No	Uraian	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Modal Sendiri	Rp.	232.581.179.783	233.009.179.783	313.269.292.025	432.017.190.021
	Modal Luar	Rp.	753.926.013.750	829.318.615.125	912.250.476.000	1.206.827.841.766
11	Total Asset	Rp.	986.507.193.533	1.062.327.794.908	1.225.519.768.025	2.460.721.621.516
12	Volume Usaha	Rp.	1.994.315.472.941	2.233.633.329.694	2.244.801.496.342	2.246.995.404.477
13	SHU	Rp.	73.044.707.496	81.810.072.395	89.991.109.634	89.996.109.834
14	Jumlah Karyawan	Orang	3.367	3.446	4.207	4.304
15	Manager	Orang	266	384	384	241

Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar

Dari hasil pembinaan kepada koperasi yang selama ini dilakukan terlihat perkembangan yang baik, ditandai dengan kenaikan jumlah koperasi sebesar 1.090 unit di tahun 2015 menjadi 1.128 unit di tahun 2016 dan di ikuti dengan jumlah modal sendiri perdesember 2015 sebesar Rp. 313.269.292.025,-menjadi Rp. 432.017.190.021,- ditahun 2016. Modal luar per desember 2015 Rp. 912.250.476.000,- menjadi Rp. 1.206.827.841.766,- Di tahun 2016. Total asset tahun 2015 sebesar Rp. 1.225.519.768.025,- menjadi Rp. 2.460.721.621.516,- di tahun 2016. Bila dilihat dari jumlah anggota koperasi, jumlahnya mengalami peningkatan yaitu 334.279orang di tahun 2015 menjadi 334.629orang di tahun 2016.

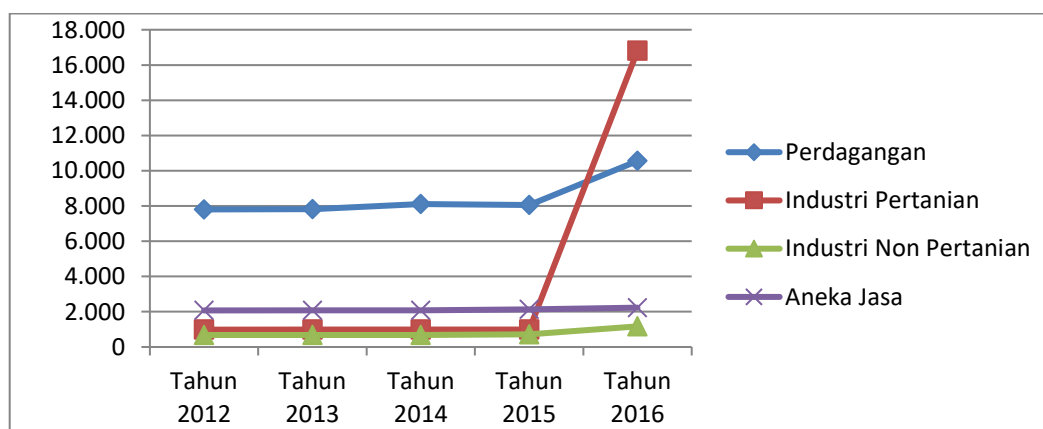
Mengacu pada manfaat koperasi diatas, upaya untuk mengembangkan koperasi di Kota Denpasar sangat diperlukan, baik dengan merangsang tumbuhnya koperasi baru maupun mendorong peningkatan skala layanan dan aset yang di kelola.

Tabel. 2.66.

Perkembangan UMKM dari Tahun 2012 – 2016

No	Klasifikasi	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Perdagangan	7.805	7.811	8.113	8.050	10.554
2	Industri Pertanian	984	991	991	993	16.805
3	IndustriNon Pertanian	682	690	690	726	1.171
4	Aneka Jasa	2.074	2.083	2.083	2.136	2.231
	JUMLAH	11.545	11.575	11.877	11.905	30.761

Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar



Gambar. 2.26 Perkembangan UKM 2012-2016



Dimana di Tahun 2016 telah dilakukan pendataan ulang terhadap UMKM di Kota Denpasar, yang mana hasil dari pendataan ini akan dijadikan pedoman dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan bagi pelaku UMKM, serta akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam hal pengambilan keputusan. Yang mana akan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan langkah pembinaan yang harus dilakukan.

Tabel. 2.67.

Kasifikasi UMKM Berdasarkan Usaha di Kota Denpasar Tahun 2016

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Mikro	30.006
2	Kecil	422
3	Menengah	273
	Total	30.761

Secara umum Koperasi dan UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Selain sulitnya memperoleh bahan baku yang murah dan belum terjalinnya kemitraan dengan perusahaan / BUMN dalam pengembangan pasar. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih dihadapi sebagian besar oleh Koperasi dan UMKM.

2.1.3.13 Urusan Kebudayaan

(18). Dinas Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan terus diupayakan melalui pengembangan, pengelolaan kekayaan dan pengelolaan keragaman budaya. Kinerja Pembangunan dibidang budaya meliputi indikator kajian budaya, fasilitas budaya, gelar budaya dan misi kesenian. Untuk kegiatan yang mencakup kajian seni dilaksanakan melalui 25 Program kegiatan seperti sarasehan, workshop, revitalisasi, konservasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk cakupan fasilitas seni dilaksanakan melalui 15 kegiatan seperti; pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi serta penerbitan dan pendokumentasian. Sebagai hasil dari pembinaan dan usaha melanjutkan pelestarian dituangkan dalam kegiatan gelar seni dengan mencakup kegiatan seperti; pagelaran, festival dan lomba. Dan untuk memperkenalkan budaya daerah ke daerah lain dilaksanakan promosi seni melalui kegiatan misi kesenian ke luar daerah. Selanjutnya upaya pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Disamping itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata. Kesemuanya itu dilakukan dalam upaya mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah.



Dibawah ini tersaji data jumlah organisasi kesenian di Kota Denpasar dari tahun 2010 sampai tahun 2016 seperti disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 2.68.

Perkembangan Organisasi Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2010-2016

Tahun	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Jumlah
2016	207	155	80	174	616
2015	165	227	150	106	648
2014	155	217	151	123	646
2013	181	238	155	193	767
2012	171	229	149	123	672
2011	154	218	154	127	653
2010	154	218	154	127	653

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2016

Jenis organisasi kesenian yang ada di Kota Denpasar sebanyak 29 jenis organisasi, paling banyak adalah gong kebyar yang mencapai 272 buah. Gong kebyar ini hampir terdapat pada setiap banjar, sedangkan beberapa kesenian langka saron, gambuh, seni keroncong hanya terdapat masing-masing 1 buah. Selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel. 2.69.

Jumlah Organisasi Kesenian Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2016

No.	Organisasi Kesenian	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Jumlah
1.	Gong Gede	4	-	2	6	12
2.	Gong Kebyar	89	52	37	94	272
3.	Semar Pegulingan	7	6	-	-	13
4.	Angklung	30	19	6	13	68
5.	Gambang	-	2	-	-	2
6.	Selonding	1	7	4	1	13
7.	Saron	-	-	-	-	-
8.	Gong Suling	-	2	-	-	2
9.	Gambuh	-	-	-	-	-
10.	Barong	5	2	3	7	17
11.	Topeng	1	-	-	-	1
12.	Calon Arang	-	-	-	-	-
13.	Arja	-	1	-	-	1
14.	Sanghyang	-	-	-	-	-
15.	Wayang Wong	-	-	-	-	-
16.	Joged Bumbung	5	-	-	-	5
17.	Legong Dedari	-	-	-	-	-
18.	Wayang Kulit	2	4	-	6	12
19.	Gandrung	-	-	-	-	-
20.	Baris Upacara	2	-	-	-	2
21.	Janger	4	3	1	2	10
22.	MB. Keroncong	-	-	-	-	-
23.	Sastra daerah	-	-	-	-	-
24.	Drama Gong	-	-	-	-	-
25.	Tekok Jago	-	-	-	-	-



No.	Organisasi Kesenian	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Jumlah
26.	Sanggar Seni Tari	47	43	26	34	150
27.	Gong Beri	-	-	-	-	0
28.	Gender Wayang	8	9	1	4	22
29.	Gdr. Pelegongan	2	5	-	7	14
	Jumlah	207	155	80	174	616

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2016

Sedangkan untuk jumlah event yang diselenggarakan dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel. 2.70.

Jumlah Event yang diselenggarakan di Kota Denpasar Tahun 2012-2016

No.	Jenis Event	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pesta Kesenian Bali (PKB)	1	1	1	1	1
2	Pengembangan Kreativitas Seni Budaya HUT Kota Denpasar	1	1	1	1	1
3	Misi Kesenian Keluar Daerah	2	2	2	2	1
4	Pementasan & Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya	1	1	1	1	1
5	Maha Bandana Prasada	1	1	1	1	1
6	Festival Raja Raja Nusantara	1	1	1	1	1
7	Pesona Pulau Serangan	1	1	1	1	1
8	Sanur Festival	-	-	1	1	-
9	Denpasar Festival	1	1	1	1	1
10	Melepas Matahari	1	1	1	1	1
	Jumlah	10	10	11	11	9

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2016

Sebagai apresiasi atas jasa, prestasi dan karya seni ilmuwan, budayawan dan seniman, dalam upaya penggalian, pengembangan, pelestarian dan revitalisasi nilai-nilai budaya daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan, diberikan penghargaan kepada seniman secara berkelanjutan. Jumlah Seniman yang menerima penghargaan dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.71.

Jumlah Seniman yang Dapat Penghargaan di Kota Denpasar sampai Tahun 2016

No.	Jenis Seni	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
1.	Seni Tari	2	1	7	6	22	38
2.	Seni karawaitan	1	1	2	2	8	14
3.	Seni Lukis	1	-	1	2	7	11
4.	Seni Drama	-	1	-	-	-	1
5.	Seni Musik	-	-	1	1	4	6
6.	Sanggar/lembaga	-	-	5	5	9	19
7.	Teater	-	-	-	-	8	8
	Jumlah	4	3	16	16	58	97

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2016



Pembangunan kebudayaan dengan menggali ketersediaan potensi kearifan lokal membutuhkan pengelolaan melalui dialog budaya sehingga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber-sumber yang berdaya guna bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Jumlah Dialog Budaya yang telah diselenggarakan dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel. 2.72.

Dialog Budaya yang diselenggarakan di Kota Denpasar sampai Tahun 2016

No.	Jenis Dialog Budaya	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Purnama Badrawada	-	-	12	13	12
2.	Grebeg Aksara	-	-	1	1	1
3.	Parum Param	-	-	1	1	1
4.	Tilem Dipa Bhawana	-	-	-	12	12
	Jumlah	-	-	14	27	26

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2016

Selanjutnya peranan subak sebagai salah satu kearifan lokal yang dapat menjaga sistem irigasi perairan dan menjadi inti dari usaha pemberdayaan alam dan masyarakat juga pengembangannya dilaksanakan secara terus menerus. Kegiatan pembinaannya dari tahun ke tahun dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel. 2.73.

Jumlah Subak yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar tahun 2012- 2016

No.	Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kec. Denpasar Utara	1	1	2	1	1
2.	Kec. Denpasar Timur	1	1	1	1	1
3.	Kec. Denpasar Selatan	1	1	1	1	1
4.	Kec. Denpasar Barat	1	1	1	1	1
	Jumlah	4	4	5	4	4

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2016

Peranan desa pakraman dalam melestarikan dan mempertahankan budaya dan adat istiadat serta memelihara stabilitas pemerintahan daerah memegang peranan penting. Berbagai pembinaan sebagai usaha untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga adat seperti desa pakraman terus dilakukan. Tabel berikut menunjukkan jumlah Desa Pakraman yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel. 2.74.

Jumlah Desa Pakraman yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar tahun 2012- 2016

No.	Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kec. Denpasar Utara	1	1	1	1	1
2.	Kec. Denpasar Timur	1	1	1	1	1
3.	Kec. Denpasar Selatan	1	1	1	1	1
4.	Kec. Denpasar Barat	1	1	1	1	1
	Jumlah	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2016

Upaya untuk mendukung program pusat tentang pelestarian dan penyelamatan Cagar Budaya terus diupayakan pemerintah Kota Denpasar. Usaha tersebut berupa pencatatan data



dan upaya untuk menjaga kelestarian cagar budaya yang berada di Kota Denpasar, karena untuk wewenang kepemilikan dan pemeliharaan masih berada pada pemerintahan pusat. Berikut ini disajikan data Cagar Budaya di Kota Denpasar sampai tahun 2016 seperti disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 2.75.

Jumlah Cagar Budaya per Kecamatan di Kota Denpasar sampai tahun 2016

NO	SITUS	lokasi			Jumlah Cagar Budaya			
		Br/Dsn	Desa	Kecamatan	Benda Cagar Budaya	Bangunan Cagar Budaya	Struktur Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya
1	Pr Maospahit	Gerenceng	Pemecutan Kaja	Denpasar Barat		2	1	
2	Pr Susunan Wadon	Br Dukuh	Serangan	Denpasar Selatan	2	1		
3	Pr Dalem Cemara	Br Pojok	Serangan	Denpasar Selatan	2	2		
4	Masjid Asyuhada	Kampung Bugis	Serangan	Denpasar Selatan	2	1		
5	Makam Bugis/Rmh Adat	Kampung Bugis	Serangan	Denpasar Selatan			18	
6	Rumah Adat Bugis	Kampung Bugis	Serangan	Denpasar Selatan		1		
7	Pr Puseh Sasetan	Sesetan	Sesetan	Denpasar Selatan	23			
8	Pr Dalem Sakenan	Banjar Dukuh	Serangan	Denpasar Timur	13	2		
9	Puri Agung Kesiman		Kesiman	Denpasar Timur		4	2	
10	Pr Blanjong	Blanjong	Sanur Kauh	Denpasar Timur	1			
11	Pr Rambut Siwi	Tatasan Kaja	Tonja	Denpasar Utara	12	1		
12	Pr Moas Pahit Tonja	Tatasan Kelod	Tonja	Denpasar Utara	3	3	1	
13	Pr Puseh Tonja	Jln. Seroja	Tonja	Denpasar Utara	26	1		
14	Pr Dalem Bengkunang	Jln. Ratna	Tonja	Denpasar Utara	9			
	JUMLAH				93	18	22	

Sumber : BPCB Gianyar

2.1.3.14 Urusan Kearsipan

(19). Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi

Dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, keberadaan dan fungsi perpustakaan, arsip serta dokumentasi merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam proses perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena pada dasarnya perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, arsip merupakan refleksi dan rekaman dari perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Untuk mencapai tujuan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan, Pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar diukur melalui 2 indikator kinerja utama. Pertama indikator bidang perpustakaan, yaitu :meningkatnya minat baca masyarakat dengan mengukur (1) jumlah anggota perpustakaan, (2) jumlah pengunjung, (3) jumlah judul dan koleksi perpustakaan.

Kedua, meningkatnya kualitas informasi dan sistem administrasi kearsipan dengan mengukur : (1) peningkatan kualitas SDM dan sistem kearsipan pada Unit-unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, (2) terwujudnya sistem pengelolaan kearsipan yang semakin baik, (3) pengelolaan arsip in aktif.

A. Bidang Perpustakaan :

Tabel. 2.76.
Perkembangan Jumlah Anggota Perpustakaan

No	Tahun	Jumlah Anggota		Total
		Laki	Perempuan	
1	2012	600	707	1307
2	2013	432	580	1012
3	2014	1111	1516	2627
4	2015	1085	1718	2803
5	2016	198	216	414
Total				

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar

Tabel. 2.77.
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2012 s/d 2016

No	Tahun	Perpustakaan									Total
		Perpus. Umum			Perpus. Jagatnatha			Pusling			
		L	P	Jml.	L	P	Jml.	L	P	Jml.	
1	2012	1420	2035	3455	92	77	169	3367	7323	10690	14314
2	2013	2415	3519	5934	316	297	613	3179	4022	7201	13748
3	2014	2564	4982	7546	566	598	1164	1066	764	1830	10540
4	2015	2814	3857	6671	676	734	1410	1155	1238	2393	10474
5	2016	3356	3917	7283	1233	1346	2579	1509	2964	4473	14335

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar



Tabel. 2.78.
Judul Buku dan Koleksi Buku

Kode	Klasifikasi	Jumlah Koleksi Per Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		Judul	Exp.	Judul	Exp.	Judul	Exp.	Judul	Exp.	Judul	Exp.
000-099	Karya Umum	116	261	75	132	54	116	281	530	46	91
100-199	Filsafat	46	106			164	269	139	271	24	54
200-299	Agama	140	281	29	50	488	1122	362	842	62	122
300-399	Ilmu Sosial	195	397	93	124	403	750	422	816	182	360
400-499	Bahasa	18	42	19	29	99	136	193	355	86	172
500-599	Ilmu Murni	79	172	26	26	109	142	220	409	72	144
600-699	Ilmu Terapan	295	611	7	7	334	581	702	1336	121	242
700-799	Kesenian & Olahraga	68	140	15	27	124	199	305	634	272	544
800-899	Kesusastaan	103	183	4	10	407	853	574	1149	195	389
900-999	Geografi dan Sejarah	44	84	17	29	300	424	295	531	39	78
Total		1104	2277	285	434	2482	4592	3493	6873	1099	2196
Akhir tahun 2012		7710	13628								
Akhir tahun 2013				7995	14062						
Akhir tahun 2014						10477	18654				
Akhir tahun 2015								13970	25527		
Total Akhir Koleksi Tahun 2016								15.069	Judul	27.273	eks

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar

Dari tabel di atas, tampak bahwa kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar dilihat dari pencapaian sasaran strategis, urusan perpustakaan memang dapat dikatakan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 terjadi trend positif, progress atau kemajuan terhadap jumlah koleksi buku dan judul buku yang dimiliki, sementara itu untuk jumlah anggota perpustakaan dan kunjungan perpustakaan terjadi fluktuasi.

B. Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar yang berawal dari penciptaan arsip sebagai informasi manajemen. Kemudian diikuti dengan pemeliharaan dan penyediaan layanan siap akses kepada pengguna internal dan publik. Pada saat negara mengkampanyekan akses yang lebih besar terhadap informasi publik melalui penyusunan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka pada saat yang sama pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar juga harus mengkampanyekan pengelolaan arsip yang lebih baik, dan secara kontinyu melakukan monitoring dan evaluasi kearsipan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Upaya peningkatan pembinaan kearsipan telah dilaksanakan secara intensif, hasilnya telah menunjukkan kemajuan yang secara umum ditandai dengan jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan kaidah urusan kearsipan. Bila



dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah arsip perangkat daerah yang telah dikeloladengan baik di depo arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, khususnya arsip in aktif sesuai dengan kaidah kearsipan mengalami peningkatan sebanyak 50% yaitu dari 8 perangkat daerah pada tahun 2011 menjadi 12 perangkat daerah pada tahun 2012. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 16 perangkat daerah. Sementara itu pada tahun 2014 menjadi 20 perangkat daerah, dan pada tahun 2015 menjadi 24 dan pada tahun 2016 bertambah 4perangkat daerah lagi sehingga total menjadi 28 perangkat daerah sehingga dapat dikatakan bahwa samapai dengan Tahun 2016 persentase arsip in aktif yang telah tersimpan dengan baik di depo arsip DPK Kota Denpasar sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku sebesar 82,35%, sedangkan presentase perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip dengan baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kearsipan yang dilakukan ke perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Denpasar sebesar 100% sebagaimana disajikan pada tabel 2.77 di bawah ini :

Tabel. 2.79.

Pengelolaan arsip in aktif dan Monitoring evaluasi kearsipan dari Tahun 2012-2016

Pengelolaan arsip in aktif	2012	2013	2014	2015	2016
Jmlh Perangkat Daerah yg dikelola arsipnya	12	16	20	24	28
Jmlh Perangkat Daerah Seluruhnya	34	34	34	34	34
% arsip in aktif yang tersimpan dengan baik	35,29%	47,06%	58,82%	70,59%	82,35%
MONEV kearsipan					
% Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip dengan baik	100% 34 PD	100% 34 PD	100% 34 PD	100% 34 PD	100% 34 PD

Pencapaian sasaran yang selama ini telah diraih tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah :

1. Prasarana perpustakaan, arsip dan dokumentasi masih perlu ditingkatkan
2. Masih minimnya tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan.

2.1.3.15 Urusan Kelautan Dan Perikanan

(20). Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan

Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam memacu perkembangan ekonomi. Seperti telah diketahui bahwa kegiatan pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan, kesehatan dan isu lainnya. Dinamisnya kehidupan masyarakat Kota Denpasar serta meningkatnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, Pemerintah Kota Denpasar berupaya meningkatkan pembangunan salah satunya pembangunan di sektor perikanan. Dengan daktor pendukung panjang pantai 47,32 km dan luas laut 101,85 km², hutan mangrove 524,27, terumbu karang 1.262,71 ha, padang lamun 452 ha (data administrasi pesisir Provinsi Bali Tahun 2015) merupakan potensi yang cukup besar untuk pengembangan perikanan laut (budidaya dan penangkapan). Begitu juga dengan pengembangan perikanan darat dengan potensi luas sawah 2.130 ha, tegalan dan pekarangan seluas 308 ha, perairan umum 2.557 ha, tambak 28 ha.



Beberapa permasalahan umum dalam pengembangan sector perikanan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- Adanya alih fungsi lahan yang sangat tinggi di Kota Denpasar
- Pola produksi yang belum tertata baik
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan
- Kurangnya sarana prasarana kelompok nelayan dan pembudidayaan ikan
- Masih rendahnya keterampilan nelayan dan pembudidaya ikan dalam penerapan teknologi dan informasi.

2.1.3.16 Urusan Pariwisata

(21). Dinas Pariwisata

Bali sebagai destinasi wisata dunia mengalami fluktuasi kunjungan wisatawan dan juga mengakibatkan fluktuasi tingkat hunian kamar di Kota Denpasar. Perkembangan kunjungan wisatawan dari tahun 2012-2016 merupakan cerminan membaiknya kondisi kepariwisataan di Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota Denpasar bersama-sama dengan seluruh komponen/pelaku pariwisata untuk memulihkan kondisi kepariwisataan.

Tabel. 2.80.
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Ke Kota Denpasar
Tahun 2012 s/d 2016

No	Tahun	Kunjungan Wisatawan Ke Kota Denpasar
1	2012	423.539 orang
2	2013	480.124 orang
3	2014	504.130 orang
4	2015	580.450 orang
5	2016	625.431 orang

Data menunjukkan bahwa tahun 2016 merupakan pencapaian kuantitas jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Denpasar terbanyak bagi Kota Denpasar, dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disikapi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan pelaku pariwisata antara lain membangun pencitraan dengan inovasi (pembuatan event pariwisata), pelaksanaan promosi terpadu melalui media cetak maupun elektronik, menyebarkan materi promosi dalam bentuk brosur-brosur (Calendar of Event, Map, Baliho, Highligh Of Denpasar dan lain-lain), mengikuti promosi dan roadshow, pemanfaatan teknologi melalui website.

Kebudayaan dengan latar belakang agama hindu adalah sebagai daya tarik utama kepariwisataan di Kota Denpasar. Eksistensinya harus dapat dipertahankan sebagai modal pembangunan dan untuk pengembangan kepariwisataan ke depan.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

- Lama tinggal rata-rata mengalami trend penurunan.
- Belum keseluruhan SDM bidang pariwisata bersertifikat.



- c) Sertifikasi bidang usaha pariwisata belum bisa terlaksana Karena kendala aturan.
- d) Kesadaran masyarakat bidang lalu lintas dan menjaga lingkungan belum maksimal.
- e) Jumlah destinasi yang mendukung pariwisata di Kota Denpasar masih terbatas.
- f) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan khususnya yang berbasis IT.

2.1.3.17 Urusan Pertanian

(22). Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk mendorong kecukupan kebutuhan pangan daerah dan mendorong peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan komoditi sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam pertumbuhan PDRB.

Dalam hal ini peran Dinas Pertanian Kota Denpasar sangatlah penting, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pemberdayaan sumberdaya di sektor pertanian yang ada di Kota Denpasar. Kunci keberhasilan pengembangan usaha pada sektor pertanian terletak pada aspek perencanaan. Adanya perencanaan yang matang dan sistematis sangat diperlukan karena agribisnis secara modern membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana dan lain-lain. Dalam kebijakan pengembangan sektor, pengembangan pertanian Kota Denpasar diharapkan untuk menuju pada pengembangan *urban farming* dan menjaga ekosistem perkotaan.

Banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar, mengingat semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian. Masalah-masalah dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rendahnya rasio kepemilikan lahan pertanian di Kota Denpasar menyebabkan kegiatan pertanian selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
2. Tingginya alih fungsi lahan karena nilai lahan pertanian di Kota Denpasar memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Alih fungsi lahan
2. Belum optimalnya kelembagaan petani, kualitas SDM petani, penyuluh dan koordinasi dengan instansi terkait

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung capaian indikator jumlah produktivitas hasil pertanian antara lain:

1. Pemanfaatan Teknologi untuk meningkatkan SDA dan SDM Pertanian
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna dengan menerapkan teknologi budidaya pertanian
3. Penyediaan sarana produksi pertanian
4. Pengembangan bibit unggul pertanian
5. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
6. Pelaksanaan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Monitoring, pengumpulan, analisa dan evaluasi data produksi tanaman pangan dan hortikultura.



2.1.3.18 Urusan Perdagangan

(23). Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan wisatawan yang datang ke Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potensial sebagai daerah pemasaran produk barang dan jasa. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perdagangan di Kota Denpasar dapat dilihat sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan, pemberdayaan industri serta perlindungan konsumen.
2. Masih terbatasnya informasi harga kepada masyarakat dalam pengendalian ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
3. Masih perlunya peningkatan kemampuan manajemen ekspor bagi pengusaha serta peningkatan kualitas produk unggulan ekspor diperlukan untuk dapat mendukung terwujudnya distribusi produk unggulan (superior product) dari Kota Denpasar melewati batas Negara melalui peningkatan daya saing usaha.
4. Masih terbatasnya akses pasar serta informasi pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan perdagangan terutama produk unggulan yang dihasilkan oleh UKM/IKM untuk mampu bersaing dalam kualitas produk sehingga diharapkan terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya peningkatan pasar dalam dan luar negeri.

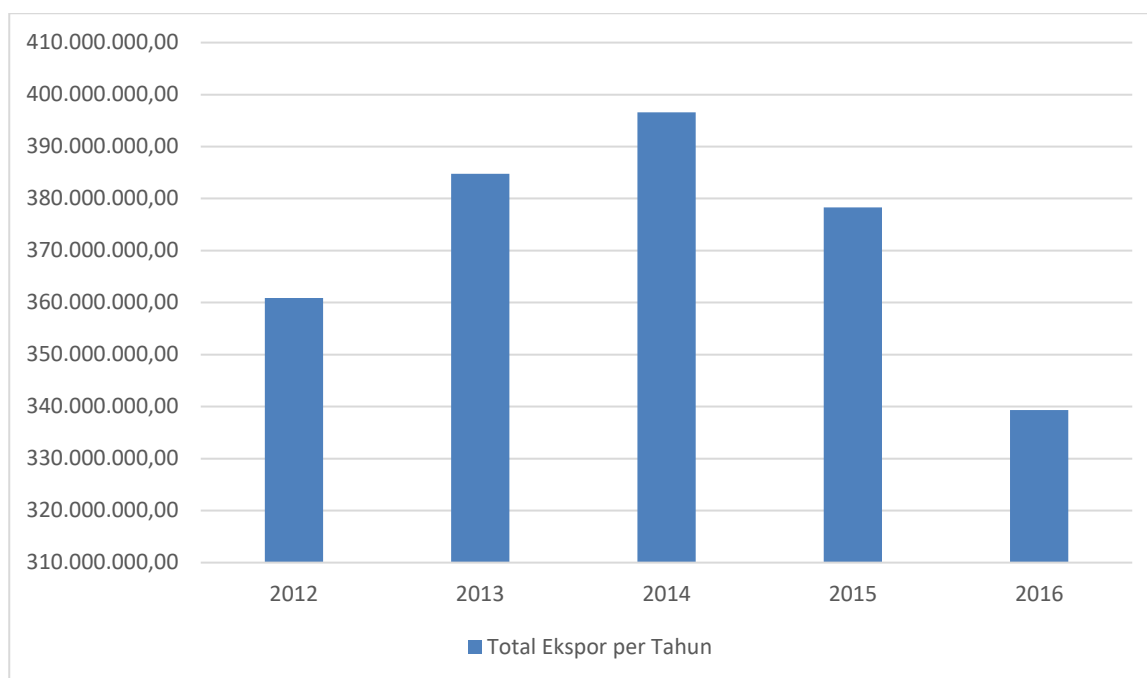




Tabel. 2.81. Laporan Realisasi Ekspor Kota Denpasar
Periode Tahun 2012 s/d 2016

NO	KOMODITI	2012		2013		2014		2015		2016		Total per Komoditi
		NILAI (US\$)	%	NILAI (US\$)	%	NILAI (US\$)	%	NILAI (US\$)	%	NILAI (US\$)	%	
1	Hasil Kerajinan	155.206.958,02	43,01	158.932.293,17	41,31	173.661.462,34	43,79	154.958.735,10	40,96	156.676.631,49	46,17	799.436.080,12
2	Hasil Industri	99.432.264,55	27,55	114.943.007,87	29,88	112.804.630,81	28,44	110.098.300,79	29,10	108.707.997,21	32,04	545.986.201,23
3	Hasil Pertanian	100.822.533,26	27,94	109.569.720,73	28,48	108.221.675,27	27,29	111.338.087,22	29,43	71.626.480,00	21,11	501.578.496,48
4	Hasil Perkebunan	154.019,39	0,04	251.362,00	0,07	881.454,73	0,22	427.367,56	0,11	455.408,38	0,13	2.169.612,06
5	Lain - Lain	5.274.314,53	1,46	1.049.756,67	0,27	1.049.756,67	0,26	1.512.747,53	0,40	1.850.350,50	0,55	10.736.925,90
	Total	360.890.089,75	100,00	384.746.140,44	100,00	396.618.979,82	100,00	378.335.238,20	100,00	339.316.867,58	100,00	1.859.907.315,79

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar



Gambar. 2.27 Grafik Total Ekspor per Tahun

2.1.3.19 Urusan Perencanaan Pembangunan

(24). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Pembangunan Kota Denpasar sesuai dengan harapan seluruh unsur masyarakat tidak bisa lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta pilihan cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan system perencanaan pembangunan nasional, yaitu : a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan. daerah (RKPD) yang bersifat tahunan disusun berikut perkiraan anggarannya.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan



yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Didalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untuk perencanaan pembangunan yang dituangkan didalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan APBN/D merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistimatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*inpact*).

2.1.3.20 Urusan Pemerintahan Umum

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan upaya guna terwujudnya pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabel, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat, serta dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini, diperlukan adanya penyesuaian dalam sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, perbaikan sumber daya manusia serta pengawasan yang efektif, atau reformasi birokrasi secara berkesinambungan. Sampai saat ini reformasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari banyaknya masalah yang harus dicarikan solusinya.

Dari sudut pandang internal birokrasi masih banyak kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, permasalahan banyak muncul seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya kinerja aparatur, rendahnya efisiensi aparatur, rendahnya kesejahteraan pegawai serta banyak peraturan yang sudah tidak sesuai lagi.

Secara eksternal maka faktor globalisasi dan adanya revolusi teknologi informasi (e-government) juga sangat berpengaruh terhadap penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan memberikan tantangan tersendiri yang memerlukan sikap kehati-hatian. Meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan lingkungan politik, ekonomi dan sosial, makin deras arus informasi dan teknologi dari mancanegara yang menimbulkan infiltrasi budaya dan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam informasi dalam masyarakat.



Secara umum sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2016–2021 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas;
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
4. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan di atasnya.
5. Terciptanya iklim bisnis yang positif

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan Kinerja Legislatif, Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas /Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur serta Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

2.1.4. Aspek Daya Saing

2.1.4.1 Fokus kemampuan ekonomi daerah.

1. Rasio Ketergantungan Penduduk

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untukantisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Tabel 2.82
Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s/d 2015
Kota Denpasar

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	221.958	224.530	209.400	212.300	214.500
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	28.712	30.174	24.100	24.300	25.600
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	250.670	254.704	233.500	236.600	240.100
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	554.230	579.205	612.700	609.900	640.500
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0.45	0.44	0,38	0,39	0.37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



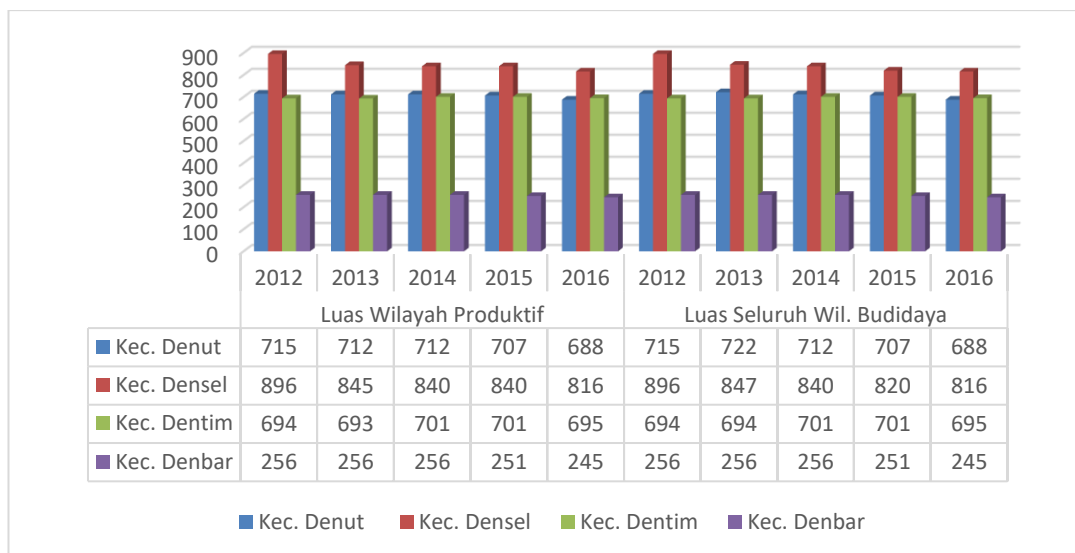
Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu 250.670 sampai tahun 2012 sebesar 254.704 , sedangkan pada tahun 2013 sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 233.500 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun-tahun selanjutnya sampai data terakhir pada tahun 2015 jumlah Usia tidak produktif di Kota Denpasar mencapai 240.100 dimana jika dibandingkan dengan data awal pada tahun 2011, usia tidak produktif di Kota Denpasar mengalami penurunan.

2.1.4.2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

Tabel 2.83
Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2012 s/d 2016
Kota Denpasar

NO (1)	Kecamatan (2)	Luas Wilayah Produktif (3)					Luas Seluruh Wil. Budidaya (4)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kecamatan Denpasar Utara	715	712	712	707	688	715	712	712	707	688
2	Kecamatan Denpasar Selatan	896	845	840	840	816	896	845	840	820	816
3	Kecamatan Denpasar Timur	694	693	701	701	695	694	693	701	701	695
4	Kecamatan Denpasar Barat	256	256	256	251	245	256	256	256	251	245
	Jumlah	2.561	2.506	2.509	2.479	2.444	2.561	2.506	2.509	2.479	2.444

Sumber : Dinas Pertanian Kota Denpasar



Gambar. 2.28 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2012 s/d 2016 Kota Denpasar



Tahun 2014 terjadi penambahan luas lahan sawah di Kota Denpasar sebesar 3 ha yang diakibatkan terjadi penyusutan 8 ha dan penambahan 11 ha dengan masuknya Subak Umadesa masuk wilayah Kota Denpasar (pelimpahan dari Kabupaten Badung). Penyusutan terjadi di Kecamatan Denpasar Timur yaitu Subak Taman 3 ha dan di Kecamatan Selatan sebanyak 5 ha yang terdiri dari subak sanur 1 ha, Subak Intaran Barat 2 ha dan Subak Cuculan 2 ha.

Tahun 2015 terjadi penyusutan lahan sawah sebesar 30 ha, terbesar di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 20 ha yang terdiri dari Subak Kepaon 2 ha, Subak Cuculan 5 ha, Subak Renon 2 ha, Subak Panjer 6 ha dan Subak Kerdung 5 ha. Di Kecamatan Denpasar Barat sebanyak 5 ha yang terdiri dari Subak Semila 2 ha, Subak Lange 1 ha dan Subak Tegalbuah 2 ha. Di Kecamatan Denpasar Utara terjadi penyusutan lahan sawah sebanyak 5 ha di Subak Petangan.

Tahun 2016 terjadi penyusutan lahan sawah sebesar 35 ha, terbesar di Kecamatan Denpasar Utara seluas 19 ha yang terdiri atas Subak Dalem 4 ha, Subak Lungatad 3 ha, Subak Kedua 2 ha, Subak Pakel I 2 ha, Subak Petangan 5 ha dan Subak Praupan Timur 3 ha. Di Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 6 ha yang terdiri dari Subak Paang 2 ha, Subak Taman 1 ha, Subak Temaga 1 ha dan Subak Padanggalak 2 ha. Di Kecamatan Denpasar Barat terjadi penyusutan lahan sawah sebanyak 6 ha yaitu Subak Tegallantang 4 ha dan Subak Lange 2 ha. Di Kecamatan Denpasar Selatan terjadi penyusutan lahan sawah sebanyak 4 ha yang terdiri dari Subak Sidakarya 2 ha dan Subak Kepaon 2 ha.

2.1.4.3 Fokus Iklim berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, hal penting yang harus ada antara lain adalah penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah. Indikator penting dalam kaitannya dengan iklim investasi daerah antara lain besaran angka kriminalitas yang tertangani oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan).

Tabel 2.84
Angka Kriminalitas Kota Denpasar

Jenis Kriminal	2012	2013
Jumlah kasus Narkoba	171	170
Jumlah kasus Pembunuhan	6	6
Jumlah Kejahatan Seksual	3	3
Jumlah kasus Penganiayaan	157	198
Jumlah kasus Pencurian	857	919
Jumlah kasus Penipuan	117	147
Jumlah kasus Penadah	13	4
Jumlah kasus penggelapan	206	174
Jumlah kriminalitas selama 1 tahun	2.743	3.052

Sumber : Poltabes Kota Denpasar



2.1.4.4 Fokus sumber daya manusia

Guna mewujudkan pembangunan multidimensi dan pelayanan prima bagi masyarakat kota, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai.

Secara kualitas, kondisi SDM Aparatur Pemerintah Kota Denpasar dapat dikatakan memadai, hal ini dapat dilihat dari data SDM Aparatur per Desember 2016, terbanyak adalah lulusan S-1 sebanyak 3.498 orang atau 48,88% diikuti lulusan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan sebanyak 1.643 orang atau sebesar 22,96%.

Tabel 2.85
Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di
Kota Denpasar Tahun 2016

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	SEKOLAH DASAR	132	1,85%
2	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	166	2,32%
3	SEKOLAH MENENGAH UMUM	1643	22,96%
4	DIPLOMA 1 (D1)	59	0,83%
5	DIPLOMA 2 (D2)	736	10,29%
6	DIPLOMA 3 (D3)	496	6,93%
7	STRATA SATU (S1)	3498	48,88%
8	STRATA DUA (S2)	427	5,97%
9	STRATA TIGA (S3)	-	-
Total		7430	100%

Sumber : Badan BKPP Kota Denpasar (Data 31 Desember 2016)

Jumlah aparatur yang memadai akan lebih optimal perannya dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bila diikuti dengan penempatan SDM Aparatur ini pada bidang tugas yang sesuai dengan kompetensinya.

2. Rasio Ketergantungan Penduduk

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untukantisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan , kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Tabel 2.86
Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s/d 2015
Kota Denpasar

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	221.958	224.530	209.400	212.300	214.500
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	28.712	30.174	24.100	24.300	25.600
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	250.670	254.704	233.500	236.600	240.100
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	554.230	579.205	612.700	609.900	640.500
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0.45	0.44	0,38	0,39	0.37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 233.500. Pada tahun 2014 sebanyak 236.600 dan tahun 2015 240.100. Untuk usai produktif tahun 2011 sebanyak 554.230 orang dan 579.205 orang ditahun 2012, untuk tahun 2013 adalah yaitu sebanyak 612.700 orang dan tahun 2014 adalah 609.900 orang dan tahun 2015 sebanyak 609.900 orang. Untuk rasio ketergantungan sebesar tahun 2011 sebesar 0,45 ditahun 2012 sebesar 0,44 dan di tahun 2013 sebesar 0,38 dan tahun 2014 sebesar 0.39 sedangkan di tahun 2015 sebesar 0,37.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD

Kesinambungan pelaksanaan pembangunan dapat tercapai jika ada keterkaitan antara perencanaan di masa datang dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai di masa lalu. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui suatu evaluasi terhadap capaian kinerja yang didasarkan kepada informasi yang obyektif. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja tersebut, perlu dilakukan evaluasi kinerja yang secara sekaligus menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar. Namun dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 ini kami belum bisa sepenuhnya menyajikan data-data hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang di Dokumen RKPD Tahun 2016 dengan RPJMD Termasuk pula evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2016) dengan realisasi Renstra Perangkat Daerah karena Dokumen seperti Renstra Perangkat Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat ini masih dalam proses penyusunan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.1.1 Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.



Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Pengertian, Prinsip dan Penerapan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

A. Pengertian

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

B. Prinsip

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsip. Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.



3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Peduli pada *Stakeholder*/Dunia Usaha

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana *good governance* dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek *good governance* menjadi kemudian *guidence* atau panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan *stakeholder* lainnya, termasuk didalamnya publik.

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.



6. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, *leaflet*, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi

7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.



C. Penerapan di Pemerintah Kota Denpasar

Good Governance di Kota Denpasar dirintis dan diterapkan sejak era Reformasi yang mana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan, penerapan *Good Governance* di Kota Denpasar belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih ditemukannya kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim *Good Governance* yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBD sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBD dan BUMD. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel kedepannya. Undang-undang, peraturan dan lembaga – lembaga penunjang pelaksanaan *Good governance* pun banyak yang dibentuk. dimana sektor publik di tempatkan sebagai *agent of development* bukannya sebagai entitas bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis *Good Governance*.

Diterapkannya *Good Governance* di Kota Denpasar tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya *Good Corporate Governance*. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa Kota Denpasar kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2.3.1.2 Pendidikan

Indikator kesejahteraan sosial masyarakat Kota Denpasar dapat dilihat dari beberapa indikator tingkat pendidikan masyarakat seperti angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan dan angka partisipasi sekolah. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Denpasar terkait dengan tingkat pendidikan masyarakatnya adalah:

- a. Belum terpenuhinya mutu, akses dan relevansi pendidikan antara lain:
 - (1) Masih kurangnya pendidikan anak usia dini seperti: PAUD berbasis budaya Bali dan Agama Hindu, penyediaan guru PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - (2) Belum terpenuhinya wajib belajar 12 tahun. (Mulai tahun 2017 bukan kewenangan Kota, menjadi kewenangan Provinsi)
 - (3) Masih kurangnya sarana dan prasarana sekolah, olahraga dan ekstra kurikuler untuk pendidikan usia dini, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendidikan menengah.
 - (4) Masih kurangnya pemberian subsidi buku pelajaran dan sarana pembelajaran (Ujian Nasional Berbasis Komputer) bagi siswa.
 - (5) Masih perlunya pembangunan Unit Sekolah Baru tingkat SMP sesuai dengan populasi penduduk di tiap kecamatan.



- b. Belum terpenuhinya jumlah guru Agama Hindu bagi semua jenjang pendidikan.
- c. Masih terjadi ketimpangan tingkat partisipasi sekolah di masing-masing kecamatan pada masing masing jenjang pendidikan.

2.3.1.3 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti: angka harapan hidup, angka kematian bayi, kematian balita, angka kematian ibu dan lainnya. Berdasarkan atas hal di atas, maka permasalahan tingkat kesehatan masyarakat Kota Denpasar adalah:

- a. Capaian angka harapan hidup Kota Denpasar masih di bawah 74,50
- b. Masih terjadinya kematian ibu melahirkan, kematian bayi, kematian balita dan adanya gizi buruk walaupun sudah di bawah target nasional.
- c. Capaian cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 masih di bawah 100 %.
- d. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani masih di bawah 100 %.
- e. Cakupan pelayanan Ibu Nifas masih di bawah 100 %.
- f. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani masih di bawah 100 %.
- g. Cakupan kunjungan bayi masih di bawah 100 %.
- h. Cakupan pelayanan anak balita masih di bawah 100 %.
- i. Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat masih di bawah 100 %.
- j. Cakupan peserta KB Aktif masih di bawah 100 %.
- k. Masih tingginya kasus HIV AIDS.

2.3.1.4 Penanggulangan Kemiskinan

Berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang belum terselesaikan dan masih terus dicari solusinya oleh hampir seluruh wilayah termasuk oleh Denpasar. Permasalahan terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Denpasar adalah:

- a. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar yang diakibatkan oleh adanya ketimpangan pendapatan.
- b. Tingginya arus urbanisasi yang terjadi termasuk banyaknya kaum urban yang belum memiliki pekerjaan tetap.
- c. Tidak diimbangi dengan kepemilikan skill / keahlian

2.3.1.5 Infrastruktur

Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar meliputi pembangunan jalan dan umur pakai jalan mendapatkan perhatian khusus, mengingat semakin panjang umur jalan maka intensitas perbaikan akan semakin berkurang sehingga keamanan, kenyamanan dan gangguan terhadap pengguna jalan dalam rangka pemeliharaan jalan akan semakin sedikit. Semakin panjang umur pakai jalan utama kota, mencerminkan semakin baiknya kualitas jalan dan juga akan berdampak pada semakin tingginya efisiensi anggaran untuk pemeliharaan jalan pertahunnya dan efisiensi biaya tersebut dapat dialihkan untuk peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan atau pembangunan infrastruktur lainnya.



Kegiatan penataan ruang dan perumahan dilaksanakan dalam rangka menata fungsi – fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi – fungsi bangunan yang di wadahnya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang berupa interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas. Keteraturan tata ruang kota akan bermuara pada wujud kota yang berwawasan budaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. Permasalahan yang terkait dengan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Denpasar adalah:

- a. Kondisi jaringan utilitas infrastruktur wilayah belum terpadu.
- b. Kondisi jaringan jalan maupun jalan lingkungan beserta utilitasnya serta fasilitas umum dan sosial kemasyarakatan termasuk jalan menuju pura masih ada yang belum tertata dengan baik.
- c. Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak.
- d. Ruang terbuka hijau masih sangat kurang.
- e. Kawasan/lingkungan Pura/tempat suci dan fasilitas lainnya masih ada yang belum tertaa dengan baik.
- f. Keterbatasan luasan dan sebaran ruang publik.
- g. Masih terdapatnya beberapa kawasan kumuh dan rasio bangunan ber-IMB belum maksimal.
- h. Penataan hunian permukiman yang layak (rumah sehat) dengan akses sanitasi pemukimam yang belum memadai dan terbangun secara optimal.
- i. Kondisi drainase dan prasarana lainnya masih ada yang belum selaras dengan tata ruang sehingga menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir.
- j. Kondisi jaringan irigasi dan jalan usaha tani yang belum optimal.
- k. Belum optimalnya penyusunan dan pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
- l. Adanya tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
- m. Kurang optimalnya penyusunan perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh seperti kawasan perkotaan.
- n. Belum tersedianya kawasan terpadu antara dunia industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi yang memungkinkan adanya aliran informasi yang lebih cepat dan efisien.

2.3.1.6 Kebudayaan

Denpasar merupakan salah satu kota kreatif terkait dengan perkembangan seni pertunjukan, arsitektur, pasar seni, kuliner dan lain-lain. Tradisi kreatif tersebut terevitalisasi dan terakselerasi oleh perkembangan industri kerajinan dan pariwisata serta ditopang oleh seniman. Pemerintah Kota Denpasar telah mengambil inisiatif dan merespon secara holistik, untuk mengimplementasikan kegiatan industri kreatif dan mewujudkan Denpasar Kota Kreatif berbasis budaya unggulan. Secara institusional formal, Kota Denpasar telah tercakup ke dalam salah satu dari sepuluh kelompok Kota Kreatif di Indonesia. Secara aktual empirik, industri



kreatif dan aneka kegiatan Denpasar Kreatif telah tumbuh dan hidup di masyarakat akar rumput, seperti : banjar, subak dan Desa Pakraman, STT, Sanggar, PKK dan komunitas kreatif.

Adanya permasalahan pembangunan ketahanan dan keberadaan kebudayaan Bali antara lain:

- a. Perlunya peningkatan pengelolaan budaya, Pura, simbol-simbol sacral sebagai asset yang sangat berharga dalam membangun jatidiri.
- b. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa guna mewujudkan hak paten seni
- c. Masih adanya warisan budaya yang masih belum didokumentasikan dengan baik
- d. Hampir punahnya beberapa kesenian langka yang masih ada dan perlunya upaya peningkatan pementasan seni budaya Bali pada pentas di hotel dan restoran.
- e. Perlu adanya sarana gedung budaya yang memadai dalam rangka pengembangan seni dan budaya.

2.3.1.7 Kreativitas dan inovasi

Untuk mendukung kinerja pembangunan Kota Denpasar, diperlukan inovasi dan kreativitas daerah dalam berbagai aspek dan skala. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Sedangkan skala inovasi dan kreativitas daerah meliputi lokal, nasional, regional, dan global. Pengembangan inovasi dan kreativitas daerah harus didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, dan teknik rekayasa. Dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis, efektif, efisien dan terpadu. Permasalahan terkait dengan penguatan inovasi daerah di Kota Denpasar adalah:

- A. Belum adanya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) secara sistemik dan sistematis yang merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik).
- B. Inovasi daerah dan kreativitas daerah belum optimal dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah.

2.3.1.8 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan nasional. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum. Adapun permasalahan ketahanan pangan di Kota Denpasar. Adapun permasalahan ketahanan pangan di Kota Denpasar adalah:



- a. Masih kurangnya kajian penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
- b. Masih kurangnya pemetaan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk ketahanan pangan.
- c. Perlindungan terhadap sawah, sumberdaya air, kesuburan tanah, akses terhadap sarana produksi dan bantuan kepada petani dalam rangka peningkatan ketahanan pangan belum optimal.
- d. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang.
- e. Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat.
- f. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.

2.3.1.9 Perekonomian

Permasalahan yang dihadapi Kota Denpasar berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah :

- a. Ketimpangan peningkatan pertumbuhan antar sektor ekonomi pembentuk PDRB.
- b. Pertumbuhan ekonomi wilayah yang belum merata
- c. Penurunan peranan sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta sektor industri pengolahan.
- d. Pertumbuhan sektor pariwisata seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum belum mampu mendorong sektor pertanian, jasa kesehatan dan jasa lainnya.

Adapun permasalahan koperasi dan UKM di Kota Denpasar antara lain:

- a. Adanya koperasi yang tidak aktif.
- b. Belum berkembangnya koperasi berbasis pertanian, pariwisata dan UMKM di Kota Denpasar.
- c. UMKM belum mampu untuk mengakses pasar secara luas.
- d. Aspek permodalan, pengolahan, pemasaran dan daya saing UMKM masih lemah.

2.3.1.10 Iklim investasi dan iklim usaha

Iklim investasi yang kondusif merupakan faktor penting untuk meningkatkan investasi di Kota Denpasar. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Denpasar dalam peningkatan iklim investasi adalah:

- a. Belum optimalnya kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana yang meliputi antara lain sistem dan prosedur berinvestasi, transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan infrastruktur pendukung.
- b. Investasi yang dikelola belum memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat secara adil dan merata
- c. Belum adanya kajian mendalam pada investasi yang telah dan akan dilakukan, baik investasi yang bersifat fisik maupun non fisik.



2.3.1.11 Lingkungan hidup

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum pembangunan lingkungan hidup. Yang bertujuan untuk: melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global. Permasalahan di bidang lingkungan Kota Denpasar, diantaranya adalah masih terjadinya ancaman banjir, timbunan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah medis, limbah domestik, minyak jelantah, abrasi pantai, interusi air laut, kerusakan terumbu karang, kerusakan ekosistem padang lamun, menurunnya kualitas udara, sungai tercemar berat, tercemarnya kualitas air sungai dan air tanah, semakin punahnya jenis-jenis flora dan fauna asli Kota Denpasar, semakin langkanya penyu hijau, kerusakan hutan mangrove, semakin sempitnya ruang terbuka hijau, semakin luasnya kerusakan tanah dan meningkatnya alih fungsi lahan serta variabilitas iklim.

2.3.1.12 Politik, hukum, keamanan dan ketertiban

Adapun permasalahan yang masih dihadapi Kota Denpasar dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan politik anatar lain:

- a. Masih perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
- b. Masih perlunya pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi: peningkatan kesadaran bela negara, peningkatan koordinasi forum pembauran kebangsaan, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa,
- c. Masih perlunya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) meliputi: Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, Penyuluhan Berkembangnya Praktek Prostitusi, Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak dibawah Umur,
- d. Masih perlunya pendidikan politik masyarakat, meliputi: verifikasi bantuan keuangan parpol, pendidikan politik pemilih pemula, pemberdayaan kelembagaan parpol, koordinasi forum-forum diskusi politik, pendidikan politik kepada organisasi massa.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar yang aman, nyaman dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Denpasar merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini



sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Adapun permasalahan menjaga ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Denpasar meliputi:

- a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mematuhi Peraturan Daerah terutama berkaitan dengan keberadaan penduduk pendatang, (Krama Tamui dan tamiu), dan yang berkaitan dengan ketertiban umum lainnya terutama di lingkungan Desa Pekraman.
- b. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung Penertiban Pelanggaran.
- c. Koordinasi yang dilakukan antara Sat.Pol.PP Kota Denpasar dengan instansi terkait baik dengan PD yang lain maupun dengan Aparat Desa Adat/Pecalang masih perlu ditingkatkan.
- d. Adanya Kepentingan-kepentingan lain dalam masyarakat sehingga cenderung menimbulkan gangguan ketertiban umum.



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKANKEUANGAN DAERAH

Salah satu bagian terpenting dari sebuah perencanaan pembangunan suatu daerah adalah gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah tersebut untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya gambaran tersebut maka suatu daerah diharapkan bisa mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD Tahun 2018 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Denpasar serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD Tahun 2018 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Denpasar serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro yang diinginkan Pemerintah Kota Denpasar akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan.

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan disisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah.



Pemulihan stabilitas pertumbuhan perekonomian daerah juga terus dipacu melalui kebijakan lintas sektoral dalam rangka peningkatan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi.

Lapangan usaha sektor perdagangan hotel dan restoran di Kota Denpasar memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian daerah, dapat menciptakan iklim yang positif dan identitas Kota Denpasar sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan mendukung pengembangan pariwisata.

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedepan terutama dalam hal mengantisipasi jumlah angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan investasi disamping padat modal juga padat karya, sehingga dengan pola seperti itu permasalahan angkatan kerja, kemiskinan dan pengangguran bisa diturunkan, dan pada gilirannya salah satu sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat menyerap jumlah pencari kerja, tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya akan terdistribusikan karena perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha selalu tercipta melalui iklim investasi yang kondusif, sehingga penduduk memperoleh kesempatan secara langsung menikmati hasil pembangunan.

Pengupayaan pertumbuhan ekonomi diharapkan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan upaya diatas diperlukan strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat terutama pada golongan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Denpasar dengan pengeluaran modal dan infrastruktur yang memadai terutama pada sektor riil. Manfaat dari hal tersebut telah kita rasakan karena selama terjadinya krisis justru usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dan masih berkembang.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan kondisi perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada beberapa faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait sektor moneter maupun sektor riil. Pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing serta kondisi ekonomi dunia secara umum sangat berdampak pada perekonomian di daerah.

Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.



Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kota Denpasar Harga Berlaku (Juta) Menurut Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.986.001,4	2.170.980,2	2.475.899,4	2.748.028,1
B	Pertambangan/Penggalian	20.329,3	22.890,0	25.071,3	25.331,0
C	Industri Pengolahan	1.858.596,0	2.058.868,3	2.342.479,7	2.595.381,5
D	Listrik, Gas	88.057,5	84.997,1	110.422,4	145.849,8
E	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	75.911,0	80.390,4	87.636,9	101.116,1
F	Konstruksi	2.683.650,4	2.951.641,2	3.126.126,5	3.555.518,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.396.997,8	2.645.105,5	2.515.109,7	2.756.326,1
H	Transportasi dan Pergudangan	795.101,1	902.921,2	1.052.803,7	1.171.372,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	6.519.877,9	7.870.764,7	9.908.704,4	10.924.363,3
J	Informasi dan Komunikasi	1.246.242,3	1.302.543,3	1.424.722,2	1.635.008,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.597.269,9	1.876.978,1	2.146.320,0	2.360.242,8
L	Real Estate	1.187.935,8	1.319.135,6	1.495.441,7	1.676.201,7
M,N	Jasa Perusahaan	470.742,5	524.618,3	596.164,2	689.930,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.422.309,8	1.427.889,9	1.617.884,1	1.785.016,6
P	Jasa Pendidikan	2.564.743,4	3.105.984,0	3.561.373,5	4.141.638,8
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	522.427,6	610.845,4	699.700,8	823.650,4
R,S,T,U	Jasa Lainnya	383.037,5	432.701,8	491.543,8	572.252,8
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	25.819.231,1	34.209.865,6	34.209.865,6	38.463.726,3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kota Denpasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.784.077,7	1.827.499,2	1.983.619,7	1.976.247,5
B	Pertambangan/Penggalian	19.919,1	20.139,7	19.969,7	19.006,2
C	Industri Pengolahan	1.680.211,9	1.802.751,6	1.948.014,8	2.105.854,0
D	Listrik, Gas	113.765,7	121.804,1	125.621,7	124.978,6
E	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	76.410,7	79.944,9	85.230,3	90.373,9
F	Konstruksi	2.378.320,6	2.498.338,9	2.526.388,3	2.718.743,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.181.524,2	2.358.611,5	2.515.109,7	2.756.326,1
H	Transportasi dan Pergudangan	745.033,6	789.100,7	856.361,7	908.224,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	5.573.797,3	5.989.052,1	6.318.390,2	6.564.846,5
J	Informasi dan Komunikasi	1.242.755,2	1.302.991,7	1.386.996,9	1.507.982,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.391.678,9	1.557.298,7	1.696.853,4	1.819.415,3
L	Real Estate	1.126.169,1	1.194.073,9	1.292.791,0	1.414.793,6
M,N	Jasa Perusahaan	439.983,1	476.363,1	509.545,9	547.390,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.389.418,5	1.376.123,4	1.516.580,5	1.616.264,4
P	Jasa Pendidikan	2.414.009,6	2.722.354,0	2.996.744,5	3.238.726,1
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	483.084,1	540.153,0	604.239,3	680.789,0
R,S,T,U	Jasa Lainnya	358.014,5	369.608,1	396.127,7	433.279,3
	PRODUKDOMESTIK REGIONAL BRUTO	23.398.173,9	25.026.208,7	26.778.585,1	28.433.247,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



Tabel 3.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	7,69	7,39	7,24	7,14
B	Pertambangan/Penggalian	0,08	0,08	0,07	0,07
C	Industri Pengolahan	7,20	7,01	6,85	6,75
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,34	0,29	0,32	0,38
E	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,29	0,27	0,26	0,26
F	Konstruksi	10,39	10,04	9,14	9,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,28	9,00	8,91	9,13
H	Transportasi dan Pergudangan	3,08	3,07	3,08	3,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	25,25	26,78	28,96	28,40
J	Informasi dan Komunikasi	4,83	4,43	4,16	4,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,19	6,39	6,27	6,14
L	Real Estate	4,60	4,49	4,37	4,36
M,N	Jasa Perusahaan	1,82	1,79	1,74	1,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,51	4,86	4,73	4,64
P	Jasa Pendidikan	9,93	10,57	10,41	10,77
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	2,02	2,08	2,05	2,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,48	1,47	1,44	1,49
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah, salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diukur berdasarkan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan PDRB perkapita. PDRB diartikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu daerah yang diukur dalam harga pasar. Ukuran ini memiliki kelemahan karena bersifat global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk. Sedangkan PDRB perkapita sering dianggap lebih mendekati ukuran kesejahteraan karena telah memperhitungkan jumlah penduduk.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2,72	2,43	8,54	-0,37
B	Pertambangan/Penggalian	16,91	6,45	-0,84	-4,83
C	Industri Pengolahan	5,72	7,29	8,06	3,48
D	Pengadaan Listrik, Gas	12,08	7,07	3,13	-0,51
E	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	4,20	4,63	6,61	6,04
F	Konstruksi	20,50	5,05	1,12	7,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,97	8,12	6,64	9,59
H	Transportasi dan Pergudangan	6,37	5,91	8,52	6,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	9,01	7,45	5,50	3,90
J	Informasi dan Komunikasi	9,15	4,85	6,45	8,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,62	11,90	8,96	7,22
L	Real Estate	7,40	6,03	8,27	9,44
M,N	Jasa Perusahaan	3,03	8,27	6,97	7,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,01	-0,96	10,21	6,57
P	Jasa Pendidikan	1,24	12,77	10,08	8,07
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	7,03	11,81	11,86	12,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,92	3,24	7,18	9,38
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7,51	6,96	7,00	6,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



3.1.1.2. Inflasi

Inflasi adalah kecendrungan meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus, kenaikan harga satu atau dua barang tidak bisa disebut sebagai inflasi kecuali jika kenaikan harga barang itu mengakibatkan harga barang lain menjadi ikut naik. Tingkat inflasi dicerminkan dari adanya kenaikan tingkat upah. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah dan mengadakan inventasi.

Tabel 3.5
Inflasi di Kota Denpasar
(Dalam Persen)

Tahun	Inflasi (%)
2012	4,71
2013	7,35
2014	8,03
2015	2,7
2016	2,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi saling berkaitan. Apabila laju inflasi tinggi, maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya laju inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat pula memicu terjadi inflasi yang tinggi melalui kenaikan dalam permintaan agregat. Dari data inflasi di atas, dapat dilihat perkembangan setiap tahunnya, Inflasi Kota Denpasar pada tahun 2015 menurun drastis dari 8,03% menjadi 2,7% tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 2,94%.

3.1.1.3. Kebutuhan Investasi (PMA dan PMDN)

Peran investasi sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena *multiplier effect* dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut.

Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan kontrol kegiatan-kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perbankan, jasa dan berbagai inovasi produksi lainnya. Disamping itu juga sebagai tempat terkonsentrasinya fasilitas pelayanan sosial, seperti : pendidikan, kesehatan, olah raga dan lainnya yang memiliki skala pelayanan regional. Kondisi ini membawa dampak tingginya pertumbuhan penduduk Kota Denpasar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bali. Investasi di sektor perdagangan dan jasa paling menonjol dan menunjukkan



peningkatan yang signifikan, terbukti dengan berdirinya beberapa pusat perdagangan yang baru dalam setahun terakhir ini.

Disisi lain Pemerintah Kota Denpasar memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, dan salah satu yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat peningkatan kesejahteraan penduduk tersebut adalah adanya peningkatan pendapatan perkapita yang secara signifikan dapat dikatakan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat diperlukan adanya investasi-investasi baru untuk membuka usaha baru maupun untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, disamping memberikan/membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Disamping itu Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengisyaratkan bahwa besarnya pendapatan pemerintah daerah/kota yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan akan sangat bergantung pada kegiatan ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah.

Kecendrungan yang terjadi dengan pemberlakuan undang-undang tersebut adalah pemerintah daerah/kota berlomba-lomba untuk dapat menarik investasi ke daerahnya, yang secara ekonomi dapat dikatakan terjadinya persaingan untuk dapat merebut investasi dan ini merupakan babak baru yang harus dihadapi pemerintah daerah/kota. Potensi daerah/kota dan adanya iklim investasi yang kondusif merupakan syarat utama untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, sehingga Kota Denpasar yang memiliki infrastruktur yang memadai sering diincar oleh para investor untuk berinvestasi.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa Penanam Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh BKPM RI merupakan Penanaman Modal dengan Fasilitas. Penanaman Modal baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah juga merupakan Penanam Modal Dalam Negeri non fasilitas dan dapat dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, penanam modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi, karena tumbuhnya penanaman modal secara sehat akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, baik ditinjau dari peningkatan penerimaan nasional, perluasan kegiatan usaha, peningkatan peluang ekspor, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya.

Sebagaimana proses manajemen maka investasi juga dimulai dari adanya rencana investasi. Rencana investasi dengan fasilitas yang pendaftarannya di BKPM RI persetujuannya dalam bentuk Surat Pendaftaran Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN. Selanjutnya setelah adanya surat pendaftaran yang juga disebut Ijin Prinsip Penanaman Modal maka penanam modal tersebut harus menindaklanjuti dengan perijinan-perijinan daerah yang diperlukan sesuai dengan usaha yang dibangun. Setelah perijinan daerah dilengkapi maka penanam modal dapat memohon Ijin Usaha Tetap Penanaman Modal (IUT). Dengan adanya IUT maka sudah terjadi realisasi investasi.



Dalam kegiatan penanaman modal peran dari aparat pemerintah adalah sebagai fasilitator/mediator yang selalu dituntut untuk mengembangkan pemahaman terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan penanaman modal, terutama bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan bersikap proaktif dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lapangan. Kegiatan pembinaan ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 7 Tahun 2010 sebagai Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

Tentunya para penanam modal yang memerlukan perijinan di daerah hendaknya menindaklanjuti perijinan tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang dituju. Dalam hal ini perlu dilaksanakan Pengendalian Penanaman Modal secara efektif dan terus menerus untuk menuntun setiap rencana investasi dapat di realisasikan dengan meminimalkan hambatan, pelanggaran maupun penyimpangan sehingga secara nyata mendatangkan manfaat dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengendalian penanaman modal tersebut wawasan pengetahuan serta kemampuan profesionalisme aparat pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah secara berkesinambungan perlu ditingkatkan mengingat pengendalian mempunyai implikasi yang besar terhadap kelancaran dan terlaksananya suatu investasi. Aparatur pengendalian tersebut harus mempunyai persepsi yang sama dan berlaku bijak dalam menyelesaikan masalah.

Mengingat pentingnya peranan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka sangatlah penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam usaha menarik minat investor menanamkan modalnya di Kota Denpasar. Upaya yang perlu dilaksanakan adalah menjaga keamanan, menyederhanakan proses perijinan, dan mengembangkan potensi-potensi daerah, dan sebagainya. Dengan mengetahui kondisi riil terhadap pelaksanaan investasi di Kota Denpasar maka dapat dipahami permasalahan yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan investasi di Kota Denpasar.





Tabel. 3.6
INVESTASI PMDN

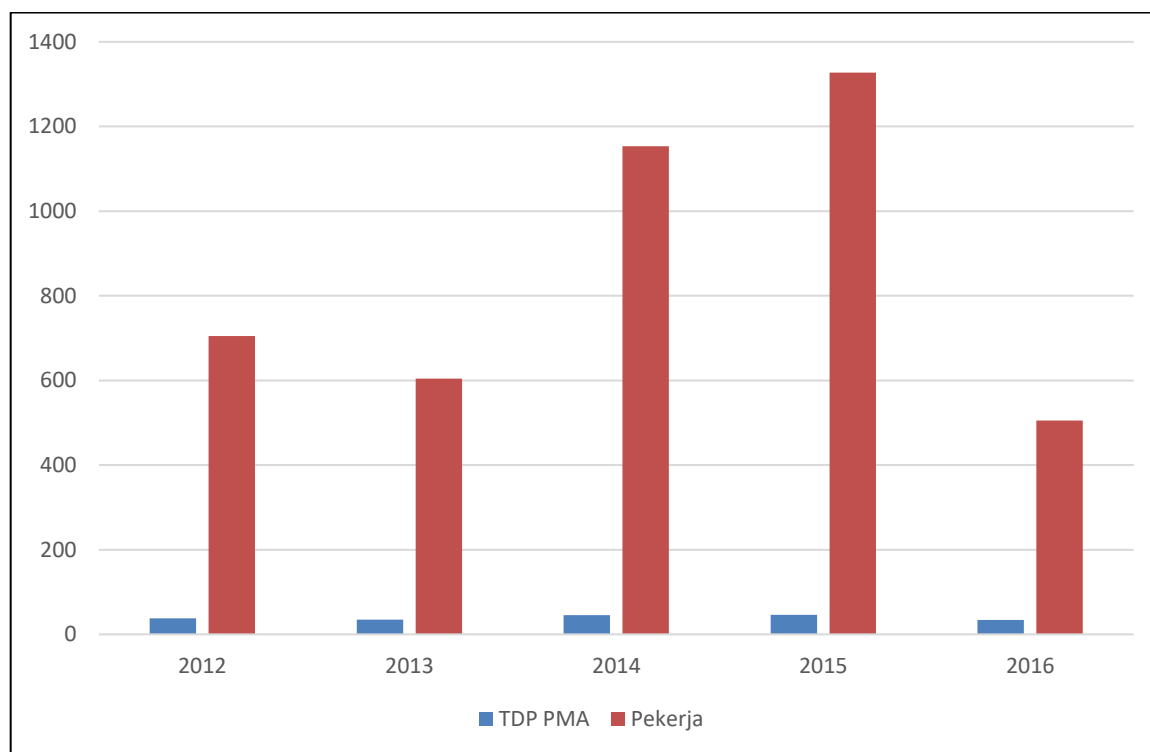
Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
	Jumlah Ijin	Investasi (Rp)	Jumlah Ijin	Investasi (Rp)	Jumlah Ijin	Investasi (Rp)	Jumlah Ijin	Investasi (Rp)	Jumlah Ijin	Investasi (Rp)
Perdagangan dan Industri	1912	3.035.075.277.522	1991	2.943.074.362.051	1549	1.117.702.341.539	1405	1.227.979.684.783	1239	4.268.500.555.842
Kesehatan	110	63.385.570.922	256	33.961.837.932	266	9.223.042.550	74	27.501.352.084	52	44.978.431.471
Pariwisata	206	311.346.000.000	211	286.309.902.943	178	242.083.844.206	244	365.273.495.467	126	490.661.254.393
Total	2.228	3.409.806.848.444	2.458	3.263.346.102.926	1.993	1.369.009.228.295	1.723	1.620.754.532.334	1.417	4.804.140.241.706

Sumber: BPPTSP dan PM Kota Denpasar

Tabel 3.7

Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Pekerja

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
TDP PMA	38	35	45	46	34
Pekerja	705	604	1.153	1.327	505



Gambar 3.1. Grafik Jumlah anda Daftar Perusahaan (TDP) Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Pekerja

Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar dipengaruhi oleh banyak faktor dan saling berkaitan satu sama lain, dengan semakin menurunnya investasi asing maka kita harus membangkitkan kembali ekonomi lokal melalui gerakan ekonomi kerakyatan untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar.

Begitu pentingnya investasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi maka perlu upaya yang lebih koordinatif dalam penanganannya. Nilai investasi akan meningkat apabila terciptanya iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pemerintah sangat penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi investor melalui transparansi regulasi investasi.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2017 dan Tahun 2018

Pemerintah bertekad mengembangkan ekonomi, tetapi untuk merealisasikannya tidak mudah. Pengalaman dari negara lain bahwa membangun basis industri yang kokoh dan mengakar serta mampu mentransformasikan gagasan, yang akan menyentuh benak konsumen sebagai pasarnya merupakan tahapan yang cukup unik. Mulai dari proses seleksi, penguatan kapasitas, pematangan di inkubator, mempertemukan dengan distributor, sampai kepada



pemberi modal, dan membangun pasar, semestinya peran ini diambil pemerintah agar berlangsung kesinambungan. Terutama, industri yang berbasis budaya. Sebab, sektor ini yang banyak digeluti UKM dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, keunggulan lain industri berbasis budaya adalah dari kekuatan pasar, yang masih bisa diandalkan untuk bertahan hidup dan tidak melakukan PHK.

Beberapa tantangan Pengembangan Ekonomi : (1). Pengaruh harga minyak global yang semakin tak terkendali dan tidak stabil. Kenaikan ini akan mempengaruhi kinerja industri kreatif, terutama pada meningkatnya harga bahan baku dan ongkos produksi. (2). Masih sulitnya pengembangan investasi karena keterbatasan dari pengembangan kota, sehingga penyerapan tenaga kerja terbatas. (3). Daya saing produk-produk kita yang masih rendah, baik di pasar domestik maupun internasional. Ini bisa mempengaruhi volume produksi dari industri kreatif. (4). Terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai keunggulan yang kompetitif dan berdaya saing.

Beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota dalam rangka pengembangan ekonomi diantaranya yaitu:

1. Mengupayakan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, para pelaku industri kreatif, kalangan akademisi dalam sebuah blueprint rencana pengembangan ekonomi kreatif.
2. Sosialisasi kepada masyarakat, baik lewat media cetak, elektronik maupun online, serta penyelenggaraan seminar dan penerbitan buku-buku.
3. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dengan pola pembinaan, pelatihan dan pendampingan langsung, sehingga akan tercipta pelaku bisnis industri kreatif yang memiliki jiwa entrepreneurship.
4. Memfasilitasi pelaku bisnis industri kreatif dengan berbagai kemudahan akses pembiayaan usaha, baik perbankan maupun nonperbankan.
5. Dalam rangka menyikapi dinamika perkembangan ekonomi global pada era industri kreatif, Kota Denpasar memolakan pembangunan dengan empat strategi pokok yang saling mendukung dan saling menguatkan yaitu (1) pemberdayaan lembaga adat, budaya, dan pemahaman agama, (2) penguatan sistem ekonomi kerakyatan, (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (4) keamanan lingkungan yang kondusif.
6. Menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif merupakan salah satu tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat Pusat maupun Daerah dan juga ketersediaan SDM di daerah yang bisa merespon dengan cepat peluang-peluang yang menarik investor. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan Pemerintah Daerah dengan menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan SDM.
7. Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

Berikut ini disampaikan beberapa strategi pokok yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu: (1) peningkatan produktivitas sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja, dan kemampuan penguasaan teknologi; (2) pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam (hayati darat-laut, mineral, energi alam) dan pengembangan lahan; (3) pengembangan institusi ekonomi yang mendukung peningkatan kegiatan produksi,



keberdayaan ekonomi rakyat, dan daya saing perekonomian daerah; (4) peningkatan penyediaan infrastruktur antar wilayah (jaringan jalan raya, transportasi laut dan udara, jalan dan infrastruktur kawasan (jalan, air bersih, waduk, irigasi, sanitasi, drainase, pengolahan sampah, tenaga listrik, dan telekomunikasi); (5) peningkatan kegiatan investasi di sektor produksi (*sektor riil*) untuk mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan jaminan lapangan kerja penduduk yang bekerja); dan (6) peningkatan integrasi ekonomi antar daerah melalui penguatan jaringan ekonomi antar daerah.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi di atas antara lain: (1) pengelolaan sistem perencanaan untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik, termasuk pengembangan kegiatan investasi dalam pemanfaatan potensi wilayah; (2) penciptaan paket investasi kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat untuk mendukung peningkatan kegiatan produksi komoditas unggulan, dan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat; (3) pengembangan pengelolaan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan potensi wilayah, pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, pemasaran produk unggulan daerah, dan pengembangan kawasan dan infrastruktur; dan (4) peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada sasaran sektor dan wilayah, serta kelompok masyarakat.

Prioritas dapat diberikan pada beberapa hal krusial berikut: (1) penguatan kapasitas pengelolaan fiskal daerah untuk meningkatkan keseimbangan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (2) pelaksanaan strategi pengeluaran keuangan daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan publik, dan sekaligus mendukung perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di daerah; dan (3) meningkatkan pengaliran sumber pembiayaan investasi melalui pembentukan semacam dana amanah (*trust fund*) untuk mendukung investasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Denpasar, oleh karena itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah satu instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disesuaikan dan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah yang dilakukan melalui mekanisme dan tahapan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, APBD harus mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan dinamika kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat serta perlunya sinkronisasi kebijakan, isu-isu strategis, dan prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah sehingga APBD diharapkan menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari :

1. Pendapatan
2. Belanja dan
3. Pembiayaan.

Upaya untuk meningkatkan hasil penerimaan Daerah perlu dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan sumber – sumber Pendapatan Daerah

Disisi lain, menciptakan iklim investasi yang semakin baik akan mendorong peningkatan penerimaan daerah dari Dana Perimbangan antara lain yang berasal dari dana bagi hasil bersumber pajak /bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

Sumber-sumber penerimaan lain yang efektif adalah badan usaha milik daerah memiliki nilai strategis mengingat bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berfungsi untuk pemerataan dan pengendalian atas sumber-sumber daya yang memiliki daerah kota terhadap warganya, serta bernilai ekonomis karena produk pelayanan yang dihasilkan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan perkotaan saat ini. Jadi optimalisasi perusahaan daerah perlu dilakukan mengingat memberikan penerimaan daerah yang berkelanjutan juga pengelolaan sumber-sumber daya daerah dapat optimal, khususnya Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Parkir dan Perusahaan Daerah Pasar.

Pembangunan infrastruktur lainnya yang bernilai strategis dan ekonomis perlu didorong seperti pembangunan pasar dan fasilitasnya sebagai bentuk investasi baik dikelola sendiri oleh pemerintah maupun dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;



5. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
7. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan Pajak dilakukan dengan memaksimalkan objek pajak.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar
Tahun 2015 s.d tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi	Proyeksi
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN	1.786.400.782.070,76	1.942.795.003.935,50	1.917.638.279.068,33	1.828.118.933.643,33	1.873.742.489.996,33
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	776.214.148.513,50	806.672.507.947,43	805.299.902.232,00	779.223.822.807,00	824.847.379.160,00
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	549.362.947.314,67	574.258.306.168,69	577.409.173.000,00	565.570.723.380,00	599.160.781.500,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	59.243.426.854,00	49.237.158.914,00	45.463.880.000,00	35.035.380.000,00	34.640.380.000,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.341.143.333,08	35.317.014.956,34	38.614.200.646,00	36.767.719.427,00	37.393.217.660,00
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	132.266.631.011,75	147.860.027.908,40	143.812.648.586,00	141.850.000.000,00	153.653.000.000,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	681.684.333.083,00	878.197.108.565,00	913.883.187.890,00	758.474.121.890,00	758.474.121.890,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.479.636.083,00	81.693.714.818,00	96.679.365.890,00	96.679.365.890,00	96.679.365.890,00
1.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	49.776.372.050,00	81.241.689.279,00	95.186.241.890,00	95.186.241.890,00	95.186.241.890,00
1.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	703.264.033,00	452.025.539,00	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	625.978.507.000,00	661.794.756.000,00	661.794.756.000,00	661.794.756.000,00	661.794.756.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	5.226.190.000,00	134.708.637.747,00	155.409.066.000,00	-	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	328.502.300.474,26	257.925.387.423,07	198.455.188.946,33	290.420.988.946,33	290.420.988.946,33
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	75.172.241.378,00	-	-	-
1.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	75.172.241.378,00	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	170.161.549.474,26	155.640.141.045,07	160.963.372.946,33	160.963.372.946,33	160.963.372.946,33
1.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	170.161.549.474,26	155.640.141.045,07	160.963.372.946,33	160.963.372.946,33	160.963.372.946,33
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	148.367.503.000,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	-	-
1.3.4.01	Dana Penyesuaian	148.367.503.000,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	-	-



No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi	Proyeksi
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.3.5.	Bantuan Keuangan	250.000.000,00	250.000.000,00	1.563.760.000,00	1.563.760.000,00	1.563.760.000,00
1.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	1.563.760.000,00	1.563.760.000,00	1.563.760.000,00
1.3.6.	Dana Transfer Lainnya	9.723.248.000,00	21.863.005.000,00	28.428.056.000,00	127.893.856.000,00	127.893.856.000,00
1.3.6.01	Pendapatan Lainnya	9.723.248.000,00	21.863.005.000,00	28.428.056.000,00	127.893.856.000,00	127.893.856.000,00
	Jumlah Pendapatan (1.1. + 1.2.+1.3.)	1.786.400.782.070,76	1.945.388.503.935,50	1.917.638.279.068,33	1.828.118.933.643,33	1.873.742.489.996,33

Sumber : Badan Pendapatan Kota Denpasar dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan per undang-undangan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja pegawai, pemenuhan belanja Rutin perkantoran, Belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun.



Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2015 s.d Tahun 2019

NO.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi	Proyeksi
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7
2.	BELANJA	1.757.644.194.261,17	1.871.440.897.164,80	2.055.069.223.179,33	1.928.118.933.643,33	1.973.742.489.996,33
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.034.937.555.844,17	1.037.975.540.099,61	1.045.037.373.902,33	1.015.626.446.520,67	1.022.704.817.273,67
2.1.1.	Belanja Pegawai	769.525.773.707,34	789.551.174.990,63	782.708.052.708,15	753.230.724.318,67	756.989.589.259,67
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	447.600.177.896,00	474.535.534.698,00	541.190.086.323,15	493.650.837.066,57	491.612.924.392,17
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	248.804.189.750,00	250.077.355.920,00	164.649.198.600,00	180.723.612.600,00	180.723.612.600,00
2.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.971.050.000,00	4.400.654.900,00	4.402.000.000,00	4.402.000.000,00	4.402.000.000,00
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	23.562.714.227,00	17.592.671.511,00	25.983.412.785,00	25.450.682.552,10	26.962.235.167,50
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.909.085.771,00	1.632.986.192,00	2.093.355.000,00	1.576.592.100,00	1.558.817.100,00
2.1.1.07.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Perangkat Daerah	43.678.556.063,34	41.311.971.769,63	44.390.000.000,00	47.427.000.000,00	51.730.000.000,00
2.1.4.	Belanja Hibah	87.123.626.156,00	53.396.264.600,00	61.824.414.000,00	83.780.200.000,00	83.780.200.000,00
2.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan	87.123.626.156,00	53.396.264.600,00	61.824.414.000,00	83.780.200.000,00	83.780.200.000,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.723.500.000,00	3.460.600.000,00	3.498.000.000,00	3.498.000.000,00	3.498.000.000,00
2.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota / Kelompok Masyarakat			3.498.000.000,00	3.498.000.000,00	3.498.000.000,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	29.044.000.000,00	57.917.771.818,00	62.042.817.300,00	60.060.610.338,00	63.380.116.150,00
2.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	29.044.000.000,00	53.317.765.000,00	57.390.917.300,00	56.557.072.338,00	59.916.078.150,00
2.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	-	4.600.006.818,00	4.651.900.000,00	3.503.538.000,00	3.464.038.000,00



NO.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi	Proyeksi
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	146.440.462.889,83	128.894.437.991,98	131.964.089.894,18	112.056.911.864,00	112.056.911.864,00
2.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	38.015.988.008,76	33.132.917.016,33	19.906.590.219,18	-	-
2.1.7.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi....	38.015.988.008,76	33.132.917.016,33	19.906.590.219,18	-	-
	JKBM	18.102.419.800,11	15.156.279.177,47	-		
	PHR	19.663.568.208,65	17.976.637.838,86	19.906.590.219,18	-	-
	BPKS	250.000.000,00				
2.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	107.578.101.945,07	-	-	-	-
2.1.7.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	846.372.936,00	846.372.936,00	846.443.675,00	846.443.675,00	846.443.675,00
2.1.7.05.	Dana Desa	-	94.915.148.039,65	111.211.056.000,00	111.210.468.189,00	111.210.468.189,00
2.1.7.05.01.	Belanja Dana Desa + ADD	-	94.915.148.039,65	111.211.056.000,00	111.210.468.189,00	111.210.468.189,00
	-Dana Desa			28.428.056.000,00	28.428.056.000,00	28.428.056.000,00
	-Alokasi Dana Desa			75.848.000.000,00	75.847.412.189,00	75.847.412.189,00
	-Bantuan Keungan kepada Desa Pekraman, Banjar Adat dan Sekaa Teruna			6.935.000.000,00	6.935.000.000,00	6.935.000.000,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	80.193.091,00	4.755.290.699,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
2.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	80.193.091,00	4.755.290.699,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	722.706.638.417,00	833.465.357.065,19	1.010.031.849.277,00	912.492.487.122,66	951.037.672.722,66
2.2.1.	Belanja Pegawai	17.551.898.300,00	17.911.639.700,00	25.710.394.000,00	-	-
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.835.219.358,00	557.885.790.212,44	612.276.064.803,00	-	-
2.2.3.	Belanja Modal	192.319.520.759,00	257.667.927.152,75	372.045.390.474,00	-	-
	Jumlah Belanja (2.1. + 2.2.)	1.757.644.194.261,17	1.871.440.897.164,80	2.055.069.223.179,33	1.928.118.933.643,33	1.973.742.489.996,33

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar



3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), Transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi pembentukan Dana Cadangan, Investasi (Penyertaan Modal dan pemberian pembelian surat berharga/saham) pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s.d Tahun 2019

NO.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi	Proyeksi
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7
3.	PEMBIAYAAN	214.951.518.760,61	165.640.331.765,20	137.430.944.111,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	281.934.471.555,61	243.708.106.570,20	159.913.680.138,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3.1.1.	Penggunaan SILPA	281.913.661.555,61	243.708.106.570,20	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3.1.1.01.	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	281.913.661.555,61	243.708.106.570,20	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Piutang	20.810.000,00	-	59.913.680.138,00	-	-
3.1.5.05.	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	20.810.000,00	-	59.913.680.138,00	-	-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	66.982.952.795,00	78.067.774.805,00	22.482.736.027,00	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	66.982.952.795,00	78.067.774.805,00	10.500.000.000,00	-	-
3.2.2.02.	Penyertaan Modal pada BUMD	66.982.952.795,00	78.067.774.805,00	10.500.000.000,00	-	-
3.2.2.02.03.	Penyertaan Modal pada PDAM	11.022.952.795,00	78.067.774.805,00	10.500.000.000,00	-	-
3.2.2.02.04.	Penyertaan Modal pada BPD Bali	55.960.000.000,00	-	-	-	-
3.2.7.	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	11.982.736.027,00	-	-
3.2.7.01.	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	11.982.736.027,00	-	-
3.2.7.01.01.	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	11.982.736.027,00	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar



BAB IV

PRIORITAS DAN

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda, perbedaan masalah ini menjadikan daerah memiliki prioritas pembangunan yang berbeda pula. Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui Rencana Program Pembangunan Daerah Tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas permasalahan daerah yang menjadi prioritas untuk diatasi. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program- program unggulan Perangkat Daerah dalam rangka tercapainya target/sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah, suatu prioritas pembangunan di masa lalu yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya walau tetap harus dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya sebagai suatu strategik pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan perkiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain :

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional seperti terhadap MDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD;
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah;
- d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar dalam RPJMD. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar dengan menyesuaikan kewenangan sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksanaan Program / Kegiatan sesuai Perangkat Daerah yang dibentuk dengan peraturan pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Visi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 yaitu:

**“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM
KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”**



Berdasarkan arah Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021 serta memperhatikan keharmonisan dengan agenda pembangunan Nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Denpasar sesuai dengan masing-masing Misi disajikan pada Tabel Berikut

Tabel 4.1
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran	Padmaksara
1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1. Menguatnya jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1. Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	P4: Menguatkan Jati Diri Masyarakat Denpasar Berdasarkan Kebudayaan Bali
		2. Memberdaya kan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	P4: Menguatkan Jati Diri Masyarakat Denpasar Berdasarkan Kebudayaan Bali
		3. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya	P4: Menguatkan Jati Diri Masyarakat Denpasar Berdasarkan Kebudayaan Bali
2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal	2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan infrastruktur	4. Menurunnya angka Kemiskinan dan Pengangguran	P6: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare society) menuju kebahagiaan.
		5. Meningkatnya perkembangan ekonomi masyarakat kecil	P6: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare society) menuju kebahagiaan.
		6. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	P5: Mengupayakan potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk memberdayakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City.
		7. Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	P5: Mengupayakan potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk memberdayakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City.
		8. Meningkatkan Infrastruktur	P5: Mengupayakan potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk memberdayakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City.
		10. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	P1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)



Misi	Tujuan	Sasaran	Padmaksara
		11. Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas.	P1: 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
		12. Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) Dalam Tata Kelola Pemerintahan	P1: 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
			P1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
			P3: Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) dalam tata kelola pemerintahan.
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Welfare Society) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan	13. Meningkatnya aksesibilitas kualitas dan mutu pelayanan pendidikan.	P6: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare society) menuju kebahagiaan
		14. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas dan mutu pelayanan kesehatan	P6: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare society) menuju kebahagiaan
		15. Menurunnya penyanggah masalah kesejahteraan sosial	P6: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare society) menuju kebahagiaan.
		16. Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	P8: Mengembangkan Ekonomi Kreatif.
			P2: Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pelatihan SDM dan sistem ekonomi kerakyatan menuju Kota Kompeten
		17. Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan	P8: Mengembangkan Ekonomi Kreatif.
		18. Meningkatkan peran Pariwisata berbasis budaya	P8: Mengembangkan Ekonomi Kreatif.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana	5. Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	19. Terwujudnya tata ruang kota yang nyaman dan terkendali.	P7: Membangun partisipasi masyarakat sebagai Agen Perubahan (Agent of Change) dengan Human Capital dan Social Capital
		20. Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat	P7: Membangun partisipasi masyarakat sebagai Agen Perubahan (Agent of Change) dengan Human Capital dan Social Capital



Dengan memperhatikan proses pembangunan di Kota Denpasar agar tetap berjalan serta prinsip-prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan maka prioritas dan sasaran pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2018 dirumuskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan perencanaan pembangunan yang ada.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 diarahkan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, namun masih belum mencapai capaian yang telah ditargetkan karena adanya kendala baik secara teknis maupun kendala non teknis sehingga memerlukan reorientasi pelaksanaannya dengan tetap mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kota Denpasar, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat.

4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut, maka Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2018 yang ditetapkan adalah

“ Memacu Perumbuhan Ekonomi Berkualitas dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan IPTEK dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur ”

Mengacu pada Agenda Prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 9 agenda prioritas yang lebih dikenal dengan NAWACITA antara lain :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial



4.3. Prioritas Pembangunan.

Sebagai penjabaran dari agenda prioritas pembangunan Nasional di implementasikan ke dalam 10 prioritas pembangunan Kota Denpasar sebagai berikut:

- Prioritas 1: Pendidikan
- Prioritas 2: Kesehatan
- Prioritas 3: Infrastruktur
- Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Kemiskinan
- Prioritas 5: Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Prioritas 6: Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan
- Prioritas 7: Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana
- Prioritas 8: Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Prioritas 9: Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM
- Prioritas 10: Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan

Tabel 4.2
Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan
Prioritas Pembangunan Kota Denpasar

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA)		Prioritas Pembangunan Kota Denpasar	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara	10	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan
2	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	6	Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	3 7	Infrastruktur Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana
4	Memperkuat Kehadiran Negara dalam melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang bebas korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.	6	Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	1 2 4 5 8	Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Kemiskinan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pertanian dan Ketahanan Pangan
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	5 9	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM



Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA)		Prioritas Pembangunan Kota Denpasar	
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik	9 8	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM Pertanian dan Ketahanan Pangan
8	Melakukan revolusi karakter bangsa	6	Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan
9	Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial	5	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan dalam bentuk program-program prioritas, yang nantinya akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Adapun keterkaitan antara Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta program prioritas yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.3.
Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) dengan Prioritas Pembangunan serta Program Prioritas

NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
01.	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara.				
		06. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					BAGIAN KERJASAMA
					KECAMATAN DENPASAR BARAT
				02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15. Program Penataan Administrasi Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH	21. Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		07. Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana			
			1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				23. Tanggap Darurat Kebencanaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				24. Pencegahan Dini dan Penanggulan Bencana Alam	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			3.00.02. PERENCANAAN	19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		10. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan			
			1.01.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
				18. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
			1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15. Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
			1.02.09. PERHUBUNGAN	21. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor	DINAS PERHUBUNGAN
			4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH	19. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN DENPASAR BARAT
02.	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.				
		02. Kesehatan			



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
		03. Infrastruktur			
			1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		05. Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
			1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP	15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
		06. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					DINAS SOSIAL
					DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
					DINAS PERHUBUNGAN
					DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
					DINAS KEBUDAYAAN
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
					DINAS PARIWISATA
					DINAS PERTANIAN
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					INSPEKTORAT
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					BADAN PENDAPATAN DAERAH
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
					BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
					BAGIAN ORGANISASI
					BAGIAN UMUM
					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
					BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
					SEKRETARIAT DPRD
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
				02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					DINAS SOSIAL
					DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					DINAS PERHUBUNGAN



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
					DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
					DINAS KEBUDAYAAN
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
					DINAS PERTANIAN
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					INSPEKTORAT
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					BADAN PENDAPATAN DAERAH
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
					SEKRETARIAT DPRD
					KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
				03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					BAGIAN ORGANISASI
					BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
				05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					DINAS PERHUBUNGAN
					DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
					DINAS KEBUDAYAAN
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
					DINAS PERTANIAN
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
					INSPEKTORAT
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					BADAN PENDAPATAN DAERAH
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
					BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
					BAGIAN UMUM
					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
					BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
					SEKRETARIAT DPRD
					KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR
				06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					SEKRETARIAT DPRD
					KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
					SELATAN
				18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BAGIAN ORGANISASI
					KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
			1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15. Program Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				16. Program Lingkungan Sehat Perumahan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				17. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				20. Program pengelolaan areal pemakaman	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			1.01.06. SOSIAL	21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
			1.02.01. TENAGA KERJA	16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
			1.02.04. PERTANAHAN	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
					ASET DAERAH
				17. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15. Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR
			1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN
			1.02.09. PERHUBUNGAN	16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN
				20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	DINAS PERHUBUNGAN
			1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMASI	15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
				16. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
				17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
					BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
				18. Program Kerjasama informasi dengan mass media	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
					BADAN PENELITIAN DAN



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
					PENGEMBANGAN
					BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
			1.02.15. PERSANDIAN	17. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			1.02.18. KEARSIPAN	15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				17. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			3.00.01. INSPEKTORAT	15. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	INSPEKTORAT
				16. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	INSPEKTORAT
				17. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	INSPEKTORAT
			3.00.02. PERENCANAAN	15. Program Pengembangan Data/Informasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				20. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
				21. Program perencanaan pembangunan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR
				22. Program perencanaan pembangunan ekonomi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				23. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				24. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			3.00.03. KEUANGAN	15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				18. Program Peningkatan dan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KECAMATAN DENPASAR UTARA
			3.00.04. KEPEGAWAIAN	16. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				17. Program Pendidikan Kedinasan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH	15. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
					BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
				19. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			4.00.02. SEKRETARIAT DPRD	15. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	SEKRETARIAT DPRD



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			5.00.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR
		07. Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana			
			1.01.02. KESEHATAN	21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
			1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
			1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	19. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.02.09. PERHUBUNGAN	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN
		10. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan			
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				19. Program Peningkatan Nasionalisme Sumber daya Aparatur	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			1.01.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
			1.02.09. PERHUBUNGAN	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
			4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH	19. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN DENPASAR SELATAN



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
03.	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.				
		02. Kesehatan			
			1.01.02. KESEHATAN	33. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	BLUD RSUD WANGAYA
		03. Infrastruktur			
			1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					KECAMATAN DENPASAR BARAT
			1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
			1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP	25. Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
			2.00.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN	29. Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
			3.00.02. PERENCANAAN	21. Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
		05. Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
			1.02.16. KEBUDAYAAN	15. Program Pengembangan Nilai Budaya	DINAS KEBUDAYAAN
				16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	DINAS KEBUDAYAAN
				17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	DINAS KEBUDAYAAN
		06. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			
			1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			3.00.02. PERENCANAAN	16. Program Kerjasama Pembangunan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				17. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		07. Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana			
			1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				28. Program pengendalian banjir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP	15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
		10. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan			
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
04.	Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.				
		06. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
			3.00.03. KEUANGAN	18. Program Peningkatan dan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH	24. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	BAGIAN ORGANISASI
				25. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	BAGIAN ORGANISASI
		10. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan			



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			1.01.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN DENPASAR BARAT
				16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH	19. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
05.	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia				
		01. Pendidikan			
			1.01.01. PENDIDIKAN	15. Program Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			1.01.01. PENDIDIKAN	16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				21. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				22. Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				23. Program Peningkatan Mutu Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN DENPASAR UTARA
			1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	16. Program peningkatan peran serta kepemudaan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				20. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					KECAMATAN DENPASAR BARAT



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
				21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		02. Kesehatan			
			1.01.02. KESEHATAN	15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
					KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
				17. Program Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
				18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	DINAS KESEHATAN
				19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	DINAS KESEHATAN
				20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	DINAS KESEHATAN
				21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	DINAS KESEHATAN
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
					KECAMATAN DENPASAR BARAT
			1.01.02. KESEHATAN	21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	KECAMATAN DENPASAR UTARA
				22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINAS KESEHATAN
					KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
				23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	DINAS KESEHATAN
				28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN
				29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	DINAS KESEHATAN
				30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	DINAS KESEHATAN
				31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	DINAS KESEHATAN
				32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINAS KESEHATAN
			1.01.06. SOSIAL	16. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	DINAS SOSIAL
				18. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	DINAS SOSIAL
			1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	020. Program Perlindungan anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN DENPASAR BARAT
				18. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
				19. Program Kesenjangan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
			1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15. Program Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				17. Program pelayanan kontrasepsi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				18. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
				19. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
				20. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				21. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
				22. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	24. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		03. Infrastruktur			
			1.01.02. KESEHATAN	25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	DINAS KESEHATAN
			1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				16. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
				18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				29. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP	15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	KECAMATAN DENPASAR BARAT
				25. Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan	KECAMATAN DENPASAR BARAT
		04. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran			
			1.01.06. SOSIAL	15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	DINAS SOSIAL



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
				21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
		05. Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
			1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	KECAMATAN DENPASAR BARAT
		06. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					DINAS KESEHATAN
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					DINAS KESEHATAN
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					DINAS KESEHATAN
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
					BAGIAN ORGANISASI
					BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
				06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS KESEHATAN
			1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	33. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.01.06. SOSIAL	21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	DINAS SOSIAL
			1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		07. Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana			
			1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31. Program Perencanaan Tata Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				32. Program Pemanfaatan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP	15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
			1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP	16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				24. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		10. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan			
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			1.02.01. TENAGA KERJA	17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
			4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH	19. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
06.	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.				
		01. Pendidikan			
			1.01.01. PENDIDIKAN	18. Program Pendidikan Non Formal	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		02. Kesehatan			
			1.01.02. KESEHATAN	20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	KECAMATAN DENPASAR UTARA
			2.00.03. PERTANIAN	21. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	DINAS PERTANIAN
		04. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran			
			1.02.01. TENAGA KERJA	15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
		05. Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
			1.02.16. KEBUDAYAAN	15. Program Pengembangan Nilai Budaya	KECAMATAN DENPASAR UTARA
			2.00.02. PARIWISATA	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DINAS PARIWISATA
					BAGIAN KERJASAMA
				17. Program Pengembangan Kemitraan	DINAS PARIWISATA
					BAGIAN KERJASAMA
		06. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS PARIWISATA
					BAGIAN UMUM
				05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					DINAS SOSIAL
					DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
					DINAS PARIWISATA
					BAGIAN KERJASAMA
			3.00.03. KEUANGAN	15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH	18. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	BAGIAN KERJASAMA
				27. Program Kerjasama Pembangunan	BAGIAN KERJASAMA
		07. Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana			
			4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH	20. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		08. Pertanian dan Ketahanan Pangan			
			1.02.03. PANGAN	15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
					BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
			2.00.03. PERTANIAN	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DINAS PERTANIAN
				17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan	DINAS PERTANIAN
				18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	DINAS PERTANIAN
				22. Program peningkatan produksi hasil peternakan	DINAS PERTANIAN
				23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	DINAS PERTANIAN
			2.00.03. PERTANIAN	24. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	DINAS PERTANIAN



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
				25. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	DINAS PERTANIAN
		09. Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM			
			1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
				18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
			1.02.12. PENANAMAN MODAL	15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
			2.00.06. PERDAGANGAN	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
			2.00.07. PERINDUSTRIAN	15. Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				19. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH	26. Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
07.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik				
		05. Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
			1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
			1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	KECAMATAN DENPASAR UTARA
			2.00.02. PARIWISATA	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	DINAS PARIWISATA
		06. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
				02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
				05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
				06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMASI	18. Program Kerjasama informasi dengan mass media	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			1.02.12. PENANAMAN MODAL	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH	28. Program pembinaan kecamatan dan kelurahan.	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		08. Pertanian dan Ketahanan Pangan			
			2.00.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN	20. Program pengembangan budidaya perikanan	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
				21. Program pengembangan perikanan tangkap	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
				23. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
				28. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
			2.00.03. PERTANIAN	16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	DINAS PERTANIAN
				17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		09. Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM			
			1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
			1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
				16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
				17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
					BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
			1.02.12. PENANAMAN MODAL	15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			2.00.06. PERDAGANGAN	18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
08.	Melakukan revolusi karakter bangsa				
		01. Pendidikan			
			1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	20. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
			1.02.17. PERPUSTAKAAN	01. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		03. Infrastruktur			



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		06. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			
			0.00. URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	KECAMATAN DENPASAR UTARA
			1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15. Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN DENPASAR UTARA
			1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	23. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		07. Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana			
			1.02.09. PERHUBUNGAN	17. Program peningkatan pelayanan angkutan	DINAS PERHUBUNGAN
		10. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan			
			4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH	19. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN DENPASAR UTARA
			5.00.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15. Program pengembangan wawasan kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				16. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				17. Program pendidikan politik masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
09.	Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial				
		01. Pendidikan			
			1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR
			5.00.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15. Program pengembangan wawasan kebangsaan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		02. Kesehatan			
			1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
		04. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran			
			1.01.06. SOSIAL	21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	KECAMATAN DENPASAR BARAT
		05. Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
			1.02.16. KEBUDAYAAN	15. Program Pengembangan Nilai Budaya	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					KECAMATAN DENPASAR BARAT
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN



NO	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		06. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			
			1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN DENPASAR UTARA
			5.00.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15. Program pengembangan wawasan kebangsaan	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
					KECAMATAN DENPASAR UTARA
		10. Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan			
			1.01.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			5.00.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN DENPASAR SELATAN



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Untuk menetapkan rencana program dan prioritas daerah maka dilakukan sebuah proses panjang mulai dari pelaksanaan musyawarah tingkat desa/kelurahan yang kemudian hasilnya dibawa dalam bentuk usulan prioritas desa/kelurahan ke musyawarah tingkat kecamatan dan dilanjutkan ke musyawarah tingkat kota. Dalam upaya mewujudkan visi misi tujuan dan sasaran pembangunan, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhatikan lingkungan strategis.

Rencana program dan kegiatan tahun 2018 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat. Program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu urusan pembangunan yang terdapat disuatu daerah yang diutamakan atau didahulukan dari yang lain karena berbagai pertimbangan seluruh pemangku kepentingan daerah, baik dari sisi teknik maupun non teknis. Dalam suatu daerah, termasuk Pemerintah Kota Denpasar penentuan prioritas pembangunan daerah ini merupakan suatu yang penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah dalam menangani segala urusan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan di atas, merupakan hasil sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasian dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dimaksud mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan, ke 10 (sepuluh) arah prioritas pembangunan yang dipergunakan mendukung percepatan pembangunan ekonomi kreatif, pengurangan kemiskinan dan pengangguran diarahkan melalui sinergi kegiatan dari beberapa sektor terkait yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan kegiatan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2018, maka disusun berbagai program prioritas yang tentunya telah diselaraskan dengan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Denpasar pada tahun 2018 yang dipilih berdasarkan prioritas pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :



Tabel 5.1
Rumusan rencana program dan pagu dana tahun 2018

URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1. URUSAN WAJIB		2.583.077.499.513	
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93.724.200	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	371.118.660	BAGIAN KERJASAMA
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	406.014.100	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	535.382.300	BAGIAN ORGANISASI
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	639.492.200	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	739.227.100	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	860.165.450	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.301.154.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.301.594.787	INSPEKTORAT
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.304.195.100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.374.221.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.416.709.100	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.444.203.300	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.616.607.200	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.745.098.200	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.750.005.700	DINAS SOSIAL
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.853.465.000	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.879.718.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.897.872.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.922.052.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.113.231.050	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.164.281.600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.230.320.850	DINAS PARIWISATA
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.327.194.200	DINAS PERTANIAN



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.347.850.500	DINAS KEBUDAYAAN
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.642.016.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.671.606.400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.919.238.550	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.736.827.800	SEKRETARIAT DPRD
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.260.119.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.324.918.488	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.326.186.800	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.553.155.050	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.843.188.400	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.902.088.900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.728.764.900	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.164.003.250	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.392.172.150	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.686.503.460	DINAS KESEHATAN
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.089.338.800	BAGIAN UMUM
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.341.528.512	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.001.705.200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.356.938.020	DINAS PERHUBUNGAN
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	33.909.032.852	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140.500.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	382.572.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	543.030.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	556.494.800	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	577.710.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	596.020.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	632.290.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	786.150.500	DINAS KEBUDAYAAN
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	795.320.000	INSPEKTORAT
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	797.890.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	869.137.312	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	883.131.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	942.744.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	967.128.000	DINAS SOSIAL
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.033.260.400	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.047.094.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.065.654.200	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.074.707.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.167.230.000	DINAS PERTANIAN
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.259.393.250	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.273.863.850	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.275.600.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.565.628.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.693.160.000	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.760.934.812	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.805.785.290	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.808.912.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.824.154.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.407.308.000	SEKRETARIAT DPRD
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.877.532.500	DINAS PARIWISATA
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.426.182.500	BAGIAN UMUM
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.428.830.000	DINAS KESEHATAN
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.696.400.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.762.510.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.007.205.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.670.024.000	DINAS PERHUBUNGAN
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.416.393.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	29.000.000	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32.882.000	BAGIAN ORGANISASI
	03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	342.335.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4.517.509.949	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.000.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.000.000	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.000.000	BAGIAN KERJASAMA
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.000.000	BAGIAN UMUM
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.300.000	BAGIAN ORGANISASI
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27.900.000	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.000.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	77.000.000	DINAS SOSIAL
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	88.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	88.122.900	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	89.995.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.861.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	DINAS PERTANIAN
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	104.623.500	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	110.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	112.500.000	DINAS PARIWISATA
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	135.000.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	143.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	165.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	167.700.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	185.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	240.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	275.000.000	INSPEKTORAT
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	294.169.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	315.213.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	350.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	444.125.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	570.000.000	DINAS KESEHATAN
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	663.900.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	709.037.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.630.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.700.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.959.000	SEKRETARIAT DPRD



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.938.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	87.028.600	DINAS KESEHATAN
	06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	142.920.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	18.070.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	30.000.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	33.067.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	41.921.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	296.300.000	BAGIAN ORGANISASI
	19. Program Peningkatan Nasionalisme Sumber daya Aparatur	140.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		2.063.161.351.168	
1.01.01. PENDIDIKAN		295.640.855.041	
	15. Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.806.952.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	278.635.362.415	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	18. Program Pendidikan Non Formal	1.491.933.956	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.581.038.510	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	21. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	6.974.831.560	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	22. Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar	2.616.952.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	23. Program Peningkatan Mutu Pendidikan	533.784.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02. KESEHATAN		179.782.578.035	
	15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.904.363.685	DINAS KESEHATAN
	16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	58.100.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	67.023.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	78.940.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	176.495.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11.396.538.300	DINAS KESEHATAN
	17. Program Pengawasan Obat dan Makanan	27.486.500	DINAS KESEHATAN
	18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	580.631.300	DINAS KESEHATAN
	19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	6.715.593.100	DINAS KESEHATAN



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	377.852.600	DINAS KESEHATAN
	20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	390.903.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	11.742.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	11.772.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	15.000.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	320.084.300	DINAS KESEHATAN
	21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	748.512.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	114.505.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	119.110.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	139.531.080	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	153.800.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	33.918.812.670	DINAS KESEHATAN
	23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.932.396.100	DINAS KESEHATAN
	24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	15.077.000	DINAS KESEHATAN
	25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	101.097.200	DINAS KESEHATAN
	28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	4.554.479.600	DINAS KESEHATAN
	29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	96.912.600	DINAS KESEHATAN
	30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	470.246.600	DINAS KESEHATAN
	31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	257.568.400	DINAS KESEHATAN
	32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1.012.183.000	DINAS KESEHATAN
	33. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	111.015.822.000	BLUD RSUD WANGAYA
1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1.502.676.730.819	
	15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.111.529.681.189	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	16. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	407.700.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	16. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	589.933.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	16. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	70.214.276.050	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	145.475.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	220.500.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	627.208.620	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	935.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	69.609.394.760	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	22. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	1.122.271.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	24. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	7.382.037.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	26. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	12.669.868.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	28. Program pengendalian banjir	5.721.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	29. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	218.704.719.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	31. Program Perencanaan Tata Ruang	1.615.132.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	32. Program Pemanfaatan Ruang	681.816.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	33. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	400.718.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		73.263.055.378	
	15. Program Pengembangan Perumahan	8.818.337.500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	16. Program Lingkungan Sehat Perumahan	17.928.338.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	17. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	109.113.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	17. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	4.136.312.200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	17. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	23.943.024.378	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	19. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	11.787.852.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	20. Program pengelolaan areal pemakaman	3.439.800.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	23. Tanggap Darurat Kebencanaan	1.500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	24. Pencegahan Dini dan Penanggulan Bencana Alam	1.600.277.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.01.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		5.566.831.495	
	15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	54.680.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	57.660.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	158.213.900	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	196.460.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	498.213.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.170.587.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.201.232.095	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	18. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	229.785.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.01.06. SOSIAL		6.231.300.400	
	15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	433.517.200	DINAS SOSIAL
	16. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.123.994.300	DINAS SOSIAL
	18. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	813.842.000	DINAS SOSIAL
	21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	181.429.600	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	269.690.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	331.195.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	475.245.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	514.908.500	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2.087.478.800	DINAS SOSIAL
1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		234.337.327.753	
1.02.01. TENAGA KERJA		5.313.283.800	
	15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.980.632.500	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.999.512.000	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1.333.139.300	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		5.582.771.345	
	20. Program Perlindungan anak	917.045.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	737.425.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	8.100.345	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	9.640.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	11.250.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20.850.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	2.142.760.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.631.395.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	18. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	39.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	19. Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	64.706.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.03. PANGAN		1.526.421.500	
	15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	371.576.500	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.154.845.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1.02.04. PERTANAHAN		1.296.415.500	
	16. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	382.366.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	16. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	760.031.500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	17. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	154.018.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP		43.723.611.830	
	15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.660.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	40.000.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	46.150.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	49.396.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	39.330.593.668	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.412.640.350	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	785.528.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	244.376.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	400.911.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	456.967.600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	24. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	801.887.812	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	25. Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan	43.700.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	25. Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan	102.800.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.537.796.828	
	15. Program Penataan Administrasi Kependudukan	138.415.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	15. Program Penataan Administrasi Kependudukan	183.610.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	15. Program Penataan Administrasi Kependudukan	260.000.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	15. Program Penataan Administrasi Kependudukan	321.288.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	15. Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.634.483.828	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		10.733.807.480	
	16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	65.052.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	553.022.550	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	640.300.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	103.848.730	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	149.424.200	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	291.470.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	345.485.100	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.203.374.400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	18. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1.773.744.050	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	19. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	221.788.850	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	19. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	367.758.200	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	19. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	542.879.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	19. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	594.338.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	19. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	3.881.322.400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		3.528.882.900	
	15. Program Keluarga Berencana	539.093.200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	187.140.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	17. Program pelayanan kontrasepsi	105.649.600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	18. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	642.758.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	19. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	140.308.500	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	19. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	157.449.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	19. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	191.331.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	19. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	287.397.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	20. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	220.235.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	21. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	55.920.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	21. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	69.379.100	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	21. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	78.620.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	21. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	86.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	21. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	87.532.500	KECAMATAN DENPASAR SELATAN



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	22. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	416.330.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	23. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	147.090.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	24. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	116.650.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.09. PERHUBUNGAN		64.930.016.110	
	15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.300.611.400	DINAS PERHUBUNGAN
	16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	44.555.542.410	DINAS PERHUBUNGAN
	17. Program peningkatan pelayanan angkutan	15.749.235.890	DINAS PERHUBUNGAN
	19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.780.596.490	DINAS PERHUBUNGAN
	20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	220.422.170	DINAS PERHUBUNGAN
	21. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor	323.607.750	DINAS PERHUBUNGAN
1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMASI		24.899.279.900	
	15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	17.030.165.300	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	16. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	837.606.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	315.545.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	506.360.000	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	18. Program Kerjasama informasi dengan mass media	323.107.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	18. Program Kerjasama informasi dengan mass media	398.675.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	18. Program Kerjasama informasi dengan mass media	636.184.400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	18. Program Kerjasama informasi dengan mass media	4.851.637.200	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		6.738.950.703	
	15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	118.550.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	918.863.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.143.623.400	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	344.907.900	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	633.426.600	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	876.425.003	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2.703.154.800	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
1.02.12. PENANAMAN MODAL		3.333.062.000	
	15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	404.740.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	736.550.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	989.285.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.202.487.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		16.941.909.197	
	16. Program peningkatan peran serta kepemudaan	865.511.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	20. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	574.109.500	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	20. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	574.434.297	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	20. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	748.820.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	20. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	863.629.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	20. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1.385.611.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	20. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	9.994.229.700	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.935.564.700	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.02.14. STATISTIK		0	
1.02.15. PERSANDIAN		878.045.800	
	17. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	195.928.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	17. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	682.117.800	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1.02.16. KEBUDAYAAN		39.075.848.260	
	15. Program Pengembangan Nilai Budaya	205.547.300	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	15. Program Pengembangan Nilai Budaya	411.365.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	15. Program Pengembangan Nilai Budaya	415.533.010	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	15. Program Pengembangan Nilai Budaya	726.046.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	15. Program Pengembangan Nilai Budaya	969.716.500	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	15. Program Pengembangan Nilai Budaya	9.927.765.250	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	15. Program Pengembangan Nilai Budaya	15.191.799.500	DINAS KEBUDAYAAN
	16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	6.410.285.900	DINAS KEBUDAYAAN
	17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4.817.789.800	DINAS KEBUDAYAAN
1.02.17. PERPUSTAKAAN		1.516.853.600	
	01. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.516.853.600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.18. KEARSIPAN		1.780.371.000	
	15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	407.861.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	550.198.700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	17. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	87.172.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	735.138.600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.00. URUSAN PILIHAN		19.836.357.100	
2.00.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN		2.548.992.600	
	20. Program pengembangan budidaya perikanan	1.223.629.700	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	21. Program pengembangan perikanan tangkap	603.231.900	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	23. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	603.212.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	28. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	0	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	29. Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan	118.919.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.00.02. PARIWISATA		5.690.830.500	
	15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.117.565.000	BAGIAN KERJASAMA
	15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.644.171.200	DINAS PARIWISATA
	16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.080.483.300	DINAS PARIWISATA
	17. Program Pengembangan Kemitraan	486.090.000	BAGIAN KERJASAMA
	17. Program Pengembangan Kemitraan	1.362.521.000	DINAS PARIWISATA
2.00.03. PERTANIAN		4.392.695.500	
	15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	105.682.500	DINAS PERTANIAN
	16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	962.939.800	DINAS PERTANIAN
	17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan	428.667.200	DINAS PERTANIAN



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan	506.810.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	299.155.000	DINAS PERTANIAN
	21. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	524.465.200	DINAS PERTANIAN
	22. Program peningkatan produksi hasil peternakan	302.269.000	DINAS PERTANIAN
	23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	140.941.800	DINAS PERTANIAN
	24. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	124.071.400	DINAS PERTANIAN
	25. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	997.693.600	DINAS PERTANIAN
2.00.04. KEHUTANAN		0	
2.00.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		0	
2.00.06. PERDAGANGAN		4.045.385.000	
	15. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	858.168.500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	574.987.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	72.000.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	89.230.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	124.250.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	137.057.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.189.692.500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.00.07. PERINDUSTRIAN		3.158.453.500	
	15. Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	963.835.900	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.202.202.800	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	738.121.550	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	19. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	254.293.250	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.00.08. TRANSMIGRASI		0	
3.00. PENUNJANG URUSAN		23.815.551.720	
3.00.01. INSPEKTORAT		2.663.934.500	
	15. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	146.481.600	INSPEKTORAT
	16. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	27.783.200	INSPEKTORAT
	17. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	2.489.669.700	INSPEKTORAT



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
3.00.02. PERENCANAAN		6.567.240.570	
	15. Program Pengembangan Data/Informasi	158.650.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	15. Program Pengembangan Data/Informasi	675.227.900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	16. Program Kerjasama Pembangunan	786.807.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	17. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	89.321.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	932.663.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	435.466.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	525.507.400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	20. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	169.542.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	21. Program perencanaan pembangunan daerah	34.855.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	21. Program perencanaan pembangunan daerah	35.761.770	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	21. Program perencanaan pembangunan daerah	63.450.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	21. Program perencanaan pembangunan daerah	67.870.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	21. Program perencanaan pembangunan daerah	1.621.919.600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	22. Program perencanaan pembangunan ekonomi	556.667.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	23. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	173.483.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	24. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	240.048.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.00.03. KEUANGAN		9.698.427.650	
	15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.558.801.550	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.102.442.600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	18. Program Peningkatan dan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.000.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	18. Program Peningkatan dan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.183.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.00.04. KEPEGAWAIAN		4.885.949.000	
	16. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.793.796.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	17. Program Pendidikan Kedisiplinan	3.092.153.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.00.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		0	



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
3.00.06. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		0	
4.00. PENDUKUNG		43.711.126.400	
4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH		6.535.404.200	
	15. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	108.237.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	15. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.552.250.000	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	18. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	290.955.000	BAGIAN KERJASAMA
	19. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	16.900.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	19. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	40.230.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	19. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	55.400.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	19. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	70.950.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	19. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	156.608.500	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	19. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.434.171.400	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
	20. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	239.870.200	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	21. Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan	205.640.000	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	24. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	91.750.000	BAGIAN ORGANISASI
	25. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	171.945.000	BAGIAN ORGANISASI
	26. Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	352.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	27. Program Kerjasama Pembangunan	670.895.000	BAGIAN KERJASAMA
	28. Program pembinaan kecamatan dan kelurahan.	77.602.100	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.00.02. SEKRETARIAT DPRD		37.175.722.200	
	15. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	37.175.722.200	SEKRETARIAT DPRD
5.00. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		5.220.065.450	
5.00.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		5.220.065.450	
	15. Program pengembangan wawasan kebangsaan	27.375.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	15. Program pengembangan wawasan kebangsaan	32.900.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	15. Program pengembangan wawasan kebangsaan	34.269.800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	15. Program pengembangan wawasan kebangsaan	46.777.500	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	15. Program pengembangan wawasan kebangsaan	108.157.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN



URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	15. Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.006.172.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	15. Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.240.405.850	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	15. Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.886.799.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	16. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	262.124.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	17. Program pendidikan politik masyarakat	575.084.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.00. KEWILAYAHAN		0	
6.00.01. KECAMATAN		0	
TOTAL SEMUA		2.675.660.600.183	

Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan.

Sedangkan untuk mengetahui secara lebih rinci tentang implementasi dari program prioritas pembangunan daerah dapat diketahui pada **Lampiran I : Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2018 Kota Denpasar**.



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2018 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Tahun 2018. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat tahunan, maka RKPD adalah kolaborasi dari dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2018 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2018 mengambil tema **“Memacu Perumbuhan Ekonomi Berkualitas dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan IPTEK dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur”**

Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018, Perangkat Daerah Kota Denpasar dan seluruh pelaku pembangunan di Kota Denpasar wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergis.
2. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD Kota Denpasar Tahun 2018 sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan pembangunan.
3. RKPD Kota Denpasar Tahun 2018, disusun berdasarkan asumsi makro yang terkait dengan eksternalitas kemampuan dan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar, untuk itu perlu kiranya semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengupayakan dengan sungguh-sungguh dalam perwujudannya.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan harmonisasi penerapan rencana program dan kegiatan, maka setiap Perangkat Daerah wajib menjabarkan RKPD Kota Denpasar Tahun 2018 ini ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah selanjutnya dipakai dasar atau pedoman dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan arahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2018 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita – cita Pembangunan Denpasar dapat tercapai


WALIKOTA DENPASAR,

KAIDHARMAWIJAYA MANTRA



**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 18

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.1.01.01.01.15.070.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (APE)			kota denpasar			1. Terlaksananya Pemberian Bantuan APE Bagi Lembaga PAUD Kota Denpasar 2. Terlaksananya Pemberian BOP Bagi Lembaga PAUD di Kota Denpasar	1. 15 Lembaga 2. 677 Lembaga	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	677 Lembaga	150,507,520.00	165,558,272.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Meningkatnya Mutu Pendidikan Wajar Sembilan Tahun	100%					278,635,362,415.00	292,472,750,754.00		
1.01.01.1.01.01.01.16.001.	Pembangunan gedung sekolah			Kota Denpasar			Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	567 Ruang Kelas Baru	Tersedianya Ruang Kelas Representatif	567 Ruang Kelas Baru	214,940,039,840.00	228,125,189,424.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pertumbuhan dan Per
1.01.01.1.01.01.01.16.019.	Pengadaan mebeluer sekolah			Kota Denpasar			Terselenggaranya Pengadaan Meja dan Kursi Siswa SD, SMP	2800 Set	Siswa Dapat Belajar dengan Lebih Kondusif	2800 Siswa	3,924,240,000.00	4,316,664,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.16.059.	Pelatihan penyusunan kurikulum (SD)			Denpasar			Meningkatnya Mutu pendidikan dan Tenaga Pendidik Siswa SD/MI kelas III dan VI se Kota Denpasar	320	Meningkatnya Mutu pendidikan dan Tenaga Pendidik Siswa SD/MI kelas III dan VI se Kota Denpasar	320	291,185,500.00	291,185,500.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.16.067.	Penyelenggaraan paket A setara SD			Denpasar			Terlaksananya Ujian Nasional Paket A setara SD	75 org	Meningkatnya tingkat pencapaian lulusan setara SD	90 %	33,258,000.00	36,583,800.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.16.068.	Penyelenggaraan paket B setara SMP			Kota Denpasar			Pelaksanaan Ujian Nasional Paket B Setara SMP	300 Orang	Meningkatnya Tingkat Capaian Lulus Paket B Setara SMP	90%	69,560,250.00	76,516,275.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.16.080.	Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)			Denpasar			Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SD/MI se Kota Denpasar	16225 siswa	Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SD/MI se Kota Denpasar	16225 Orang siswa	808,767,575.00	808,767,575.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.1.01.01.01.16.092.	Dana BOS Pendamping SMP Kota Denpasar			Kota Denpasar			Tersalurnya dana BOS Pendamping Pendidikan Menengah Pertama	15200 org siswa SMP	Mempercepat Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)	15200 org siswa SMP	12,242,846,000.00	12,242,846,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.16.093.	Peningkatan Aktifitas dan Kreatifitas Siswa Berprestasi Tingkat SMP/Festival Lomba Seni Nasional (FLS2N) Siswa SMP			kota denpasar			Terlaksananya Peningkatan Aktivitas Dan Kreativitas Siswa Berprestasi SMP/Festival Lomba Seni Nasional(FLS2N Siswa SMP)	1.100 Orang Siswa	Meningkatnya Prestasi Seni Siswa SMP Tingkat Provinsi dan Nasional	1.100 Orang Siswa	481,229,000.00	481,229,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.16.094.	Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Sekolah dengan Penerapan MBS di Satuan Pendidikan Menengah Pertama			Kota Denpasar			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan penerapan MBS di Satuan Pendidikan Menengah Pertama	120 org	Meningkatnya Manajemen SMP kota Denpasar	120 org	36,570,000.00	36,570,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.16.095.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Pertama			kota denpasar			Pelaksanaan Pengadaan Sarana prasarana Pendidikan Menengah Pertama	480 Unit Komputer P/c, 24 Unit Note Book, 24 Unit LCD Proyektor	Tersedianya sarana prasarana Pendidikan Menengah Pertama	SMP Negeri	5,382,619,000.00	5,382,619,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.16.096.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP/MTS			Kota Denpasar			Terlaksananya Pelatihan Kurikulum Bagi Guru Mapel SMP/MTs Se Kota Denpasar	975 Orang	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik SMP/MTs Se Kota Denpasar	975 Orang	690,524,000.00	730,096,400.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.16.097.	Ujian Nasional Siswa SMP/MTS			Kota Denpasar			Laporan Ujian Nasional Siswa SMP/MTs Se Kota Denpasar	14.000 Siswa	Terlaksananya Ujian Nasional Siswa SMP/MTs Se Kota Denpasar	100%	367,859,300.00	404,645,230.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.16.098.	Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP			Kota Denpasar			Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris SMP	240 Orang	Meningkatnya Presentasi Siswa Dalam Pidato Bahasa Inggris Tingkat Propinsi dan Nasional	240 Orang	141,871,000.00	156,058,100.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.1.01.01.01.18.023.	Pendidikan Keluarga di SPNF KB Kota Denpasar			SPNF SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar			Parenting PAUD dan Dikmas	100 orang	Meningkatnya peran serta orang tua dalam pendidikan anaknya	100 orang	26,352,400.00	28,987,640.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.18.024.	Orientasi Teknis Peningkatan Tenaga Pendidik PAUD dan DIKMAS di SPNF SKB			Denpasar			Terlaksananya Orientasi Teknis Peningkatan Tenaga Pendidik PAUD dan DIKMAS	20	Meningkatnya Kapasitas PAmor Belajar dan Tenaga Pendidik yang Berkualitas	20	139,324,400.00	139,324,400.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%					1,581,038,510.00	1,611,946,110.00		
1.01.01.1.01.01.01.20.004.	Sosialisasi Sertifikasi			Denpasar			Terlaksananya Sertifikasi Pendidik	1500 Guru	Terpenuhnya Kebutuhan Tenaga Pendidik Yang Memenuhi	100%	140,517,210.00	140,517,210.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.20.012.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Denpasar			Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan pelaporan kegiatan kepegawaian	Laporan	Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kepegawaian	Jumlah Kasek	95,533,400.00	97,446,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1.01.01.1.01.01.01.20.013.	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah			Denpasar			-Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Bagi Guru	640 PAK	Terbitnya PAK Tenaga Kependidikan	100%	418,638,100.00	418,638,100.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.20.014.	Workshop Penilaian Karya Tulis Ilmiah/PTK			Denpasar			Terlaksananya Uji Kompetensi Workshop Penulisan Karya Ilmiah	40 Tenaga Pendidik	Tercapainya Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik	100%	41,154,570.00	41,154,570.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.20.015.	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (Workshop Penilaian Kinerja Guru) (PKG)			Denpasar			Terlaksananya Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG)	40 Kepala Sekolah	Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Pendidik	100%	49,230,000.00	45,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.20.016.	Workshop Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah			Denpasar			Terlaksananya Workshop Pengawas Sekolah	65 Pengawas Sekolah	Meningkatnya Kualitas Pengawas Sekolah yang memenuhi Standar Kompetensi	100%	442,744,580.00	442,744,580.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.1.01.01.01.20.017.	Pengembangan Karir Tenaga Pendidik (Pengangkatan Kepala Sekolah)			Denpasar			Laporan Pemenuhan Kebutuhan Kepala Sekolah TK,SD, SMP	40 Calon Kepala Sekolah	Tercapainya Pengangkatan Kepala Sekolah	100%	25,732,150.00	25,732,150.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.20.018.	Penyiapan Calon Kepala Sekolah			Denpasar			Terlaksananya Diklat Calon Kepala Sekolah	40 Calon Kepala Sekolah	Tersedianya Calon Kepala Sekolah	100%	367,488,500.00	400,713,500.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Pendidikan	100 %					6,974,831,560.00	7,565,688,631.00		
1.01.01.1.01.01.01.21.002.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan			Kota denpasar			Laporan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Cyberschool Kota Denpasar	60 Sekolah	Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Cyberschool Kota Denpasar	60 Sekolah	988,968,150.00	1,087,864,965.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.004.	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan			Kota Denpasar			Terselenggaranya Sosialisasi dan Advokasi Peraturan di Bidang Pendidikan	10 Laporan	Guru Mampu Mengimplementasik andalam PBM	2684 Orang	142,413,500.00	156,654,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.007.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan			Kota Denpasar			Terlaksananya Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	584 Orang	Pemenuhan SIM Sesuai Standar Minimal	584 Orang	106,644,000.00	117,308,400.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.008.	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan			Kota Denpasar			Terlaksananya Kegiatan Seminar	1300 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Siswa dan Guru Tentang Perkembangan Pendidikan	1 Buah Konsep	346,548,300.00	355,278,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Kota Denpasar			Tersedianya Laporan Kegiatan	10 Laporan	Tersedianya Potret Aktivitas Dinas Dikpora Kota Denpasar	1 Paket	41,089,240.00	45,198,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.010.	Penyelenggaraan Perivikasi Program Kerja Sekolah (RAPBS) SD,SMP Se Kota Denpasar			kota denpasar			Terlaksananya Perifikasi Program Kerja Sekolah Berlaku di Bidang Pendidikan	10 Laporan	Tersedianya RAPBS sesuai standar	193 Buah	128,873,500.00	141,760,850.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.1.01.01.01.21.011.	Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Pintar			Denpasar			Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Secara Optimal	-	Meningkatnya sarana dan Prasarana Rumah Pintar yang dapat digunakan secara Optimal	-	2,602,244,000.00	2,800,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.012.	Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja			Kota Denpasar			Terlaksananya Penyelenggaraan Penyusunan Kerja Dikpora	10 Laporan	Tersedianya Program Kerja Dinas Dikpora Kota Denpasar	1 Paket	214,252,500.00	217,408,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.013.	Penerimaan Peserta Didik Baru			Kota Denpasar			Siswa Dapat Menentukan Sekolah Pilihan Sesuai dengan Kemampuan	12000 Siswa	Meningkatnya Daya Tampung SMP Negeri di Kota Denpasar	12.000 Siswa	366,794,000.00	403,473,400.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.014.	Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah			Kota Denpasar			Terlaksananya Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah	584 Orang	Meningkatnya Ketrampilan di Bidang IT Sesuai Standar Minimal	584 Orang	98,043,000.00	107,847,300.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.015.	Lomba Penelitian Ilmiah dan Pameran			Kota Denpasar			Terselenggaranya Lomba Penelitian Ilmiah dan Pameran	1 Laporan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	90 Orang	453,759,770.00	510,387,876.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.016.	Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Denpasar			Kota Denpasar			Terlaksananya Kegiatan Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah	584 orang	Pemenuhan Rencana Pengembangan Pendidikan sesuai standar minimal	584 orang	84,764,500.00	93,240,550.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.017.	Profile Pendidikan Kota Denpasar			Kota Denpasar			Terlaksananya Pembuatan Profil Pendidikan Kota Denpasar	600 buah	Pemenuhan Kebutuhan Profil Pendidikan Kota Denpasar	600 buah	72,400,000.00	79,640,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.018.	Lomba Bidang Informasi Teknologi Berbasis Budaya			Denpasar			Terlaksananya lomba bidang informasi teknologi berbasis budaya	150 Guru	Pemenuhan Kebutuhan IT di Sekolah	100%	153,139,150.00	168,453,065.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.21.019.	Peningkatan Kemampuan Siswa Tentang Teknologi Informasi			Kota Denpasar			Terlaksananya Lomba Kreativitas Siswa Dibidang Teknologi Informasi	160 Siswa	Menumbuhkan Kreativitas Siswa Tentang Teknologi Informasi	100%	124,630,050.00	137,093,055.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.1.01.01.01.22.006.	Peningkatan Aktivitas dan Kreativitas Siswa Berprestasi Tingkat SD/Festival Lomba Seni Nasional (FLS2N)			Kota Denpasar			Terlaksananya Peningkatan AKtivitas dan Kreativitas Siswa Berprestasi Tingkat SD / Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N Siswa SD)	408 Orang	Meningkatnya Prestasi Seni SD Tingkat Propinsi & Nasional	408 Orang	630,809,000.00	650,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.22.007.	Seleksi Siswa,Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD			Kota Denpasar			Terlaksananya Seleksi Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD	204 Orang	Meningkatnya Prestasi Siswa, Guru, Kepala Sekolah, & Pengawas Berprestasi SD Tingkat Provinsi dan Nasional	204 Orang	239,356,000.00	300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.22.008.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS di Satuan Pendidikan Dasar			Denpasar			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan Pendidikan Dasar	180 Orang	Meningkatnya Manajemen SD Kota Denpasar	180 orang	95,261,500.00	95,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.22.010.	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sains Tingkat SD)			Kota Denpasar			Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sains Tingkat SD)	80 Orang Siswa SD	Meningkatnya Prestasi Siswa Peserta Olimpiade Sains SD Untuk Maju Ke Tingkat Provinsi	80 Orang Siswa SD	304,943,000.00	664,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.22.012.	Olimpiade Sains Guru SD			Kota Denpasar			Terlaksananya Olimpiade Sains Guru	200 Orang	Meningkatnya Prestasi Guru pada Olimpiade Sains Guru Tingkat Provinsi dan Nasional	200 Orang	106,177,000.00	260,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.22.013.	Seleksi Pemberian Penghargaan Kepada Siswa,Guru,Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat SD			Kota Denpasar			Terlaksananya Seleksi Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Pembina dan Sekolah Berprestasi	112 Orang	Meningkatnya Prestasi Siswa, Guru dan Sekolah di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	112	101,222,000.00	110,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.1.01.01.01.22.014.	Lomba Budaya Mutu SD			Denpasar			Terlaksananya Lomba Budaya Mutu SD	4 Kecamatan	Meningkatnya Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar	4 Kecamatan	203,321,000.00	220,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.22.015.	Bimbingan Teknis Tim MBS Tingkat SD			Denpasar			Terlaksananya Bimbingan Teknis Tim MBS Tingkat SD	120	Meningkatnya Kinerja SD melalui Pembinaan oleh MBS	120	132.613,500.00	145,874,850.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.22.016.	Workshop Pembina Karya Ilmiah Remaja Tingkat SD			denpsar			terlaksananya workshop pembinaan karya tulis remaja tingkat SD	100 Orang	mengkatkan pemahaman Pembina KIR SD untuk meraih prestasi tingkat propinsi dan nasional	100 orang	90,277,500.00	99,305,250.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.22.017.	Lomba Cerita Bahasa Inggris SD			Kota Denpasar			Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris SD dan SMP	204 Orang	Meningkatnya Prestasi Siswa dalam Lomba Pidato Bhs Inggris Tingkat Provinsi dan Nasional	204 Orang	131.686,500.00	155,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.23.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Pendidikan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Tersedianya Pendidikan dan Tenaga pendidik yang memiliki Daya Saling	100%					533,784,600.00	553,728,580.00		
1.01.01.1.01.01.01.23.001.	Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs Negeri dan Swasta			Kota Denpasar			Laporan Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs se- Kota Denpasar	100%	Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs se- Kota Denpasar	13.500 Siswa	199,263,800.00	219,207,780.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.01.1.01.01.01.23.002.	Ujian PemantapanSiswa SD/MI Negeri dan Swasta			Kota Denpasar			Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SD/MI se Kota Denpasar	16225 Siswa	Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SD/MI se Kota Denpasar	16225 orang siswa	334,520,800.00	334,520,800.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		TERWUJUDNY A PELAYANAN PRIMA TERHADAP MASYARAKAT	100%					12,001,705,200.00	12,001,705,200.00		

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.13.1.01.01.01.16.013.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Memperingati Hari Pramuka dan Kegiatan Rutin Kwardcab Denpasar)			Denpasar			Terlaksananya lomba gerak jalan, lomba lampion untuk pramuka penggalang dan penegak	500 orang	Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara	500 orang	62,175,000.00	66,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.02.13.1.01.01.01.16.014.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Jambore Kwardcab Denpasar)			Denpasar			Terlaksananya kegiatan jamboree untuk pramuka penggalang yang berpangkalan di Sd dan SMP se Kota Denpasar	650 orang	Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara	650 orang	86,070,000.00	90,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.02.13.1.01.01.01.16.015.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Mengikuti Lomba GUGUS Depan Tergiat Kwarda Bali)			Denpasar			Dapat mengikuti kegiatan lomba gugus depan tergiat kwarda bali	3 Gudep	Rasa kepedulian terhadap kelangsungan bangsa dan negara	3 gudep	12,625,000.00	15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.02.13.1.01.01.01.16.016.	Pengembangan Kreatifitas Seni dan Budaya Daerah			Kota Denpasar			Terlaksananya Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	1 Paket Kegiatan	Terwujudnya Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	100 %	378,704,000.00	454,444,800.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.02.13.1.01.01.01.16.017.	Pembinaan Organisasi Kepemudaa (Pelatihan Asesor Akreditasi Gugus Depan)			Kota Denpasar			Dapat Melaksanakan Pelatihan Asesor Akreditasi Gugus Depan	220 Orang	Rasa Kepedulian terhadap Kelangsungan Bangsa dan Negara	220 Orang	27,425,000.00	27,425,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.02.13.1.01.01.01.16.018.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Menyelenggarakan Tri Lomba Pramuka)			DENPASAR			Terlaksananya kegiatan lomba untuk Pramuka Siaga, Penggalang dan Penegak	500 Orang	Rasa Kepedulian terhadap kelangsungan Bangsa dan Negara	500 Orang	34,270,000.00	35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.02.13.1.01.01.01.16.019.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Kursus Pembinaan Mahir Tingkat Dasar/KMD)			Kota Denpasar			Terlaksananya Kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) di Kwardcab Denpasar	120 Orang	Rasa Kepedulian Terhadap Kelangsungan Bangsa dan Negara	120 Orang	48,555,000.00	48,555,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.02.13.1.01.01.01.16.020.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Kursus Pembinaan Mahir Tingkat Lanjutan/KML)			Kota Denpasar			Terlaksananya Kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjut (KML) di Kwardcab Denpasar	120 Orang	Rasa Kepedulian terhadap kelangsungan Bangsa dan Negara	120 Orang	48,555,000.00	48,555,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.13.1.01.01.01.16.021.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Raimuna Kwarcab Denpasar)			Kota Denpasar			Terlaksananya Kegiatan Raimuna Cabang untuk Pramuka Penegak di Pendega Se Kota Denpasar	650 Orang	Rasa Kepedulian Terhadap Kelangsungan Bangsa dan Negara	650 Orang	86,040,000.00	86,070,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pendidikan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Menyediakan atlit berprestasi	100 %					9,994,229,700.00	11,050,000,000.00		
1.02.13.1.01.01.01.20.006.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga			Denpasar			- Laporan pelaksanaan PORJAR, PORSENI, POPNAS/POPWIL	- 1100 orang	- Tersedianya atlit berprestasi	- 1100 orang	7,910,335,100.00	8,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1.02.13.1.01.01.01.20.017.	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya			Denpasar			- Laporan Mengikuti Kegiatan O2SN Tingkat Provinsi dan Nasional	- 280 Orang	- Tersedianya atlit usia dini berprestasi	- 280 Orang	958,918,200.00	1,200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.02.13.1.01.01.01.20.020.	Pelaksanaan PORSENIJAR Kecamatan			Denpasar			- Laporan pelaksanaan Porsenijar Kecamatan	- 4 Paket	- Tersedianya kontingen kecamatan untuk mengikuti PORSENIJAR Kota	- 4 Kontingen Kecamatan	874,576,400.00	1,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.02.13.1.01.01.01.20.021.	Kegiatan HUT Kota Denpasar			Denpasar			- Terselenggaranya Pelaksanaan HUT Kota Denpasar	- 1 Kegiatan	- Terciptanya Masyarakat yang Sehat dan Berbudaya	- 1 Kegiatan	250,400,000.00	350,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
1.02.13.1.01.01.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pendidikan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Penyediaan Atlit dan Artis Berprestasi	100					1,935,564,700.00	2,322,677,640.00		
1.02.13.1.01.01.01.21.008.	Sarana Prasarana Peralatan Olahraga dan Seni			Denpasar			Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga dan Seni	Rp 1935564700	Tersedianya Sarana Prasarana Olahraga dan Seni	1150 Atlet	1,935,564,700.00	2,322,677,640.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelayanan
5.00.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										34,269,800.00	37,696,780.00		
5.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										34,269,800.00	37,696,780.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.00.01.1.01.01.01.15.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pendidikan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100%					34,269,800.00	37,696,780.00		
5.00.01.1.01.01.01.15.003.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa			Kota Denpasar			Pelaksanaan lomba-lomba Penjor dalam rangka HUT Kota Denpasar	49 OPD	Juara lomba penjor antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	4 OPD	34,269,800.00	37,696,780.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
Jumlah											326,462,704,441.00	344,158,067,256.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.1.01.02.01.18.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Pemenuhan Kebutuhan Yankes Tradisional	100%					580,631,300.00	665,618,470.00		
1.01.02.1.01.02.01.18.003.	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri			Kota Denpasar			Pembinaan Toga, Hattra dan Spa	43 Desa	Terlaksananya Pembinaan hattra, TOGA dan Spa	22 hattra, 8 desa/kelurahan , 55 Spa	528,747,100.00	608,159,530.00	DINAS KESEHATAN	
1.01.02.1.01.02.01.18.006.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Kota Denpasar			Monitoring evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional	11 Puskesmas	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan kesehatan tradisional	11 Puskesmas	51,884,200.00	57,458,940.00	DINAS KESEHATAN	
1.01.02.1.01.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		-	-					6,715,593,100.00	7,319,682,050.00		
1.01.02.1.01.02.01.19.001.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat			Kota Denpasar			- Persentase satuan pendidikan dasar mendapatkan promosi kesehatan - Persentase puskesmas dan pustu melaksanakan promosi kesehatan - Persentase promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan - Persentase satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar kesehatan - Persentase usia 15 - 19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar kesehatan	- 100% - 70% - 100% - 100% - 100%	- Meningkatnya persentase pendidikan dasar mendapatkan promosi kesehatan - Meningkatnya persentase puskesmas dan pustu melaksanakan promosi kesehatan - Meningkatnya persentase promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan - Terlaksananya siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan - Terlaksananya siswa usia 15 - 19 tahun mendapatkan skrining kesehatan	- 100% - 70% - 100% - 100% - 100%	5,381,229,600.00	5,921,000,000.00	DINAS KESEHATAN	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.1.01.02.01.20.003.	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya			Kota Denpasar			-Cakupan gizi buruk mendapat perawatan - Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk - Presentase bumil mendapat TTD - Persentase bumil KEK mendapat PMT - Persentase Balita kurus mendapat makanan tambahan - Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul Vit A	100% 6% 99% 70% 85% 99%	- Terlaksananya balita gizi buruk mendapat perawatan -Menurunkan Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk - Meningkatnya bumil mendapat TTD - Meningkatnya bumik yang mendapat PMT - Meningkatnya balita kurus mendapat makanan tambahan - Meningkatnya balita 6-59 bulan mendapat kapsul Vit A	- 100% - 6% - 99% - 70% - 85% - 99%	270,495,900.00	300,000,000.00	DINAS KESEHATAN	Pelayanan
1.01.02.1.01.02.01.20.004.	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi			Kota Denpasar			persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif, persentase bayi baru lahir mendapat IMD	47%, 43 %	meningkatnya bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif, meningkatnya bayi baru lahir mendapat IMD	47%, 43%	107,356,700.00	200,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
1.01.02.1.01.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Pengembangan lingkungan sehat	100%					320,084,300.00	334,990,900.00		
1.01.02.1.01.02.01.21.001.	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat			Kota Denpasar			laporan kegiatan penyelenggaraan kota sehat	100%	penyelenggaraan kab/kota sehat di kota denpasar	4 kecamatan	270,092,600.00	280,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
1.01.02.1.01.02.01.21.002.	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat			Dinas Kota Denpasar			Jumlah Desa/Kel. yang dibina dan dinilai PSN dan keberhasilannya.	4 Desa/Kel.	Diperolehnya peringkat juara PSN dan kebersihan desa/kelurahan tingkat Kota.	4 desa / kelurahan	49,991,700.00	54,990,900.00	DINAS KESEHATAN	Pelayanan

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.1.01.02.01.22.006.	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik			Dinas Kesehatan Kota Denpasar			Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Jumantik (senter) Bahan kimia larvasida Terlaksananya pemberian sembako kepada Jumantik, Koordinator & Petugas Fogging Fokus Terlaksananya pemberian gaji/upah Jumantik dan Koordinator Terlaksananya sosialisasi penanggulangan DBD di media cetak & elektronik Terlaksananya pengadaan cetak blangko, kartu rumah, leaflet Terlaksananya foto copy Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman rapat Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan (Jumantik dan Koord. Jumantik) Terlaksananya Refresing/Penyegara n Jumantik dan Koordinator Jumantik Terlaksananya pemilihan koordinator dan jumantik terbaik Terlaksananya	1 paket 474 buah 18.597 kotak 482 bungkus 474 orang 5 kegiatan 11 macam 25.000 lbr 3 macam 474 stel 474 orang 2 katagori 11 sekolah	Terlaksananya upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang	100 %	10,457,601,000.00	11,503,361,100.00	DINAS KESEHATAN	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.1.01.02.01.23.002.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan			Kota Denpasar			Meningkatnya derajat kesehatan bagi masyarakat umum dan kelompok rawan/resti Terlaksananya kegiatan safari kesehatan Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan di pos pelayanan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan menurut standar akreditasi di puskesmas Tersedianya data survey kepuasan masyarakat	448 kk rawan/resti 22 desa/kelurahan 52 kali 3 puskesmas 11 puskesmas	Meningkatnya derajat kesehatan bagi masyarakat umum dan kelompok rawan/resti Meningkatnya akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Puskesmas terskreditasi Persentase puskesmas dengan nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) > 80	448 kk rawan/resti 22 desa/kelurahan 3 puskesmas 100 %	1,310,358,300.00	1,441,394,130.00	DINAS KESEHATAN	
1.01.02.1.01.02.01.23.007.	Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan			Kota Denpasar			Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan di Puskesmas beserta Jaringannya dan UPT Pengawasan Farmasi dan Makanan Kota Denpasar	11 Puskesmas beserta Jaringannya dan UPT Pengawasan Farmasi dan Makanan Kota Denpasar	Alat Kesehatan di Puskesmas beserta Jaringannya dan UPT Pengawasan Farmasi dan Makanan Kota Denpasar Memenuhi Standar	11 Puskesmas beserta Jaringannya dan UPT Pengawasan Farmasi dan Makanan Kota Denpasar	191,689,100.00	210,858,010.00	DINAS KESEHATAN	Pelayanan
1.01.02.1.01.02.01.23.008.	Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas			Kota Denpasar			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas	9 Tenaga Kesehatan	Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Puskesmas Kota Denpasar	9 Tenaga Kesehatan	430,348,700.00	473,383,570.00	DINAS KESEHATAN	Pelayanan
1.01.02.1.01.02.01.24.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Eksistensi Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	100%					15,077,000.00	17,362,900.00		
1.01.02.1.01.02.01.24.001.	Pelayanan operasi katarak			Kota Denpasar			Terlaksananya pelayanan operasi katarak	40 orang	Terwujudnya pelayanan operasi katarak bagi penduduk miskin	100 %	15,077,000.00	17,362,900.00	DINAS KESEHATAN	

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.1.01.02.01.29.004.	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita			Kota Denpasar			cakupan pelayanan balita, persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, cakupan kunjungan balita, persentase puskesmas mampu melaksanakan penanganan KTA, pesentase puskesmas menyelenggarakan kelas ibu balita, persentase anak balita di SDIDTK, persentase puskesmas melaksanakan MTBS, dan MTBM, menurunkan angka kematian balita.	82%, 100%, 92%, 100%,100%, 92%,100%, 10/1000 KH	meningkatnya cakupan pelayanan balita, meningkatnya balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meningkatnya kunjungan balita, meningkatnya puskesmas mampu melaksanakan penanganan KTA, meningkatnya puskesmas menyelenggarakan kelas ibu balita, meningkatnya anak balita di SDIDTK, meningkatnya puskesmas melaksanakan MTBS dan MTBM, menurunnya angka kematian balita.	82%,100%,92%, 100%,100%,92 %,100%,10/1000 KH	96,912,600.00	124,327,600.00	DINAS KESEHATAN	
1.01.02.1.01.02.01.30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Meningkatnya akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	100 %					470,246,600.00	535,716,800.00		
1.01.02.1.01.02.01.30.006.	Pelayanan kesehatan			Denpasar			Meningkatnya derajat kesehatan bagi masyarakat umum dan kelompok rawan/resti Terlaksananya safari kesehatan Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan di pos pelayanan kesehatan	385 KK rawan/resti 22 Desa/kelurahan 52 kali	Meningkatnya derajat kesehatan bagi masyarakat umum dan kelompok rawan/resti Meningkatnya akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	385 KK rawan/resti 22 Desa/Kelurahan	298,878,900.00	347,212,800.00	DINAS KESEHATAN	

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.1.01.02.01.31.003.	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant			Kota Denpasar			terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan restaurant terlaksananya pelatihan hygiene sanitasi	364 lokasi 50 orang	pengelola memahami tentang hygiene sanitasi restaurant/rumah makan	100%	62,550,900.00	88,500,000.00	DINAS KESEHATAN	
1.01.02.1.01.02.01.31.005.	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Kantin Sekolah			Kota Denpasar			terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan laboratorium kantin sekolah	280 kantin	pengelola kantin sekolah memahami tentang makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi	100%	96,028,800.00	130,500,000.00	DINAS KESEHATAN	Pelayanan
1.01.02.1.01.02.01.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Ibu dan Anak mendapat pelayanan kesehatan secara terpadu	100 %					1,012,183,000.00	1,112,010,000.00		
1.01.02.1.01.02.01.32.004.	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Secara Terpadu			Kota Denpasar			Terlayannya Kesehatan Ibu dan Anak sesuai standar pelayanan - Persentase Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil - Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K1 - Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan K4 - Persentase Puskesmas melakukan orientasi P4K - Persentase Bumil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	- 100 % - 100 % - 98 % - 100 % - 98 %	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak - Menurunnya cakupan Angka Kematian Ibu - Menurunnya cakupan Angka Kematian Bayi	- 96/100.000 KH - 10/1.000 KH	82,541,000.00	89,404,000.00	DINAS KESEHATAN	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.1.01.02.01.32.005.	Kesehatan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir			Kota Denpasar			Ibu bersalin dengan aman dan bayi lahir sehat - Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan - Persentase persalinan di fasilitas kesehatan - Cakupan pelayanan ibu nifas sesuai standar - Cakupan BBL mendapat yankes sesuai standar - Persentase BBLR - Cakupan Neonatus lengkap - Cakupan neonatal dengan komplikasi tertangani	- 100 % - 100 % - 98 % - 100 % - < 5 % - 98 % - 80 %	Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak - Menurunnya kematian neonatal - Menurunnya Peresentase BBLR - Meningkatnya persalinan di faskes sesuai standar	- 25/1000 KH - 4 % - 100 %	929,642,000.00	1,022,606,000.00	DINAS KESEHATAN	Pelayanan
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%					9,686,503,460.00	10,069,385,413.00		
1.01.1.01.02.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kota Denpasar			Laporan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	1 Laporan 12bulan	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	100 %	9,686,503,460.00	10,069,385,413.00	DINAS KESEHATAN	Pelayanan
1.01.1.01.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan aparatur	100 %					5,428,830,000.00	6,182,895,600.00		
1.01.1.01.02.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Denpasar			Laporan kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Laporan 12 bulan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	5,428,830,000.00	6,182,895,600.00	DINAS KESEHATAN	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur sesuai kebutuhan	100%					570,000,000.00	600,000,000.00		
1.01.1.01.02.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kota Denpasar			Laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan	2 laporan	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Dinas Kesehatan dan UPT di bawahnya	570,000,000.00	600,000,000.00	DINAS KESEHATAN	Pelayanan
1.01.1.01.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Prosentase Penyelesaian dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	100 %					87,028,600.00	95,731,460.00		
1.01.1.01.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dinas Kesehatan Kota Denpasar			Laporan Profil,Lakip,Laporan Profil SPM	1 Laporan	Tersedianya Data Informasi Kesehatan	100 %	87,028,600.00	95,731,460.00	DINAS KESEHATAN	Pelayanan
Jumlah											82,453,685,015.00	89,365,522,096.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BLUD RSUD WANGAYA

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										111,015,822,000.00	111,015,822,000.00		
1.01.02.	KESEHATAN										111,015,822,000.00	111,015,822,000.00		
1.01.02.1.01.02.02.33.	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	100%					111,015,822,000.00	111,015,822,000.00		
1.01.02.1.01.02.02.33.01.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan			RSUD Wangaya			Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Sakit	1 Paket	Terlayannya Masyarakat dengan baik	100 %	111,015,822,000.00	111,015,822,000.00	BLUD RSUD WANGAYA	Pelayanan
Jumlah											111,015,822,000.00	111,015,822,000.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										1,524,689,148,010.84	1,662,592,707,048.72		
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										1,499,750,914,198.84	1,639,893,848,255.12		
1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Infrastruktur	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Terbangunnya Box Culvert	1 Buah					1,111,529,681,188.84	1,222,682,649,308.12		
1.01.03.1.01.03.01.15.003.	Pembangunan jalan kabupaten			Kota Denpasar			Peningkatan Jalan	220 Meter	Tersedianya Jalan yang Mantap	220 Meter	3,608,035,000.00	3,968,838,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelayanan
1.01.03.1.01.03.01.15.005.	Pembangunan jembatan			Kota Denpasar			Pembangunan Jembatan	24 Buah	Meningkatkan Aksesibilitas	24 Buah	52,344,338,000.00	57,578,771,800.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelayanan
1.01.03.1.01.03.01.15.007.	Peningkatan Jalan di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Meningkatnya kondisi jalan	183.873,7 meter	Tersedianya aksesibilitas jalan yang mantap	183.873,7 meter	859,691,152,702.84	945,660,267,973.12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelayanan
1.01.03.1.01.03.01.15.008.	Pembuatan Trotoar di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Pembuatan Trotoar	45.047 Meter	Meningkatnya akses pejalan kaki	45.047 Meter	195,043,872,486.00	214,548,259,735.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelayanan
1.01.03.1.01.03.01.15.009.	Pembuiatan Box Culvert di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Pembuatan Box Culvert	1 buah	Meningkatnya Aksebilitas `	1 buah	842,283,000.00	926,511,300.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelayanan
1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Infrastruktur	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Terpenuhinya Saluran Drainase	12.127.00 M					70,214,276,050.00	74,239,307,505.00		
1.01.03.1.01.03.01.16.003.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			Kota Denpasar			Saluran Drainase	12.127.00 M	Saluran Drainase	12.127.00 M	62,449,800,000.00	68,694,780,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelayanan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.04.1.01.03.01.17.002.	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat			Kota Denpasar			-Tersedianya Aspal untuk Peningatan Jalan Swadaya Masyarakat -Tersedianya Paving untuk Peningatan Jalan Swadaya Masyarakat	-1000 Drum - 22.550 m2	-jumlah Aspal Swadaya yang terdistribusi untuk Jalan Swadaya Masyarakat -Jumlah Paving yang terdistribusi untuk Jalan Swadaya Masyarakat	-1000 Drum -22.550 m2	4,136,312,200.00	0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelayanan
1.01.1.01.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan Pelayanan Administrasi perkantoran	Beroperasinya Administrasi Perkantoran					10,341,528,512.00	11,305,176,383.60		
1.01.1.01.03.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			PUPR			Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	10,281,363,712.00	11,238,995,103.60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelayanan
1.01.1.01.03.01.01.022.	Survey Harga Satuan Barang dan Jasa			Kota Denpasar			Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2018	1 Laporan	Tersedianya Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Sebagai Acuan Pelaksanaan Kegiatan	1 laporan	60,164,800.00	66,181,280.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelayanan
1.01.1.01.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana	100 %					10,416,393,100.00	11,345,282,410.00		
1.01.1.01.03.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kota Denpasar			Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kantor	100 %	10,416,393,100.00	11,345,282,410.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelayanan
1.01.1.01.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5%					44,000,000.00	48,400,000.00		
1.01.1.01.03.01.05.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kota Denpasar			Pemenuhan peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	5 %	meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Pegawai	5 %	44,000,000.00	48,400,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelayanan

No. Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah											1,524,689,148,010.84	1,662,592,707,048.72		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.04.1.01.04.01.19.005.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran			Kota Denpasar			Terlatihnya tenaga operasional yang disiagakan untuk penanganan darurat bencana	40 orang	Meningkatnya kemampuan tenaga operasional BPBD yang disiagakan untuk menangani bencana alam	40 orang	233,753,000.00	256,000,000.00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH	
1.01.04.1.01.04.01.19.007.	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran			kota denpasar			Jumlah pengelola pasar modern yang mendapat penyuluhan dalam Penanggulangan Bencana	300 orang	Meningkatnya Pengetahuan, Kemampuan dan kesiapsiagaan bagi pengelola pasar modern.	300 orang	242,094,800.00	400,000,000.00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH	
1.01.04.1.01.04.01.19.008.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran			Kota Denpasar			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100 %	Kualitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100%	7,168,200,000.00	1,200,000,000.00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH	
1.01.04.1.01.04.01.19.009.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran			Kota Denpasar			Terpeliharaanya Kendaraan operasional Penanggulangan Bencana	100 %	Kualitas Kendaraan operasional Penanggulangan bencana	100 %	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH	Pelayanan
1.01.04.1.01.04.01.19.011.	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran			Kota Denpasar			Jumlah BALANA yang mendapat pelatihan kebencanaan dari masing-masing Aparatur SKPD	40 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan BALANA yang disiagakan dari masing-masing SKPD	40 orang	243,535,000.00	300,000,000.00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH	Pelayanan
1.01.04.1.01.04.01.19.012.	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran			Kota Denpasar			Jumlah peserta lomba simulasi penanggulangan darurat bencana kebakaran	86 orang	Meningkatnya kemampuan SDM Lembaga keuangan terhadap bahaya kebakaran	86 orang	102,725,000.00	150,000,000.00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH	
1.01.04.1.01.04.01.19.014.	Pelatihan dan Simulasi Penggunaan Sarpras Pasca Bencana			kota denpasar			Jumlah Anggota Parum Pecalang yang disiagakan dalam penanganan pasca bencana	43 orang	Meningkatnya Kemampuan Anggota Parum Pecalang yang disiagakan dalam penanganan pasca bencana	43 orang	300,230,000.00	300,000,000.00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH	Pelayanan

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.04.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Pejabat dan Staf BPBD yang perlu ditingkatkan kemampuannya dalam penanganan bencana	100%					167,700,000.00	200,000,000.00		
1.01.1.01.04.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			di Kota Denpasar			Jumlah Pejabat dan Staf BPBD mendapatkan bintek penanganan bencana	15 orang	Meningkatnya kemampuan Pejabat dan staf BPBD yang dilatih dalam penanganan bencana	15 orang	167,700,000.00	200,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan
Jumlah											29,336,151,550.00	20,803,000,000.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 5

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.04.1.01.04.02.16.007.	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keresasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang			Kota Denpasar			Terkendalinya dan tertatanya sarana dan prasarana lingkungan publik di Kota Denpasar	Penataan sarana dan prasarana lingkungan publik di Kota Denpasar	Terwujudnya penataan sarana dan prasarana lingkungan publik di Kota Denpasar	6 kawasan lingkungan publik dan 1 kawasan lingkungan privat	15,190,200,000.00	16,709,220,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pelayanan
1.01.04.1.01.04.02.16.009.	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas umum			Kota denpasar			Laporan OP pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk reklame dan utilitas lainnya	Operasional pengawasan pemanfaatan reklame	Laporan OP pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk reklame dan utilitas lainnya	4.000 Objek pengawasan, penataan dan pengendalian pemanfaatan untuk reklame dan papan nama	2,325,650,000.00	2,558,215,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pelayanan
1.01.04.1.01.04.02.17.	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan pertamanan	100%					23,943,024,378.00	26,337,326,816.00		
1.01.04.1.01.04.02.17.002.	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat			Kota Denpasar			Terlaksananya penataan taman yang berkualitas di Kota Denpasar	Tertatanya taman dan prasarana lingkungan ruang publik di Kota Denpasar	Pemenuhan penataan taman di Kota Denpasar	100%	23,615,939,878.00	25,977,533,866.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pelayanan
1.01.04.1.01.04.02.17.003.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan			Kota Denpasar			Perlunya Konservasi Tanaman Hias, Tanaman Penghijauan dan Tanaman Toga	Terpenuhinya konservasi tanaman hias, tanaman penghijauan dan tanaman toga serta terlaksananya kegiatan PPT Kota Denpasar	Pemenuhan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan	100%	327,084,500.00	359,792,950.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1.01.04.1.01.04.02.20.	Program pengelolaan areal pemakaman	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Kota denpasar	Masyarakat di Kota Denpasar					3,439,800,000.00	3,783,780,000.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.04.1.01.04.02.20.007.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman			Kota Denpasar			Pemeliharaan sarana dan prasaran pemakaman	1 Laporan Masterplan dan 1 Penataan Kawasan	Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman	1 kegiatan	3,439,800,000.00	3,783,780,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1.01.1.01.04.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	100%					2,671,606,400.00	2,938,767,040.00		
1.01.1.01.04.02.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kota Denpasar			Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran	100%	Prosentasi tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	2,671,606,400.00	2,938,767,040.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pelayanan
1.01.1.01.04.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%					869,137,312.00	956,051,043.00		
1.01.1.01.04.02.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kota Denpasar			Sarana dan Prasrana Apartur	100%	Prosentase Pemenuhan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	869,137,312.00	956,051,043.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pelayanan
1.01.1.01.04.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Terlaksananya Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					240,000,000.00	264,000,000.00		
1.01.1.01.04.02.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kota Denpasar			Terlaksananya kursus-kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku	100%	Kapasitas aparatur yang meningkat	100%	240,000,000.00	264,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pelayanan
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										914,049,500.00	1,083,442,650.00		
1.02.04.	PERTANAHAN										914,049,500.00	1,083,442,650.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.04.1.01.04.02.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat	50%					760,031,500.00	836,034,650.00		
1.02.04.1.01.04.02.16.001.	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah			Kota Denpasar			Data Tanah Aset Daerah	14 Sertifikat	Sertifikat	14 Sertifikat	682,635,800.00	750,899,380.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1.02.04.1.01.04.02.16.003.	Penataan Kawasan Terpadu I Kecamatan Denpasar Barat			Kota Denpasar			Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat	1 Paket	Tertatanya Kawasan Terpadu Berupa Konsolidasi Tanah (LC) di Kecamatan Denpasar Barat	50%	77,395,700.00	85,135,270.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pelayanan
1.02.04.1.01.04.02.17.	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar		Adanya Kepastian Pemilikan Tanah	10 bh peta					154,018,000.00	247,408,000.00		
1.02.04.1.01.04.02.17.001.	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Kota Denpasar			Data Tanah Aset Daerah	10 buah peta	Peta bidang	10 buah	154,018,000.00	247,408,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
Jumlah											58,824,293,090.00	65,185,664,199.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.05.1.01.05.01.15.011.	Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM)			Kota Denpasar			Jumlah laporan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	4 laporan	Terlaksananya forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Denpasar	100%	382,023,000.00	439,326,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelayanan
1.01.05.1.01.05.01.15.012.	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial			Kota Denpasar			Jumlah laporan tim terpadu penanganan konflik sosial	4 laporan	Terciptanya keamanan wilayah	100%	26,706,000.00	30,712,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelayanan
1.01.05.1.01.05.01.15.013.	Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Th 2015 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik			Kota Denpasar			Jumlah peserta sosialisasi peraturan BPK No.2 Th.2015 tentang bantuan keuangan partai politik di Kota Denpasar Tahun 2018	100 orang	Terselenggaranya sosialisasi peraturan BPK No.2 Th.2015 tentang bantuan keuangan partai politik di Kota Denpasar Tahun 2018	100%	86,290,000.00	100,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelayanan
1.01.05.1.01.05.01.15.015.	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunannya di kota Denpasar			Kota Denpasar			Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar	12 kali	Terlaksanya koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar	100%	1,041,990,000.00	1,050,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelayanan
1.01.05.1.01.05.01.15.020.	Monitoring / Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bagi Organisasi Masyarakat Di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Jumlah tim monitoring/ pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi organisasi masyarakat di Kota Denpasar	25 orang	Terselenggaranya monitoring/ pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi organisasi masyarakat di Kota Denpasar	100%	138,045,000.00	150,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pertumbuhan dan Perencanaan
1.01.05.1.01.05.01.15.021.	Pelatihan Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan Bagi Pecalang di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Jumlah peserta pelaksanaan pelatihan keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi ormas (pecalang) di Kota Denpasar	70 orang	Terselenggaranya pelatihan pecalang untuk memahami ketentuan mengenai keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Denpasar	100%	192,090,000.00	200,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pertumbuhan dan Perencanaan
1.01.05.1.01.05.01.15.022.	Pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini			Kota Denpasar			Jumlah peserta pelatihan pembekalan jaringan deteksi dini	50 orang	Terlatihnya tenaga jaringan deteksi dini	100%	75,300,000.00	86,595,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pertumbuhan dan Perencanaan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.00.01.1.01.05.01.16.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Ketentraman, Keterlibatan dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Prosentase pemenuhan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100%					262,124,500.00	287,071,950.00		
5.00.01.1.01.05.01.16.004.	Lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan			Kota Denpasar			Jumlah peserta lomba paskibra	200 orang	Terselenggaranya lomba paskibra	100%	110,974,500.00	122,071,950.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pertumbuhan dan Pemertumbuhan
5.00.01.1.01.05.01.16.006.	Fasilitasi Terhadap Pelestarian Ketahanan Kreasi Seni dan Budaya			Kota Denpasar			Jumlah peserta bimtek kegiatan fasilitasi terhadap pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya	50 orang	Terselenggaranya bimtek fasilitasi terhadap pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya	100%	80,750,000.00	85,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pertumbuhan dan Pemertumbuhan
5.00.01.1.01.05.01.16.021.	Seminar Peningkatan Ketahanan Kebangsaan Bagi Penganut Aliran Kepercayaan			Kota Denpasar			Jumlah peserta seminar peningkatan ketahanan kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan	50 orang	Terselenggaranya seminar peningkatan ketahanan kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan	100%	70,400,000.00	80,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pertumbuhan dan Pemertumbuhan
5.00.01.1.01.05.01.17.	Program pendidikan politik masyarakat	Ketentraman, Keterlibatan dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Prosentase pemenuhan pendidikan politik masyarakat	100%					575,084,000.00	667,500,000.00		
5.00.01.1.01.05.01.17.006.	Verifikasi Bantuan Parpol			Kota Denpasar			Jumlah verifikasi bantuan parpol di Kota Denpasar	7 parpol	Pemenuhan kebutuhan data besaran bantuan parpol di Kota Denpasar	100%	143,250,000.00	160,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelayanan
5.00.01.1.01.05.01.17.007.	Pendidikan Politik Kepada Organisasi Massa			Kota Denpasar			Jumlah peserta pendidikan politik kepada organisasi masyarakat di Kota Denpasar	100 orang	Terselenggaranya pendidikan politik kepada organisasi masyarakat di Kota Denpasar	100%	83,540,000.00	90,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pertumbuhan dan Pemertumbuhan
5.00.01.1.01.05.01.17.008.	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik			Kota Denpasar			Jumlah peserta koordinasi forum-forum diskusi politik	50 orang	Pemenuhan etika politik di Kota Denpasar	100%	35,000,000.00	40,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pertumbuhan dan Pemertumbuhan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.00.01.1.01.05.01.17.009.	Monitoring / Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Umum Kepala Daerah Provinsi Bali Di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Jumlah tim monitoring/ pemantauan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar	15 orang	Terselenggaranya monitoring/ pemantauan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar	100%	34,000,000.00	37,500,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pertumbuhan dan Pem
5.00.01.1.01.05.01.17.010.	Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Jumlah peserta kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kota Denpasar	200 orang	Terselenggaranya pendidikan politik masyarakat bagi pemilih pemula di Kota Denpasar	100%	64,340,000.00	90,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pertumbuhan dan Pem
5.00.01.1.01.05.01.17.017.	Pemberdayaan Kelembagaan Parpol			Kota Denpasar			Jumlah parpol pemenang pemilu 2014-2019 yang mengikuti pemberdayaan pemilu	7 parpol	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan parpol pemenang pemilu 2014-2019	100%	148,110,000.00	165,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pertumbuhan dan Pem
5.00.01.1.01.05.01.17.018.	Pendidikan Politik Bagi Aparatur Pemerintah di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Jumlah peserta kegiatan pendidikan politik bagi apartur pemerintah di Kota Denpasar	200 orang	Terselenggaranya pendidikan politik bagi aparatur pemerintah di Kota Denpasar	100%	66,844,000.00	85,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pertumbuhan dan Pem
Jumlah											7,175,937,300.00	7,943,343,250.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 4

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.05.1.01.05.02.15.019.	Pemantauan Upaya Perlindungan Masyarakat			KOTA DENPASAR			Terpantaunya upaya perlindungan masyarakat di 43 (empat puluh tiga) desa/kelurahan di Kota Denpasar	43 Desa / Kelurahan	Meningkatnya upaya perlindungan masyarakat	100 %	73,471,000.00	84,491,650.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
1.01.05.1.01.05.02.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Pencegahan dan Pemeliharaan Kantramtibmas	100 %					1,201,232,095.00	1,381,416,664.00		
1.01.05.1.01.05.02.16.006.	Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Ditertibkannya Pelanggar Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar	48 Kali	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota	80 %	96,347,170.00	110,799,246.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
1.01.05.1.01.05.02.16.007.	Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Ditertibkannya Pelanggar Peraturan Perundang Undangan Daerah di Kota Denpasar	165 Kali	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mentaati Peraturan Perundang Undangan	80 %	157,886,376.00	181,569,332.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
1.01.05.1.01.05.02.16.008.	Penertiban Baliho / Spanduk yang melanggar Perda Kota Denpasar			Kota Denpasar			Ditertibkannya Spanduk/Baliho yang melanggar Perda di Kota Denpasar	63 Kali	Tertib dan bersihnya Kota Denpasar	80 %	65,000,000.00	74,750,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
1.01.05.1.01.05.02.16.009.	Penertiban Penduduk Yang mengganggu kenyamanan di kota Denpasar			Kota Denpasar			Ditertibkannya Masyarakat yang melanggar Perda di Kota Denpasar	156 Kali Turun	Tercapainya ketertiban dan berkurangnya pelanggaran Perda Di Kota Denpasar	80 %	165,334,249.00	190,134,386.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
1.01.05.1.01.05.02.16.010.	Penertiban Pedagang di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Ditertibkannya masyarakat yang memiliki usaha /berjualan / transaksi menggunakan tempat yang melanggar Perda di Kota Denpasar	110 Kali turun	Tertib dan berkurangnya masyarakat yang melanggar Perda di Kota Denpasar	80 %	106,260,000.00	122,199,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.05.1.01.05.02.16.011.	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Ditertibkannya Reklame Tanpa Ijin dan atau Tidak berijin	24 Titik	Tertibnya Pemasangan Reklame sesuai dengan ijin	100 %	219,258,000.00	252,146,700.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
1.01.05.1.01.05.02.16.012.	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Penertiban Permukiman Kumuh di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Ditertibkannya dan dibongkarnya kawasan permukiman di Kota Denpasar	3 Titik	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh di Kota Denpasar	100 %	81,146,300.00	93,318,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
1.01.05.1.01.05.02.16.013.	Operasi Gabung Terpadu, Patroli dan Penertiban Malam			Kota Denpasar			Terciptanya Keamanan dan Ketertiban di Kota Denpasar	48 Kali Turun	Terpantaunya Keamanan dan Ketertiban di Kota Denpasar	80 %	310,000,000.00	356,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
1.01.1.01.05.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					1,879,718,600.00	2,067,690,460.00		
1.01.1.01.05.02.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar			Terselenggaranya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Satu tahun	100%	1,879,718,600.00	2,067,690,460.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
1.01.1.01.05.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang layak	100 %					1,074,707,000.00	1,235,913,050.00		
1.01.1.01.05.02.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kota Denpasar			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang layak	100 %	Terpenuhinya Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Layak	100 %	1,074,707,000.00	1,235,913,050.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
1.01.1.01.05.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Dan Anggota Satpol PP	100 %					342,335,000.00	393,685,250.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.05.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kota Denpasar			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	168 Orang	Meningkatnya Disiplin Aparatur	80 %	342,335,000.00	393,685,250.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
1.01.1.01.05.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 %					315,213,800.00	362,495,870.00		
1.01.1.01.05.02.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kota Denpasar			Terselenggaranya Kapasitas sumber daya aparatur	4 Orang	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan Formal.	100 %	48,000,000.00	55,200,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
1.01.1.01.05.02.05.009.	Pendidikan, Pelatihan Kesemaptaan			Kota Denpasar			Terlaksananya Pelatihan Kesemaptaan	130 Orang	Meningkatnya Ketrampilan Anggota, Meningkatnya Kebugaran Anggota, Meningkatnya Disiplin Anggota	100 %	267,213,800.00	307,295,870.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
1.01.1.01.05.02.19.	Program Peningkatan Nasionalisme Sumber daya Aparatur	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur	100 %					140,000,000.00	161,000,000.00		
1.01.1.01.05.02.19.01.	Hut Satpol PP dan Linmas			Kota Denpasar			Lancarnya Pelaksanaan HUT.Pol.PP dan Linmas Tk. Nasional dan Tk. Daerah	5 Kali Kegiatan	Terlaksananya Acara HUT.Pol.PP dan Linmas Tk. Nasional dan Tk. Daerah	80 %	140,000,000.00	161,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelayanan
Jumlah											5,451,419,995.00	6,175,146,819.00		

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS SOSIAL

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 6

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.06.1.01.06.01.16.008.	Penyusunan kebijakan pelayananandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial			Kota Denpasar			Tersedianya Data PMKS dan PSKS	43 Desa/Kelurahan	Tersusunnya Buku Data PMKS dan PSKS	65 Buku	155,666,100.00	186,799,320.00	DINAS SOSIAL	
1.01.06.1.01.06.01.16.010.	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa			Kota Denpasar			Meningkatnya Peran Serta TAGANA dalam Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	45 TAGANA	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Kesejahteraan Sosial	45 TAGANA	69,810,000.00	83,772,000.00	DINAS SOSIAL	
1.01.06.1.01.06.01.16.011.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Kota Denpasar			Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	70 Buku	Data Base Keluarga Miskin	70 Buku	155,463,000.00	186,555,600.00	DINAS SOSIAL	
1.01.06.1.01.06.01.16.012.	Penyusunan Program Perencanaan Berbagi Pelayanan di Bidang Sosial			Kota Denpasar			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial	4 Dokumen	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Di Bidang Kesejahteraan Sosial	4 Dokumen	95,030,300.00	114,036,360.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.06.1.01.06.01.16.013.	Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial			Kota Denpasar			Tersusunnya Buku Profil Dinas Sosial	65 Buku	Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Dinas Sosial	65 Buku	50,433,900.00	60,520,680.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.06.1.01.06.01.16.014.	Pemulangan Orang Terlantar			Kota Denpasar			Jumlah Orang Terlantar yang dipulangkan kedaerah asalnya	30 Orang	Terpulangnnya orang terlantar ke daerah asalnya	30 Orang	3,650,000.00	4,380,000.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.06.1.01.06.01.16.015.	Konvensi Keserasian Sosial Daerah			Kota Denpasar			Terlaksananya komitmen relawan dan masyarakat yang mendapat pemantapan penanggulangan bencana sosial	50 TAGANA	Terwujudnya komitmen tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan dari unsur pemerintah untuk hidup berdampingan secara damai, selaras dan harmonis sehingga konflik sosial dapat dicegah	50 TAGANA	33,675,000.00	40,410,000.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.06.1.01.06.01.21.010.	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)			Kota Denpasar			Meningkatnya Rasa Percaya Diri dan Kesadaran Para Lanjut Usia	500 Orang Lansia	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	500 Orang Lansia	364,680,000.00	437,616,000.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.06.1.01.06.01.21.011.	Penyusunan Buku SPM Bidang Sosial			Kota Denpasar			Tersusunnya SPM Bidang Sosial	20 SPM	Terpenuhinya Laporan SPM Bidang Sosial	20 SPM	26,032,600.00	31,239,120.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.06.1.01.06.01.21.013.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Kota Denpasar			Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 Laporan	Laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 Laporan	21,897,600.00	26,227,120.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.06.1.01.06.01.21.014.	Penyusunan LAKIP Dinas Sosial			Kota Denpasar			Tersusunnya LAKIP dan LKPJ Dinas Sosial Kota Denpasar	2 Laporan	Laporan LAKIP dan LKPJ Dinas Sosial Kota Denpasar	2 Laporan	99,087,600.00	118,905,120.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.06.1.01.06.01.21.015.	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang (PUB))			Kota Denpasar			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Sumber Dana Bantuan Sosial	30 Lembaga	Terinformasinya Penyelenggara Sumber Dana Bantuan Sosial	30 Lembaga	9,457,500.00	11,349,000.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.06.1.01.06.01.21.016.	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS))			Kota Denpasar			Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha yang Berpartisipasi dalam Penanganan PMKS	30 Lembaga Dunia Usaha	Terwujudnya Kemitraan Dunia Usaha dalam Penanganan PMKS	30 Lembaga Dunia Usaha	16,602,500.00	19,923,000.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.06.1.01.06.01.21.017.	Penyuluhan dan Bimbingan Sosial			Kota Denpasar			Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Kesejahteraan Sosial	400 Orang	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kesejahteraan Sosial	400 Orang	100,755,000.00	110,830,500.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.06.1.01.06.01.21.018.	Pelatihan Manajemen Organisasi Karang Taruna			Kota Denpasar			Meningkatnya Pemahaman Tentang Manajemen Organisasi Karang Taruna	35 orang	Terlatihnya 35 orang pengurus Karang Taruna	35 orang	135,890,000.00	149,479,000.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.06.1.01.06.01.21.019.	Pembinaan Kepahlawanan/Keperintisan			Kota Denpasar			Meningkatnya Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan	225 orang	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Pahlawan dan Pemahaman Terhadap Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan	225 orang	263,815,000.00	290,196,500.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.06.1.01.06.01.21.020.	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional			Kota Denpasar			Meningkatnya Peningkatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	1 Orsos	Meningkatnya Peningkatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	1 Orsos	143,365,500.00	157,702,050.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.1.01.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %					1,750,005,700.00	2,100,006,840.00		
1.01.1.01.06.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kota Denpasar			Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan	1,750,005,700.00	2,100,006,840.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.1.01.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %					967,128,000.00	1,160,553,600.00		
1.01.1.01.06.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kota Denpasar			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kegiatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Layak	1 Kegiatan	967,128,000.00	1,160,553,600.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
1.01.1.01.06.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	100 %					77,000,000.00	80,000,000.00		
1.01.1.01.06.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kota Denpasar			Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan PNS pada Dinas Sosial	7 Orang	Meningkatnya prestasi kerja dan dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional	7 Orang	77,000,000.00	80,000,000.00	DINAS SOSIAL	Pelayanan
Jumlah											7,252,966,000.00	8,519,882,000.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.1.02.01.01.16.010.	Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri			Kota Denpasar			Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja Mandiri / Pencari Kerja	40 Orang	Terlatihnya Tenaga Kerja Mandiri / Pencari Kerja Dengan Terampil	40 Orang	885,847,000.00	974,431,700.00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	Pelayanan
1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Terlaksananya Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100 %					1,333,139,300.00	1,466,453,230.00		
1.02.01.1.02.01.01.17.002.	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial			Kota Denpasar			Terlaksananya Jumlah Penyelesaian Kasus PHI/PHK/Mogok dan Unjuk Rasa	Laporan	Terselesaikannya Kasus Hubungan Industrial	35 Kasus	135,942,300.00	149,536,530.00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	
1.02.01.1.02.01.01.17.003.	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan			Kota Denpasar			Tersusunnya KHL dan rekomendasi UMK	Laporan Kegiatan dan Rekomendasi UMK	Tercapainya Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ditetapkan UMK	Nilai KHL dan Nilai UMK Tahun 2018	527,020,200.00	579,722,220.00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	
1.02.01.1.02.01.01.17.004.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan			Kota Denpasar			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan-Peraturan Ketenagakerjaan	160 Perusahaan	Tercapainya Peningkatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan	160 Perusahaan	29,345,900.00	32,280,490.00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	
1.02.01.1.02.01.01.17.009.	Inovasi Program (Peringatan Hari Buruh Internasional/May Day)			kota Denpasar			Terlaksananya Peringatan Hari Buruh	50 Perusahaan	Meningkatnya Solidaritas Buruh	50 Perusahaan	264,962,500.00	291,458,750.00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	Pelayanan
1.02.01.1.02.01.01.17.011.	Fasilitasi Syarat-Syarat Kerja dan Kelembagaan Ketenagakerjaan			Kota Denpasar			Terlaksananya Prosedur Pemberi Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan	Lembaga Ketenagakerjaan, 145 Perusahaan	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis Lewat Lembaga Ketenagakerjaan	Lembaga Ketenagakerjaan, 145 Perusahaan	375,868,400.00	413,455,240.00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	Pelayanan
1.02.1.02.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					1,853,465,000.00	2,038,811,500.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kota Denpasar			Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 kegiatan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan	1,853,465,000.00	2,038,811,500.00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	Pelayanan
1.02.1.02.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					1,693,160,000.00	1,862,476,000.00		
1.02.1.02.01.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kota Denpasar			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak	1 Kegiatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Layak	1 Kegiatan	1,693,160,000.00	1,862,476,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	Pelayanan
1.02.1.02.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	4 Orang					44,000,000.00	50,000,000.00		
1.02.1.02.01.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kota Denpasar			Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan PNS pada DTKSK	4 Orang	Meningkatnya Prestasi Kerja dan Dapat Melaksanakan Pekerjaan Secara Profesional	4 Orang	44,000,000.00	50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	Pelayanan
Jumlah											8,903,908,800.00	8,469,787,534.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.1.02.02.01.17.008.	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan			Kota Denpasar			Terlaksananya pelayanan terpadu perlindungan perempuan	4 kecamatan	Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan	200 orang	158,000,000.00	175,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan
1.02.02.1.02.02.01.17.010.	Penyusunan Profil Statistik Gender			Kota Denpasar			Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan	1 kali	Tersusunnya profil Statistik Gender	1 buah	93,800,000.00	93,800,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan
1.02.02.1.02.02.01.17.011.	Sosialisasi 3 End Lomba Pecha Kucha / PISPA			Kota Denpasar			PUSPA di tingkat kecamatan dan Kota Denpasar	25 kelompok	Desa/Kelurahan, kecamatan dan di Kota Denpasar	100%	259,325,000.00	260,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan
1.02.02.1.02.02.01.17.013.	Pemenuhan Anak di Bidang Kesehatan Dasar			Denpasar			Meningkatnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, Pemerintah masyarakat termasuk organisasi non pemerintahan, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan anak	70%	Jumlah SDM Penggiat (Champion) pemenuhan hak kesehatan anak di kota Denpasar	70%	1,010,550,000.00	900,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.1.02.02.01.17.014.	Penyusunan Profile Kekerasan terhadap perempuan dan anak			Kota Denpasar			Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan	1 Kali	Tersusunnya Buku Profil Kekerasan Perempuan dan Anak	1 Buah	58,300,000.00	60,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan
1.02.02.1.02.02.01.18.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Predikat dalam evaluasi PUG dan Menuju Kota Layak Anak Responsif Gender	Predikat Utama					39,600,000.00	40,480,000.00		
1.02.02.1.02.02.01.18.002.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender			Denpasar			Frekwensi Pendidikan dan Pelatihan ARG	4 Kecamatan	Tersusunnya Anggaran yang Responsif Gender di Masing-masing SKPD	40 orang	39,600,000.00	40,480,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan
1.02.02.1.02.02.01.19.	Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Predikat dalam evaluasi PUG dan Menuju Kota Layak Anak Responsif Gender	4 Kecamatan					64,706,000.00	65,906,000.00		
1.02.02.1.02.02.01.19.001.	Pelatihan Usaha dan Managemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha.			Kota Denpasar			Frekuensi Bimbingan Manajemen Usaha	4 Kecamatan	a. Terlatihnya 40 orang perempuan dalam mengelola Home Industri b. Terlatihnya 40 orang perempuan dalam menambah penghasilan keluarga	80 orang	64,706,000.00	65,906,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.08.1.02.02.01.23.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Pendamping Kelompok Tri Bina Paripurna (BKB,BKR,BKL) Berdampingan Dengan UPPKS dan Keluarga Harmonis	80%					147,090,000.00	175,000,000.00		
1.02.08.1.02.02.01.23.001.	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan			Denpasar			Laporan Pelaksanaan Kegiatan	200 orang	Terlaksananya kebutuhan Tenaga Pendamping Kelompok Tri Bina Paripurna berdampingan dengan UPPKS dan Keluarga Harmonis di Kecamatan se-Kota Denpasar	200 orang	147,090,000.00	175,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.08.1.02.02.01.24.	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Pemenuhan Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu, PAUD	80%					116,650,000.00	150,000,000.00		
1.02.08.1.02.02.01.24.001.	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU			Denpasar			Frekuensi Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu, PAUD	100 orang	Tersedianya Pelayanan Kesehatan dan Tumbuh Kembang Anak	100 orang	116,650,000.00	150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan
1.02.1.02.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %					2,164,281,600.00	2,349,141,960.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.02.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kota Denpasar			Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	2,164,281,600.00	2,349,141,960.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan
1.02.1.02.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					1,273,863,850.00	1,401,250,235.00		
1.02.1.02.02.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kota Denpasar			Laporan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1,273,863,850.00	1,401,250,235.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan
1.02.1.02.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan Kegiatan Sumber Daya Manusia	100%					165,000,000.00	181,500,000.00		
1.02.1.02.02.01.05.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Denpasar dan Luar Denpasar			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat / Bintek	15 Orang	Jumlah PNS yang memiliki Kompetensi Teknis	100%	165,000,000.00	181,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan
Jumlah											11,597,022,250.00	12,823,232,595.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	93%					1,412,640,350.00	436,773,284,000.00		
1.02.05.1.02.05.01.16.001.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura			Denpasar			jumlah jenis buku laporan	1 jenis	jumlah trophy adi pura dan desa sadar lingkungan	1,1	126,211,000.00	140,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
1.02.05.1.02.05.01.16.002.	Koordinasi penilaian langit biru			Denpasar			Jumlah Jenis Laporan Kajian	1 Jenis buku laporan	% Hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu dari 9 parameter yang di ukur	100%	366,416,100.00	400,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.	Pemantauan Kualitas Lingkungan			Denpasar			jumlah jenis buku laporan	1 jenis	%hasil uji kualitas air sungai , air laut dan kebisingan yang memenuhi baku mutu dari 15 parameter yang di ukur	100%	182,290,100.00	200,519,110.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
1.02.05.1.02.05.01.16.004.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup			Denpasar			jumlah jenis buku laporan	1 jenis	jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaraan dan / atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	20 buah pengaduan	107,836,000.00	118,619,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
1.02.05.1.02.05.01.16.006.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3			Denpasar			Jumlah jenis laporan	2 jenis laporan	Jumlah TPS Limbah B3 yang terbangun di perusahaan penghasil limbah B3	5 buah	80,667,000.00	89,173,700.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup			Kota Denpasar			jumlah penerbitan dokumen lingkungan(UKL - UPL, SPPL)	200 buah dokumen	jumlah usaha dan / atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (UKL - UPL, SPPL)	200 Buah perusahaan	101,801,900.00	111,608,090.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.05.1.02.05.01.16.013.	Koordinasi penyusunan AMDAL			Denpasar			Jumlah penerbitan dokumen AMDAL	1	Jumlah Usaha dan / Atau Kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL)	1	55,331,000.00	60,864,100.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
1.02.05.1.02.05.01.16.014.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup			Denpasar			jumlah jenis buku laporan	1 jenis	jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota,tingkat provinsi,tingkat nasional,mandiri.	5,3,3,2	392,087,250.00	435,652,500,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	93%					785,528,900.00	880,769,430.00		
1.02.05.1.02.05.01.17.004.	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan			denpasar			jumlah jenis buku laporan	1 jenis	jumlah desa atau keluarahan yang dibina sesuai dengan potensi desa	3 buah desa atau kelurahan	192,011,600.00	215,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	Pelayanan
1.02.05.1.02.05.01.17.005.	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim			denpasar			jumlah jenis buku laporan	1 jenis	jumlah penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	1.291.490,36 Gg	197,238,000.00	225,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	Pelayanan
1.02.05.1.02.05.01.17.006.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan			Denpasar			jumlah jenis buku laporan	1 jenis	luasan lahan yang ditetapkan dan di informasikan status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomasa	3.456,65 Ha	218,881,300.00	240,769,430.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	Pelayanan
1.02.05.1.02.05.01.17.010.	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem			denpasar			jumlah jenis buku laporan	1 jenis	jumlah jenis flora dan fauna yang di inventarisir	200 jenis flora / 100 jenis fauna	177,398,000.00	200,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	Pelayanan
1.02.05.1.02.05.01.18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatnya Perindangan Lahan	100%					244,376,000.00	300,000,000.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.05.1.02.05.01.18.003.	Rehabilitasi hutan dan lahan			Denpasar			Jumlah bibit pohon	500 bibit pohon	jumlah luasan perindangan lahan	0.50 Ha	244,376,000.00	300,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
1.02.05.1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%					400,911,500.00	445,460,000.00		
1.02.05.1.02.05.01.19.003.	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah			denpasar			jumlah jenis buku laporan SLHD	2 jenis	%ketersediaan informasi data kualitas lingkungan	100%	400,911,500.00	445,460,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
1.02.05.1.02.05.01.20.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatnya Pengendalian Polusi Lingkungan	94%					456,967,600.00	502,664,360.00		
1.02.05.1.02.05.01.20.001.	Pengujian emisi kendaraan bermotor			Denpasar			jumlah jenis buku laporan	1 jenis	jumlaj kendaraan yang di uji emisi	1000	153,517,900.00	168,869,690.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
1.02.05.1.02.05.01.20.002.	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri			Denpasar			Jumlah jenis buku laporan	1 jenis	jumlah usaha dan / atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara.	32 buah	69,843,100.00	76,827,410.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
1.02.05.1.02.05.01.20.003.	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair			Denpasar			jumlah jenis buku laporan	1 jenis	jumlah usaha dan / atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran air.	87 perusahaan	233,606,600.00	256,967,260.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.05.1.02.05.01.24.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	86%					801,887,812.00	1,049,254,386.00		
1.02.05.1.02.05.01.24.006.	Pemeliharaan RTH			denpasar			jumlah jenis buku laporan	1 jenis	jumlah pemeliharaan ruang terbuka hijau	1 kali	801,887,812.00	1,049,254,386.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	Pelayanan
1.02.1.02.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	100%					33,909,032,852.00	37,299,936,137.00		
1.02.1.02.05.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Denpasar			jumlah jenis buku laporan	1 jenis	%peningkatan kinerja aparatur	100%	33,909,032,852.00	37,299,936,137.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	Pelayanan
1.02.1.02.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	100%					1,760,934,812.00	1,937,028,293.00		
1.02.1.02.05.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Denpasar			Jumlah Jenis Buku Laporan	1 Jenis	%Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	1,760,934,812.00	1,937,028,293.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	Pelayanan
1.02.1.02.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik	100%					44,000,000.00	48,400,000.00		
1.02.1.02.05.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Denpasar			jumlah SDM yang mengikuti diklat	10 orang	%peningkatan penyelesaian pekerjaan	100%	44,000,000.00	48,400,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	Pelayanan
Jumlah											79,146,873,494.00	522,500,449,641.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										7,763,666,728.00	7,652,969,380.00		
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										1,634,483,828.00	1,916,331,345.00		
1.02.06.1.02.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Tertib Data Administrasi Kependudukan	100%					1,634,483,828.00	1,916,331,345.00		
1.02.06.1.02.06.01.15.002.	Pelatihan tenaga pengelola SIAK			Kota Denpasar			SDM TIK yang terlatih tentang dokumen administrasi kependudukan	30 orang	Terwujudnya SDM TIK yang terlatih tentang dokumen administrasi kependudukan	100 %	101,568,000.00	120,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan
1.02.06.1.02.06.01.15.006.	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar			Laporan kegiatan monev SPM dan Buku profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50 buku dan 75 buku	Keakuratan data kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	32,508,000.00	37,384,200.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1.02.06.1.02.06.01.15.008.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil			Denpasar			Laporan hasil pelayanan jemput bola	1 laporan	Kepemilikan Akta bagi masyarakat	43 lokasi	227,200,000.00	306,720,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan
1.02.06.1.02.06.01.15.011.	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar			SDM TIK yang terlatih tentang dokumen administrasi kependudukan	25 orang	Terwujudnya SDM TIK yang terlatih tentang dokumen administrasi kependudukan	100%	88,018,000.00	116,803,200.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1.02.06.1.02.06.01.15.012.	Sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil			Denpasar			Laporan hasil Sosialisasi	1 laporan	Pemahaman masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil	180 orang	225,729,000.00	259,588,350.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.06.1.02.06.01.15.014.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Denpasar			Termonitoringnya Administrasi Kependudukan	1 laporan	Pembentukan Aparat Desa / Kelurahan yang memahami administrasi kependudukan	8 Desa/Kelurahan terbaik	120,230,000.00	132,253,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1.02.06.1.02.06.01.15.016.	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang			Kota Denpasar			Terkendalinya mobilitas penduduk pendatang	penduduk pendatang	Data penduduk pendatang	100%	50,000,000.00	50,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan
1.02.06.1.02.06.01.15.017.	Pembuatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar			Buku profil perkembangan kependudukan	50 buku	Kepuasan Masyarakat akan informasi perkembangan kependudukan	100%	141,750,278.00	163,012,820.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan
1.02.06.1.02.06.01.15.020.	Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar			Denpasar			Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar	543.997 KTP	E-KTP	543.997 KTP	280,672,050.00	308,740,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan
1.02.06.1.02.06.01.15.022.	Pengolahan dan Pengarsipan Data Catatan Sipil			Denpasar			Tertatnya berkas/warkah Pencatatan Sipil	800 buku	Warkah akta Pencatatan Sipil terjilid (buku)	100%	286,266,000.00	329,205,900.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan
1.02.06.1.02.06.01.15.024.	Inovasi Pelayanan Publik			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Proposal Inovasi Pelayanan Publik	1 Proposal	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan	100%	80,542,500.00	92,623,875.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan
1.02.1.02.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar		Pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					4,902,088,900.00	4,416,564,535.00		
1.02.1.02.06.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Dinas Kkependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar			Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4,902,088,900.00	4,416,564,535.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%					1,047,094,000.00	1,113,073,500.00		
1.02.1.02.06.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar			Laporan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1,047,094,000.00	1,113,073,500.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan
1.02.1.02.06.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur	100%					180,000,000.00	207,000,000.00		
1.02.1.02.06.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Adanya Kesempatan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15 Ok	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	180,000,000.00	207,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan
Jumlah											7,763,666,728.00	7,652,969,380.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.07.1.02.07.01.18.019.	Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan APBDes			Denpasar			Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	27 Desa	Jumlah Desa yang Telah Dibina dan Mendapat Pengawasan APBDes	27 Desa	28,644,150.00	31,508,565.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pelayanan
1.02.07.1.02.07.01.19.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	100%					3,881,322,400.00	4,372,074,120.00		
1.02.07.1.02.07.01.19.001.	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.			Denpasar			Terbinanya Kader Pokja Posyandu Kecamatan Desa/Kelurahan	17 Posyandu	Meningkatnya Peran Serta Kader Posyandu Tentang Pentingnya Posyandu	17 Posyandu	138,249,200.00	152,074,120.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pelayanan
1.02.07.1.02.07.01.19.004.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			di Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat			Terlaksananya Pelatihan Kader -Kader Tata Kelola Sampah -KDRT -Hatinya PKK -UP2K -Banten -Tata Rias -Posyandu -TP PKK Desa/Kel/Kec -Desa Wisma	150 Orang 125 Orang 125 Orang 100 Orang 600 Orang 200 Orang 250 Orang 330 Orang 250 Orang	Peningkatan Pemahaman Dan Keterampilan Kader Terlaksananya Pelatihan Kader -Kader Tata Kelola Sampah -KDRT -Hatinya PKK -UP2K -Banten -Tata Rias -Posyandu -TP PKK Desa/Kel/Kec -Desa Wisma	150 Orang 125 Orang 125 Orang 100 Orang 600 Orang 200 Orang 250 Orang 330 Orang 250 Orang	3,743,073,200.00	4,220,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pelayanan
1.02.1.02.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%					1,304,195,100.00	1,505,196,200.00		
1.02.1.02.07.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Denpasar			Presentase Belanja Pegawai dan Belanja Habis Pakai	100%	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,304,195,100.00	1,505,196,200.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					596,020,000.00	606,020,000.00		
1.02.1.02.07.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Denpasar			Presentase Belanja Barang/Jasa untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	596,020,000.00	606,020,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pelayanan
1.02.1.02.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Presentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%					66,000,000.00	72,600,000.00		
1.02.1.02.07.01.05.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Denpasar			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat, Bintek, Workshop, Teknis/Funas	6 orang	Jumlah PNS yang memiliki Kompetensi Teknis	6 orang	66,000,000.00	72,600,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pelayanan
Jumlah											9,768,581,500.00	10,969,972,955.00		

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										92,306,978,130.00	34,621,874,424.00		
1.02.09.	PERHUBUNGAN										64,930,016,110.00	0.00		
1.02.09.1.02.09.01.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Ketentraman, Keterlibatan dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	100%					1,300,611,400.00	0.00		
1.02.09.1.02.09.01.15.001.	Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan			Kota Denpasar			Tersedianya perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100 %	Tercapainya kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan yang baik	100 %	898,401,300.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.02.09.1.02.09.01.15.003.	Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan			Kota Denpasar			Tersedianya kinerja dan pelayanan perhubungan yang baik	100 %	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	-	117,337,600.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.02.09.1.02.09.01.15.008.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Kota Denpasar			Tersedianya data laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaopran tentang perhubungan	100 %	Tercapainya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perhubungan yang baik	100 %	284,872,500.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar		Pemenuhan Kebutuhan Kelancaran Arus Lalu Lintas	100%					44,555,542,410.00	0.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.09.1.02.09.01.16.005.	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ, Guardrail dan Warning Ligh serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat			Kota Denpasar			Keselamatan transportasi darat yang terpelihara	1 buku	Pemenuhan keamanan dan ketertiban lalu lintas	100%	965,829,500.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.09.1.02.09.01.16.006.	Operasional Lalu Lintas			Kota Denpasar			Terpelihara traffic light dengan baik	65%	Pemenuhan fasilitas lalu lintas yang berfungsi dengan baik	75%	3,423,126,900.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.09.1.02.09.01.16.007.	Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas			Kota Denpasar			Tersedianya fasilitas lalu lintas yang baik	1 paket	Pemenuhan fasilitas lalu lintas yang berfungsi dengan baik	100%	8,747,414,570.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.09.1.02.09.01.16.009.	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias Di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Terpeliharanya seluruh titik lampu di Kota Denpasar	Pembayaran rekening listrik LPJU 12 bulan, pembayaran upah dan uang lembur tenaga LPJU 55 orang, pemeliharaan LPJU di Kota Denpasar 17.452 titik	Pemenuhan pemeliharaan LPJU	100%	27,212,851,440.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.09.1.02.09.01.16.010.	Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat Jalan Lingkungan dan Lampu Taman Desa/Kelurahan di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Tercapainya pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat Jalan Lingkungan dan Lampu Taman Desa/ Kelurahan di Kota Denpasar	1 buku DED pemasangan LPJU, 1 set pemasangan LPJU, 1 laporan pengawasan pemasangan LPJU	Terpasangnya titik lampu penerangan dan lampu taman untuk prasarana sosial desa adat dan jalan lingkungan desa/ kelurahan di Kota Denpasar	100%	4,206,320,000.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.09.1.02.09.01.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Kelancaran Arus Lalu Lintas Persimpangan	28%					15,749,235,890.00	0.00		
1.02.09.1.02.09.01.17.012.	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan			KOTA DENPASAR			Laporan Penyusunan DED Terminal Angkutan Orang	1 Laporan	Terpenuhinya Penyusunan DED Terminal Angkutan Orang	100%	884,253,000.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.09.1.02.09.01.17.015.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan			KOTA DENPASAR			Laporan Hasil Kegiatan Pemilihan AKUT	1 Laporan	Terpilihnya sopir AKUT dan tersedianya data angkutan kota di Kota Denpasar	6 orang	252,327,400.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.02.09.1.02.09.01.17.018.	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran			KOTA DENPASAR			Terbentuknya posko Terpadu Angkutan lebaran tahun 2016 di Terminal Ubung	1 Posko	Masyarakat Umum	100%	197,968,380.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.09.1.02.09.01.17.019.	Operasional Pelayanan Transportasi Darat			Kota Denpasar			- Terpenuhiya Operasional CC Room ATCS - Terpenuhiya Kebutuhan Sosialisasi Sistem ATCS	100%	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sistem ATCS dan Sosialisasi Layanan	-	1,661,638,000.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.09.1.02.09.01.17.020.	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal,Denpasar Festival dan Tahun Baru			Kota Denpasar			Terbentuknya Posko Terpadu Angkutan Nataru dan Denpasar Festival	1 Posko	Terwujudnya keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	212,065,600.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.09.1.02.09.01.17.021.	Peran Serta Lomba Tertib lalu Lintas Wahana Tata Nugraha			Kota Denpasar			Peran serta lomba tertib lalu lintas dan angkutan	1 kegiatan	Meningkatkan budaya tertib dan disiplin berlalu lintas	10%	506,859,000.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.09.1.02.09.01.17.022.	Operasional Pelayanan Terminal Penumpang			Kota Denpasar			Pemenuhan kebutuhan Operasional Terminal	100%	Lancarnya Pelayanan Jasa Angkutan Penumpang	100%	554,000,000.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.09.1.02.09.01.17.023.	Operasional Pelayanan UPT PKB			Kota Denpasar			Pemenuhan Kebutuhan Operasional PKB	100%	Lancarnya Pelayanan Pengujian	100%	3,302,995,200.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.09.1.02.09.01.17.024.	Operasional Pelayanan Terminal Barang			Kota Denpasr			Pemenuhan Pelayanan UPT. Terminal Barang	100%	Lancarnya Pelayanan UPT. Terminal Barang	100%	789,505,000.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.09.1.02.09.01.17.025.	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Terselenggaranya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Denpasar	1 Kegiatan	Terwujudnya keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	213,944,660.00	0.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%					18,356,938,020.00	22,108,185,624.00		
1.02.1.02.09.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Dinas Perhubungan Kota Denpasar			Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	18,356,938,020.00	22,108,185,624.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.1.02.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%					8,670,024,000.00	12,093,688,800.00		
1.02.1.02.09.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Dinas Perhubungan Kota Denpasar			Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	8,670,024,000.00	12,093,688,800.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
1.02.1.02.09.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					350,000,000.00	420,000,000.00		
1.02.1.02.09.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dinas Perhubungan Kota Denpasar			Jumlah ASN yang mengikuti diklat	27 orang	Peningkatan Kompetensi ASN	27 Orang	350,000,000.00	420,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan
Jumlah											92,306,978,130.00	34,621,874,424.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.10.1.02.10.10.15.033.	Pelayanan Sound System & Mobil Keliling di Lingkungan Kota Denpasar			Kota Denpasar			Instansi/OPD memperoleh Pelayanan Sound System yang prima	100%	Terselenggarannya operasional pelayanan sound system di Kota Denpasar	100%	915,036,000.00	1,006,539,600.00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Pelayanan
1.02.10.1.02.10.10.16.	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Tersedianya Kajian di Bidang TIK	100%					837,606,000.00	921,366,600.00		
1.02.10.1.02.10.10.16.002.	Penyusunan Kajian Tata Kelola E-Goverment			Kota Denpasar			Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik	100%	Dokumen Tata Kelola Penyelenggaraan E-Government Pemerintah Kota Denpasar	100%	160,539,000.00	176,592,900.00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Pelayanan
1.02.10.1.02.10.10.16.003.	Perencanaan Strategis Cloud Computing E-Government			Kota Denpasar			Terwujudnya Rencana Strategis Cloud Computing	100%	Dokumen Perencanaan Strategis Cloud Computing	100%	110,039,000.00	121,042,900.00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Pelayanan
1.02.10.1.02.10.10.16.005.	Audit Tata Kelola E-Government Pemerintah Kota Denpasar			Kota Denpasar			Hasil Audit Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik	100%	Rekomendasi Tata Kelola Penyelenggaraan E-Government Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	109,189,000.00	120,107,900.00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Pelayanan
1.02.10.1.02.10.10.16.006.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terpadu Pemerintah Kota Denpasar			Kota Denpasar			Rencana Induk Pengembangan TIK	100%	Terwujudnya layanan Pemerintah Kota Denpasar berbasis TIK	100%	163,249,000.00	179,573,900.00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Pelayanan
1.02.10.1.02.10.10.16.007.	Penyusunan SOP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar			Kota Denpasar			Terselenggaranya Dokumen SOP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	Tersediannya Dokumen SOP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	152,334,000.00	167,567,400.00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Pelayanan
1.02.10.1.02.10.10.16.009.	Penyusunan Kajian Konten Media Online Pemerintah Kota Denpasar			Kota Denpasar			Kajian Teknis Konten Media Online Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	Pedoman dalam penyebarluasan informasi melalui media online	1Laporan	142,256,000.00	156,481,600.00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.10.1.02.10.10.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar		Tersedianya SDM yang menguasai keamanan Informasi	100%					315,545,000.00	347,099,500.00		
1.02.10.1.02.10.10.17.003.	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Berupa Seminar Budaya Keamanan Informasi di Kota Denpasar			Kota Denpasar			Meningkatnya pengetahuan SDM dalam Bidang keamanan Informasi	100%	Terselenggaranya Pelatihan SDM dalam bidang keamanan Informasi	100%	130,609,000.00	143,669,900.00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Pelayanan
1.02.10.1.02.10.10.17.004.	Workshop PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar			Kota Denpasar			Instansi / OPD yang memperoleh seminar PPID	100%	SDM yang memahami PPID Di Kota Denpasar	50 orang	184,936,000.00	203,429,600.00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Pelayanan
1.02.10.1.02.10.10.18.	Program Kerjasama Informasi dengan mass media	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Terlaksananya Informasi dan Publikasi Pembangunan Daerah	100%					323,107,000.00	355,417,700.00		
1.02.10.1.02.10.10.18.008.	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Massa			Kota Denpasar			Terlaksananya Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Pembangunan	100%	Terselenggaranya Publikasi, Informasi dan Komunikasi	100%	323,107,000.00	355,417,700.00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Pelayanan
Jumlah											21,456,630,500.00	23,715,575,150.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										7,416,998,800.00	8,158,698,680.00		
1.02.1.02.11.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	-					1,374,221,000.00	1,511,643,100.00		
1.02.1.02.11.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kota Denpasar			Jumlah pelayanan admistrasi perkantoran	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan publik	1 Tahun	1,374,221,000.00	1,511,643,100.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan
1.02.1.02.11.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Prosentase Pelayanan dibidang barang / aset	-					577,710,000.00	635,481,000.00		
1.02.1.02.11.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kota Denpasar			Jumlah tersedianya sarana dan prasara na aparatur	1 Tahun	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	577,710,000.00	635,481,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan
1.02.1.02.11.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Prosentase peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara	-					66,000,000.00	72,600,000.00		
1.02.1.02.11.01.05.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kota Denpasar			Jumlah pegawai yang mengikuti kursus kursus singkat/ pelatihan	6 Pegawai	Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur	6 Pegawai	66,000,000.00	72,600,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										5,399,067,800.00	5,938,974,580.00		
1.02.11.1.02.11.01.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Prosentase Peningkatan Produktivitas UMKM	-					918,863,000.00	1,010,749,300.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.11.1.02.11.01.15.002.	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah			Kota Denpasar			Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi kebijakan tentang UMKM	50 UMKM	meningkatnya pemahaman UKM tentang peraturan tentang UMKM	50 UMKM	248,530,000.00	273,383,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
1.02.11.1.02.11.01.15.006.	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah			Kota Denpasar			Jumlah Koordinasi yang dilakukan	12 UMKM	Koordinasi yang dilakukan untuk mengakses dana maupun bantuan pemerintah bagi UMKM	12 UMKM	211,431,000.00	232.574,100.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
1.02.11.1.02.11.01.15.008.	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah			Kota Denpasar			Jumlah UMKM yang di fasilitasi pengembangan usahanya	77 UMKM	Peningkatan Pengembangan bagi UMKM di Kota Denpasar	77 UMKM	458,902,000.00	504,792,200.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan
1.02.11.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Prosentase meningkatnya kemitraan UMKM dan Koperasi	-					1,143,623,400.00	1,257,985,740.00		
1.02.11.1.02.11.01.16.003.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			Kota Denpasar			Jumlah UMKM yang di fasilitasi kemitraan dalam temu usaha	30 UMKM	Meningkatnya kemitraan usaha UMKM	30 UMKM	337,956,000.00	371,751,600.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
1.02.11.1.02.11.01.16.006.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			Kota Denpasar			Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	30 UMKM	Meningkatnya jumlah UMKM tertib administrasi	30 UMKM	140,826,300.00	154,908,930.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
1.02.11.1.02.11.01.16.008.	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah			Kota Denpasar			Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HAKI	50 UMKM	Meningkatnya pemahaman tentang penting HKI bagi UMKM	50 UMKM	183,030,000.00	201,333,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
1.02.11.1.02.11.01.16.11.	Penyelenggaraan Talkshow bagi gerakan koperasi			Kota Denpasar			Jumlah koperasi yang mengikuti talkshow	200 koperasi	tercapainya standar pelayanan & peningkatan kinerja dalam tata kelola koperasi	200 koperasi	124,935,100.00	137,428,610.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan
1.02.11.1.02.11.01.16.12.	Pelatihan Achiement Motivation bagi pimpinan koperasi			Kota Denpasar			Terlatihnya 30 pimpinan koperasi	30 Koperasi	Termotivasinya pimpinan koperasi yang berprestasi	30 koperasi	356,876,000.00	392,563,600.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Prosentase Penumbuhan Usaha Koperasi dan UMKM	-					633,426,600.00	696,769,280.00		
1.02.11.1.02.11.01.17.001.	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan			Kota Denpasar			Terlaksananya sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	50 Koperasi	Terwujudnya alternatif sumber pembiayaan bagi koperasi	50 Koperasi	43,333,600.00	47,666,960.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
1.02.11.1.02.11.01.17.008.	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah			Kota Denpasar			Jumlah UMKM dalam penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah	120 UMKM (4 Kecamatan)	Prosentase peningkatan UMKM yang dibina	120 UMKM (4 Kecamatan)	167,966,000.00	184,762,600.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
1.02.11.1.02.11.01.17.009.	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah			Kota Denpasar			Jumlah UMKM yang ikut serta dalam ajang promosi keluar daerah	8 UMKM	Peningkatan produktifitas UKM	8 UMKM	422,127,000.00	464,339,700.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya ekonomi kreatif.		meningkatnya koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	-					2,703,154,800.00	2,973,470,280.00		
1.02.11.1.02.11.01.18.001.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi			Kota Denpasar			Jumlah perencanaan dan pendataan koperasi yang dilakukan	1 Laporan	Pendataan koperasi yang dilakukan untuk pengembangan dan kemajuan bagi Koperasi di Kota Denpasar	1 laporan	248,311,500.00	273,142,650.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
1.02.11.1.02.11.01.18.005.	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi			Kota Denpasar			Jumlah koperasi yang dapat dibina, diawasi dan diberi penghargaan	20 Koperasi	Peningkatan koperasi yang berkualitas	20 Koperasi	367,358,000.00	404,093,800.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan
1.02.11.1.02.11.01.18.006.	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi			Kota Denpasar			Jumlah koperasi yang mengembangkan jaringan kerja sama usaha koperasi	4 koperasi	Meningkatnya dan mengembangkannya jaringan kerjasama usaha koperasi melalui pameran	4 koperasi	365,993,000.00	402,592,300.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.11.1.02.11.01.18.019.	Bimbingan Teknis Kelembagaan Koperasi			Kota Denpasar			Terlatihnya 30 Koperasi Tentang Pemeriksaan Kelembagaan	30 Koperasi	Tertatanya Kelembagaan Koperasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	30 Koperasi	160,516,200.00	176,567,820.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan
1.02.11.1.02.11.01.18.020.	Sosialisasi Peraturan Per Undang-Undangan Koperasi (Pengawasan)			Kota Denpasar			Terlaksananya Sosialisasi Peranan Pengawas koperas	200 Koperasi	Peningkatan Pemahaman Koperasi terhadap Peran Pengawasan	200 koperasi	56,125,000.00	61,737,500.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan
1.02.11.1.02.11.01.18.021.	Diklat Pengawasan			Kota Denpasar			Terlaksananya Diklat Pengawasan koperasi	30 Koperasi	Terwujudnya Peningkatan Loyalitas dan dedikasi kepada Koperasi	30 koperasi	161,657,200.00	177,822,920.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan
1.02.11.1.02.11.01.18.022.	Supervisi Kepatuhan			Kota Denpasar			Terwujudnya Tata Kelola Perkoperasian sesuai asas Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang - Undangan	50 Koperasi	Terlaksananya Supervisi Kepatuhan Koperasi	50 Koperasi	44,025,000.00	48,427,500.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan
1.02.11.1.02.11.01.18.023.	Supervisi Kelembagaan			Kota Denpasar			Terwujudnya Peningkatan Kinerja Koperasi	50 Koperasi	Terwujudnya Tata Kelola Perkoperasian sesuai dengan peraturan per Undang- Undangan	50 koperasi	44,825,000.00	49,307,500.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan
1.02.11.1.02.11.01.18.024.	Supervisi Unit Simpan Pinjam			Kota Denpasar			Terlaksananya Supervisi Unit Simpan Pinjam Koperasi	50 Koperasi	Tersedianya Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam secara Real Time	50 koperasi	44,025,000.00	48,427,500.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Pelayanan
Jumlah											7,416,998,800.00	8,158,698,680.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.12.1.02.12.01.18.007.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal dan PTSP			Rancangan Peraturan daerah	1 (satu) Ranperda	- Persentase Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin - Persentase Kesesuaian Waktu Pemrosesan Ijin Dibandingkan Janji Layanan	- Peningkatan 2% - 70%	160,550,000.00	176,605,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pelayanan
1.02.12.1.02.12.01.18.008.	Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP			Dinas Penanaman Modal dan PTSP			Terjaminnya kepastian hukum penerbitan perijinan di Kota Denpasar	1 Laporan	Persentase peningkatan jumlah penerbitan ijin Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan	peningkatan 2 % 70 %	469,890,000.00	516,879,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pelayanan
Jumlah											9,627,754,500.00	10,590,749,950.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS KEBUDAYAAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.16.1.02.16.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai agen perubahan (agent of change) dengan human capital dan social capital.		Meningkatkan Pelestarian dan Aktualisasi Budaya Daerah	100%					15,191,799,500.00	16,711,150,110.00		
1.02.16.1.02.16.01.15.001.	Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah			Dinas Kebudayaan Kota Denpasar			Terlaksananya Pentas Budaya dan workshop Sanggar/Sekaa se-Kota Denpasar	120 Sanggar/Sekaa, 500 orang peserta pelatihan tabuh, 70 orang peserta pementasan hasil pelatihan, 250 orang peserta Lomba tari bali	Meningkatnya Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah	120 Sanggar/Sekaa, 500 orang peserta pelatihan tabuh, 70 orang peserta pementasan, 250 orang peserta lomba tari bali	834,249,200.00	917,674,225.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.15.004.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya			Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar			Pelaksanaan Pentas Seni TK dan Sd di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung	48 Gugus TK/SD	Terlaksananya Pentas Seni TK dan SD di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung	48 Gugus TK/SD	137,378,200.00	150,805,325.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.15.005.	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya			Dinas Kebudayaan Kota Denpasar			Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Seni Parama Budaya,Kerti Budaya, dan Sanggar/Sekaa	2 Parama Budaya, 5 Kerti Budaya, 5 Sanggar/ Sekaa	Terpenuhinya pemberian Penghargaan kepada Penerima Penghargaan Kerti Budaya, Parama Budaya, Sanggar/Sekaa	2 Parama Budaya, 5 Kerti Budaya, 5 Sanggar/Sekaa	442,680,700.00	486,948,770.00	DINAS KEBUDAYAAN	
1.02.16.1.02.16.01.15.006.	Penyelenggaraan Kreativitas Budaya			Kota Denpasar			- Pelaksanaan Lomba Ngelawar, Sate Renteng & Meprani - Pelaksanaan Lomba Tari Legong Keraton	60 sekaa	- Terlaksananya Lomba Ngelawar, Sate Renteng & Meprani - Terlaksananya Lomba Tari Legong Keraton	60 sekaa	407,062,900.00	448,250,000.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.15.007.	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah			Kota Denpasar			Pelaksanaan Pembinaan, Pelatihan dan Pementasan Dalang	50 Orang	Terlaksananya Pembinaan, Pelatihan dan Pementasan Dalang	50 Orang	669,500,000.00	736,450,000.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.16.1.02.16.01.15.026.	Kaderisasi Pelestarian Budaya			Kota Denpasar			Pelaksanaan kegiatan kaderisasi pelestarian budaya daerah, kemah budaya tingkat Kota dan tingkat Provinsi	20 SMA/SMK	Terlaksananya kegiatan kaderisasi pelestarian budaya daerah, kemah budaya tingkat Kota dan tingkat Provinsi	20 SMA/SMK	283,958,700.00	312,354,570.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.15.027.	Pembinaan Kelompok Kesenian			Dinas Kebudayaan Kota Denpasar			Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Kesenian di Kota Denpasar	12 Sekaa	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kesenian di Kota Denpasar	12 Sekaa	1,151,836,400.00	1,267,020,040.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.15.028.	Jelajah Pusaka			Kota Denpasar			Pelaksanaan kegiatan jelajah pusaka mengenal keberadaan zona z heritage dan lomba mading	15 SMA, 20 SD & 35 pemandu	Terlaksananya kegiatan jelajah pusaka mengenal keberadaan zona z heritage dan lomba mading	15 SMA, 20 SD & 35 pemandu	166,000,000.00	182,600,000.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.15.029.	Penelusuran dan Penyusunan Purana Pura			Kota Denpasar			Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya daerah	1 Pura	Terwujudnya Purana Pura dalam bentuk lempengan, buku purana pura	Buku Purana Pura jagatnatha	68,599,800.00	75,459,780.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai agen perubahan (agent of change) dengan human capital dan social capital.		Pelestarian dan pengelolaan kekayaan budaya	100%					6,410,285,900.00	7,051,314,644.00		
1.02.16.1.02.16.01.16.001.	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya			Kota Denpasar			Pelaksanaan Utsawa Dharmagita tingkat Kota Denpasar dan tingkat Provinsi	356 Peserta	Terlaksananya Utsawa Dharmagita tingkat Kota Denpasar dan tingkat Provinsi	356 Peserta	639,894,800.00	703,884,280.00	DINAS KEBUDAYAAN	
1.02.16.1.02.16.01.16.004.	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah			Kota Denpasar			Tersediannya buku hasil sosialisasi Tari Tenun	300 Buah	Tersediannya buku hasil sosialisasi Tari Tenun	300 Buah	121,639,500.00	133,803,450.00	DINAS KEBUDAYAAN	
1.02.16.1.02.16.01.16.006.	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata			Dinas Kebudayaan Kota Denpasar			Pelaksanaan Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik	44 Sekaa	Tampilnya Sekaa Gong Kebyar dan Kesenian Klasik	44 Sekaa/Sanggar	1,122,874,500.00	1,235,161,950.00	DINAS KEBUDAYAAN	
1.02.16.1.02.16.01.16.012.	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam			Kota Denpasar			Terlaksananya penggandaan buku sastra keagamaan dan budaya	900 Buah Buku	Tersedianya Buku-buku budaya dan sastra keagamaan	900 Buah Buku	108,594,100.00	119,453,510.00	DINAS KEBUDAYAAN	

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.16.1.02.16.01.16.013.	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala			Kota Denpasar			Terdatanya Cagar Budaya yang dimiliki Oleh Kota Denpasar	6 lokasi	Tersedianya Data Cagar Budaya di Kota Denpasar	6 lokasi	112,548,800.00	123,803,680.00	DINAS KEBUDAYAAN	
1.02.16.1.02.16.01.16.014.	Denpasar Film Festival			Kota Denpasar			Pelaksanaan kegiatan Denpasar Film Festival (Pembinaan dan Pelatihan)	105 Orang siswa-siswi 2 Buah Master DVD Film Dokumenter	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perfilman	105 Orang siswa-siswi 2 Buah Master DVD Film Dokumenter	428,515,300.00	471,366,830.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.16.015.	Rekam Budaya Riset dan Pendokumentasian Pustaka Seni dan Budaya			Kota Denpasar			Pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Penyusunan Buku seni dan budaya - 10 Master DVD Kgt - 128 buah DVD - 66 album kegiatan - 1050 Buah Buku	Tersedianya informasi tentang riset dan perekaman kesenian tradisional	Penyusunan Buku seni dan budaya - 10 Master DVD Kgt - 128 buah DVD - 66 album kegiatan - 1050 Buah Buku	616,003,000.00	677,603,300.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.16.016.	Kreatifitas Seni Tradisional			Kota Denpasar			Pelaksanaan kegiatan omed-omedan kreatifitas seni tradisional di Kota Denpasar	STT. Satya Dharma Kerti	Terlaksananya kegiatan omed-omedan kreatifitas seni tradisional di Kota Denpasar	STT. Satya Dharma Kerti	108,442,000.00	119,286,200.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.16.018.	Lomba Pesantian Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA / SMK			Kota Denpasar			Pelaksanaan Lomba Pesantian	350 Siswa SD, SMP & SMA/SMK	Terlaksananya Lomba Pesantian	350 Siswa SD, SMP & SMA/SMK	175,483,800.00	193,032,180.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.16.020.	Penyelenggaraan Maha Bandana			Dinas Kebudayaan Kota Denpasar			Pelaksanaan Pembinaan seni Budaya Daerah	14 Sekaa	Tampilnya Sekaa Kesenian	14 Sekaa	503,786,000.00	554,164,754.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.16.021.	Misi Kesenian Keluar Daerah (Promosi Seni)			Dinas Kebudayaan Kota Denpasar			Pelaksanaan Kegiatan Gelar Seni Budaya ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	38 crew, 11 Pendamping, dan 5 Sekaa	Terwujudnya Kemitraan Pengelolaan Antar Daerah	38 crew, 11 pendamping, dan 5 sekaa	635,999,800.00	699,599,780.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.16.022.	Melepas Matahari 2018			Dinas Kebudayaan Kota Denpasar			Pelaksanaan Kreativitas Berkesenian	14 Sekaa/Sanggar	terlaksananya kreativitas berkesenian	2 tim	585,621,200.00	644,183,320.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.16.1.02.16.01.17.003.	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan			Kota Denpasar			pelaksanaan kegiatan dialog budaya, rembug sastra purnama badrawada, rembug budaya dipa bhawana, grebeg aksara, parum-param & seminar	2.325 Mahasiswa, STT, para akademisi & budayawan	Terlaksananya kegiatan dialog budaya, rembug sastra purnama badrawada, rembug budaya dipa bhawana, grebeg aksara, parum-param & seminar	2.325 Mahasiswa, STT, para akademisi & budayawan	371,467,000.00	408,613,700.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.17.004.	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah			Kota Denpasar			Pelaksanaan musyawarah untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat Kota Denpasar melalui Sabha Upadesa	35 Desa Pakraman, 42 Subak, 43 Kades, Lurah dan 17 Bendega	Terlaksananya musyawarah untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat Kota Denpasar Kota Denpasar melalui Sabha Upadesa	35 Desa Pakraman, 42 Subak, 43 Kades, Lurah dan 17 Bendega	403,173,400.00	443,490,740.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.17.005.	Penyelenggaraan festival budaya daerah			Kota Denpasar			Pelaksanaan seleksi ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan se- Kota Denpasar	40 Sekaa Teruna	Terlaksananya seleksi ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan se- Kota Denpasar	40 Sekaa	795,908,500.00	875,499,350.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.17.007.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya			Dinas Kebudayaan Kota Denpasar			Pelaksanaan Pendataan Kegiatan Kesenian	28 kegiatan Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Pendataan Kegiatan Kesenian	28 kegiatan Dinas Kebudayaan	36,767,300.00	40,444,030.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
1.02.16.1.02.16.01.17.009.	Lomba Kaligrafi dan Bali Simbar			kota denpasar			Pelaksanaan lomba Pembuatan Kaligrafi Pelaksanaan lomba Pembuatan Bali Simbar	100 Siswa SMP & SMA/SMK 100 Siswa SMP & SMA/SMK	Terlaksananya lomba Pembuatan Kaligrafi Terlaksananya lomba Pembuatan Bali Simbar	100 Siswa SMP & SMA/SMK 100 Siswa SMP & SMA/SMK	92,379,500.00	101,617,450.00	DINAS KEBUDAYAAN	Pelayanan
Jumlah											29,619,876,200.00	32,582,180,384.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										6,076,926,200.00	6,313,120,060.00		
1.02.1.02.17.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					1,897,872,800.00	1,972,077,825.00		
1.02.1.02.17.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kota Denpasar			Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,875,257,400.00	1,950,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan
1.02.1.02.17.01.01.020.	Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA			Kota Denpasar			Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	22,615,400.00	22,077,825.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan
1.02.1.02.17.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					797,890,000.00	837,784,500.00		
1.02.1.02.17.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Denpasar			Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang Diadakan	100%	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	797,890,000.00	837,784,500.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan
1.02.1.02.17.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					66,000,000.00	66,000,000.00		
1.02.1.02.17.01.05.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Denpasar			Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Bimtek	6 Orang	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6 Orang	66,000,000.00	66,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.17.1.02.17.01.01.003.	Supervisi,Pembinaan dan simulasi pada Perpustakaan Umum,Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Masyarakat			Denpasar			Jumlah Perpustakaan Umum, Sekolah dan Masyarakat yang disupervisi, dibina dan stimulasi dan pengadaan buku - buku dan sarana pendukung perpustakaan	50 unit Perpustakaan Sekolah Dasar, 15 set Buku, 15 unit sarana	Jumlah Perpustakaan yang tertib administrasi / menejemen Perpustakaan	100 %	315,930,000.00	327,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan
1.02.17.1.02.17.01.01.009.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah			Kota Denpasar			Jumlah Pengadaan Buku - buku dan Sarana Pendukung Perpustakaan	3000 Buku	Persentase Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka	100%	185,000,000.00	220,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan
1.02.17.1.02.17.01.01.011.	Perencanaan dan Pelaksanaan Reproduksi Pustaka Langka			Denpasar			Jumlah Pustaka Langka yang direproduksi	3 set	Meningkatnya koleksi bahan pustaka langka	3 set	190,650,000.00	210,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan
1.02.17.1.02.17.01.01.012.	Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan Instansi, Desa/ Kelurahan, dan Perpustakaan Sekolah			Denpasar			Jumlah peserta bimbingan teknis perpustakaan	100 orang	Bertambahnya pengelola perpustakaan yang profesional	100 orang	87,297,700.00	87,297,700.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan
1.02.17.1.02.17.01.01.013.	Publikasi dan Sosialisasi Pelestarian Bahan Pustaka dan Peningkatan Minat Baca			Denpasar			Jumlah publikasi dan sosialisasi pelestarian bahan pustaka	6 Kali	Persentase pemustaka per tahun	1,75%	116,840,600.00	180,175,160.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan
1.02.17.1.02.17.01.01.014.	Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka			denpasar			Jumlah bahan pustaka yang dipelihara dan dilestarikan	27.723 buku	Persentase masa pemanfaatan buku bertambah	100%	81,005,000.00	85,005,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan
1.02.18.	KEARSIPAN										1,780,371,000.00	1,741,141,940.00		
1.02.18.1.02.17.01.15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100%					407,861,200.00	420,815,400.00		
1.02.18.1.02.17.01.15.007.	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan			denpasar			Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan PD yang memakai Sistem Informasi Kearsipan	36 OPD	Presentase Oprasional sistem informasi Kearsipan berjalan dengan baik	100%	94,484,900.00	100,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.18.1.02.17.01.18.006.	Penyusunan Profile Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar			Kota Denpasar			1. Buku profil perpustakaan dan kearsipan; 2. Buku saku perpustakaan dan kearsipan	1. 100 Buku; 2. 200 Buku	Meningkatnya kualitas informasi mengenai perpustakaan dan kearsipan	100%	42,835,900.00	44,689,050.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan
1.02.18.1.02.17.01.18.007.	Pelaksanaan Publikasi Arsip Statis			Denpasar			Jumlah foto-foto arsip yang dipublikasikan	120 Foto	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	100%	131,804,200.00	135,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan
1.02.18.1.02.17.01.18.008.	Bimbingan Teknis Tenaga Kearsipan dan Dokumentasi			Denpasar			Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang diberikan Bimtek / jumlah OPD yang dibina SDM pengelola kearsipannya	51 OPD / 8 OPD	Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya dalam pengelolaan sistem kearsipan	51 OPD / 8 OPD	125,830,800.00	130,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan
1.02.18.1.02.17.01.18.009.	Pengelolaan Ruang Studio			Denpasar			Jumlah Kunjungan ke Ruang Studio Kearsipan dan Museum Visual/ Diorama	2.350 orang	1.Prosentase Kunjungan ke Ruang Layanan Kearsipan Berbasis TIK; 2. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kearsipan	1. 1,39%; 2. 81,25 atau kategori B	163,304,900.00	179,551,900.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan
Jumlah											6,076,926,200.00	6,313,120,060.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										371,576,500.00	415,000,000.00		
1.02.03.	PANGAN										371,576,500.00	415,000,000.00		
1.02.03.2.00.01.01.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Tercapainya peningkatan ketahanan pangan	100%					371,576,500.00	415,000,000.00		
1.02.03.2.00.01.01.15.003.	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan			Kota Denpasar			Jumla Data NBM dan PPH Ketersediaan Pangan di Kota Denpasar	30 buku	Jumlah skor konsumsi pangan di Kota Denpasar	94	96,136,500.00	105,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan
1.02.03.2.00.01.01.15.009.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan			Kota Denpasar			- Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan pekarangan - Jumlah bibit tanaman yang disalurkan	- 80 orang - 4 jenis tanaman	Jumlah anggota KWT yang meningkat ketrampilannya dalam memanfaatkan lahan pekarangan	40 orang	190,000,000.00	216,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan
1.02.03.2.00.01.01.15.012.	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian			Kota Denpasar			Jumlah anggota KWT yang mendapat pelatihan beras hitam	80 orang	Jumlah anggota KWT yang meningkat ketrampilannya dalam mengolah beras hitam	40 orang	29,015,000.00	32,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan
1.02.03.2.00.01.01.15.032.	Peningkatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan			Kota Denpasar			Jumlah koordinasi ketahanan pangan Kota Denpasar	2 kali	Jumlah informasi kepada instansi teknis terkait keamanan dan ketahanan pangan di Kota Denpasar	25 buku	56,425,000.00	62,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan
2.00.	URUSAN PILIHAN										5,399,642,700.00	5,286,443,200.00		

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.00.01.2.00.01.01.20.007.	Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan			Kota Denpasar			- Jumlah kelompok pembudidayaan ikan yang mendapat pembinaan, pelatihan kelembagaan - Jumlah pembinaan dan pelatihan kelembagaan - Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan dan penilaian kelas kelompok - Jumlah pembinaan dan penilaian kelas kelompok - Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan budidaya perikanan - Jumlah pembinaan dinamika kelompok - Jumlah monitoring dan evaluasi kelompok budidaya perikanan	- 10 kelompok - 10 kali - 20 kelompok - 20 kali - 30 orang - 10 kelompok - 31 kali	- Jumlah kelompok yang berbadan hukum/bersertifikat - Jumlah kelompok yang mendapat kenaikan kelas kelompok - Jumlah kelompok yang meningkat kompetensinya	- 3 kelompok - 6 kelompok - 30 orang	168,907,000.00	186,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan
2.00.01.2.00.01.01.20.008.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan			Kota Denpasar			- jumlah sarana penanganan kesehatan ikan dan lingkungan - Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan hama penyakit ikan (HPI) - Jumlah distributor/toko/unit budidaya yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan obat ikan, kimia, dan bahan biologi (OIKB)	- 3 set - 14 kelompok - 6 unit	- Jumlah produksi benih ikan di UPR - Jumlah produksi ikan budidaya air tawar - Jumlah produksi ikan budidaya air laut - Jumlah produksi ikan budidaya ikan hias	- 7.960.000 ekor - 194,9 ton - 373,6 ton - 2.300 ekor	213,868,000.00	256,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.00.01.2.00.01.01.20.009.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan			Kota Denpasar			- Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya - Jumlah survey potensi kawasan perikanan budidaya - Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis pemanfaatan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan - Jumlah identifikasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan - Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring dan evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	- 1 kelompok - 1 unit - 10 kelompok - 10 kelompok - 10 kelompok	- jumlah produksi benih ikan di upr - jumlah produksi ikan budidaya - budidaya air tawar - budidaya air laut - budidaya ikan hias - jumlah Kelompok pembudidaya ikan bersertifikasi CBIB dan CPIB	- 7.960.000 ekor - 194,9 ton - 373,3 ton - 2300 ekor - 3 kelompok	306,458,000.00	367,749,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan
2.00.01.2.00.01.01.20.010.	Pengelolaan Perbenihan dan Pembesaran Ikan			Kota Denpasar			- Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Pembinaan CBIB - Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Pembinaan CPIB - Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Pembinaan Budidaya Ikan Hias - Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Monitoring Perbenihan dan pembesaran Ikan	- 10 Kelompok - 3 Kelompok - 1 Kelompok - 10 Kelompok	- Jumlah Produksi Benih ikan Di UPR - Jumlah Produksi Ikan Budidaya : - Budidaya Air tawar - Budidaya Air Laut - Budidaya Ikan Hias - Jumlah Kelompok Pembudidaya Yang bersertifikat CBIB dan CPIB	- 7.960.000 Ekor - - 194,9 Ton - 373,6 Ton - 2300 Ekor - 3 Kelompok	127,816,000.00	140,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan
2.00.01.2.00.01.01.21.	Program pengembangan perikanan tangkap	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Meningkatnya produksi dan produktivitas nelayan	100%					603,231,900.00	626,000,000.00		

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.00.01.2.00.01.01.23.003.	Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan			Kota Denpasar			- Jumlah pendataan usaha budidaya perikanan - Jumlah pembinaan mutu hasil budidaya peikanan - Jumlah bimbingan kemitraan usaha budidaya perikanan - Frekuensi promosi pelaku usaha budidaya perikanan	- 28 kelompok - 40 orang - 10 orang - 2 kali	- Jumlah deversifikasi usaha budidaya perikanan - Jumlah usaha budidaya perikanan yang mendapat pembinaan mutu hasil budidaya - Jumlah usaha budidaya perikanan yang mendapat bimbingan kemitraan usaha - Jumlah lomba mancing ikan	- 1 kelompok - 40 kelompok - 10 orang - 2 kali	165,845,000.00	192,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan
2.00.01.2.00.01.01.23.004.	Pendampingan Bina Mutu dan Penguatan Promosi Produk Olahan Perikanan			Kota Denpasar			- Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan mutu produk olahan perikanan - Jumlah sampel produk dan olahan perikanan yang diperiksa - Jumlah kampanye dan safari Gemar Makan Ikan	- 10 orang - 25 sampel - 2 kali	Jumlah diversifikasi produk olahan konsumsi	12 jenis	367,355,000.00	440,800,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan
2.00.01.2.00.01.01.23.005.	Pendampingan Kemitraan, Bina Mutu dan Diversifikasi Usaha Nelayan			Kota Denpasar			- Jumlah pendataan usaha nelayan - Jumlah pembinaan mutu hasil tangkapan - Jumlah bimbingan kemitraan usaha nelayan - Jumlah monitoring harga pasar	- 1 Unit - 20 Kelompok/unit - 1 kali - 20 kali	- Jumlah kelompok/unit usaha nelayan yang meningkat mutu hasil tangkapannya - Jumlah penjualan produksi hasil tangkapan - Jumlah kelompok/unit usaha nelayan yang mendapat bimbingan kemitraan usaha - Jumlah informasi data harga pasar	- 10 kelompok - 1.029,96 ton - 30 orang - 1 laporan	70,012,000.00	77,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.00.2.00.01.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kota Denpasar			Jumlah penerbitan laporan hasil kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	1 Laporan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	1,416,709,100.00	1,450,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan
2.00.2.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Tersedianya kebalikan sarana dan prasarana aparatur	100%					883,131,000.00	900,000,000.00		
2.00.2.00.01.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kota Denpasar			- Jumlah sarana prasarana perkantoran elektronik - Jumlah sarsana prasarana perkantoran non elektronik	- 10 unit - 5 unit	Persentase sarana dan prasarana perkantoran	100%	883,131,000.00	900,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan
2.00.2.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Persentase sumber daya aparatur yang meningkat kompetensinya	100%					44,000,000.00	50,000,000.00		
2.00.2.00.01.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kota Denpasar			Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan	4 orang	Persentasesumber daya aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	44,000,000.00	50,000,000.00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pelayanan
Jumlah											5,771,219,200.00	5,701,443,200.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS PARIWISATA

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.00.2.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-					2,230,320,850.00	2,453,352,935.00		
2.00.2.00.02.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kota Denpasar			Laporan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2,230,320,850.00	2,453,352,935.00	DINAS PARIWISATA	Pelayanan
2.00.2.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-					2,877,532,500.00	3,165,285,750.00		
2.00.2.00.02.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			kota denpasar			Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2,877,532,500.00	3,165,285,750.00	DINAS PARIWISATA	Pelayanan
2.00.2.00.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-					112,500,000.00	123,750,000.00		
2.00.2.00.02.01.05.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kota Denpasar			Terselenggaranya Diklat	100 %	Diklat Kepariwisataaan	24 Orang	112,500,000.00	123,750,000.00	DINAS PARIWISATA	Pelayanan
Jumlah											9,307,528,850.00	10,238,281,735.00		

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS PERTANIAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.00.03.2.00.03.01.23.007	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.			Kota Denpasar			- Jumlah produk peternakan yang difasilitasi pameran luar dan dalam negeri - Jumlah pelaku usaha pengolah peternakan yang meningkat	5 Jenis 12 orang	Jumlah produk pertanian unggulan daerah dan prooduk pengolahan hasil peternakan yang dikenal masyarakat	Kelompok/pelaku usaha pengolah produk hasil peternakan	140,941,800.00	150,941,800.00	DINAS PERTANIAN	Pelayanan
2.00.03.2.00.03.01.24.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Peningkatan populasi dan produksi temak	100%					124,071,400.00	168,871,400.00		
2.00.03.2.00.03.01.24.001.	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna			Denpasar			- Jumlah pengadaan alat mesin - Jumlah SDM peternakan yang mendapat demontrasi pengoperasian alsin - Jumlah SDM bidang peternakan yang mendapat bimtek	4 buah 25 orang 80 orang	Jumlah SDM di bidang peternakan meningkat kompetensinya	50%	124,071,400.00	168,871,400.00	DINAS PERTANIAN	Pelayanan
2.00.03.2.00.03.01.25.	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Jumlah bahan asal hewan (BAH) yang ASUH di Kota Denpasar	7.939,89 ton					997,693,600.00	1,159,000,000.00		
2.00.03.2.00.03.01.25.001.	Penjaminan Pangan Asal Hewan			Denpasar			Jumlah unit usaha yang mendapatkan pembinaan dan monitoring terkait NKV Jumlah daging yang diperiksa secara organoleptik Jumlah sampel daging diperiksa secara laboratorium Jumlah unit usaha pemotongan hewan ilegal yang mendapatkan pengawasan	5 unit 7939,89 ton 50 sampel 5 unit	Tersedianya bahan asal hewan (BAH) yang ASUH	7939,89 ton	129,586,600.00	159,000,000.00	DINAS PERTANIAN	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.00.2.00.03.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Dinas Pertanian Kota Denpasar			Lancarnya operasional Sarana dan Prasarana aparatur	100%	Peningkatan aktivitas sarana dan prasarana aparatur	20%	1,167,230,000.00	1,500,000,000.00	DINAS PERTANIAN	Pelayanan
2.00.2.00.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya pelayanan dibidang pengelolaan barang/ aset, kepegawaian dan keuangan di lingkup Dinas Pertanian Kota Denpasar untuk mendukung Kinerja SKPD	20%					100,000,000.00	120,000,000.00		
2.00.2.00.03.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dinas Pertanian Kota Denpasar			Terpenuhinya sumberdaya manusia pertanian	100%	Meningkatnya pengetahuan sumberdaya manusia pertanian	20%	100,000,000.00	120,000,000.00	DINAS PERTANIAN	Pelayanan
Jumlah											7,480,309,700.00	8,611,973,700.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.00.06.2.00.06.01.18.008.	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan			Denpasar			Jumlah peserta misi dagang	10 pelaku usaha	Jumlah kesepakatan kerjasama di bidang industri dan perdagangan yang ditetapkan	10 kesepakatan	202,302,800.00	222,540,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelayanan
2.00.06.2.00.06.01.18.009.	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah			Denpasar			Jumlah peserta seminar	30 orang	Persentase peningkatan jumlah peserta seminar peningkatan SDM UKM	100%	123,791,500.00	150,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelayanan
2.00.06.2.00.06.01.18.010.	Pengembangan Pasar dan Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Penting di Pasar Tradisional dan Distributor			Denpasar			-Jumlah Informasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok di Pasar Badung, Pasar Sanglah, Pasar Kreneng dan Pasar Agung -Jumlah Informasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok Melalui Media Informasi Masyarakat	96 Laporan 3 Media	Tersebar nya informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat	3 media	198,286,200.00	219,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelayanan
2.00.06.2.00.06.01.18.011.	Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif			Denpasar			Jumlah peserta pameran Denpasar Bookfair	50 pelaku usaha	Persentase peningkatan peserta pameran Denpasar Bookfair	100%	290,874,000.00	320,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelayanan
2.00.06.2.00.06.01.18.012.	Peningkatan Inovasi Produk Lokal			Denpasar			-Jumlah peserta Duta Endek -Jumlah peserta pelatihan publik speaking, pembekalan Duta Endek, pelatihan desain motif -Jumlah peserta pelatihan	-200 orang -24 orang -200 pedagang	-Persentase terlaksananya pemilihan Duta Endek -Persentase terlaksananya pelatihan publik speaking, pembekalan Duta Endek, dan pelatihan desain motif -Persentase terlaksananya pelatihan	100%	707,540,000.00	800,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.00.07.2.00.06.01.17.002.	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri			Denpasar			- Jumlah Peserta Pelatihan Design Kemasan - Jumlah Peserta Pelatihan Dupa - Jumlah Peserta Sosialisasi ISO dan SNI	125 Orang 15 Orang 25 Orang	- Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan DDC - Prosentase Peningkatan Kemampuan IKM Kerajinan yang memiliki design kemasan - Peningkatan Pengetahuan tentang ISO dan SNI 25 Orang - Prosentase Peningkatan Kemampuan IKM Kerajinan Tentang Dupa	25 Orang 80% 70% 70%	268,552,000.00	470,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.00.07.2.00.06.01.17.005.	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Agro			Denpasar			- Jumlah Peserta yang dilatih Pengolahan Pangan - Jumlah IKM Agro yang menerapkan GMP - Jumlah IKM Agro yang menerapkan GKM	- 100 Orang - 2 IKM - 1 IKM	- Prosentase peningkatan Kemampuan Peserta dalam pengolahan pangan - Prosentase IKM yang menerapkan GMP - Prosentase IKM yang menerapkan GKM	- 80% - 100% - 100%	267,180,350.00	290,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelayanan
2.00.07.2.00.06.01.19.	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya dan menguatnya kelembagaan pelatihan SDM dan sistem ekonomi kerakyatan menuju Kota Kompeten		Jumlah Ketersediaan Data Sektor Industri.	6 Data Sektor Industri					254,293,250.00	280,000,000.00		
2.00.07.2.00.06.01.19.002.	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat			Denpasar			- Frekeungsi Monitoring Evaluasi Industri Agro - Tersedianya data informasi direktori - Tersedianya data informasi Company Profil	- 40 kali - 100 Direktori - 150 Company Profil	Ketersediaan Data Sektor Industri Agro	1 Laporan	56,717,500.00	62,400,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.00.07.2.00.06.01.19.007.	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Logam dan Mesin			Denpasar			-Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Logam dan Mesin -Tersedia Informasi Produk IKM	-40 Kali -100 Buah	Tersedianya Data Sektor Industri	1 Laporan	30,177,500.00	33,200,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelayanan
2.00.2.00.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100 %					2,113,231,050.00	2,281,000,000.00		
2.00.2.00.06.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Denpasar			Tersedianya administrasi perkantoran bagi aparatur	100 %	Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,113,231,050.00	2,281,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelayanan
2.00.2.00.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100 %					1,259,393,250.00	1,385,332,575.00		
2.00.2.00.06.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Denpasar			Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	Prsentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	1,259,393,250.00	1,385,332,575.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelayanan
2.00.2.00.06.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Prosentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	100 %					110,000,000.00	100,000,000.00		
2.00.2.00.06.01.05.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Denpasar			↳ Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan	↳ 10 orang	Persetanse terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	-	110,000,000.00	100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelayanan
Jumlah											10,263,925,800.00	11,309,031,545.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

INSPEKTORAT

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00.	PENUNJANG URUSAN										5,035,849,287.00	5,287,641,751.00		
3.00.01.	INSPEKTORAT										2,663,934,500.00	2,797,131,225.00		
3.00.01.3.00.01.01.15.	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya profesionalism e tenaga pemeriksa dan meningkatnya nilai evaluasi Lap Kinerja SKPD	100%					146,481,600.00	153,805,680.00		
3.00.01.3.00.01.01.15.002.	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja			Denpasar			Lapoa n Evaluasi LAKIP	4 Lap	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas	100%	146,481,600.00	153,805,680.00	INSPEKTORAT	
3.00.01.3.00.01.01.16.	Program Penataan dan Penyempumaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Terinventarisa sinya informasi hasil pengawasan	100%					27,783,200.00	29,172,360.00		
3.00.01.3.00.01.01.16.002.	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			Denpasar			Laporan informasi hasil pengawasan	1 Lap	Terinventarisasinya informasi hasil pengawasan	100%	27,783,200.00	29,172,360.00	INSPEKTORAT	
3.00.01.3.00.01.01.17.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang-und angan	100%					2,489,669,700.00	2,614,153,185.00		

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00.3.00.01.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Denpasar			Laporan pelayanan administrasi perkantoran	1 Lap	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1,301,594,787.00	1,366,674,526.00	INSPEKTORAT	Pelayanan
3.00.3.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	1 Tahun					795,320,000.00	835,086,000.00		
3.00.3.00.01.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Denpasar			Laporan hasil kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	1 Lap	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasana kantor	100%	795,320,000.00	835,086,000.00	INSPEKTORAT	Pelayanan
3.00.3.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Terpenuhinya kebutuhan SDA yang berkompeten dan berkualitas	1 Tahun					275,000,000.00	288,750,000.00		
3.00.3.00.01.01.05.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Denpasar			Jumlah SDA yang telah mengikuti diklat	25 orang	SDA yang kompeten dan profesional	100%	275,000,000.00	288,750,000.00	INSPEKTORAT	Pelayanan
Jumlah											5,035,849,287.00	5,287,641,751.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00.02.3.00.02.01.15.009.	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			Kota Denpasar			Jumlah buku laporan Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	50 buku	Meningkatnya capaian kinerja program dan kegiatan koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	80%	32,430,800.00	35,673,880.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan
3.00.02.3.00.02.01.15.010.	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA			Denpasar			Jumlah Buku Laporan hasil pelaksanaan analisis capaian target kinerja program dan kegiatan koordinasi bidang perekonomian dan SDA	9 buku	Meningkatnya capaian target kinerja program dan kegiatan koordinasi bidang perekonomian dan SDA	80%	32.803,100.00	40,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan
3.00.02.3.00.02.01.15.011.	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Kota Denpasar			Jumlah buku laporan Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	50 Buku	Meningkatnya capaian target kinerja program dan kegiatan koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80%	95,502,000.00	105,052,200.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan
3.00.02.3.00.02.01.16.	Program Kerjasama Pembangunan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Meningkatnya Kerjasama Pembangunan	100%					786,807,000.00	865,487,700.00		
3.00.02.3.00.02.01.16.004.	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah			Kota Denpasar			Frekuensi pertemuan kelompok ahli Jumlah Buku Bunga Rampai Jumlah Kajian Isu-Isu Strategis	20 kali 200 Buku 36 Kajian	Meningkatnya Pemecahan Masalah - Masalah Daerah	100%	786,807,000.00	865,487,700.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
3.00.02.3.00.02.01.17.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Pengembangan Wilayah Perbatasan	100%					89,321,800.00	98,235,980.00		
3.00.02.3.00.02.01.17.003.	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan			Kota Denpasar			Jumlah buku laporan hasil koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	15 buku	Terkoordinirnya tata ruang perbatasan	4 kecamatan	89,321,800.00	98,235,980.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00.02.3.00.02.01.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola kepemrintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100%					932,663,400.00	1,079,237,840.00		
3.00.02.3.00.02.01.18.002.	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh			Kota Denpasar			Jumlah buku laporan BKPRD, Jumlah buku materi RDTR Jumlah buku review RTRW	25 laporan 70 buku 60 buku	Terkendalnya Penataan Ruang Kota Denpasar	50%	360,629,000.00	450,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
3.00.02.3.00.02.01.18.003.	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh			Kota denpasar			Laporan Masterplan dan Sport Center Kompyang Sujana Review Masterplan Lumintang	2 Laporan	Meningkatnya Penataan Kawasan Lumintang dan Sport Centre Kompyang Sujana	100 %	572,034,400.00	629,237,840.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
3.00.02.3.00.02.01.19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola kepemrintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	100 %					435,466,000.00	479,012,800.00		
3.00.02.3.00.02.01.19.007.	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan			Kota Denpasar			Jumlah buku laporan perencanaan penanganan perumahan Masterplan permukiman tradisional	15 buku 1 Laporan	Terkendalnya penanganan perumahan di Kota Denpasar Revitalisasi permukiman tradisional di Kota Denpasar	4 kecamatan 4 kecamatan	346,241,100.00	380,865,210.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
3.00.02.3.00.02.01.19.008.	Koordinasi perencanaan penanganan perpikiran			Kota Denpasar			Jumlah buku laporan perencanaan penanganan Perparkiran	15 Buku	Meningkatnya Perencanaan Perparkiran di Kota Denpasar	100 %	89,224,900.00	98,147,390.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
3.00.02.3.00.02.01.20.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola kepemrintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %					169,542,000.00	186,818,500.00		

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00.02.3.00.02.01.21.015.	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPA)			Kota Denpasar			Jumlah Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 Jumlah Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019 Jumlah Buku KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 Jumlah Buku KUA dan PPAS Induk Tahun 2019	160 buku 160 buku 240 buku 240 buku	Meningkatnya sinergitas perencanaan dengan penganggaran	100 %	160,825,600.00	179,911,600.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan
3.00.02.3.00.02.01.21.017.	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar 2016-2021			Kota Denpasar			Jumlah buku evaluasi paruh waktu RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021	100 buku	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	308,830,000.00	0.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan
3.00.02.3.00.02.01.21.020.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Kota Denpasar			Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017	75 buku	Nilai LAKIP Kota Denpasar	Nilai Lakip B	124,331,000.00	136,742,100.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan
3.00.02.3.00.02.01.21.021.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Aparatur			Kota Denpasar			Jumlah Buku Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aparatur	18 Buku	Sinergitas perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur dengan perencanaan pembangunan daerah	80%	57,354,500.00	63,089,950.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan
3.00.02.3.00.02.01.21.022.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat			Kota Denpasar			Jumlah buku laporan Hasil koordinasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	18 Buku	Sinergitas perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan kesejahteraan rakyat dengan perencanaan pembangunan daerah	80%	85,095,800.00	93,605,380.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00.02.3.00.02.01.24.007.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kominfo dan Kecamatan			Kota Denpasar			Jumlah buku laporan hasil koordinasi Perencanaan Sub bidang Kominfo dan Kecamatan	50 Buku	Sinergitas Perencanaan pembangunan sub bidang Kominfo dan Kecamatan dengan perencanaan pembangunan daerah	80%	61,147,900.00	67,262,690.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan
3.00.02.3.00.02.01.24.008.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			Kota Denpasar			Jumlah buku laporan hasil koordinasi Sub bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	10 Buku	Sinergitas perencanaan pembangunan Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan perencanaan pembangunan daerah	80%	105,832,800.00	200,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan
3.00.3.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %					2,642,016,500.00	2,906,218,150.00		
3.00.3.00.02.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Denpasar			Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2,642,016,500.00	2,906,218,150.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan
3.00.3.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %					942,744,000.00	1,037,018,400.00		
3.00.3.00.02.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Denpasar			Frekuensi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Jumlah sarana kantor yang diadakan	12 Bulan 4 unit computer, 4 unit printer	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur	100%	942,744,000.00	1,037,018,400.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan
3.00.3.00.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %					185,000,000.00	204,000,000.00		

No. Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00.3.00.02.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Denpasar			Jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan	15 Orang	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15 orang	185,000,000.00	204,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pelayanan
Jumlah											9,450,906,900.00	10,130,576,700.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 2

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00.03.3.00.03.01.15.022.	Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi/Pameran)			Badan Pendapatan Daerah			Terpenuhinya penyampaian data dan informasi pajak daerah melalui pameran	110 pengunjung stand	Jumlah kunjungan dalam penyampaian data informasi pajak Daerah melalui Pameran	110 Pengunjung Stand	25,020,000.00	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pelayanan
3.00.3.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Pelayanan Dalam Administrasi Perkantoran	100%					5,728,764,900.00	0.00		
3.00.3.00.03.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar			Terpenuhinya pelaynan administrasi perkantoran	100%	jumlah ketersediaan dalam memberikan pelayanan dibidang administrasi perkantoran lebih memadai	100%	5,728,764,900.00	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pelayanan
3.00.3.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana apartur	100%					1,824,154,000.00	0.00		
3.00.3.00.03.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-			Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tugasnya	100%	Jumlah sarana dan prasarana untuk aparatur dalam melaksanakan tugasnya lebih memadai	100%	1,824,154,000.00	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pelayanan
3.00.3.00.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya sumber daya aparatur	100%					50,000,000.00	0.00		
3.00.3.00.03.01.05.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar			Terpenuhinya pengembangan pelatihan dan keterampilan sumber daya aparatur	100%	Jumlah pegawai/petugad dalam mendapatkan pelatihan dan ketrampiln lebih memadai	100%	50,000,000.00	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pelayanan
Jumlah											12,705,361,500.00	0.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00.03.3.00.03.02.15.002.	penyusunan standar satuan harga			BPKAD Kota Denpasar			Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang Tahun 2020, jumlah buku Standarisasi Biaya Jasa Tahun 2020 dan Jumlah Buku RKBMD Tahun 2020	150 Buku Standarisasi Harga Barang Tahun 2020,150 Buku Standarisasi Biaya Jasa Tahun 2020 dan 100 buku RKBMD Tahun 2020	Tersedianya Acuan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar	150 Buku Standarisasi Harga Barang Tahun 2020,150 Buku Standarisasi Biaya Jasa Tahun 2020 dan 100 buku RKBMD Tahun 2020	165,697,200.00	173,982,060.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pelayanan
3.00.03.3.00.03.02.15.007.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD			BPKAD Kota Denpasar			Jumlah Buku	Rancangan Perwali sebanyak 300 buku dan 375 buku	Terwujudnya Peraturan Walikota tentang pemerintah Kota Denpasar	100%	372,671,600.00	403,502,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pelayanan
3.00.03.3.00.03.02.15.009.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD			BPKAD Kota Denpasar			Jumlah Buku	Rancangan Perwali sebanyak 300 buku dan 375 buah buku	Terwujudnya Peraturan Walikota ttg Penjabaran Perubahan APBD Kota Denpasar	100%	269,017,000.00	295,761,400.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pelayanan
3.00.03.3.00.03.02.15.010.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.			BPKAD Kota Denpasar			Jumlah Buku	200 buah Buku Peraturan Daerah ttg Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar	Terwujudnya Peraturan Daerah ttg Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Denpasar	100%	323,599,800.00	0.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pelayanan
3.00.03.3.00.03.02.15.016.	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah			BPKAD Kota Denpasar			Prosentase Laporan/ Data Inventaris Barang Milik Daerah PD se- Kota Denpasar	100 %	Tersusnya Data Aset Milik Daerah Pemerintah Kota Denpasar	100 %	362,832,800.00	399,116,080.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pelayanan
3.00.03.3.00.03.02.15.025.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD			BPKAD Kota Denpasar			Jumlah Buku	Rancangan Perda Sebanyak 125 buku, Nota Keuangan , Pidato	Terwujudnya perda tentang APBD Pemerintah Kota Denpasar	100%	246,417,600.00	325,849,260.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pelayanan

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00.3.00.03.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Cakupan Pemenuhan Dokumen APBD Kota Denpasar	100 %					4,517,509,949.00	4,969,260,944.00		
3.00.3.00.03.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			BPKAD Kota Denpasar			Jumlah bahan seragam pakaian dinas harian/PDH	6.600 potong pegawai Pemkot Denpasar	Keseragaman pakaian dinas aparat pemerintah kota denpasar	6.600 potong bahan pakaian seragam dinas pegawai pemkot Denpasar beserta perlengkapannya	4,517,509,949.00	4,969,260,944.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pelayanan
3.00.3.00.03.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Cakupan Pemenuhan Dokumen APBD Kota Denpasar	100 %					66,000,000.00	69,300,000.00		
3.00.3.00.03.02.05.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			BPKAD Kota Denpasar			Prosentase pegawai pemkot yang ikut diklat dan bimtek	100 %	Meningkatnya jumlah pegawai pemkot Denpasar yang mampu dalam pelaksanaan tugas	100 %	66,000,000.00	69,300,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pelayanan
Jumlah											19,236,609,549.00	20,473,986,788.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Hal 1 dari 6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00.3.00.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					1,444,203,300.00	1,588,623,630.00		
3.00.3.00.04.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Denpasar			Persentase Belanja Pegawai dan Barang Pakai Habis guna menunjang lancarnya operasional kantor	100%	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,444,203,300.00	1,588,623,630.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelayanan
3.00.3.00.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Persentase terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%					382,572,000.00	420,829,200.00		
3.00.3.00.04.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			BKPSDM Kota Denpasar			Persentase belanja barang/jasa guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	382,572,000.00	420,829,200.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelayanan
3.00.3.00.04.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Persentase pegawai yang memiliki kemampuan/ser tifikat diklat teknis/fungsio nal	100%					709,037,000.00	6,559,326,700.00		
3.00.3.00.04.01.05.005.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bimtek Workshop			Kota Denpasar			Jumlah Pegawai ASN Kota Denpasar yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional/Bimtek/W orkshop	15 orang	Jumlah Pegawai ASN yang memiliki kompetensi Teknis Fungsional	15 orang	513,110,000.00	1,026,220,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelayanan
3.00.3.00.04.01.05.011.	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Budaya Kerja			Kota Denpasar			Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pengembangan Budaya Kerja	45 orang	Jumlah aparatur yang memahami budaya kerja guna peningkatan kinerja	45 orang	147,097,000.00	161,806,700.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelayanan

No. Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00.3.00.04.01.05.012.	Bimbingan Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			Kota Denpasar			Jumlah PPK Kota Denpasar yang mengikuti Bimbingan Teknis	40 Orang	Jumlah PPK yang memiliki kompetensi Teknis bidang Pengadaan Barang dan Jasa	40 Orang	48,830,000.00	5,371,300,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelayanan
Jumlah											7,421,761,300.00	13,967,428,710.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										929,941,600.00	0.00		
1.01.02.	KESEHATAN										748,512,000.00	0.00		
1.01.02.3.00.06.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Terwujudnya lingkungan sehat di Kota Denpasar	100%					748,512,000.00	0.00		
1.01.02.3.00.06.01.21.001.	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat			Kota Denpasar			Kajian Lingkungan Sehat Pasar Tradisional ; Kajian Sistem Pengelolaan Sampah TPA Suwung ; Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	1 kajian ; 1 kajian ; 1 kajian	Tersedianya data tentang lingkungan sehat pasar tradisional, data pengelolaan sampah di TPA Suwung, dan data pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	100%	748,512,000.00	0.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
1.01.06.	SOSIAL										181,429,600.00	0.00		
1.01.06.3.00.06.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan Kemisklnan dan Pengurangan Pengangguran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Persentase pengembangan lembaga perlindungan sosial	100%					181,429,600.00	0.00		
1.01.06.3.00.06.01.21.004.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial			Kota Denpasar			Kajian Pengembangan Model Kelembagaan Sosial	1 kajian	Tersedianya data model kelembagaan sosial di Kota Denpasar	100%	181,429,600.00	0.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										1,186,639,600.00	0.00		
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI										636,184,400.00	0.00		

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.00.02.3.00.06.01.19.012.	Pengkajian dan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan			Kota Denpasar			Kajian Desain Utilitas Terpadu dan Kelayakan Kebijakan Infrastruktur ; Kajian Kapasitas Kota Dalam Daya Dukung Infrastruktur Transportasi	1 kajian ; 1 kajian	Tersedianya kajian infrastruktur perkotaan	100%	525,507,400.00	0.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pelayanan
3.00.3.00.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%					1,745,098,200.00	0.00		
3.00.3.00.06.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar			Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	100%	1,745,098,200.00	0.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pelayanan
3.00.3.00.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					632,290,000.00	632,290,000.00		
3.00.3.00.06.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	632,290,000.00	632,290,000.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pelayanan
3.00.3.00.06.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas	100%					135,000,000.00	0.00		
3.00.3.00.06.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar			Terlatihnya sumber daya aparatur	10 orang	Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	100%	135,000,000.00	0.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pelayanan
4.00.	PENDUKUNG										156,608,500.00	0.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH										156,608,500.00	0.00		
4.00.01.3.00.06.01.19.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Persentase tertatanya peraturan perundangan di lingkup Pemerintah Kota Denpasar	100%					156,608,500.00	0.00		
4.00.01.3.00.06.01.19.006.	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah			Kota Denpasar			Kajian Peraturan Perundang-undangan	1 kajian	Tertatanya peraturan dan perundang-undanga n daerah	100%	156,608,500.00	0.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
Jumlah											5,469,735,300.00	632,290,000.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.	PENDUKUNG										2,549,895,600.00	2,725,685,160.00		
4.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH										2,434,171,400.00	2,597,898,710.00		
4.00.01.4.00.01.01.01.19.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Produk Hukum Daerah Yang Serasi Dengan Peraturan Perundang-undangan	100%					2,434,171,400.00	2,597,898,710.00		
4.00.01.4.00.01.01.01.19.001.	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan			Denpasar			Laporan Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Sengketa Hukum)	100%	Koordinasi, Konsultasi dan Jasa Kuasa Hukum	100%	695,419,000.00	737,846,450.00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Pelayanan
4.00.01.4.00.01.01.01.19.003.	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan			Denpasar			Laporan Hasil Kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%	Disahkannya Perda Kota Denpasar yang terusi secara materiil	100%	891,187,400.00	927,506,250.00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
4.00.01.4.00.01.01.01.19.005.	Publikasi peraturan perundang-undangan			Denpasar			Laporan Hasil Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	100%	Basis Data Peraturan Hukum Daerah Kota Denpasar	100%	563,527,600.00	619,880,360.00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Pelayanan
4.00.01.4.00.01.01.01.19.006.	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah			Denpasar			Panitia Ranham Kota Denpasar dan Yankamas	100%	Perda Yang Harmonis Dengan Prinsip Dasar HAM	100%	76,205,600.00	83,826,600.00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
4.00.01.4.00.01.01.01.19.007.	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Antar Kecamatan Se Kota Denpasar			Denpasar			Penetapan Juara Lomba Kadarkum Kota Denpasar	100%	Wakil Kadarkum Kota Denpasar ke Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi	100%	207,831,800.00	228,839,050.00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.4.00.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Tertaksananya kegiatan administrasi perkantoran	100%					93,724,200.00	103,586,450.00		
4.00.4.00.01.01.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Denpasar			Tertaksananya Program Administrasi Perkantoran	100%	Kegiatan Administrasi Perkantoran pada Bagian Hukum dan HAM	100%	93,724,200.00	103,586,450.00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Sumber Daya Aparatur Yang Kompeten	100%					22,000,000.00	24,200,000.00		
4.00.4.00.01.01.01.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Denpasar			Aparatur Yang Bersertifikat	100%	Komptensi Aparatur Yang Meningkat	100%	22,000,000.00	24,200,000.00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Pelayanan
Jumlah											2,549,895,600.00	2,725,685,160.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										3,526,670,003.00	0.00		
1.02.03.	PANGAN										1,154,845,000.00	0.00		
1.02.03.4.00.01.01.02.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Klompok Tani Dalam Arti Luas	100%					1,154,845,000.00	0.00		
1.02.03.4.00.01.01.02.15.033.	Pekan Daerah / Pekan Nasional			Kota Denpasar			Meningkatnya Wawasan / Pengtahuan KTNA	30 KTNA	Terlaksananya Pameran, Lomba lomba serta seminar pada kegiatan PEDANA	100%	1,077,970,000.00	0.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Pelayanan
1.02.03.4.00.01.01.02.15.034.	Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian			Kota Denpasar			Terlaksananya Koordinasi dan Promosi	30 KTNA	Terlaksananya pameran dalam mendukung pengetahuan & wawasan Kelompok Tani	100%	76,875,000.00	0.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Pelayanan
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										640,300,000.00	0.00		
1.02.07.4.00.01.01.02.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Peningkatan Kemampuan Pengurus LPD di Kota Denpasar	100%					640,300,000.00	0.00		
1.02.07.4.00.01.01.02.16.002.	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Miliik Desa			Kota Denpasar			Terlatihnya Pengurus LPD se-Kota Denpasar	35 LPD	Peningkatan Kemampuan Pengurus LPD di Kota Denpasar	35 LPD	421,300,000.00	0.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.07.4.00.01.01.02.16.007.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Kota Denpasar			Terbinanya LPD di Kota Denpasar	35 LPD	Prosentase tingkat kesehatan LPD	100%	219,000,000.00	0.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Pelayanan
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										994,975,003.00	0.00		
1.02.11.4.00.01.01.02.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya dan menguatnya kelembagaan pelatihan SDM dan sistem ekonomi kerakyatan menuju Kota Kompeten		Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Insan Kreatif di Kota Denpasar	100%					118,550,000.00	0.00		
1.02.11.4.00.01.01.02.15.008.	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah			Kota Denpasar			Memfasilitasi peran serta UKM dan Insan Kreatif Kota Denpasar	1 Kegiatan	Terlaksananya peran serta UKM dan Insan Kreatif di Kota Denpasar	80%	118,550,000.00	0.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Pelayanan
1.02.11.4.00.01.01.02.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Penyelenggara an kegiatan Hut Kota Denpasar, Cooking Class, Detik Festival, Profesional Chef	100%					876,425,003.00	0.00		
1.02.11.4.00.01.01.02.17.009.	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah			Kota Denpasar			Promosi Pemasaran Hasil Olahan Pangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Denpasar	50 UMKM	UMKM di Kota Denpasar berkembang	100%	553,225,003.00	0.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
1.02.11.4.00.01.01.02.17.010.	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi local			Kota Denpasar			Pelatihan Kewirausahaan Bagi Generasi Muda di Rumah Perubahan	1 Kegiatan	Tumbuhnya Jiwa Wirausaha di Kalangan Generasi Muda	100%	323,200,000.00	0.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Pelayanan
1.02.12.	PENANAMAN MODAL										736,550,000.00	0.00		
1.02.12.4.00.01.01.02.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya dan menguatnya kelembagaan pelatihan SDM dan sistem ekonomi kerakyatan menuju Kota Kompeten		Pertumbuhan Potensi Unggulan Daerah	100%					736,550,000.00	0.00		

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.4.00.01.01.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Sesuai Kualifikasi yang Ditetapkan	100%					22,000,000.00	0.00		
4.00.4.00.01.01.02.05.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kota Denpasar			Penerbitan Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tepat Waktu	Satu Laporan	Pemenuhan Pelayanan	100%	22,000,000.00	0.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Pelayanan
Jumlah											4,306,684,103.00	0.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BAGIAN ORGANISASI

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.4.00.01.01.03.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya kinerja Unit Pelayanan Publik	16 Unit Pelayanan					296,300,000.00	325,930,000.00		
4.00.4.00.01.01.03.18.009.	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar			Kota Denpasar			Meningkatnya kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009	16 Unit Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	16 Unit Pelayanan	10,100,000.00	11,110,000.00	BAGIAN ORGANISASI	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.03.18.010.	Pameran Pelayanan Publik			pemerintah kota denpasar			Terlaksananya Pameran Pelayanan Publik.	100%	Prosentase Pelayanan Publik Kota Denpasar Yang Berkualitas	100%	286,200,000.00	314,820,000.00	BAGIAN ORGANISASI	Pelayanan
Jumlah											1,153,559,300.00	1,268,915,340.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BAGIAN UMUM

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.	PENDUKUNG										15,537,521,300.00	0.00		
4.00.4.00.01.01.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan Operasional Kantor	100%					10,089,338,800.00	0.00		
4.00.4.00.01.01.04.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Denpasar					Pemenuhan Operasional Kantor	100%	1,866,300,000.00	0.00	BAGIAN UMUM	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.04.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Denpasar							7,153,539,800.00	0.00	BAGIAN UMUM	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.04.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kota Denpasar							239,657,050.00	0.00	BAGIAN UMUM	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.04.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Denpasar							92,366,950.00	0.00	BAGIAN UMUM	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.04.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Denpasar							737,475,000.00	0.00	BAGIAN UMUM	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Terpenuhinya Sarana & Prasarana Aparatur	100%					5,426,182,500.00	0.00		
4.00.4.00.01.01.04.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kota Denpasar							807,600,000.00	0.00	BAGIAN UMUM	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.04.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor			Kota Denpasar							581,600,000.00	0.00	BAGIAN UMUM	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.04.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kota Denpasar							294,000,000.00	0.00	BAGIAN UMUM	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.04.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Denpasar							2,963,782,500.00	0.00	BAGIAN UMUM	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.04.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kota Denpasar							504,200,000.00	0.00	BAGIAN UMUM	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.04.02.033.	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor			Kota Denpasar							275,000,000.00	0.00	BAGIAN UMUM	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.4.00.01.01.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					22,000,000.00	0.00		
4.00.4.00.01.01.04.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kota Denpasar							22,000,000.00	0.00	BAGIAN UMUM	Pelayanan
Jumlah											15,537,521,300.00	0.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										682,117,800.00	735,000,000.00		
1.02.15.	PERSANDIAN										682,117,800.00	735,000,000.00		
1.02.15.4.00.01.01.05.17.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		terlaksannya pengawasan pelaksanaan pembangunan	100					682,117,800.00	735,000,000.00		
1.02.15.4.00.01.01.05.17.009.	Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan			Denpasar			Terlaksananya Pemantauan Pembangunan	100%	Teralokasinya Dana yang Rasional dan terinformasinya Hasil Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	100%	49,540,000.00	50,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pelayanan
1.02.15.4.00.01.01.05.17.010.	Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan			Denpasar			Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	100%	Kegiatan yang Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100%	50,662,800.00	55,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pelayanan
1.02.15.4.00.01.01.05.17.011.	Evaluasi Kegiatan Pembangunan			Denpasar			Laporan Hasil Kegiatan Pembangunan Secara Triwulan	100%	Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Pembangunan	100%	421,515,000.00	430,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pelayanan
1.02.15.4.00.01.01.05.17.012.	Rapat Kerja Pemerintah Daerah			Denpasar			Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintah Daerah	100%	Teralokasikannya Dana yang Rasional dan Terinformasinya Hasil Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	100%	160,400,000.00	200,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pelayanan
4.00.	PENDUKUNG										1,438,660,250.00	1,522,000,000.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.4.00.01.01.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Terlaksananya Proram Administrasi Perkantoran	100					860,165,450.00	900,000,000.00		
4.00.4.00.01.01.05.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Denpasar			Tersedianya Perlengkapan Alat Tulis Kantor Tersedianya SDM Guna Menunjang Pelaksanaan Tugas-tugas	100% 16 orang	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	860,165,450.00	900,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		manfaat teknologi informasi yang cepat guna	100					556,494,800.00	600,000,000.00		
4.00.4.00.01.01.05.02.031.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana e-procurement			Denpasar			Sistem e-Procurement yang Optimal	100%	Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Transparan dan Berdaya Saing	100%	556,494,800.00	600,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.05.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Sumber Daya Aparatur Yang Kompeten	100%					22,000,000.00	22,000,000.00		
4.00.4.00.01.01.05.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kota Denpasar			Aparatur Yang Bersertifikat	100%	Komptensi Aparatur Yang Meningkat	100%	22,000,000.00	22,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pelayanan
Jumlah											2,120,778,050.00	2,257,000,000.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 4

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.01.4.00.01.01.06.15.002.	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri			Denpasar			Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	3500 oh	Jumlah terlayannya kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	100 %	897,250,000.00	986,975,000.00	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
4.00.4.00.01.01.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %					4,553,155,050.00	5,008,470,555.00		
4.00.4.00.01.01.06.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Denpasar			Prosentase jumlah tersedianya keperluan alat tulis kantor	100 %	Prosentase terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor	100 %	49,483,050.00	54,431,355.00	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.06.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Denpasar			Prosentase jumlah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Prosentase terpenuhinya keperluan administrasi perkantoran	100 %	4,503,672,000.00	4,954,039,200.00	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.06.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Terpenuhinya Kebutuhan Saranan Prasarana Aparatur	40 stell					29,000,000.00	31,900,000.00		
4.00.4.00.01.01.06.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Denpasar			Tersedianya 40 stell pakaian dinas hari-hari tertentu	40 stell	Jumlah aparatur yang menggunakan pakaian hari-hari tertentu	20 tenaga pramutamu	29,000,000.00	31,900,000.00	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.06.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Jumlah Staf Bagian Humas dan Protokol yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilanny a dalam bidang kehumasan dan keprotokolan	10 orang					27,900,000.00	30,690,000.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.4.00.01.01.06.05.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Denpasar			Jumlah pegawai humas dan protokol yang ikut diklat dan bimtek	12 orang	Prosentase jumlah pegawai Humas dan Protokol yang pengetahuan dan keterampilannya meningkat dalam bidang kehumasan dan keprotokolan	100 %	27,900,000.00	30,690,000.00	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Pelayanan
Jumlah											11,520,302,250.00	12,672,332,475.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 3

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.01.4.00.01.01.07.21.01.	Pelaksanaan Kegiatan Apeksi Tahunan			2 kota			Jumlah informasi pembngunan yang diperoleh antar anggota APEKSI	2 kota	Terjalinnya kerjasama antar daerah seluruh anggota APEKSI	2 kota	205,640,000.00	205,640,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Pelayanan
4.00.01.4.00.01.01.07.28.	Program pembinaan kecamatan dan kelurahan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan	100%					77,602,100.00	85,220,000.00		
4.00.01.4.00.01.01.07.28.001.	Pembinaan Kelurahan			Kota Denpasar			Terbinanya Kelurahan di Kota Denpasar	4 Kelurahan	Evektifitas pelaksanaan pelimpahan kewenangan	4 Kelurahan	31,048,500.00	34,000,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Pelayanan
4.00.01.4.00.01.01.07.28.002.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan			Kecamatan se Kota Denpasar			Terbentuknya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kec.Denbar,Dentim,D enut dan Densel	4 Kecamatan	Evektifitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	4 Kecamatan	46,553,600.00	51,220,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pelayanan Administrasi Kantor	8 belanja					639,492,200.00	536,258,100.00		
4.00.4.00.01.01.07.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Bagian Pemerintahan Dan OTDA			Tersedianya barang dan jasa pada Bagian Pemerintahan Dan OTDA	8 belanja	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	8 belanja	639,492,200.00	536,258,100.00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.07.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar		Peningkatan kualitas SDM Pegawai di lingkungan Setda Kota Denpasar	2 org					22,000,000.00	24,200,000.00		
4.00.4.00.01.01.07.05.005.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek Workshop			Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kota Denpasar			Jumlah Pegawai Setda yang ikut Diklat dan Bintek	2 org	Jumlah Pegawai Setda yang meningkat kemampuan dalam pelaksanaan tugas	2 org	22,000,000.00	24,200,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Pelayanan
5.00.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										1,240,405,850.00	1,365,000,000.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										1,240,405,850.00	1,365,000,000.00		
5.00.01.4.00.01.01.07.15.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar		Terselenggara nya HUT Kota dan HUT RI	2 Kali					1,240,405,850.00	1,365,000,000.00		
5.00.01.4.00.01.01.07.15.008.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai - nilai Luhur Budaya Bangsa			Kota Denpasar			Terselenggaranya HUT Kota Denpasar dan HUT RI	2 kali	Meningkatnya rasa kebangsaan	Kota Denpasar	1,240,405,850.00	1,365,000,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Pelayanan
Jumlah											2,533,247,350.00	2,667,318,100.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.16.4.00.01.01.08.15.023.	Pembinaan Kegiatan Keagamaan			Kota Denpasar			Terlaksananya Penataran Pemangku dan Tukang Banten, Penyerahan Punia Sulinggih, dan Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui Tirta Yatra	70 Pemangku dan Tukang Banten, 190 Sulinggih	Terlaksananya Penataran Pemangku dan Tukang Banten, Penyerahan Punia Sulinggih, dan Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui Tirta Yatra	70 Pemangku dan Tukang Banten, 190 Sulinggih	1,021,829,000.00	1,100,000,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelayanan
1.02.16.4.00.01.01.08.15.024.	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)			Kota Denpasar			Pelaksanaan Seminar/ Penyuluhan dalam rangka Sosialisasi Program WHDI Kota Denpasar	1 (satu) Kegiatan	Peningkatan Peranan Wanita Hindu untuk ikut serta dalam pembangunan di Kota Denpasar	WHDI Kota Denpasar	335,440,000.00	350,000,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelayanan
4.00.	PENDUKUNG										761,227,100.00	875,411,165.00		
4.00.4.00.01.01.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					739,227,100.00	850,111,165.00		
4.00.4.00.01.01.08.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			-Kota Denpasar			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Pelaporan, Belanja Pegawai Pada Bagian Kesra Setda Kota Denpasar	1 (Satu) Kegiatan	Lancarnya Pelayanan Administrasi pada Bagian Kesra Setda Kota Denpasar	100%	739,227,100.00	850,111,165.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelayanan
4.00.4.00.01.01.08.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					22,000,000.00	25,300,000.00		
4.00.4.00.01.01.08.05.005.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek Workshop			Kota Denpasar			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil	2 Orang PNS	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	22,000,000.00	25,300,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelayanan
5.00.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										1,886,799,000.00	2,009,964,000.00		
5.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										1,886,799,000.00	2,009,964,000.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.00.01.4.00.01.01.08.15.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pendidikan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Prosentase Pencapaian Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%					1,886,799,000.00	2,009,964,000.00		
5.00.01.4.00.01.01.08.15.009.	Penyelenggaraan Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar			Kota Denpasar			- Safari Kesehatan, Bakti Sosial, Penyerahan Bingkisan dan Penghargaan Uang Kepada Veteran - Parade Baleganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar	- 104 Veteran - 20 Sekaa	Terselenggaranya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar	100%	923,195,000.00	950,000,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelayanan
5.00.01.4.00.01.01.08.15.010.	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional			Kota Denpasar			Pementasan Hiburan Rakyat	Sekaa	Terselenggaranya Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional	100%	224,010,000.00	246,411,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelayanan
5.00.01.4.00.01.01.08.15.011.	Peringatan Hari Puputan Margarana			Kota Denpasar			Upacara Serah Terima Pataka - Pataka / Panji - Panji dan Surat Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan Napak Tilas Menelusuri Rute Perjuangan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai	Pelajar dan Masyarakat	Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana	100%	739,594,000.00	813,553,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelayanan
Jumlah											13,635,348,350.00	15,253,865,365.00		

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

BAGIAN KERJASAMA

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.4.00.01.01.09.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Peningkatan kualitas sumber daya manusia/ Pegawai	2 Orang					22,000,000.00	24,200,000.00		
4.00.4.00.01.01.09.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kota Denpasar			Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek	2 orang	Jumlah Pegawai yang meningkat kemampuan dalam melaksanakan tugas	2 orang	22,000,000.00	24,200,000.00	BAGIAN KERJASAMA	Pelayanan
Jumlah											2,958,623,660.00	3,271,376,526.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.4.00.01.01.10.05.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kota Denpasar			Meningkatnya kemampuan dalam menyusun dokumen pengadaan barang/jasa	450 pegawai ASN	Tercapainya pemahaman sistem pengadaan barang/jasa	100 %	444,125,000.00	488,537,500.00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pelayanan
Jumlah											2,506,677,000.00	2,757,346,900.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIAT DPRD

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.	PENDUKUNG										43,478,817,000.00	47,826,699,300.00		
4.00.02.	SEKRETARIAT DPRD										37,175,722,200.00	40,893,294,420.00		
4.00.02.4.00.02.01.15.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%					37,175,722,200.00	40,893,294,420.00		
4.00.02.4.00.02.01.15.001.	Pembahasan rancangan peraturan daerah			denpasar			jumlah rapat pembahasan rancangan peraturan daerah	32 kali	Tersedianya Perda	15 perda	8,755,785,000.00	9,631,363,500.00	SEKRETARIAT DPRD	
4.00.02.4.00.02.01.15.002.	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama			denpasar			jumlah hearing/dialog/koordi nasi	3 kali	Tersedianya keputusan rapat	3 keputusan	26,285,000.00	28,913,500.00	SEKRETARIAT DPRD	
4.00.02.4.00.02.01.15.003.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			denpasar			jumlah rapat alat kelengkapan dewan	104 kali	tersedianya keputusan rapat	20 keputusan	386,507,200.00	425,157,920.00	SEKRETARIAT DPRD	
4.00.02.4.00.02.01.15.004.	Rapat-rapat paripurna			denpasar			jumlah rapat paripurna DPRD	14 kali	tersedianya keputusan paripurna DPRD	14 keputusan	514,040,000.00	565,444,000.00	SEKRETARIAT DPRD	
4.00.02.4.00.02.01.15.005.	Kegiatan Reses			denpasar			Jumlah komunikasi dan konsultasu dengan konstituen di daerah pemilihan	3 kali	Tersalurnya usulan masyarakat/ konstituen di daerah pemilihan	3 dokumen	4,460,825,000.00	4,906,907,500.00	SEKRETARIAT DPRD	
4.00.02.4.00.02.01.15.006.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD			denpasar			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD kunjungan kerja	57 ok	Tersedianya hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan	13 dokumen	7,094,000,000.00	7,803,400,000.00	SEKRETARIAT DPRD	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.00.4.00.02.01.01.020.	Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA			Denpasar			Jumlah penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Lakip	6 dokumen	Tersedianya dokumen Rwnstra, Renja, RKA, DPA dan Lakip	6 dokumen	17,708,000.00	19,478,800.00	SEKRETARIAT DPRD	Pelayanan
4.00.4.00.02.01.01.021.	Pelayanan Humas dan Keprotokolan			denpasar			Prosentase pelayanan humas dan keprotokolan	100%	Optimalnya hubungan dan komunikasi antar lembaga dan masyarakat di Kota Denpasar	100%	483,220,000.00	531,542,000.00	SEKRETARIAT DPRD	Pelayanan
4.00.4.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8 %					2,407,308,000.00	2,648,038,800.00		
4.00.4.00.02.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			denpasar			Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	8 %	Optimalnya tugas pokok dan fungsi DPRD dan Sekretariat	100%	2,407,308,000.00	2,648,038,800.00	SEKRETARIAT DPRD	Pelayanan
4.00.4.00.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Peningkatan sumber daya aparatur	100%					143,000,000.00	157,300,000.00		
4.00.4.00.02.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			kota denpasar			Jumlah bimbingan teknis staf sekretariat	13 ok	Optimalnya pelaksanaan tugas secretariat	100%	143,000,000.00	157,300,000.00	SEKRETARIAT DPRD	Pelayanan
4.00.4.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan daerah	100%					15,959,000.00	17,554,900.00		
4.00.4.00.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			denpasar			Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	3 dokumen	Dokumen kinerja dan keuangan sebagai alat evaluasi dan penilaian SKPD	3 dokumen	15,959,000.00	17,554,900.00	SEKRETARIAT DPRD	Pelayanan
Jumlah											43,478,817,000.00	47,826,699,300.00		

[illegible]

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

KECAMATAN DENPASAR BARAT

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										1,549,390,500.00	1,704,318,550.00		
1.01.02.	KESEHATAN										209,822,000.00	230,771,200.00		
1.01.02.6.00.01.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		100 %	100 %					78,940,000.00	86,834,000.00		
1.01.02.6.00.01.01.16.017.	Pembinaan UKS			Denpasar			UKS di Kecamatan Denpasar Barat	4 Sekolah (TK,SD,SMP, SMA)	Tercapainya Pembangunan Kesehatan Sekolah	4 Sekolah (TK,SD,SMP,SM A)	27,620,000.00	30,382,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.01.02.6.00.01.01.16.020.	Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna			Kecamatan Denpasar Barat			Terbinanya PKTP di Kecamatan Denpasar Barat	3 Sekolah (SD,SMP,SMA)	Tercapainya Kesadaran Siswa Tentang Kesehatan	3 Sekolah (SD,SMP,SMA)	51,320,000.00	56,452,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.01.02.6.00.01.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		100 %	100 %					11,772,000.00	12,916,200.00		
1.01.02.6.00.01.01.21.004.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Denpasar			Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan	100 %	Meningkatnya kesehatan masyarakat	11 Desa/Kelurahan	11,772,000.00	12,916,200.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
1.01.02.6.00.01.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		100 %	100 %					119,110,000.00	131,021,000.00		
1.01.02.6.00.01.01.22.007.	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular			Denpasar			Terlaksananya Lomba PSN di Kecamatan Denpasar Barat	Desa dan Kelurahan di Kecamatan Denpasar Barat	Tercapainya Penyelenggaraan Lomba PSN	Banjar/Lingkunga n	119,110,000.00	131,021,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										628,200,000.00	691,020,000.00		

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.06.6.00.01.01.21.004.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial			Denpasar			Pembinaan PSM	Se-Kecamatan Denpasar Barat	Tercapainya Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	1 Desa/Kelurahan	39,020,000.00	42,922,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
1.01.06.6.00.01.01.21.005.	Pembinaan Karang Taruna			Denpasar			Terbinanya Kelompok Karang Taruna di Kecamatan Denpasar Barat	3 Kelompok	Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna di Kecamatan Denpasar Barat	3 Kelompok	183,237,500.00	201,561,250.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.01.06.6.00.01.01.21.010.	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)			Denpasar			Meningkatnya Persentase Kesejahteraan Para Lanjut Usia	100 %	Jumlah Kesejahteraan Para Lanjut Usia Meningkat	3 Kelurahan	101,340,000.00	111,474,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.01.06.6.00.01.01.21.021.	Lomba Kuis Siapa Bisa			Denpasar			Terlaksananya kuis siapa bisa	1 Kelurahan	Terbinanya Peserta Kuis Siapa Bisa	1 Kelurahan	12,501,000.00	13,773,100.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										2,364,143,500.00	2,610,724,350.00		
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										9,640,000.00	10,604,000.00		
1.02.02.6.00.01.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		100%	100%					9,640,000.00	10,604,000.00		
1.02.02.6.00.01.01.16.005.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			Denpasar			Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anak di Masyarakat	Se-Kecamatan Denpasar Barat	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan anak di Kecamatan Denpasar Barat	Se-Kecamatan Denpasar Barat	9,640,000.00	10,604,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP										52,360,000.00	57,596,000.00		
1.02.05.6.00.01.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Infrastruktur	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		100 %	100 %					8,660,000.00	9,526,000.00		
1.02.05.6.00.01.01.15.011.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			Denpasar			Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Desa/Kelurahan	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pengelolaan Persampahan	Desa/Kelurahan	8,660,000.00	9,526,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.07.6.00.01.01.19.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Berkembangnya ekonomi kreatif.		100 %	100 %					594,338,000.00	653,771,300.00		
1.02.07.6.00.01.01.19.002.	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K			Denpasar			Terpenuhinya Pembinaan Administrasi PKK,PW2KSS dan UP2K	1 Kegiatan	Terbinanya Administrasi PKK,PW2KSS dan UP2K	100 %	521,503,000.00	573,653,300.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.07.6.00.01.01.19.003.	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			Denpasar			Terpenuhinya pelaksanaan Bunda PAUD	100%	Terlaksananya Bunda PAUD	100%	33,000,000.00	36,300,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.07.6.00.01.01.19.005.	KB Kes			Denpasar			Terbinanya Persatuan Gerak PKK KB Kes Kec. Denpasar Barat	1 Kelompok	Tercapainya Persatuan Gerak PKK KB Kes Kec. Denpasar Barat	1 Kelompok	39,835,000.00	43,818,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										247,251,000.00	271,976,100.00		
1.02.08.6.00.01.01.19.	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		100%	100%					191,331,000.00	210,464,100.00		
1.02.08.6.00.01.01.19.001.	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)			Denpasar			Pembinaan Posyandu	Se-Kecamatan Denpaar Barat	Tercapainya kesehatan bayi dan anak	3 Kelurahan	156,934,000.00	172,627,400.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.08.6.00.01.01.19.002.	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat (GSI)			Denpasar			Penyuluhan GSI	Se-Kecamatan Denpasar Barat	Tercapainya kesehatan bayi dan anak	100%	3,700,000.00	4,070,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.08.6.00.01.01.19.004.	Lomba Balita Indonesia			Denpasar			Terlaksananya lomba LBSI di Kecamatan Denpasar Barat	Se-Kecamatan Dnpasar Barat	Tercapainya pelaksanaan evaluasi LBSI	22 kelompok	30,697,000.00	33,766,700.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.08.6.00.01.01.21.	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		100 %	100 %					55,920,000.00	61,512,000.00		
1.02.08.6.00.01.01.21.001.	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS			Denpasar			Penyuluhan Penyakit Menular (HIV/AIDS)	200 orang	Tercapainya Penyelenggaraan Penyuluhan Penyakit Menular (HIV/AIDS)	100 %	55,920,000.00	61,512,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA										574,109,500.00	631,520,450.00		
1.02.13.6.00.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pendidikan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		100 %	100 %					574,109,500.00	631,520,450.00		
1.02.13.6.00.01.01.20.018.	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Porkot			Denpasar			Pelaksanaan Porkot	3 Kelurahan	Tercapainya Kompetisi Olah Raga	3 Kelurahan	299,857,000.00	329,842,700.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.13.6.00.01.01.20.019.	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Porkel			Denpasar			Pelaksanaan Porkel di Kecamatan Denpasar Barat	3 Kelurahan	Tercapainya Kompetisi Olah Raga	3 Kelurahan	274,252,500.00	301,677,750.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.16.	KEBUDAYAAN										411,365,000.00	462,668,500.00		
1.02.16.6.00.01.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai agen perubahan (agent of change) dengan human capital dan social capital.		100 %	100 %					411,365,000.00	462,668,500.00		
1.02.16.6.00.01.01.15.001.	Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah			Denpasar			Terlaksananya Lomba Ogoh-Ogoh	1 Kelurahan	Tercapainya Penyelenggaraan Lomba Ogoh-Ogoh	1 Kelurahan	32,030,000.00	35,233,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.16.6.00.01.01.15.007.	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah			Denpasar			Terlaksananya Sabha Upadesa	100 %	Meningkatnya keragaman budaya lokal dalam mengantisipasi modernisasi	100 %	18,030,000.00	30,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.16.6.00.01.01.15.015.	Lomba UDG dan Pementasan Budaya			Denpasar			Pembinaan Utsawa Dharma Gita	58 Peserta	Tercapainya Penyelenggaraan Lomba Utsawa Dharma Gita	58 Peserta	133,270,000.00	146,597,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.16.6.00.01.01.15.016.	Pelaksanaan Dharma Shanti			Denpasar			Terpenuhinya Pelestarian Seni Budaya Daerah	1 Kegiatan	Tercapainya Pelestarian dan Aktualisasi Budaya Daerah	100 %	40,625,000.00	44,687,500.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
1.02.16.6.00.01.01.15.017.	Pembinaan Sekeha Truna			Denpasar			Terpenuhinya Penyelenggaraan Pembinaan Sekaa Teruna	1 Sekeha Teruna	Terbinanya Sekeha Teruna dalam Menjaga Nilai Budaya	1 Sekeha Teruna	127,840,000.00	140,624,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.16.6.00.01.01.15.018.	Pembinaan Desa Pakraman			Denpasar			Terpenuhinya Penyelenggaraan Pembinaan Desa Pekraman	1 Desa Pekraman	Terbinanya Desa Pekraman dalam Menjaga Nilai Budaya	1 Desa Pekraman	59,570,000.00	65,527,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
2.00.	URUSAN PILIHAN										89,230,000.00	98,153,000.00		
2.00.06.	PERDAGANGAN										89,230,000.00	98,153,000.00		
2.00.06.6.00.01.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya ekonomi kreatif.		100%	100%					89,230,000.00	98,153,000.00		
2.00.06.6.00.01.01.18.009.	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah			Denpasar			Laporan hasil kegiatan	Pedagang kecil di Kecamatan Denpasar Barat	Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah	100%	89,230,000.00	98,153,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
3.00.	PENUNJANG URUSAN										34,855,000.00	38,340,500.00		
3.00.02.	PERENCANAAN										34,855,000.00	38,340,500.00		
3.00.02.6.00.01.01.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Infrastruktur	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		100 %	100 %					34,855,000.00	38,340,500.00		
3.00.02.6.00.01.01.21.014.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			Denpasar			Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan	4 Kali (1 Kecamatan 3 Kelurahan)	Tercapainya Penyelenggaraan Musrenbang	4 Kali (1 Kecamatan 3 Kelurahan)	34,855,000.00	38,340,500.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
4.00.	PENDUKUNG										55,400,000.00	60,940,000.00		
4.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH										55,400,000.00	60,940,000.00		
4.00.01.6.00.01.01.19.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		100 %	100 %					55,400,000.00	60,940,000.00		
4.00.01.6.00.01.01.19.007.	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Antar Kecamatan Se Kota Denpasar			Denpasar			Terbinanya Kelompok Kadarkum	100 %	Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat	100 %	55,400,000.00	60,940,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.00.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										46,777,500.00	51,455,250.00		
5.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										46,777,500.00	51,455,250.00		
5.00.01.6.00.01.01.15.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		100 %	100 %					46,777,500.00	51,455,250.00		
5.00.01.6.00.01.01.15.003.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa			Denpasar			Laporan Hasil Kegiatan	100 %	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Di Kecamatan Denpasar Barat	100 %	46,777,500.00	51,455,250.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
6.00.	KEWILAYAHAN										5,520,399,000.00	6,072,438,500.00		
6.00.6.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		100%	100%					4,326,186,800.00	4,758,805,480.00		
6.00.6.00.01.01.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Denpasar			1 Tahun	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4,326,186,800.00	4,758,805,480.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
6.00.6.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		100%	100%					1,065,654,200.00	1,172,219,620.00		
6.00.6.00.01.01.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kecamatan Denpasar Barat			Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana	100 %	1,065,654,200.00	1,172,219,620.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
6.00.6.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		100 %	100 %					90,861,000.00	99,947,100.00		
6.00.6.00.01.01.05.005.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek Workshop			Denpasar			Laporan Hasil Kegiatan	100 %	Meningkatny SDM Kaling Kadus se Kec. Denpasar Barat	100 %	46,861,000.00	51,547,100.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.00.6.00.01.01.05.008.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS			Denpasar			Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4 orang	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4 orang	44,000,000.00	48,400,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
6.00.6.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Berkembangnya ekonomi kreatif.		100 %	100 %					4,630,000.00	5,093,000.00		
6.00.6.00.01.01.06.008.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Denpasar			Terlaksananya Pembuatan Laporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan Denpasar Barat	1 laporan	Tertibnya Sistem Pelaporan Kinerja dan keuangan Kecamatan Denpasar Barat	1 laporan	4,630,000.00	5,093,000.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
6.00.6.00.01.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		100%	100%					33,067,000.00	36,373,300.00		
6.00.6.00.01.01.18.001.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Denpasar			Tercapainya pelayanan kepada masyarakat	Se-Kecamatan Denpasar Barat	Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat	Se-Kecamatan Denpasar Barat	33,067,000.00	36,373,300.00	KECAMATAN DENPASAR BARAT	Pelayanan
Jumlah											9,660,195,500.00	10,636,370,150.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

KECAMATAN DENPASAR TIMUR

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										822,350,000.00	1,001,937,500.00		
1.01.02.	KESEHATAN										291,000,000.00	341,207,500.00		
1.01.02.6.00.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100%					176,495,000.00	201,207,500.00		
1.01.02.6.00.01.02.16.004.	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Kegiatan Pokjanal DBD di Kecamatan	1 Paket	Terkoordinasinya dengan baik Tim Pokjanal DBD di Kecamatan	100%	47,117,500.00	59,207,500.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
1.01.02.6.00.01.02.16.017.	Pembinaan UKS			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Kegiatan UKS di Sekolah	4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Sekolah	100%	56,105,000.00	60,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.01.02.6.00.01.02.16.019.	Kota Sehat			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Kegiatan Kota Sehat	1 Paket	Meningkatnya Derajat Kesehatan di Kota	100%	35,272,500.00	37,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.01.02.6.00.01.02.16.020.	Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan PKTP	11 Desa/Kelurahan	Pemenang Lomba PKTP Tingkat Kecamatan	100%	38,000,000.00	45,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.01.02.6.00.01.02.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	100%					114,505,000.00	140,000,000.00		
1.01.02.6.00.01.02.22.007.	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Kesehatan Masyarakat	11 Desa Kel.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100%	114,505,000.00	140,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										145,475,000.00	252,475,000.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.03.6.00.01.02.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatnya Penataan Lingkungan	100%					145,475,000.00	252,475,000.00		
1.01.03.6.00.01.02.18.006.	Peningkatan Jalan Lingkungan			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Pemeliharaan Lingkungan	3 Kelurahan	Meningkatnya kenyamanan lingkungan	85%	145,475,000.00	252,475,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										54,680,000.00	56,680,000.00		
1.01.05.6.00.01.02.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Meningkatnya Penataan lingkungan	100%					54,680,000.00	56,680,000.00		
1.01.05.6.00.01.02.15.005.	pengendalian keamanan lingkungan			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Pemeliharaan Lingkungan	1 Paket	Meningkatnya kenyamanan lingkungan	100%	54,680,000.00	56,680,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
1.01.06.	SOSIAL										331,195,000.00	351,575,000.00		
1.01.06.6.00.01.02.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Denpasar	100%					331,195,000.00	351,575,000.00		
1.01.06.6.00.01.02.21.003.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			Kecamatan Denpasar Timur			Laporan Hasil Kegiatan	1 Paket	Melestarikan Nilai Budaya Lokal	100%	114,325,000.00	121,575,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
1.01.06.6.00.01.02.21.004.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial			Kecamatan Denpasar Timur			Laporan Hasil Kegiatan	1 Paket	Jumlah PSM yang Terbina	11 Desa/Kelurahan	10,745,000.00	15,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
1.01.06.6.00.01.02.21.005.	Pembinaan Karang Taruna			Kecamatan Denpasar Timur			Laporan Hasil Kegiatan	11 Desa/ Kelurahan	Melestarikan Nilai Budaya Lokal	100%	143,335,000.00	145,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.01.06.6.00.01.02.21.010.	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)			Denpasar			Meningkatnya persentase kesejahteraan para lanjut usia	100%	Jumlah kesejahteraan para lanjut usia meningkat	4 kelurahan	50,315,000.00	55,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.01.06.6.00.01.02.21.021.	Lomba Kuis Siapa Bisa			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Kuis Bisa	100%	Meningkatkan peran serta Masyarakat	1 Kelurahan	12,475,000.00	15,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										2,517,339,050.00	3,610,967,350.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										20,850,000.00	60,000,000.00		
1.02.02.6.00.01.02.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Peningkatan Pengarusutama an Gender di Masyarakat	100%					20,850,000.00	60,000,000.00		
1.02.02.6.00.01.02.16.005.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Gender dan Anak	11 Desa/Keluraha n	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Anak di Kecamatan	100%	20,850,000.00	60,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP										49,396,000.00	104,500,000.00		
1.02.05.6.00.01.02.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Meningkatkan Ekonomi Kreatif dalam Masyarakat	100%					49,396,000.00	104,500,000.00		
1.02.05.6.00.01.02.15.011.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Persampahan	2 Kelurahan	Memanfaatkan dan Memilah Sampah Organik dan Non Organik	75%	49,396,000.00	104,500,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
1.02.06.	ADMINISTRATSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										138,415,000.00	180,000,000.00		
1.02.06.6.00.01.02.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola kepemrintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	100%					138,415,000.00	180,000,000.00		
1.02.06.6.00.01.02.15.015.	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Penertiban Administrasi Penduduk	1 Paket	Terdatanya Administrasi Kependudukan dengan baik	100 %	138,415,000.00	180,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										371,213,050.00	501,302,350.00		
1.02.07.6.00.01.02.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola kepemrintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatkan Profil Kelurahan	100%					149,424,200.00	270,000,000.00		
1.02.07.6.00.01.02.17.005.	Penyusunan Profil Kelurahan			Kecamatan Denpasar Timur			Usulan Kegiatan Profil Kelurahan	4 Kelurahan	Usulan Masuk Dalam Profil Kelurahan	100%	75,162,200.00	135,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.07.6.00.01.02.17.012.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong	1 Paket	Terciptanya Lingkungan Bersih dan Asri	4 Kelurahan	74,262,000.00	135,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.02.07.6.00.01.02.19.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Meningkatnya Kwalitas PKK, P2WKSS dan UP2K di Denpasar Timur	100%					221,788,850.00	231,302,350.00		
1.02.07.6.00.01.02.19.002.	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K			Kecamatan Denpasar Timur			Laporan Hasil Kegiatan	11 Desa/ Kelurahan	Melestarikan Nilai-nilai Budaya	100%	166,157,850.00	165,982,850.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.02.07.6.00.01.02.19.003.	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Pembinaan PAUD di Kecamatan Denpasar Timur	1 Paket	Terlaksananya Kegiatan PAUD di Kecamatan Denpasar Timur	100%	9,886,000.00	15,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.02.07.6.00.01.02.19.005.	KB Kes			Denpasar			Laporan Hasil Kegiatan	1 Kelurahan	Suksesnya KB Kes Di Kecamatan Dentim	100	45,745,000.00	50,319,500.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										218,928,500.00	261,550,000.00		
1.02.08.6.00.01.02.19.	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100%					140,308,500.00	181,550,000.00		
1.02.08.6.00.01.02.19.001.	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Kegiatan Posyandu di Kecamatan	11 Desa/Keluraha n	Meningkatnya kualitas Posyandu	100%	87,836,000.00	115,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.02.08.6.00.01.02.19.002.	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat (GSI)			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Pembinaan GSI	11 Desa/Keluraha n	Meningkatnya Pengetahuan tentang Kesehatan Ibu dan Anak	100%	15,612,500.00	16,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.02.08.6.00.01.02.19.004.	Lomba Balita Indonesia			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya kegiatan Lomba Balita Sehat	1 Paket	Pemenang Lomba Balita Sehat Kecamatan	100%	36,860,000.00	50,550,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.02.08.6.00.01.02.21.	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	100%					78,620,000.00	80,000,000.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.16.6.00.01.02.15.016.	Pelaksanaan Dharma Shanti			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Darma Shanti	1 Paket	Meningkatnya Kemampuan Budaya Lokal Dalam Mengantisipasi Modernisasi	100%	49,385,000.00	60,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.02.16.6.00.01.02.15.017.	Pembinaan Sekeha Truna			Kecamatan Denpasar Timur			terlaksananya Pembinaan Desa Pekraman dan Sekaa Teruna	1 Desa Pekraman	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Desa Pekraman dan Sekaa Teruna	100%	100,344,000.00	113,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
1.02.16.6.00.01.02.15.018.	Pembinaan Desa Pakraman			Kecamatan Denpasar Timur							113,237,500.00	130,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
2.00.	URUSAN PILIHAN										124,250,000.00	130,000,000.00		
2.00.06.	PERDAGANGAN										124,250,000.00	130,000,000.00		
2.00.06.6.00.01.02.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Terbangunnya daya saing diantara pedagang kecil mikro	100%					124,250,000.00	130,000,000.00		
2.00.06.6.00.01.02.18.009.	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah			Kecamatan Denpasar			Terlaksananya Kegiatan Pasar Rakyat	11 Desa/ Kelurahan	Meningkatnya Kemampuan Pedagang Kecil Mikro	100%	124,250,000.00	130,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
3.00.	PENUNJANG URUSAN										63,450,000.00	63,450,000.00		
3.00.02.	PERENCANAAN										63,450,000.00	63,450,000.00		
3.00.02.6.00.01.02.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Musyawarah Program Yang Diusulkan Oleh Masyarakat	100%					63,450,000.00	63,450,000.00		
3.00.02.6.00.01.02.21.014.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			Kecamatan Denpasar Timur			Usulan Kegiatan Untuk Musrenbang Kota	1 Paket	Usulan Masuk Dalam Musrenbang Kota	100%	63,450,000.00	63,450,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
4.00.	PENDUKUNG										40,230,000.00	44,253,000.00		

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.00.6.00.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Kwalitas Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					1,033,260,400.00	1,649,200,000.00		
6.00.6.00.01.02.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kecamatan Denpasar Timur			Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas	1	Meningkatnya Kwalitas Sarana dan Prasarana	100%	1,033,260,400.00	1,649,200,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
6.00.6.00.01.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Aparatur	100%					89,995,000.00	93,494,500.00		
6.00.6.00.01.02.05.005.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek Workshop			Denpasar Timur			Terlaksananya Diklat Peningkatan Wawasan Aparatur	Bimtek Kaling	Kwalitas Sumber Daya Aparatur Meningkat	100%	34,995,000.00	38,494,500.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
6.00.6.00.01.02.05.008.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS			Kecamatan Denpasar Timur			Terlaksananya Diklat Peningkatan Wawasan Aparatur	5 Orang	Kwalitas Sumber Daya Aparatur meningkat	100%	55,000,000.00	55,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
6.00.6.00.01.02.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatnya Kwalitas Laporan Denpasar Timur	100%					18,070,000.00	27,570,000.00		
6.00.6.00.01.02.18.001.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Kecamatan Denpasar Timur			Terpenuhi Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur	11 Desa/Kelurahan	Tertib administrasi dan Pelayanan di Kecamatan Denpasar Timur	100%	18,070,000.00	27,570,000.00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Pelayanan
Jumlah											9,579,507,850.00	11,603,837,350.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

KECAMATAN DENPASAR SELATAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										2,290,403,000.00	2,519,756,835.00		
1.01.02.	KESEHATAN										232,565,000.00	255,822,600.00		
1.01.02.6.00.01.03.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Kesehatan	100 %					67,023,000.00	73,725,850.00		
1.01.02.6.00.01.03.16.017.	Pembinaan UKS			Kecamatan Denpasar Selatan			Terbinanya UKS Yang Ada di Denpasar Selatan	100 %	Meningkatnya Jumlah UKS Yang Terbina	4 Sekolah	36,350,000.00	39,985,000.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
1.01.02.6.00.01.03.16.020.	Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna			Kecamatan denpasar Selatan			Menurunnya Persentase Penderita Kanker	100 %	Menurunnya Jumlah Penderita Kanker	10 Desa/Kelurahan	30,673,000.00	33,740,850.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
1.01.02.6.00.01.03.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	100 %					11,742,000.00	12,916,750.00		
1.01.02.6.00.01.03.21.004.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Kecamatan Denpasar Selatan			Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan	100 %	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	10 Desa/Kelurahan	11,742,000.00	12,916,750.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
1.01.02.6.00.01.03.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan	100 %					153,800,000.00	169,180,000.00		
1.01.02.6.00.01.03.22.007.	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular			Kecamatan Denpasar Selatan			Menurunnya Volume Penderita Demam Berdarah	100	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	10 Desa/Kelurahan	153,800,000.00	169,180,000.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										1,524,933,000.00	1,677,776,300.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.03.6.00.01.03.16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Infrastruktur	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatnya Jumlah Drainase	100 %					589,933,000.00	648,926,300.00		
1.01.03.6.00.01.03.16.003.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			Kecamatan Denpasar Selatan			Menurunnya Persentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	3 Kelurahan	Jumlah Kawasan Banjir Menurun	3 Kelurahan	589,933,000.00	648,926,300.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
1.01.03.6.00.01.03.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Infrastruktur	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan	100 %					935,000,000.00	1,028,850,000.00		
1.01.03.6.00.01.03.18.006.	Peningkatan Jalan Lingkungan			Kecamatan Denpasar Selatan							935,000,000.00	1,028,850,000.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										57,660,000.00	63,426,000.00		
1.01.05.6.00.01.03.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Meningkatkan Keamanan Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru	100 %					57,660,000.00	63,426,000.00		
1.01.05.6.00.01.03.15.005.	pengendalian keamanan lingkungan			Kecamatan Denpasar Selatan			Meningkatnya keamanan dan nyaman di masyarakat	100%	Menurunnya tindak kriminalitas pada waktu perayaan nyepi dan tahun baru	6 kelurahan	57,660,000.00	63,426,000.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
1.01.06.	SOSIAL										475,245,000.00	522,731,935.00		
1.01.06.6.00.01.03.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Terpeliharanya Lembaga Sosial Kemasyarakatan	100 %					475,245,000.00	522,731,935.00		
1.01.06.6.00.01.03.21.003.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			Kecamatan Denpasar Selatan			Terlaksananya Forum Aksi Pramuka	100 %	Terbinanya Forum Aksi Pramuka	100 %	99,353,000.00	109,288,300.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
1.01.06.6.00.01.03.21.004.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial			Kecamatan Denpasar Selatan							20,781,000.00	22,859,320.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.06.6.00.01.03.21.005.	Pembinaan Karang Taruna			Kecamatan Denpasar Selatan			Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna	100 %	Terbinanya Karang Taruana	3 Karang Taruna	171,340,000.00	188,474,440.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
1.01.06.6.00.01.03.21.010.	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)			Kecamatan Denpasar Selatan			Meningkatnya Persentase Kesejahteraan Para Lanjut Usia	6 Kelurahan	Jumlah Kesejahteraan Lanjut Usia Meningkat	6 Kelurahan	171,250,000.00	188,336,500.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
1.01.06.6.00.01.03.21.021.	Lomba Kuis Siapa Bisa			Kecamatan Denpasar Selatan			Terlaksananya Kuis Siapa Bisa	100	Terbinanya Peserta Kuis Siapa Bisa	1 Kelurahan	12,521,000.00	13,773,375.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										3,856,438,600.00	4,282,597,850.00		
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										11,250,000.00	12,375,000.00		
1.02.02.6.00.01.03.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pengarusutama an Gender dan Anak	100 %					11,250,000.00	12,375,000.00		
1.02.02.6.00.01.03.16.005.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			Kecamatan Denpasar Selatan			Terlaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anak	100 %	Jumlah Lembaga Yang Mendapatkan Sosialisasi	100 %	11,250,000.00	12,375,000.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP										148,950,000.00	168,410,000.00		
1.02.05.6.00.01.03.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	100 %					46,150,000.00	55,330,000.00		
1.02.05.6.00.01.03.15.011.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			Kecamatan Denpasar Selatan			Terlaksananya Lomba Kebersihan Lingkungan	100 %	Tertatanya Kebersihan Lingkungan	4 Kelurahan	46,150,000.00	55,330,000.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
1.02.05.6.00.01.03.25.	Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan	Infrastruktur	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatkan Jumlah Taman	100 %					102,800,000.00	113,080,000.00		

[illegible]

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.16.6.00.01.03.15.016.	Pelaksanaan Dharma Shanti			Kecamatan Denpasar Selatan			Terlaksananya Kegiatan Dharma Shanti	100 %	Terlaksananya Dharma Shanti	1 Desa/Kelurahan	48,375,000.00	53,212,500.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
1.02.16.6.00.01.03.15.017.	Pembinaan Sekeha Truna			Kecamatan Denpasar Selatan			Terbinanya Sekaa Teruna	100 %	Jumlah Sekaa Teruna Yang Terbina	1 Sekaa Teruna	38,280,000.00	42,108,000.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
1.02.16.6.00.01.03.15.018.	Pembinaan Desa Pakraman			Kecamatan Denpasar Selatan			Terlaksananya Pembinaan Desa Pakraman	100 %	Jumlah Desa Pakraman Yang Terbina	1 Desa Kelurahan	54,340,000.00	59,774,000.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
2.00.	URUSAN PILIHAN										137,057,000.00	150,762,370.00		
2.00.06.	PERDAGANGAN										137,057,000.00	150,762,370.00		
2.00.06.6.00.01.03.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Meningkatkan Kemampuan Pedagang Kecil Menengah	100 %					137,057,000.00	150,762,370.00		
2.00.06.6.00.01.03.18.009.	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah			Kecamatan Denpasar Selatan			Terlaksananya Kegiatan Pasar Rakyat	100	Meningkatkan Pendatan Pedagang Mikro Kecil Menengah	35 Pedagang	137,057,000.00	150,762,370.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
3.00.	PENUNJANG URUSAN										67,870,000.00	74,657,000.00		
3.00.02.	PERENCANAAN										67,870,000.00	74,657,000.00		
3.00.02.6.00.01.03.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Infrastruktur	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Meningkatkan Pembangunan Daerah	100 %					67,870,000.00	74,657,000.00		
3.00.02.6.00.01.03.21.014.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			Kecamatan Denpasar Selatan			Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	Terwujudnya Pembangunan Yang Berskala Prioritas	Desa/Kelurahan	67,870,000.00	74,657,000.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
4.00.	PENDUKUNG										70,950,000.00	78,056,000.00		
4.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH										70,950,000.00	78,056,000.00		

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.00.6.00.01.03.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kecamatan Denpasar Selatan			Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tercapainya Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1,805,785,290.00	1,986,363,819.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
6.00.6.00.01.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	100 %					104,623,500.00	115,085,850.00		
6.00.6.00.01.03.05.005.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek Workshop			Kecamatan Denpasar Selatan			Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	100 %	Meningkatkan Pengetahuan Kaling/Kadus	100 %	60,623,500.00	66,685,850.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
6.00.6.00.01.03.05.008.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS			Kecamatan Denpasar Selatan			Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Sesuai Standart Mutu	4 ASN	44,000,000.00	48,400,000.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
6.00.6.00.01.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Meningkatkan Capaian Kinerja Aparatur	100					7,700,000.00	8,470,000.00		
6.00.6.00.01.03.06.008.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Kecamatan Denpasar Selatan			Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	100 %	Jumlah Capaian Kinerja Meningkat	100 %	7,700,000.00	8,470,000.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
6.00.6.00.01.03.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %					41,921,000.00	46,113,100.00		
6.00.6.00.01.03.18.001.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Kecamatn Denpasar Selatan			Terbinanya	100%	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat	10 Desa/Kelurahan	41,921,000.00	46,113,100.00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	Pelayanan
Jumlah											15,883,077,540.00	17,620,382,939.00		

**PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

KECAMATAN DENPASAR UTARA

PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										1,267,743,600.00	1,394,517,960.00		
1.01.02.	KESEHATAN										212,631,080.00	233,894,188.00		
1.01.02.6.00.01.04.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		peningkatan kesehatan masyarakat	100					58,100,000.00	63,910,000.00		
1.01.02.6.00.01.04.16.017.	Pembinaan UKS			Kecamatan Denut			pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)	1 kali	tercapainya kesehatan masyarakat	1 kali	35,600,000.00	39,160,000.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
1.01.02.6.00.01.04.16.020.	Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna			Kecamatan Denut			penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	1 kali	tercapainya kesehatan masyarakat	1 kali	22,500,000.00	24,750,000.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
1.01.02.6.00.01.04.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		penigkatan kesehatan masyarakat	100					15,000,000.00	16,500,000.00		
1.01.02.6.00.01.04.21.004.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			kecamatan denpasar utara			lomba Kota Sehat	1 kali	tercapainya kesehatan masyarakat	1 kali	15,000,000.00	16,500,000.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
1.01.02.6.00.01.04.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		pemusnahan/k arantina sumber penyakit menular	100					139,531,080.00	153,484,188.00		
1.01.02.6.00.01.04.22.007.	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular			Kecamatan Denut			lomba PSN (pembrantasan sarang nyamuk) dan jumat bersih	1 kali	tertanggulangnya sumber penyebab penyakit menular	1 kali	139,531,080.00	153,484,188.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										627,208,620.00	689,929,482.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.03.6.00.01.04.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Infrastruktur	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		pemeliharaan jalan lingkungan	100					627,208,620.00	689,929,482.00		
1.01.03.6.00.01.04.18.006.	Peningkatan Jalan Lingkungan			kecamatan denpasar utara			pemappingan jalan lingkungan	1 kali	jalan lingkungan yang berkualitas	1 kali	627,208,620.00	689,929,482.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										158,213,900.00	174,035,290.00		
1.01.05.6.00.01.04.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan		peningkatan keaman dan kenyamanan lingkungan	100					158,213,900.00	174,035,290.00		
1.01.05.6.00.01.04.15.003.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan			Kecamatan Denut			pelatihan anggota sat.linmas kelurahan ubung	1 kelurahan	tercapainya sumberdaya aparatur sat.linmas yang berkualitas	1 kelurahan	158,213,900.00	174,035,290.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
1.01.06.	SOSIAL										269,690,000.00	296,659,000.00		
1.01.06.6.00.01.04.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Pemerdayaan Karang Taruna	100					269,690,000.00	296,659,000.00		
1.01.06.6.00.01.04.21.003.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			Kecamatan Denpasar Utara			Jambore kwartir ranting pramuka tingkat kecamatan	3 hari	Tercapainya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan disiplin	3 hari	148,690,000.00	163,559,000.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
1.01.06.6.00.01.04.21.004.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial			Kecamatan Denpasar Utara			pembinaan pekerjaan sosial masyarakat (PSM)	1 kali	Tercapainya pembinaan PSM	1 kali	26,000,000.00	28,600,000.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
1.01.06.6.00.01.04.21.005.	Pembinaan Karang Taruna			Kecamatan Denpasar Utara			Pembinaan dan Evaluasi Karang Taruna	1 kali	Terbinanya karang taruna	1 kali	95,000,000.00	104,500,000.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										2,061,554,682.00	2,407,923,378.00		
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										8,100,345.00	8,910,380.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.07.6.00.01.04.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Memfasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah	100					65,052,000.00	71,557,200.00		
1.02.07.6.00.01.04.16.006.	Kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan			Kecamatan Denpasar Utara			Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terdata	1 kali	Terdatanya usaha mikro kecil dan menengah	1 kali	65,052,000.00	71,557,200.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
1.02.07.6.00.01.04.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pendidikan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100					103,848,730.00	157,801,730.00		
1.02.07.6.00.01.04.17.005.	Penyusunan Profil Kelurahan			Kecamatan Denut			penyusunan profil kecamatan dan kelurahan	1 kali	tercapainya profil kecamatan dan kelurahan yang baik	1 kali	50,000,000.00	55,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
1.02.07.6.00.01.04.17.006.	Lomba Kelurahan			Kecamatan Denut			lomba kelurahan	1 kali	tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat membangun desa	1 kali	37,448,730.00	84,761,730.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
1.02.07.6.00.01.04.17.007.	Bulan Bhakti Gotong Royong			Kecamatan Denpasar Utara			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 kali	Tercapainya kebersihan dan penataan lingkungan	1 kali	16,400,000.00	18,040,000.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
1.02.07.6.00.01.04.19.	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare Society) menuju kebahagiaan.		Pemerdayaan peran perempuan di pedesaan	100					367,758,200.00	404,534,020.00		
1.02.07.6.00.01.04.19.002.	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K			Kecamatan Denpasar Utara			Pemerdayaan PKK, P2WKSS dan UP2K	1 kali	Peningkatan peran perempuan di pedesaan	1 kali	327,923,200.00	360,715,520.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
1.02.07.6.00.01.04.19.005.	KB Kes			Kecamatan De			Terbinanya kesatuan gerakan PKK KB Kes	1 kali	Tercapainya kesatuan gerakan PKK KB Kes	1 kali	39,835,000.00	43,818,500.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										226,828,100.00	346,156,010.00		

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.16.6.00.01.04.15.001.	Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah			Kecamatan Denpasar Utara			Pembinaan Desa Pakraman, Sekaa Teruna, Dharma Santhi, Parade Ogoh-ogoh, Kreatifitas Seni, Lomba Utsawa Dharma Gita dan Pentas Budaya	1 kali	Tercapainya pelestarian kebudayaan daerah	1 kali	391,698,010.00	430,867,811.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
1.02.16.6.00.01.04.15.007.	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah			Kecamatan Denpasar Utara			Terlaksananya pembinaan desa pekraman	1 kali	Meningkatnya keragaman budaya lokal dalam mengantisipasi modernisasi	1 kali	23,835,000.00	26,218,500.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
2.00.	URUSAN PILIHAN										72,000,000.00	79,200,000.00		
2.00.06.	PERDAGANGAN										72,000,000.00	79,200,000.00		
2.00.06.6.00.01.04.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya ekonomi kreatif.		Pemerdayaan pedagang kecil dan menengah	100					72,000,000.00	79,200,000.00		
2.00.06.6.00.01.04.18.009.	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah			Kecamatan Denpasar Utara			Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah	1 kali	Terlaksananya pasar rakyat	1 kali	72,000,000.00	79,200,000.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
3.00.	PENUNJANG URUSAN										42,761,770.00	47,039,947.00		
3.00.02.	PERENCANAAN										35,761,770.00	39,339,947.00		
3.00.02.6.00.01.04.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Infrastruktur	Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali		Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	100					35,761,770.00	39,339,947.00		
3.00.02.6.00.01.04.21.014.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			Kecamatan Denpasar Utara			Penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan kelurahan	1 kali	Terlaksananya pembangunan daerah yang sesuai dengan perencanaan kecamatan dan kelurahan	1 kali	35,761,770.00	39,339,947.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan

[illegible]

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.00.6.00.01.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100					4,324,918,488.00	4,757,410,337.00		
6.00.6.00.01.04.01.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kecamatan Denut			Terpenuhinya Administrasi Perkantoran Yang Memadai	2 belanja	Tercapainya Pelayanan Yang Berkualitas	2 belanja	4,324,918,488.00	4,757,410,337.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
6.00.6.00.01.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100					1,808,912,000.00	1,989,803,200.00		
6.00.6.00.01.04.02.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kecamatan Denut			terpenuhinya penyiapan sarana dan prasarana kantor yang memadai	2 belanja	tercapainya pelayanan yang berkualitas	2 belanja	1,808,912,000.00	1,989,803,200.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
6.00.6.00.01.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar		pemenuhan sumber daya aparatur yang berkualitas	100					88,122,900.00	96,935,190.00		
6.00.6.00.01.04.05.005.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek Workshop			kecamatan denpasar utara			Pelatihan sumberdaya aparatur kelurahan	1 kali	Tercapainya sumberdaya aparatur yang berkualitas	1 kali	22,122,900.00	24,335,190.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
6.00.6.00.01.04.05.008.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS			Kecamatan Denut			pelatihan sumber daya aparatur kecamatan	6 orang	tercapainya sumber daya aparatur yang berkualitas	6 orang	66,000,000.00	72,600,000.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
6.00.6.00.01.04.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Kota Cerdas (Smart City)		meningkatkan kualitas pelayanan publik	100					30,000,000.00	33,000,000.00		
6.00.6.00.01.04.18.001.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Kecamatan Denpasar Utara			terlaksananya pelayanan publik yang transparasi dan berkualitas	1 kali	tercapainya transparasi pelayanan publik	1 kali	30,000,000.00	33,000,000.00	KECAMATAN DENPASAR UTARA	Pelayanan
Jumlah											9,745,813,440.00	10,860,610,012.00		

[illegible]

